GERMAS
Gerakan Masyarakat Hidup Sehat

PROVINSI BANTEN
Kolaborasi Kuat untuk Banten Maju, Adil Merata, Tidak Korupsi

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

#bangga melayani bangsa

BANTEN
IMAN TAQWA

RENSTRA
RENCANA STRATEGIS
DINAS KESEHATAN PROVINSI BANTEN
TAHUN 2025 - 2029

Kawasan Pusat Pemerintah Provinsi Banten
Jl. Syech Nawawi Al-Bantani Sukajaya Kec. Curug - Kota Serang

www.dinkes.bantenprov.go.id
dinkes_provinsibanten
Dinkes Provinsi Banten
DinkesBanten
DinkesProvinsiBanten

KATA PENGANTAR

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Puji syukur kepada Allah SWT selalu kami panjatkan, karena hanya dengan rahmat dan karunianya Penyusunan Rancangan Awal Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan Provinsi Banten dapat diselesaikan. Rancangan Awal Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan Provinsi Banten merupakan dokumen perencanaan yang bersifat indikatif dan memuat berbagai program pembangunan kesehatan yang akan dilaksanakan langsung oleh Dinas Kesehatan Provinsi Banten untuk kurun waktu tahun 2025-2029, dengan penekanan pada pencapaian sasaran Prioritas Daerah pada Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Banten.

Tantangan pembangunan kesehatan dan permasalahan pembangunan kesehatan makin bertambah berat, kompleks, dan bahkan terkadang tidak terduga (*unpredictable*). Oleh sebab itu pembangunan kesehatan dilaksanakan dengan memperhatikan dinamika kependudukan, epidemiologi penyakit, perubahan ekologi dan lingkungan, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta globalisasi dan demokratisasi dengan semangat kemitraan, kerja sama lintas sektoral serta mendorong peran serta aktif masyarakat.

Melalui kesempatan ini saya mengajak kepada semua unsur Dinas Kesehatan Provinsi Banten untuk saling bahu-membahu dalam menyelenggarakan pembangunan kesehatan guna mewujudkan sasaran strategis yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Banten.

Semoga upaya kita mendapat rahmat, hidayah dan ridhoNya. Aamiin.

KEPALA DINAS KESEHATAN
PROVINSI BANTEN

Dr. dr. Hj. Ati Pramudji Hastuti, MARS
Pembina Utama Madya
NIP. 19730815 200312 2 005

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ..... **ii**
DAFTAR ISI ..... **iv**
DAFTAR TABEL ..... **vi**
DAFTAR GAMBAR ..... **viii**

BAB - 1 PENDAHULUAN **1-1**
1.1 Latar Belakang 1-1
1.2 Dasar Hukum Penyusunan 1-5
1.3 Maksud dan Tujuan 1-7
1.3.1 Maksud 1-7
1.3.2 Tujuan 1-8
1.4 Sistematika Penulisan 1-8
BAB - 2 GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN, ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH **2-10**
2.1 Gambaran Pelayanan Dinas Kesehatan 2-10
2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Dinas Kesehatan 2-10
2.1.2 Sumber Daya Perangkat Daerah 2-23
2.1.2.1 Sumber Daya Manusia Kesehatan 2-23
2.1.2.2 Prasarana dan Sarana Pelayanan Kesehatan 2-28
2.1.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 2-30
2.1.3.1 Capaian Indikator Kinerja 2-30
2.1.3.2 Capaian Realisasi Anggaran 2-52
2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Dinas Kesehatan Provinsi Banten 2-56
BAB - 3 TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN **3-73**
3.1 Tujuan 3-73
3.2 Sasaran 3-74
3.3 Strategi 3-74
3.4 Arah Kebijakan 3-84
3.5 Program Prioritas RENSTRA Dinas Kesehatan Tahun 2025-2029 3-88
BAB - 4 PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN **4-96**
4.1 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan 4-96
4.2 Indikator Kinerja Utama (IKU) Bidang Kesehatan 4-384
4.3 Indikator Kinerja Program Usulan Bidang Kesehatan 4-386
BAB - 5 PENUTUP **5-393**

DAFTAR TABEL

DAFTAR TABEL

TABEL 2-1 JUMLAH TENAGA KESEHATAN DI LINGKUNGAN DINAS KESEHATAN (INDUK) PROVINSI BANTEN BERDASARKAN TINGKAT PENDIDIKAN TAHUN 2024 2-23
TABEL 2-2 JUMLAH TENAGA KESEHATAN PADA UPTD RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PROVINSI BANTEN TAHUN 2024 2-25
TABEL 2-3 JUMLAH TENAGA KESEHATAN PADA UPTD RSUD LABUAN DAN RSUD CILOGRANG TAHUN 2025 2-26
TABEL 2-4 ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA DINAS KESEHATAN 2-27
TABEL 2-5 ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA DINAS KESEHATAN UPTD RSUD LABUAN DAN UPTD RSUD CILOGRANG 2-27
TABEL 2-6 LOKASI KANTOR UPTD DI LINGKUNGAN DINAS KESEHATAN PROVINSI BANTEN 2-28
TABEL 2-7 JUMLAH SARANA KESEHATAN / FASILITAS KESEHATAN DI PROVINSI BANTEN 2-29
TABEL 2-8 CAPAIAN TUJUAN DAERAH BIDANG KESEHATAN TAHUN 2020 - 2024 2-30
TABEL 2-8 CAPAIAN SPM BIDANG KESEHATAN TAHUN 2023 DAN 2024 2-30
TABEL 2-9 USIA HARAPAN HIDUP PROVINSI BANTEN TAHUN 2020 – 2024 2-30
TABEL 2-10 CAPAIAN SPM BIDANG KESEHATAN DINAS KESEHATAN PROVINSI BANTEN TAHUN 2020 – 2024 2-34
TABEL 2-11 CAPAIAN KINERJA INDIKATOR KINERJA UTAMA DAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM DINAS KESEHATAN PROVINSI BANTEN TAHUN 2020 – 2022 2-35
TABEL 2-12 CAPAIAN KINERJA INDIKATOR KINERJA UTAMA DAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM DINAS KESEHATAN PROVINSI BANTEN TAHUN 2023 – 2024 2-44
TABEL 2-13 EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA TAHUN ANGGARAN 2024 2-52
TABEL 2-14 REALISASI ANGGARAN DINAS KESEHATAN TAHUN 2020 – 2024 2-54
TABEL 2-15 MATRIKS SWOT PENGEMBANGAN KESEHATAN PROVINSI BANTEN 2-69
TABEL 2-16 RUMUSAN ISU STRATEGIS DINAS KESEHATAN PROVINSI BANTEN TAHUN 2025 – 2029 2-71
TABEL 3-1 TUJUAN DAN INDIKATOR PEMERINTAH DAERAH DAN TUJUAN RENCANA STRATEGIS DINAS KESEHATAN PROVINSI BANTEN TAHUN 2025-2029 3-74
TABEL 3-2 ISU STRATEGIS, TUJUAN DAN SASARAN DINAS KESEHATAN TAHUN 2025-2029 3-76
TABEL 3-3 PENAHAPAN PEMBANGUNAN DINAS KESEHATAN TAHUN 2025-2029 3-78
TABEL 3-4 ARAH KEBIJAKAN RENSTRA DINAS KESEHATAN PROVINSI BANTEN TAHUN 2025-2029 3-85

TABEL 3-5 PROGRAM PRIORITAS DINAS KESEHATANNPROVINSI BANTEN TAHUN 2025-2029 3-89
TABEL 3-6 PROGRAM UNGGULAN DAN PROGRAM TURUNAN KEPALA DAERAH DALAM RENSTRA DINAS KESEHATAN PROVINSI BANTEN TAHUN 2025 – 2029 3-95
TABEL 4-1 PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN RENSTRA DINAS KESEHATAN PROVINSI BANTEN TAHUN 2025 – 2029 4-99
TABEL 4-2 RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN PENDANAAN RENSTRA DINAS KESEHATAN PROVINSI BANTEN TAHUN 2025-2029 4-191
TABEL 4-3 DAFTAR SUB KEGIATAN PRIORITAS DINAS KESEHATAN PROVINSI BANTEN 4-378
TABEL 4-4 INDIKATOR KINERJA UTAMA DALAM RENSTRA DINAS KESEHATAN PROVINSI BANTEN TAHUN 2025 - 2029 4-385
TABEL 4-5 INDIKATOR KINERJA KUNCI DALAM RENSTRA DINAS KESEHATAN PROVINSI BANTEN TAHUN 2025-2029 4-388

DAFTAR GAMBAR

DAFTAR GAMBAR

GAMBAR 1-1 HUBUNGAN DOKUMEN PERENCANAAN DAN ANGGARAN PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI BANTEN 1-3
GAMBAR 2-1 STRUKTUR ORGANISASI DINAS KESEHATAN PROVINSI BANTEN 2-16
GAMBAR 2-2 STRUKTUR ORGANISASI UPTD RSUD BANTEN 2-18
GAMBAR 2-3 STRUKTUR ORGANISASI UPTD RSUD MALINGPING, RSUD LABUAN, DAN RSUD CILOGRANG 2-20
GAMBAR 2-4 STRUKTUR ORGANISASI UPTD PELATIHAN KESEHATAN 2-21
GAMBAR 2-5 STRUKTUR ORGANISASI UPTD LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH 2-22
GAMBAR 2-6 JUMLAH PEGAWAI BERDASARKAN TINGKAT PENDIDIKAN PADA DINAS KESEHATAN (INDUK), UPTD LABKESDA DAN UPTD PELATIHAN KESEHATAN ... 2-24
GAMBAR 2-7 JUMLAH TENAGA KESEHATAN PADA UPTD RSUD BANTEN DAN RSUD MALINGPING 2-25
GAMBAR 2-8 JUMLAH TENAGA KESEHATAN PADA UPTD RSUD LABUAN DAN RSUD CILOGRANG 2-26
GAMBAR 2-9 KEBUTUHAN PEGAWAI DINAS KESEHATAN PROVINSI BANTEN 2-28
GAMBAR 2-10 USIA HARAPAN HIDUP PROVINSI BANTEN TAHUN 2020 – 2024 2-31
GAMBAR 2-11 CAPAIAN ANGGARAN DAN REALISASI PENGGUNAAN SUMBER DAYA TAHUN ANGGARAN 2024 2-53
GAMBAR 2-12 PERBANDINGAN USIA HARAPAN HIDUP DI PROVINSI BANTEN DENGAN WILAYAH LAINNYA DI PULAU JAWA TAHUN 2020-2024 2-64
GAMBAR 2-13 PERBANDINGAN PREVALENSI STUNTING DI PROVINSI BANTEN DENGAN WILAYAH LAINNYA TAHUN 2020-2024 2-65
GAMBAR 3-1 PROGRAM UNGGULAN DAN PROGRAM TURUNAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR BANTEN 3-93
GAMBAR 3-2 DIAGRAM ALIR INTERVENSI DUKUNGAN PROGRAM UNGGULAN DAN PROGRAM TURUNAN KEPALA DAERAH DALAM RENSTRA DINAS KESEHATAN PROVINSI BANTEN TAHUN 2025 – 2029 3-94
GAMBAR 3-2 DIAGRAM ALIR INTERVENSI DUKUNGAN PROGRAM UNGGULAN DAN PROGRAM TURUNAN KEPALA DAERAH DALAM RENSTRA DINAS KESEHATAN PROVINSI BANTEN TAHUN 2025 – 2029 3-94

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Pembangunan kesehatan pada hakekatnya bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi tingginya, sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomis. Hal ini merupakan implementasi atas hak kesehatan sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 28H ayat (1) dalam perubahan kedua dan Pasal 34 ayat (3) dalam perubahan keempat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Penyelenggaraan pembangunan kesehatan diatur secara spesifik dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

Setiap kegiatan untuk mewujudkan derajat kesehatan yang setinggi-tingginya bagi masyarakat perlu diselenggarakan upaya kesehatan dalam bentuk upaya kesehatan perorangan dan masyarakat dengan pendekatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif yang diselenggarakan secara terpadu, menyeluruh, dan berkesinambungan. Pada undang-undang tersebut dijelaskan pula bahwa Pemerintah dan Pemerintah daerah bersama-sama masyarakat merupakan komponen penyelenggara upaya kesehatan. Salah satu instrumen yang digunakan untuk dapat memenuhi tujuan pembangunan kesehatan tersebut adalah melalui suatu Sistem Perencanaan Pembangungan Nasional (SPPN) yang diatur lebih lanjut dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004.

Sejalan dengan hal tersebut, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang memberikan dasar hukum yang jelas bagi penyelenggaraan sistem perencanaan pembangunan daerah yang selaras dengan tujuan pembangunan nasional. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan bahwa pemerintahan daerah provinsi, kabupaten/kota dalam rangka menyelenggarakan pemerintahannya harus menyusun perencanaan pembangunan. Perencanaan pembangunan daerah tersebut, disusun secara berjangka meliputi :

1. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk jangka waktu 20 tahunan;
2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu 5 tahunan; dan
3. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk jangka waktu 1 tahunan.

Hal tersebut berlaku pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Provinsi Banten harus menyusun perencanaan pembangunan yang meliputi :

1. Rencana Strategis (Renstra) untuk jangka waktu 5 tahunan;
2. Rencana Kerja (Renja) untuk jangka waktu 1 tahunan.

Dinas Kesehatan Provinsi Banten sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Gubernur Banten Nomor 48 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Uraian Tugas, dan Tata Kerja Dinas Daerah. Memiliki tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah Provinsi. Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan 2025-2029 berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dalam penyusunannya berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), RPJMD Provinsi Banten 2025-2029 serta memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).

Berdasarkan Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Provinsi Banten Tahun 2025-2029, mendorong Dinas Kesehatan untuk melakukan perubahan dan penyesuaian dalam merumuskan isu strategis, menetapkan, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, penyusunan program, kegiatan, dan sub kegiatan yang dituangkan kedalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan Provinsi Banten.

Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, yang dijabarkan melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 pengganti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008, menyebutkan bahwa setiap OPD harus menyusun Rencana Strategis (Renstra) setelah RPJMD ditetapkan. Perubahan Rencana Strategis merupakan suatu rangkaian proses yang berorientasi kepada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu satu sampai dengan lima tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang, kemampuan serta faktor yang mempengaruhi (internal – eksternal) dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul. Rencana Strategis Dinas Kesehatan memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program, kegiatan, dan sub kegiatan serta cara pencapaian yang realistis sesuai tupoksi OPD untuk mengantisipasi perkembangan masa depan berpedoman pada RPJMD Tahun 2025-2029 dan bersifat indikatif.

Berdasarkan pengertian tersebut di atas, dapat disampaikan bahwa Penyusunan Renstra Dinas Kesehatan merupakan dokumen perencanaan Dinas Kesehatan untuk periode selama 5 (lima) tahun ke depan sesuai dengan program pembangunan jangka menengah Provinsi demi menyelaraskan pembangunan di provinsi Banten khususnya di bidang

kesehatan. Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Banten merupakan dokumen perencanaan yang bersifat indikatif yang memuat program-program pembangunan bidang kesehatan yang akan dilaksanakan langsung oleh Dinas Kesehatan Provinsi Banten termasuk seluruh UPTD, dengan mendorong peran serta aktif masyarakat dalam kurun waktu tahun 2025-2029.

Pembangunan kesehatan diarahkan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar peningkatan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya dapat terwujud. Pembangunan kesehatan diselenggarakan dengan berdasarkan pada perikemanusiaan, pemberdayaan dan kemandirian, adil dan merata, serta pengutamaan dan manfaat dengan perhatian khusus pada penduduk rentan, antara lain ibu, bayi, anak, lanjut usia (lansia), dan keluarga miskin. Rumusan strategi dan arah kebijakan dalam Renstra PD harus menunjukkan keinginan yang kuat bagaimana pemerintah daerah menciptakan nilai tambah (*value added*) bagi stakeholder pembangunan daerah dan menjadi jembatan untuk dapat memenuhi hak dan kebutuhan dasar warganya dalam kerangka pelayanan publik.

GAMBAR 1 HUBUNGAN DOKUMEN PERENCANAAN DAN ANGGARAN PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI BANTEN

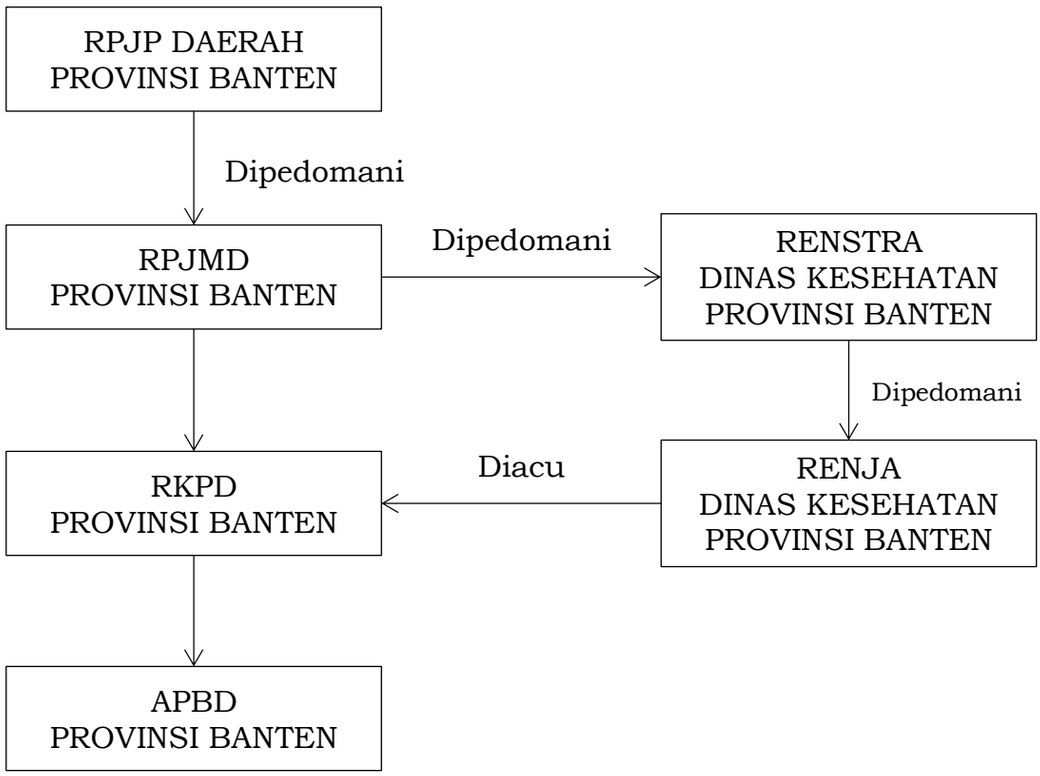

Sumber: Inmendagri nomor 2 tahun 2025

Oleh karena itu, penting untuk menentukan beberapa parameter sebagai indikasi bagaimana strategi-strategi tersebut dapat menciptakan sebuah nilai (*strategic objective*). Selanjutnya, parameter-parameter tersebut diterjemahkan lebih jauh dengan didasarkan pada data dan metodologi tertentu, asumsi-asumsi, analisa, serta membangun kerangka berfikir ilmiah dan sistematis sebagai pendekatan perencanaan teknokratis ke dalam beberapa indikator keberhasilan penyelenggaraan pemerintah daerah yang disepakati bersama berikut dengan indikasi pembiayaan yang dibutuhkan.

Dalam proses penyusunan Renstra Dinas Kesehatan, dilaksanakan dengan mempedomani dan memperhatikan :

1. Penyelerasan target indikator makro dan program prioritas nasional dalam RPJMN 2025-2029;
2. Kesesuaian sasaran pokok dan arah kebijakan RPJPD Provinsi Banten Tahun 2025-2045;
3. RPJMD Provinsi Banten Tahun 2025-2029;
4. Penyelarasan indikator dan target pada Renstra Kementerian Kesehatan Republik Indonesia tahun 2025-2029;
5. Isu-isu strategis yang berkembang;
6. Kebijakan nasional;
7. Regulasi yang berlaku.

Selain hal tersebut, penyusunan Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Banten juga turut memperhatikan :

1. RPJMD Provinsi Banten Tahun 2025-2029;
2. Adanya penyesuaian aturan baru terhadap tugas dan perangkat daerah; serta
3. Dinas Kesehatan turut berperan di dalam mewujudkan sumber daya manusia yang produktif, unggul dan berdaya saing yang mencakup segala upaya peningkatan derajat kesehatan

Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Banten memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif. Renstra Perangkat Daerah disusun dengan tahapan:

1. Persiapan penyusunan;
2. Penyusunan rancangan;
3. Pelaksanaan forum Perangkat Daerah dan forum konsultasi publik;
4. Perumusan rancangan akhir;
5. Fasilitasi rancangan akhir Renstra;
6. Penetapan.

Lima pendekatan perencanaan yang dipergunakan dalam penyusunan Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Banten adalah:

1. Pendekatan politik, dengan menyelaraskan program kepala Daerah;
2. Pendekatan teknokratik, Artinya Menggunakan metode dan kerangka bepikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan Daerah;
3. Pendekatan partisipatif, yaitu dilaksanakan dengan melibatkan semua pemangku kepentingan (Stakeholder);
4. Pendekatan atas-bawah (top-down); dan
5. Pendekatan bawah-atas (bottom-up).

1.2 DASAR HUKUM PENYUSUNAN

Rencana Strategis Dinas Kesehatan Provinsi Banten 2025-2029 disusun dengan berlandaskan hukum-hukum sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2005 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6841);
5. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6887);
6. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6041);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
13. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana telah dimutakhirkan di dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Kepurusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
17. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2000 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 21);

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
19. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
20. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
21. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2007 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2007 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 4);
22. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Banten (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 66);
23. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Banten Tahun 2023-2043 (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 102);
24. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Banten Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2024 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 109);
25. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Banten Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2025 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 112);
26. Peraturan Gubernur Banten Nomor 48 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Daerah (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2022 Nomor 48).

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

1.3.1 MAKSUD

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan Provinsi Banten Tahun 2025-2029 dimaksudkan sebagai pedoman kebijakan, perencanaan dan pelaksanaan program serta kegiatan selama lima tahun ke depan. Dokumen ini menjadi acuan strategis dan teknokratis bagi perangkat daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan yang menjadi kewenangan daerah provinsi.

1.3.2 TUJUAN

Adapun tujuan dari penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan Provinsi Banten Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut :

1. Mewujudkan keselarasan perencanaan sektoral dengan RPJMD Provinsi Banten Tahun 2025-2029, serta mendukung pencapaian agenda pembangunan nasional dalam RPJMN 2025-2029;
2. Menjabarkan visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur Banten ke dalam tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan bidang kesehatan;
3. Menjadi dasar perencanaan tahunan, pengukuran, evaluasi dan pelaporan kinerja perangka daerah, serta memastikan akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan tugas dan fungsi;
4. Menjamin sinkronisasi dan konsistensi proses perencanaan, penganggaran, pengendalian, serta evaluasi program dan kegiatan pembangunan kesehatan jangka menengah dan jangka pendek Dinas Kesehatan Provinsi Banten beserta unit perangkat teknisnya;
5. Menjadi parameter di dalam mengukur tingkat kinerja Dinas Kesehatan beserta unit perangkat teknisnya terhadap penyelenggaraan pembangunan daerah bidang kesehatan.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah serta Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, maka Rencana Strategis Dinas Kesehatan Provinsi Banten disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan

- 1.1 Latar Belakang;
- 1.2 Dasar Hukum Penyusunan;
- 1.3 Maksud dan Tujuan;
- 1.4 Sistematika Penulisan.

BAB II Gambaran Pelayanan, Permasalahan dan Isu Strategis Dinas Kesehatan

- 2.1 Gambaran Pelayanan Dinas Kesehatan Provinsi Banten;
- 2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Dinas Kesehatan Provinsi Banten.

BAB III Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

3.1 Tujuan Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Banten 2025-2029;

3.2 Sasaran Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Banten 2025-2029;

3.3 Strategi Dinas Kesehatan Provinsi Banten Dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Banten 2025-2029;

3.4 Arah Kebijakan Dinas Kesehatan Dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Banten 2025-2029.

BAB IV Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Kesehatan

4.1 Uraian Program;

4.2 Uraian Kegiatan;

4.3 Uraian Sub Kegiatan Beserta Kinerja, Indikator, Target dan Pagu Indikatif;

4.4 Uraian Sub Kegiatan Dalam Rangka Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah;

4.5 Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Kesehatan Tahun 2025-2029 Melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kesehatan;

4.6 Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Tahun 2025-2029 Melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK)

BAB V Penutup

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN, ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1 GAMBARAN PELAYANAN DINAS KESEHATAN

2.1.1 TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR DINAS KESEHATAN

Dinas Kesehatan adalah merupakan unsur pelaksana di bidang kesehatan pada Pemerintah Provinsi Banten, yang dipimpin oleh Kepala Dinas dan bertanggung jawab langsung kepada Gubernur Provinsi Banten melalui Sekretaris Daerah. Berdasarkan Peraturan Gubernur Banten Nomor 48 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi, Uraian Tugas, dan Tata Kerja Dinas Daerah, Dinas Kesehatan mempunyai tugas pokok membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahanan di bidang kesehatan dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah Provinsi.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat satu (1) Pasal delapan (8) Peraturan Gubernur Nomor 48 Tahun 2022, Dinas Kesehatan Provinsi Banten menyelenggarakan fungsi dan kewenangan sebagai berikut :

1. Penyediaan Layanan Kesehatan untuk Upaya Kesehatan Perorangan (UKP) Rujukan, Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) dan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) Rujukan Tingkat Daerah Provinsi;
2. Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintergrasi;
3. Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi;
4. Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi;
5. Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi;
6. Penerbitan Pengakuan Pedangan Besar Farmasi (PBF) Cabang dan Cabang Penyalur Alat Kesehatan (PAK);
7. Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT);
8. Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi;
9. Pelaksanaan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Perilaku Hidup Bersih dan Sehat dalam rangka Promotif Preventik Tingkat Daerah Provinsi; dan
10. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya sesuai peraturan perundangundangan.

Susunan Organisasi dan Uraian Tugas Dinas Kesehatan Provinsi Banten adalah sebagai berikut :

a. Kepala Dinas

Kepala Dinas Kesehatan mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

1. Merumuskan rencana strategis dan rencana kerja di lingkungan Dinas Kesehatan;
2. Menetapkan rencana kerja Dinas Kesehatan;
3. Mengoordinasikan pelaksanaan tugas di lingkungan Dinas Kesehatan sesuai dengan program kerja yang telah ditetapkan;
4. Membina dan mengarahkan pelaksanaan tugas bawahan dilingkungan Dinas Kesehatan sesuai dengan tugas, tanggung jawab, permasalahan dan hambatan serta ketentuan yang berlaku;
5. Merumuskan penyelenggaraan :
   a. Pemenuhan upaya Kesehatan perorangan dan upaya Kesehatan masyarakat;
   b. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia Kesehatan;
   c. Sediaan farmasi, alat Kesehatan dan makanan minuman;
   d. Pemberdayaan masyarakat bidang Kesehatan.
6. Menyelenggarakan koordinasi, pembinaan, pengendalian, dan memimpin pelaksanaan fungsi urusan pemerintahaan bidang Kesehatan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi;
7. Menyelenggarakan Pengelolaan kinerja, evaluasi dan pelaporan Dinas Kesehatan; dan
8. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

b. Sekretaris

1. Sekretaris mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas Kesehatan dalam perumusan, penetapan, pengoordinasian, dan pengendalian pelaksanaan tugas.
2. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada huruf a, Sekretaris mempunyai uraian tugas sebagai berikut :
   a. Menyusun rencana kerja di lingkungan Sekratariat berdasarkan Rencana Strategis Dinas;
   b. Mendistribusikan tugas dan pelaksanaan sub kegiatan kepada bawahan dan kelompok jabatan fungsional di lingkungan Sekretariat;
   c. Memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkungan Sekretariat sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku;
   d. Meyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sekretariat;

e. Merencanakan rumusan kebijakan perencanaan, pengendalian, evaluasi, pelaporan program/kegiatan, Pelayanan Administrasi umum dan kepegawaian, keuangan, perencanaan, evaluasi dan pelaporan di lingkungan Dinas Kesehatan;
f. Menyelenggarakan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
g. Menyelenggarakan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
h. Menyelenggarakan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah;
i. Menyelenggarakan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah;
j. Menyelenggarakan Administrasi Umum Perangkat Daerah;
k. Menyelenggarakan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
l. Menyelenggarakan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
m. Menyelenggarakan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
n. Menyelenggarakan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan, Pelaksanaan, Pengendalian dan Evaluasi Program dan Kegiatan di lingkungan Dinas;
o. Menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan teknis dan administratif kegiatan dan tindak lanjut hasil pemeriksaan di lingkungan Dinas;
p. Menyelenggarakan penyusunan laporan pelaksanaak tugas Sekretaiat; dan
q. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sekretaris membawahkan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

c. Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan
1. Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas Kesehatan dalam merencanakan dan perumusan program, melaksanakan koordinasi, monitoring, serta pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan;
2. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan mempunyai uraian tugas sebagai berikut :
   a. Menyususn rencana kerja di lingkungan Bidang berdasarkan Rencana Strategis Dinas;
   b. Mendistribusikan tugas dan pelaksanaan sub kegiatan kepada bawahan dan kelompok jabatan fungsional di lingkungan bidang;

c. Memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkungan bidang sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku;
d. Menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan bidang;
e. Menyelenggarakan, mengedalikan dan mengevaluasi :
    1. Penyediaan Fasilitas Pelayanan, sarana, prasarana dan alat Kesehatan untuk UKP rujukan, UKM, dan UKM rujukan tingkat Daerah Provinsi;
    2. Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan tingkat Daerah Provinsi.
f. Menyelenggarakan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi kegiatan dengan UPTD;
g. Menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan teknis den administratif dan tindak lanjut hasil pemeriksaan di lingkungan dinas;
h. Menyenggarakan Pengelolaan kinerja, evaluasi dan pelaporan bidang;
i. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan, membawahkan :
1. Kepala Seksi Mutu dan Pelayanan Kesehatan Primer; dan
2. Kepala Seksi Mutu dan Pelayanan Kesehatan Rujukan.

d. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat

1. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas Kesehatan dalam merencanakan dan perumusan program, melaksanakan koordinasi, monitoring, serta pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan;
2. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat mempunyai uraian tugas sebagai berikut :
    a. Menyusun rencana kerja di lingkungan Bidang berdasarkan Rencana Kerja Strategis Dinas;
    b. Mendistribusikan tugas dan pelaksanaan sub kegiatan kepada bawahan dan kelompok jabatan fungsional di lingkungan bidang;
    c. Memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkungan Bidang sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku;
    d. Menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bidang;
    e. Menyelenggarakan, mengendalikan dan mengevaluasi :
        1. Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi;

2. Pelaksanaan Komunikasi Informasi Edukasi (KIE) Perilaku Hidup Bersih dan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Provinsi; dan
3. Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Provinsi.

f. Menyelenggarakan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi kegiatan dengan UPTD;
g. Menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan teknis dan administratif dan tindak lanjut hasil pemeriksaan di lingkungan Dinas;
h. Menyelenggarakan Pengelolaan kinerja, evaluasi dan pelaporan pada bidang; dan
i. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat, membawahkan :
1. Kepala Seksi Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak; dan
2. Kepala Seksi Kesehatan Jiwa dan Tata Kelola Kesehatan Masyarakat.

e. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit

1. Kepala Bidang Pengendalian dan Pencegahan Penyakit mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas Kesehatan dalam rangka merencanakan dan perumusan program, melaksanakan koordinasi, monitoring, serta pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan;
2. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit mempunyai uraian tugas sebagai berikut :
   a. Menyusun rencana kerja di lingkungan Bidang berdasarkan Rencana Strategis Dinas;
   b. Mendistribusikan tugas dan pelaksanaan sub kegiatan kepada bawahan dan kelompok jabatan fungsional di lingkungan Bidang;
   c. Memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkungan bidang sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku;
   d. Menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bidang;
   e. Menyelenggarakan, mengendalikan dan mengevaluasi Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi;
   f. Menyelenggarakan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi kegiatan dengan UPTD;

g. Menyelenggarakan koordinasi pelaskanaan teknis dan administratif dan tindak lanjut hasil pemeriksaan di lingkungan Dinas;
h. Menyelenggarakan Pengelolaan kinerja, evaluasi dan pelaporan pada Bidang; dan
i. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, membawahkan :

1. Kepala Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular dan Tidak Menular; dan
2. Kepala Seksi Pengelolaan Imunisasi, Surveilans, Kekarantinaan dan Penyehatan Lingkungan.

f. Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan, Kefarmasian dan Alat Kesehatan

1. Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan, Kefarmasian dan Alat Kesehatan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas Kesehatan dalam merencanakan dan perumusan program, melaksanakan koordinasi, monitoring, serta pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan;
2. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan, Kefarmasian dan Alat Kesehatan mempunyai uraian tugas sebagai berikut :
   a. Menyusun rencana kerja di lingkungan Bidang berdasarkan Rencana Startegis Dinas;
   b. Mendistribusikan tugas dan pelaksanaan sub kegiatan kepada bawahan dan kelompok jabatan fungsional di lingkungan Bidang;
   c. Memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkungan Bidang sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku;
   d. Menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bidang;
   e. Menyelenggarakan, mengendalikan dan mengevaluasi :
      1. Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi;
      2. Penerbitan Pengakuan Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang dan Cabang Penyalur Alat Kesehatan (PAK); dan
      3. Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT).
   f. Menyelenggarakan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi kegiatan dengan UPTD;
   g. Menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan teknis dan administratif dan tindak lanjut hasil pemeriksaan di lingkungan Bidang; dan

h. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan, Kefarmasian dan Alat Kesehatan membawahkan:

1) Kepala Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan; dan
2) Kepala Seksi Ketahanan Produksi, Distribusi, Pengawasan Alat Kesehatan, Pengelolaan dan Pelayanan Kefarmasian.

GAMBAR 2.1 STRUKTUR ORGANISASI DINAS KESEHATAN PROVINSI BANTEN

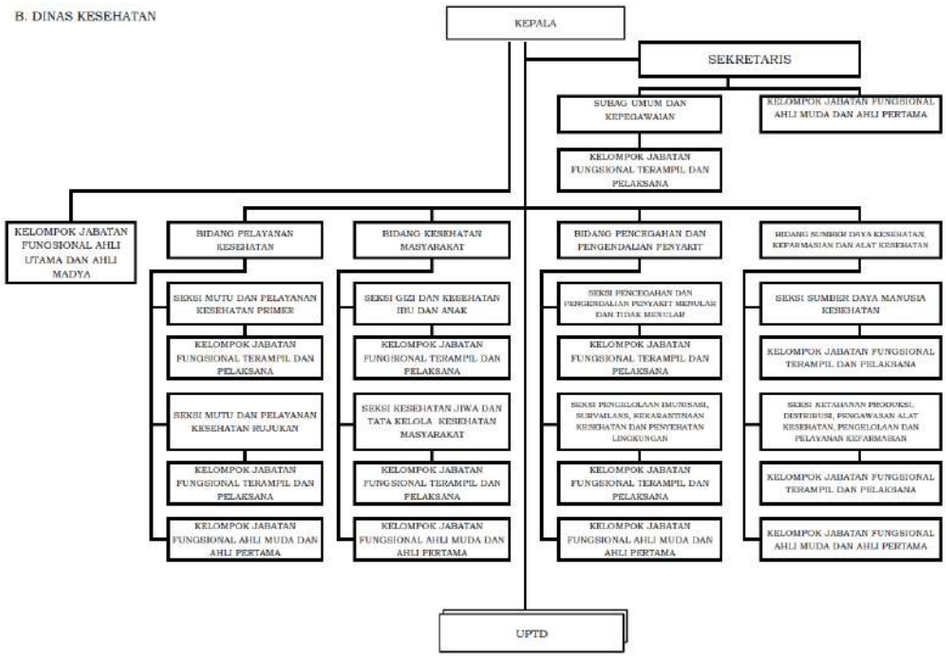

Sumber: Pergub Banten Nomor 35 Tahun 2023

g. Jabatan Fungsional dan Pelaksana.

Jabatan fungsional di Dinas Kesehatan Provinsi Banten, seperti di dinas kesehatan lainnya, terdiri dari berbagai posisi yang memerlukan keahlian dan keterampilan khusus dalam bidang kesehatan. Jabatan fungsional ini berperan penting dalam menjalankan tugas-tugas teknis dan operasional di dinas kesehatan, diantaranya :

1) Penata Kelola Layanan Kesehatan : Bertanggung jawab dalam pengelolaan dan pelayanan kesehatan;
2) Fungsional di Bidang Kesehatan Masyarakat : Meliputi berbagai peran seperti promosi kesehatan, gizi, kesehatan keluarga, dan imunisasi;
3) Fungsional di Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit : Berfokus pada upaya pencegahan dan pengendalian berbagai penyakit;

4) Fungsional di Bidang Pelayanan Kesehatan : Bertanggung jawab atas pelayanan kesehatan di berbagai fasilitas kesehatan;
5) Fungsional di Bidang Sumber Daya Kesehatan : Berurusan dengan pengelolaan sumber daya manusia, kefarmasian, dan alat kesehatan;
6) Jabatan Fungsional Tertentu : Bisa meliputi berbagai jabatan lain yang membutuhkan keahlian khusus di bidang kesehatan, seperti analis kesehatan, sanitarian, nutrisionis, dan lain-lain.

h. Unit Pelaksana Teknis Daerah

Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Dinas Kesehatan Provinsi Banten terdiri atas :

1) UPTD RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BANTEN

UPTD Rumah Sakit Umum Daerah Banten mempunyai tugas pokok memberikan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna. Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, UPTD Rumah Sakit Umum Daerah Banten mempunyai fungsi :

1. Penyelenggaraan pelayanan medis dan nonmedis;
2. Penyelenggaraan pelayanan penunjang medis dan nonmedis;
3. Penyelenggaraan pelayanan dan asuhan keperawatan;
4. Penyelenggaraan pelayanan rujukan;
5. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan;
6. Penyelenggaraan penelitian dan pengembangan; dan
7. Penyelenggaraan administrasi umum dan keuangan.

Susunan organisasi UPTD Rumah Sakit Umum Daerah Banten terdiri atas :

1. Direktur;
2. Wakil Direktur Pelayanan, membawahkan :
   - ➔ Bidang Pelayanan Medis dan Keperawatan; dan
   - ➔ Bidang Penunjang Pelayanan;
3. Wakil Direktur Sarana Prasarana, Sumber Daya Manusia, Pendidikan dan Pelatihan, membawahkan :
   - ➔ Bidang Sarana Prasarana; dan
   - ➔ Bidang Sumber Daya Manusia, Pendidikan dan Pelatihan.
4. Wakil Direktur Perencanaan, Evaluasi, Pelaporan dan Keuangan, membawahkan :
   - ➔ Bagian Administrasi, Perencanaan, EValuasi, Pelaporan dan Keuangan, membawahkan Sub Bagian Tata Usaha.
5. Kelompok Jabatan Fungsional.

GAMBAR 2.2 STRUKTUR ORGANISASI UPTD RSUD BANTEN

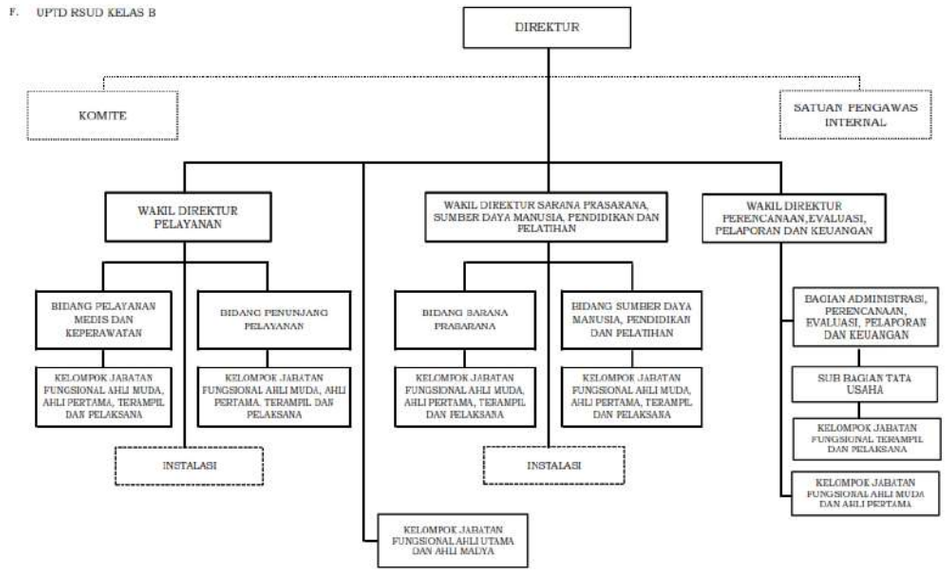

Sumber: Pergub Banten Nomor 35 Tahun 2023

2) UPTD RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MALINGPING

UPTD Rumah Sakit Umum Daerah Malingping mempunyai tugas pokok memberikan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna. Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, UPTD Rumah Sakit Umum Daerah Malingping mempunyai fungsi :

1. Penyelenggaraan pelayanan medis dan nonmedis;
2. Penyelenggaraan pelayanan penunjang medis dan nonmedis;
3. Penyelenggaraan pelayanan dan asuhan keperawatan;
4. Penyelenggaraan pelayanan rujukan;
5. Penyelenggaraan penelitian dan pengembangan; dan
6. Penyelenggaraan administrasi umum dan keuangan.

Susunan organisasi UPTD Rumah Sakit Umum Daerah Malingping terdiri atas :

1. Direktur;
2. Sekretariat, membawahkan Sub Bagian tata Usaha;
3. Bidang Medis;
    - Seksi Rawat Inap dan Rawat Jalan; dan
    - Seksi Pelayanan Medis dan Gawat Darurat.
4. Bidang Penunjang, membawahkan Seksi Etika, Mutu, kerjasama dan Pengembangan;
5. Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.

3) UPTD RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LABUAN

UPTD Rumah Sakit Umum Daerah Labuan mempunyai tugas pokok memberikan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna. Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, UPTD Rumah Sakit Umum Daerah Labuan mempunyai fungsi:

1. Penyelenggaraan pelayanan medis dan nonmedis;
2. Penyelenggaraan pelayanan penunjang medis dan nonmedis;
3. Penyelenggaraan pelayanan dan asuhan keperawatan;
4. Penyelenggaraan pelayanan rujukan;
5. Penyelenggaraan penelitian dan pengembangan; dan
6. Penyelenggaraan administrasi umum dan keuangan.

Susunan organisasi UPTD Rumah Sakit Umum Daerah Labuan terdiri atas :

1. Direktur;
2. Sekretariat, membawahkan Sub Bagian tata Usaha;
3. Bidang Medis;
    - Seksi Rawat Inap dan Rawat Jalan; dan
    - Seksi Pelayanan Medis dan Gawat Darurat.
4. Bidang Penunjang, membawahkan Seksi Etika, Mutu, kerjasama dan Pengembangan;
5. Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.

4) UPTD RUMAH SAKIT UMUM DAERAH CILOGRANG

UPTD Rumah Sakit Umum Daerah Cilograng mempunyai tugas pokok memberikan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna. Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, UPTD Rumah Sakit Umum Daerah Cilograng mempunyai fungsi :

1. Penyelenggaraan pelayanan medis dan nonmedis;
2. Penyelenggaraan pelayanan penunjang medis dan nonmedis;
3. Penyelenggaraan pelayanan dan asuhan keperawatan;
4. Penyelenggaraan pelayanan rujukan;
5. Penyelenggaraan penelitian dan pengembangan; dan
6. Penyelenggaraan administrasi umum dan keuangan.

Susunan organisasi UPTD Rumah Sakit Umum Daerah Cilograng terdiri atas :

1. Direktur;
2. Sekretariat, membawahkan Sub Bagian tata Usaha;
3. Bidang Medis;
    - Seksi Rawat Inap dan Rawat Jalan; dan
    - Seksi Pelayanan Medis dan Gawat Darurat.

4. Bidang Penunjang, membawahkan Seksi Etika, Mutu, kerjasama dan Pengembangan;
5. Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.

GAMBAR 2.3 STRUKTUR ORGANISASI UPTD RSUD MALINGPING, RSUD LABUAN, DAN RSUD CILOGRANG

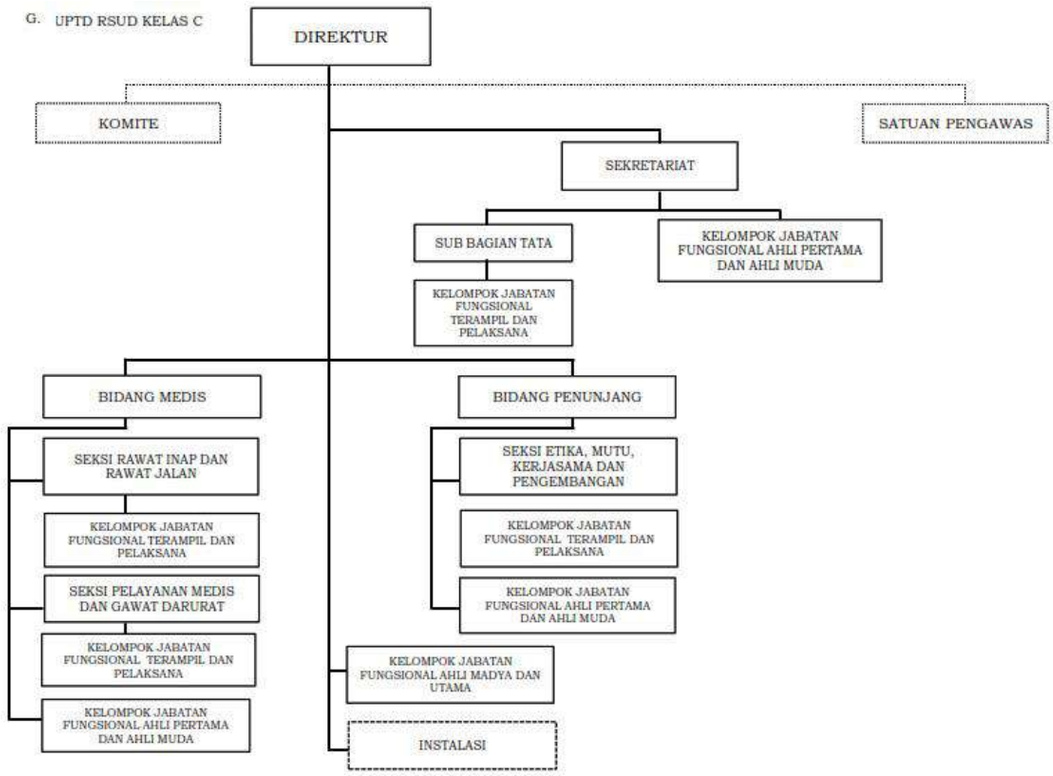

Sumber: Pergub Banten Nomor 35 Tahun 2023

5) UPTD PELATIHAN KESEHATAN

UPTD Pelatihan Kesehatan mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan teknis operasional Dinas Kesehatan di bidang pendidikan dan pelatihan serta pengembangan Sumber Daya Manusia kesehatan dan masyarakat.

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, UPTD Pelatihan Kesehatan mempunyai fungsi :

1. Penyusunan bahan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran UPTD;
2. Pelaksanaan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran UPTD;
3. Pelaksanaan kerjasama nasional maupun internasional di bidang pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia kesehatan dan masyarakat;
4. Pelaksanaan advokasi penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia kesehatan dan masyarakat;

5. Pengembangan metode dan teknologi pelatihan, pemantauan, evaluasi, sistem informasi dan penyusunan laporan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia kesehatan dan masyarakat;
6. Penyiapan pengembangan kemitraan;
7. Pengkajian dan pengendalian mutu pelatihan;
8. Pelaksanaan kegiatan administrasi ketatausahaan, ketatalaksanaan, kepegawaian, pelaporan dan pengelolaan barang milik daerah lingkup UPTD; dan
9. Melaksanakan tugas teknis dinas yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan kewenangannya.

Susunan Organisasi UPTD Pelatihan Kesehatan terdiri atas :
a. Kepala;
b. Sub Bagian Tata Usaha;
c. Seksi Pengkajian, Pengembangan dan Pengendalian Mutu;
d. Seksi Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan; dan
e. Kelompok jabatan fungsional dan pelaksana.

GAMBAR 2.4 STRUKTUR ORGANISASI UPTD PELATIHAN KESEHATAN

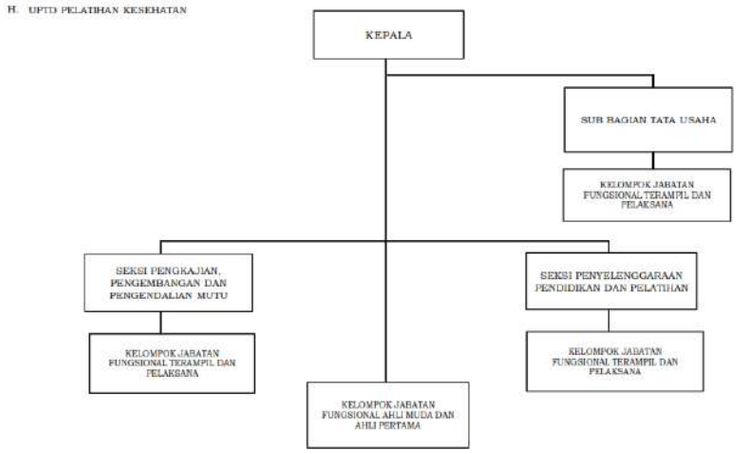

Sumber: Pergub Banten Nomor 35 Tahun 2023

6) UPTD LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH

UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan teknis operasional Dinas Kesehatan di bidang pelayanan pemeriksaan laboratorium kesehatan dan kalibrasi. Dalam melaksanakan tugas pokok, UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah mempunyai fungsi :
a. Penyusunan bahan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran UPTD;
b. Pelaksanaan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran UPTD;
c. Pelaksanaan kegiatan operasional pelayanan pemeriksaan laboratorium klinik dan laboratorium kesehatan masyarakat;

d. Pelaksanaan kegiatan operasional pelayanan pemeriksaan laboratorium kimia kesehatan dan lingkungan;
e. Pelaksanaan kegiatan operasional pelayanan rujukan pemeriksaan laboratorium klinik, laboratorium kesehatan masyarakat dan laboratorium kimia kesehatan dan lingkungan;
f. Pelaksanaan kegiatan operasional pelayanan kalibrasi alat kesehatan;
g. Pelaksanaan kegiatan operasional pengendalian mutu;
h. Pelaksanaan kegiatan administrasi ketatausahaan, ketatalaksanaan, kepegawaian, pelaporan dan pengelolaan barang milik daerah lingkup UPTD; dan
i. Melaksanakan tugas teknis dinas yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan kewenangannya.

Susunan Organisasi UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah terdiri atas :
1. Kepala;
2. Sub Bagian Tata Usaha;
3. Seksi Pelayanan;
4. Seksi Pengendalian Mutu; dan
5. Kelompok Jabatan fungsional dan Pelaksana.

GAMBAR 2.5 STRUKTUR ORGANISASI UPTD LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH

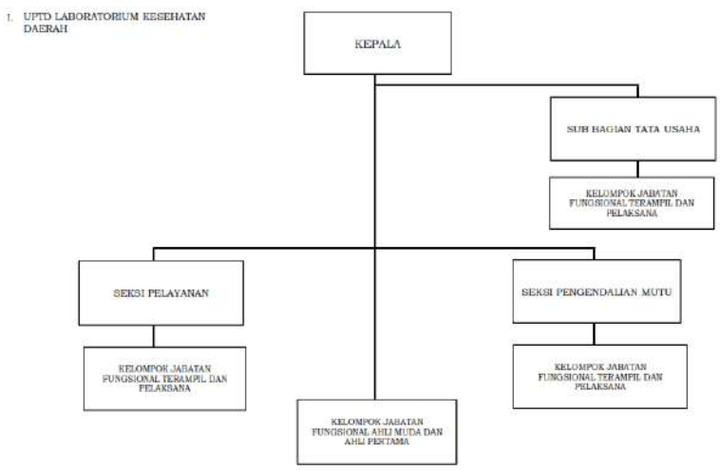

Sumber: Pergub Banten Nomor 35 Tahun 2023

2.1.2 SUMBER DAYA PERANGKAT DAERAH

Pembangunan kesehatan diselenggarakan dengan berazaskan perikemanusiaan, keseimbangan, manfaat, perlindungan, penghormatan terhadap hak dan kewajiban serta norma-norma agama.
Dalam pelaksanaan pembangunan kesehatan Pemerintah bertanggung jawab terhadap :

a. Merencanakan, mengatur, menyelenggarakan, membina dan mengawasi penyelenggaraan upaya kesehatan yang merata dan terjangkau oleh masyarakat;
b. Ketersediaan lingkungan, tatanan, fasilitas kesehatan baik fisik maupun sosial bagi masyarakat untuk mencapai derajat kesehatan yang setinggi-tingginya;
c. Ketersediaan sumberdaya dibidang kesehatan yang adil dan merata bagi seluruh masyarakat untuk memperoleh derajat kesehatan yg setinggi-tingginya;
d. Ketersediaan akses terhadap informasi, edukasi dan fasilitas pelayanan kesehatan untuk meningkatkan dan memelihara derajat kesehatan yang setinggi-tingginya;
e. Memberdayakan dan mendorong peran aktif masyarakat dalam segala bentuk upaya kesehatan;
f. Ketersediaan segala bentuk upaya kesehatan yang bermutu, aman, efisien dan terjangkau;
g. Pelaksanaan jaminan kesehatan masyarakat melalui Sistem Jaminan Sosial Nasional bagi upaya kesehatan perorangan yang dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundangan.

2.1.2.1 SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN

Sumber daya manusia kesehatan yang disajikan pada bab ini lebih diutamakan pada ketersediaan Sumber Daya Manusia Dinas Kesehatan Provinsi banten dan UPTD Dinas Kesehatan Provinsi Banten.

TABEL 2.1 JUMLAH TENAGA KESEHATAN DI LINGKUNGAN DINAS KESEHATAN (INDUK) PROVINSI BANTEN BERDASARKAN TINGKAT PENDIDIKAN TAHUN 2024

NO	TINGKAT PENDIDIKAN	DINAS INDUK		UPTD LABKESDA		UPTD PELATIHAN KESEHATAN	
		JUMLAH	%	JUMLAH	%	JUMLAH	%
1	Doktoral	2	0,87	0	0,00	0	0,00
2	Magister Kesehatan	17	7,42	1	1,25	0	0,00
3	Magister Non Kesehatan	16	6,99	3	3,75	1	5,00
4	Dokter Umum	3	1,31	2	2,50	1	5,00
5	Dokter Gigi	2	0,87	0	0,00	0	0,00
6	Apoteker	7	3,06	0	0,00	0	0,00
7	Sarjana Kesehatan Masyarakat	34	14,85	5	6,25	1	5,00
8	Sarjana Kesehatan Lainnya	18	7,86	5	6,25	1	5,00

NO	TINGKAT PENDIDIKAN	DINAS INDUK		UPTD LABKESDA		UPTD PELATIHAN KESEHATAN	
		JUMLAH	%	JUMLAH	%	JUMLAH	%
9	Sarjana Non Kesehatan	51	22,27	22	27,50	3	15,00
10	D3 Kesehatan	15	6,55	3	3,75	3	15,00
11	D3 Non Kesehatan	3	1,31	9	11,25	2	10,00
12	SLTA / Umum	61	26,64	30	37,50	8	40,00
Jumlah		229	100,00	80	100,00	20	100,00

Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Banten, 2025

Apabila dilihat berdasarkan tingkat pendidikan, pegawai Dinas Kesehatan, UPTD Labkesda dan UPTD Pelatihan Kesehatan pada Tahun 2024 masih didominasi oleh tingkat pendidikan SLTA / Umum dan Sarjana Non Kesehatan dengan besaran persentase masing-masing :

1. Dinas Kesehatan (Induk) : Jumlah pegawai dengan tingkat pendidikan SLTA sebesar 26,64% dan jumlah pegawai dengan tingkat pendidikan Sarjana Non Kesehatan sebesar 22,27%;
2. UPTD Labkesda : Jumlah pegawai dengan tingkat pendidikan SLTA sebesar 37,50% dan jumlah pegawai dengan tingkat pendidikan Sarjana Non Kesehatan sebesar 27,50%; dan
3. UPTD Pelatihan Kesehatan : Jumlah pegawai dengan tingkat pendidikan SLTA sebesar 40,00 % dan jumlah pegawai dengan tingkat pendidikan Sarjana Non Kesehatan sebesar 15,00%.

GAMBAR 2.6 JUMLAH PEGAWAI BERDASARKAN TINGKAT PENDIDIKAN PADA DINAS KESEHATAN (INDUK), UPTD LABKESDA DAN UPTD PELATIHAN KESEHATAN TAHUN 2023-2026

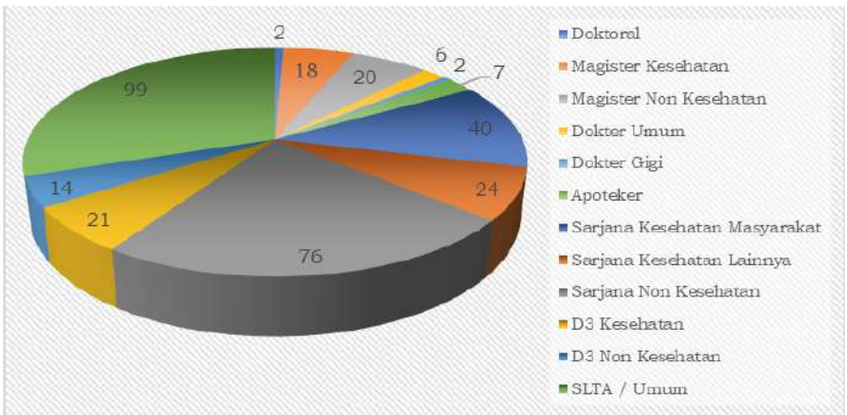

Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Banten, 2025

TABEL 2.2 JUMLAH TENAGA KESEHATAN PADA UPTD RSUD BANTEN DAN RSUD MALINGPING TAHUN 2024

NO	JENIS TENAGA	RSUD BANTEN				RSUD MALINGPING			
		PNS	NON PNS	PNS (%)	NON PNS (%)	PNS	NON PNS	PNS (%)	NON PNS (%)
1	Dokter Spesialis	31	20	12,06	2,65	13	16	11,71	6,27
2	Dokter Umum dan Gigi	16	28	6,23	3,70	7	6	6,31	2,35
3	Perawat	73	312	28,40	41,27	40	84	36,04	32,94
4	Bidan	15	85	5,84	11,24	12	18	10,81	7,06
5	Tenaga Kesehatan Lainnya	80	66	31,13	8,73	29	33	26,13	12,94
6	Tenaga Umum	42	245	16,34	32,41	10	98	9,01	38,43
	Jumlah	257	756	100,00	100,00	111	255	100,00	100,00

Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Banten, 2025

Apabila dilihat berdasarkan jumlah tenaga kesehatan yang berstatus PNS dan Non PNS yang terdapat pada UPTD Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Banten pada tahun 2024 masih didominasi oleh tenaga kesehatan non PNS, dimana di RSUD Banten terdapat sebanyak 756 tenaga kesehatan atau sebesar 74,63% tenaga kesehatan berstatus non PNS.

Sedangkan untuk tenaga kesehatan di RSUD malingping terdapat sebanyak 255 tenaga kesehatan atau sebesar 69,67% tenaga kesehatan yang berstatus non PNS.

GAMBAR 2.7 JUMLAH TENAGA KESEHATAN PADA UPTD RSUD BANTEN DAN RSUD MALINGPING TAHUN 2024

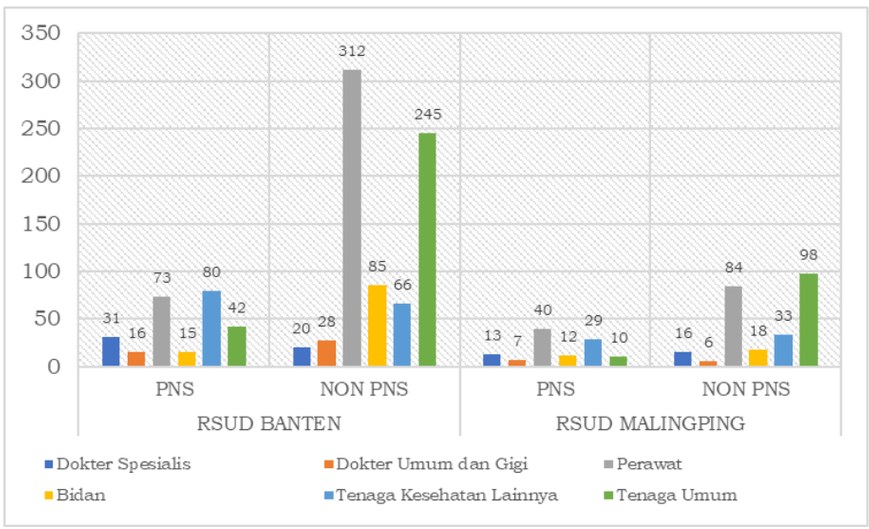

Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Banten, 2025

TABEL 2.3 JUMLAH TENAGA KESEHATAN PADA UPTD RSUD LABUAN DAN RSUD CILOGRANG TAHUN 2025

NO	JENIS TENAGA	RSUD LABUAN				RSUD CILOGRANG			
		PNS	NON PNS (BLUD)	PNS (%)	NON PNS (BLUD) (%)	PNS	NON PNS (BLUD)	PNS (%)	NON PNS (BLUD) (%)
1	Pejabat Struktural	8	0	100,00	0,0	8	0	100,00	0,0
2	Dokter Spesialis	0	16	0,0	100,00	0	18	0,0	100,00
3	Dokter Umum dan Gigi	0	23	0,0	100,00	0	19	0,0	100,00
4	Perawat	0	120	0,0	100,00	0	119	0,0	100,00
5	Bidan	0	22	0,0	100,00	0	26	0,0	100,00
6	Tenaga Kesehatan Lainnya	0	64	0,0	100,00	0	60	0,0	100,00
7	Tenaga Umum	0	73	0,0	100,00	0	76	0,0	100,00
	Jumlah	8	318	2,5	97,50	0	318	0,0	100,00

Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Banten, 2025

Pada UPTD RSUD Labuan dan RSUD Cilograng belum memiliki tenaga kesehatan yang berstatus PNS karena pada saat dilaksanakannya operasional Rumah Sakit di bulan Februari 2025, belum ada penerimaan CPNS baru tahun 2025 sehingga tenaga kesehatan yang direkrut di RSUD Labuan dan RSUD Cilograng menggunakan tenaga kesehatan BLUD.

GAMBAR 2.8 JUMLAH TENAGA KESEHATAN PADA UPTD RSUD LABUAN DAN RSUD CILOGRANG TAHUN 2025

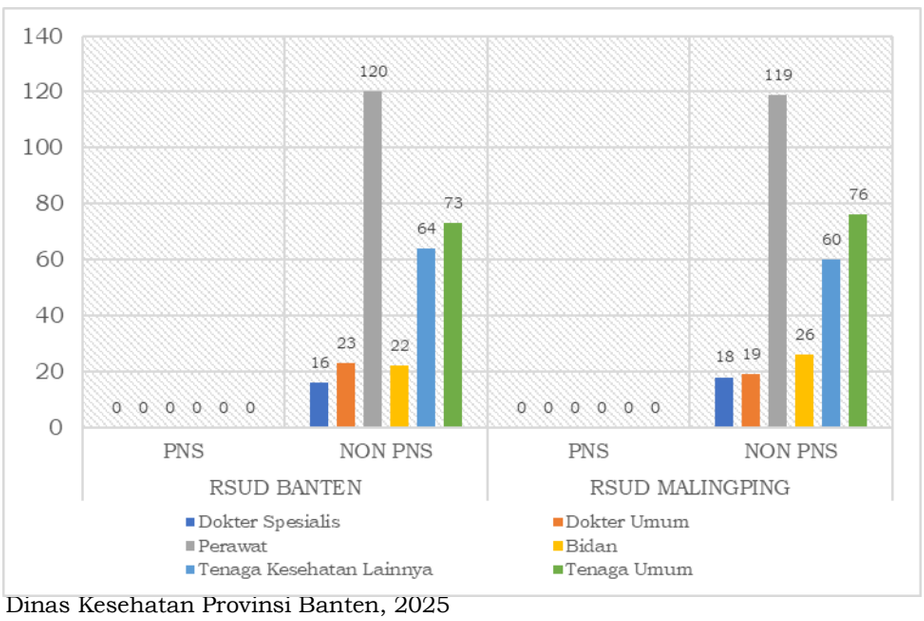

Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Banten, 2025

Apabila mengacu kepada Peraturan Gubernur Banten Nomor 26 Tahun 2023 tentang Analisis Beban Kerja Pada Perangkat Daerah, dapat dilihat bahwa kebutuhan pegawai di lingkungan Dinas Kesehatan Provinsi Banten, adalah sebagai berikut :

TABEL 2.4 ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA DINAS KESEHATAN PROVINSI BANTEN

NO	PERANGKAT DAERAH / CABANG DINAS / UPTD	KEBUTUHAN PEGAWAI				
		JABATAN PIMPINAN TINGGI	JABATAN ADMINISTRATOR	JABATAN PENGAWAS	JABATAN FUNGSIONAL	JABATAN PELAKSANA
1	Dinas Kesehatan	1	5	9	145	169
2	UPTD RSUD Banten	1	7	1	1.282	181
3	UPTD RSUD Malingping	0	4	9	1.035	70
4	UPTD Pelatihan Kesehatan	0	1	3	18	21
5	UPTD Labkesda	0	1	3	104	27
Jumlah		2	18	25	2.584	468

Sumber: Peraturan Gubernur Banten No. 26 Tahun 2023

UPTD RSUD Labuan dan UPTD RSUD Cilograng merupakan UPTD RSUD milik Pemerintah Provinsi Banten yang baru melaksanakan operasional rumah sakitnya pada tanggal 2 Juni 2025 sehingga tidak tercantum pada Peraturan Gubernur Banten nomor 26 tahun 2023 tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja Pada Perangkat Daerah. Tetapi apabila berpedoman pada Pergub tersebut, maka nomenklatur jabatan pada UPTD RSUD Labuan dan UPTD RSUD Cilograng adalah sebagai berikut :

TABEL 2.5 ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA UPTD RSUD LABUAN DAN UPTD RSUD CILOGRANG

NO	PERANGKAT DAERAH / CABANG DINAS / UPTD	KEBUTUHAN PEGAWAI				
		JABATAN PIMPINAN TINGGI	JABATAN ADMINISTRATOR	JABATAN PENGAWAS	JABATAN FUNGSIONAL	JABATAN PELAKSANA
1	UPTD RSUD Labuan	0	4	4	245	73
2	UPTD RSUD Cilograng	0	4	4	242	76
Jumlah		0	8	8	487	149

Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Banten

GAMBAR 2.9 KEBUTUHAN PEGAWAI DINAS KESEHATAN PROVINSI BANTEN

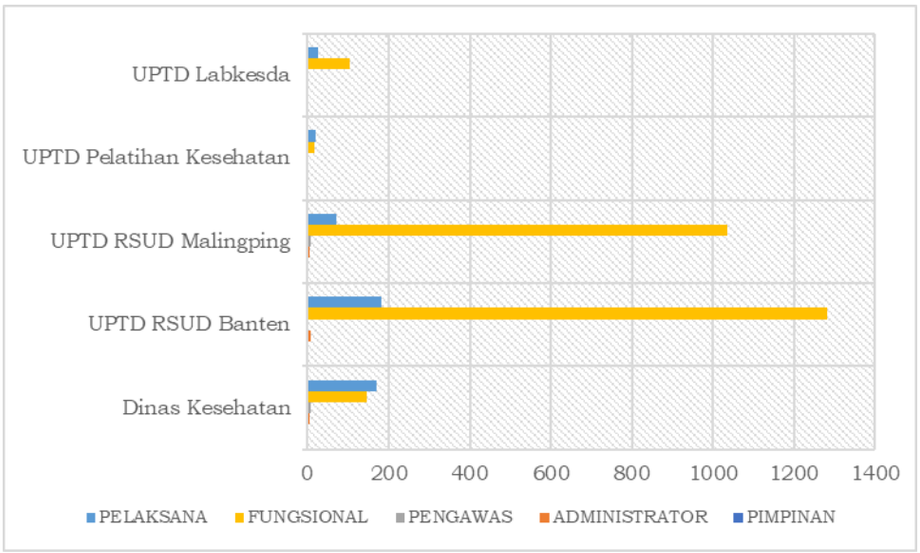

Sumber: Peraturan Gubernur No. 26 Tahun 2023

2.1.2.2 PRASARANA DAN SARANA PELAYANAN KESEHATAN

Ketersediaan sarana pelayanan kesehatan merupakan salah satu tolak ukur kinerja pemerintah terhadap upaya peningkatan aksesibilitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Rasio fasilitas pelayanan kesehatan terhadap jumlah penduduk menggambarkan daya keterjangkauan pelayanan kesehatan di suatu daerah terhadap penduduknya.

Sarana dan prasarana kerja berupa alat perlengkapan kantor dilingkungan Dinas Kesehatan Provinsi Banten dalam rangka menunjang aktivitas kerja aparatur relatif terpenuhi berdasarkan perbandingan jumlah pegawai dan beban kerja, dan sebagian besar kondisinya masih baik dan layak pakai, serta sesuai dengan standardisasi sarana dan prasarana kerja. Adapun lokasi UPTD Dinas Kesehatan dan sebaran sarana kesehatan yang ada di provinsi Banten adalah sebagai berikut:

TABEL 2.6 LOKASI KANTOR UPTD DI LINGKUNGAN DINAS KESEHATAN PROVINSI BANTEN

NO	UPTD	ALAMAT
1	Pelatihan Kesehatan	Jl. Raya Serang KM.31 Kelurahan Sumur Bandung Kecamatan Jayanti Kabupaten Tangerang
2	Labkesda	Jl. Syech Nawawi Al Bantani, Kelurahan Banjar Agung Kecamatan Cipocok Jaya Kota Serang
3	RSUD Banten	Jl. Syech Nawawi Al Bantani, Kelurahan Banjar Agung Kecamatan Cipocok Jaya Kota Serang

NO	UPTD	ALAMAT
4	RSUD Malingping	Jl. Raya Saketi Malingping KM.1 Desa Malingping Utara Kecamatan Malingping Kabupaten Lebak
5	RSUD Labuan	Jl. Raya Labuan – Pandeglang, Kalanganyar Kecamatan Labuan Kabupaten Pandeglang
6	RSUD Cilograng	Jl. Nasional II Desa Cijengkol Kecamatan Cilograng Kabupaten Lebak

Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Banten, 2025

Terhitung mulai tahun 2005 Dinas Kesehatan Provinsi Banten yang sudah memiliki gedung sendiri yang berlokasi di Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B) Jalan KH. Syech Nawawi Al-Bantani di wilayah Curug Kota Serang. Untuk kendaraan Dinas, baik kendaraan Dinas Jabatan/Operasional hampir seluruh pejabat baik eselon II, III maupun IV relatif terpenuhi sesuai dengan kebutuhan dan beban kerja masing-masing. Sarana dan prasarana lainnya berupa alat perlengkapan kantor seperti meja kerja saat ini setiap orang pegawai diberikan meja kerja, sedangkan untuk perlengkapan lainnya seperti personal komputer, filling kabinet, laptop, notebook masing-masing sub bagian (Eselon IV a) memiliki 1 unit, serta sarana dan prasarana pendukung lainnya seperti infocus, perlengkapan teknologi informasi, dan lain sebagainya. Dari seluruh kondisi tersebut memudahkan dalam melaksanakan koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan simplifikasi serta mobilisasi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Kesehatan.

TABEL 2.7 JUMLAH SARANA KESEHATAN / FASILITAS KESEHATAN DI PROVINSI BANTEN

NO	JENIS SARANA	JUMLAH
1	Puskesmas	
	Puskesmas Non Perawatan	159
	Puskesmas Perawatan	87
	Puskesmas Pembantu	214
2	Rumah Sakit	
	Rumah Sakit Provinsi	4
	RS Vertikal, RSUD Kab/Kota, Swasta	106
3	Laboratorium Kesehatan Daerah	
	Labkesda Provinsi	1
	Labkesda Kab/Kota	8
4	UPTD PMI	7

Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Banten, 2025

2.1.3 KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1.3.1 CAPAIAN INDIKATOR KINERJA

Capaian tujuan daerah bidang kesehatan Provinsi Banten yaitu "*Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat dengan Indikator Usia Harapan Hidup dan Prevelansi Stunting*". Adapun capaian tujuan daerah bidang kesehatan Provinsi Banten dapat dilihat sebagai berikut :

TABEL 2.8 CAPAIAN TUJUAN DAERAH BIDANG KESEHATAN TAHUN 2020 - 2024

TAHUN	TUJUAN DAN SASARAN	SATUAN	INDIKATOR USIA HARAPAN HIDUP (UHH)			IDIKATOR PREVELANSI STUNTING PADA BALITA		
			TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI	%
2020	Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat	%	70,36	74,12	105,34	24,60	23,40	104,88
2021			70,66	74,17	104,97	23,60	24,50	96,19
2022			70,66	74,46	105,38	23,60	20,00	115,24
2023			70,40	74,77	106,21	23,50	24,00	97,84
2024			74,82	74,97	100,20	23,00	21,10	113,04

Sumber: LPPD Dinas Kesehatan Provinsi Banten Tahun 2024

UHH di Provinsi Banten selain dipengaruhi faktor Kesehatan, diperlukan struktur ekonomi yang Tangguh yang tercermin dalam pertumbuhan ekonomi daerah, faktor inflasi yang dapat ditekan, angka pengangguran yang rendah, angka kemiskinan yang rendah, faktor Pendidikan masyarakat yang tinggi dan kondisi lingkungan yang memadai. Usia harapan hidup merupakan sarana evaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk disuatu wilayah. Menurut data yang dirilih oleh BPS Provinsi Banten, UHH Provinsi Banten tahun 2024 adalah 74,97.

Artinya rata-rata usia hidup maksimal masyarakat banten mencapai 74 tahun 11 bulan 19 hari. Usia Harapan Hidup Provinsi Banten pada tahun 2024 sebesar 74,97 telah berada diatas rata-rata UHH Nasional yaitu sebesar 72,39.

TABEL 2.9 USIA HARAPAN HIDUP PROVINSI BANTEN TAHUN 2020-2024

NO	KABUPATEN / KOTA	2020	2021	2022	2023	2024
1	Lebak	72,93	73,04	73,43	73,80	73,99
2	Pandeglang	73,10	73,22	73,63	74,01	74,22
3	Serang	73,70	73,81	74,22	74,62	74,91
4	Tangerang	74,56	74,59	74,91	75,18	75,34
5	Kota Serang	74,43	74,54	74,84	75,13	75,31
6	Kota Cilegon	74,23	74,25	74,51	74,81	75,03
7	Kota Tangerang	74,78	74,78	75,02	75,30	75,50
8	Kota Tangerang Selatan	75,16	75,16	75,40	75,64	75,80
	Provinsi Banten	**74,12**	**74,17**	**74,46**	**74,77**	**74,97**

Sumber: BPS Provinsi Banten UHH Tahun 2024

GAMBAR 2.10 USIA HARAPAN HIDUP PROVINSI BANTEN TAHUN 2020-2024

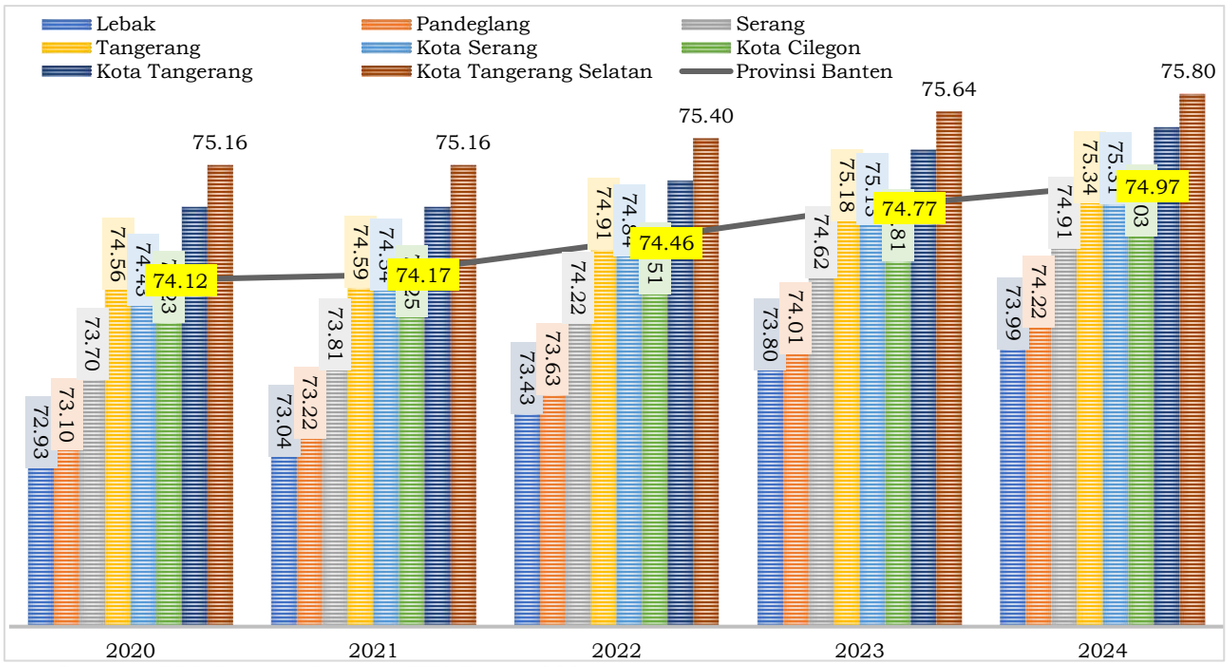

Sumber: BPS Provinsi Banten UHH Tahun 2024

Usia Harapan Hidup Provinsi Banten apabila dilihat berdasarkan Kabupaten/Kota dapat dilihat bahwa Usia Harapan Hidup di Provinsi Banten tertinggi terdapat di Kota Tangerang Selatan sedangkan Usia Harapan Hidup terendah terdapat di Kabupaten Lebak.

Sedangkan Usia Harapan Hidup Provinsi Banten Tahun 2024 adalah sebesar 74,97. Keberhasilan dalam pencapaian kinerja tidak terlepas dari faktor internal dan faktor eksternal organisasi. Adapun faktor internal dan faktor eksternal keberhasilan tersebut antara lain disebabkan oleh:

a. Ketersediaan anggaran yang memadai untuk melaksanakan program dan kegiatan yang telah direncanakan;
b. Adanya komitmen dan kepedulian yang tinggi dari masing-masing penanggung jawab kegiatan untuk merealisasikan apa yang telah ditargetkan untuk kinerja tahun 2024;
c. Perencanaan dari masing-masing kegiatan telah fokus pada apa yang akan dicapai;
d. Telah diimplementasikannya penganggaran yang berbasis kinerja, setiap anggaran yang telah dikeluarkan dapat menghasilkan kinerja yang optimal;
e. Telah dilakukannya evalusi perbulan atas pelaksanaan kegiatan baik terkait realisasi keuangan maupun realisi fisiknya, hal ini dimungkinkan untuk dapat melakukan perbaikan apabila terdapat kegiatan yang tidak focus pada hasil;
f. Optimalnya koordinasi dengan berbagai stakeholder baik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota maupun Pemerintah Vertikal teknis, OPD teknis mitra Dinas Kesehatan, Organisasi Profisi maupun Organisasi

Masyarakat dan Masyarakat secara luas. Sehingga pelaksanaan kegiatan dapat berjalan efektif, efiesien dan tepat sasaran;

g. Adanya sinergitas program/kegiatan baik antara Kementerian Kesehatan dengan Dinas Kesehatan Provinsi Banten maupun dengan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota; dan
h. Kualitas dan kompetensi SDM yang semakin meningkat menjadi kekuatan potensial untuk menghasilkan kinerja yang optimal.

Pemerintah Provinsi Banten juga berkomitmen dalam percepatan penurunan stunting ditunjukkan dengan Prevalensi Stunting yang dijadikan indikator daerah dan merupakan tematik pembangunan, sehingga penurunan stunting menjadi fokus dan prioritas pembangunan di Provinsi Banten. Hal ini dapat dibuktikan dengan capaian penurunan Prevalensi Stunting Tahun 2024 yaitu 21,10 persen turun 2,90 persen dari Tahun 2021 (SSGI, 2025).

Secara umum, prevalensi stunting di Provinsi Banten menurun dari 24,50 persen pada Tahun 2021 menjadi 20,00 persen pada Tahun 2022, namun kembali meningkat menjadi 24,00 persen pada Tahun 2023 dan kembali menurun pada Tahun 2024 menjadi 21,10. Ini menunjukkan bahwa upaya penurunan Stunting di provinsi ini masih membutuhkan perhatian yang lebih intensif. Pada penurunan Prevalensi Stunting, Dinas Kesehatan Provinsi Banten telah berupaya keras dalam menurunkan balita stunting.

Salah satu indikator terkait Stunting di Dinas Kesehatan dalam rangka mendukung capaian target indikator kinerja daerah Penurunan Prevalensi Stuning adalah Cakupan Layanan Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif Dalam Penurunan Stunting. Pengukuran Prevalensi Stunting dilaksanakan melalui SSGI (Survey Status Gizi Indonesia) dan hasil yang diperoleh melalui SSGI merupakan hasil penelitian terhadap Blok Sensus terpilih yaitu sampel rumah tangga balita (RUTA) yang tersebar di Kabupaten / Kota, sehingga yang diteliti hanya beberapa wilayah tertentu dan tidak mencakup pemeriksaan seluruh Balita.

Pada tahun 2020 sampai dengan 2022, perhitungan Prevalensi Stunting pada Balita termasuk di Provinsi Banten menggunakan SSGI. Pada tahun 2023 pengukuran prevalensi stunting dilaksanakan melalui SKI (Survey Kesehatan Indonesia) yang dilaksanakan setiap 5 (lima) tahun sekali, sehingga hasil capaian prevalensi stunting tahun 2023 yang tidak tercapai sesuai target dapat disebabkan oleh perbedaan pelaksanaan SSGI dan SKI, yaitu:

1. Pada SSGI pengukuran tinggi badan, berat badan pada Balita dilakukan oleh tenaga gizi yang memiliki kompotensi untuk mengukur status gizi balita;
2. Pada SKI, pengukuran tinggi badan, berat badan dilakukan oleh tenaga kesehatan (tidak spesifik tenaga gizi);
3. Pada SSGI dilakukan pendampingan pengukuran oleh Dinkes;
4. Pada SKI tidak dilakukan pendampingan pengukuran oleh Dinkes;
5. Pada SSGI khusus untuk mengukur status gizi balita;

6. Pada SKI selain mengukur status gizi balita juga mengkukur indikator kesehatan lainnya termasuk data penyakit menular, penyakit tidak menular dan sampel biomedis.

Selain itu permasalahan ekonomi global yaitu salah satunya meningkatnya angka pengangguran, turut mempengaruhi daya beli masyarakat dalam penyediaan pangan yang sehat dan bergizi untuk keluarga. Kondisi ekonomi yang menurun juga menyebabkan beberapa keluarga tidak dapat melaksanakan pemeriksaan kesehatan secara rutin untuk Balita yang memiliki masalah kesehatan penyerta pada Balita yang memiliki potensi stunting.

Jenis pelayanan dasar SPM bidang kesehatan pada Pemerintah Daerah Provinsi sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan yaitu:

1. Pelayanan dasar bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat dan/atau berpotensi bencana Provinsi; dan
2. Pelayanan Kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa.

TABEL 2.10 CAPAIAN SPM BIDANG KESEHATAN DINAS KESEHATAN PROVINSI BANTEN TAHUN 2020 – 2024

NO	TUJUAN DAN SASARAN	2020			2021			2022			2023			2024		
		TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI	%
A	Persentase Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan / Potensi Bencana Provinsi (Orang)	418.873	418.873	100	115.464	115.464	100	164.283	164.283	100	3.300	3.300	100	500	500	100
B	Persentase Pelayanan Penduduk Terdampak dan Beresiko Pada Kondisi Kejadian Luar Biasa Provinsi (Orang)	19.086	19.086	100	61.613	61.613	100	179	179	100	179	179	100	300	300	100

Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Banten

TABEL 2.11 CAPAIAN KINERJA INDIKATOR KINERJA UTAMA DAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM DINAS KESEHATAN PROVINSI BANTEN TAHUN 2020 – 2022

NO	RENSTRA 2017 - 2022							EVALUASI
	IKU	2020		2021		2022		
		TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	
INDIKATOR KINERJA UTAMA								
1.	Capaian SAKIP	BB	80	85	81,5	85	85	
2.	Penurunan Jumlah Kematian Ibu	237	237	232	198	227	193	
3.	Penurunan Jumlah Kematian Bayi	1139	1068	1134	1157	1.129	1.107	Pada tahun 2021 target penurunan jumlah kematian ibu tidak tercapi karena efek pasca pandemi COVID-19
4.	Persentase Penduduk yang Memiliki Jaminan Kesehatan	100	100	100	100	100	100	
5.	BOR RSUD Banten	70	67,06	75	75	80	80,82	Pada tahun 2020 target BOR RSUD Banten dan RSUD Malingping tidak tercapai karena terjadi penurunan kunjungan pasien rawat inap karena pandemi COVID-19
6.	BOR RSUD Malingping	65	50,28	70	70	75	75,06	

NO	RENSTRA 2017 - 2022							EVALUASI
	IKU	2020		2021		2022		
		TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	
INDIKATOR KINERJA KUNCI (*OUTCOME*)								
1.	Capaian Kesesuaian Dengan Parameter Penilaian Dokumen Perencanaan, Evaluasi Dan Pelaporan Perangkat Daerah	100	100	100	100	100	100	
2.	Persentase Sarana Prasarana Perkantoran Yang Mendukung Kelancaran Tugas Dan Fungsi Administrasi Perangkat Daerah	100	100	100	100	100	100	
3.	Persentase Terwujudnya Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur Yang Mendukung Kelancaran Tugas Dan Fungsi SKPD	100	100	100	100	100	100	

NO	RENSTRA 2017 - 2022							EVALUASI
	IKU	2020		2021		2022		
		TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	
4.	Persentase Terwujudnya Penata Usaha Keuangan Dan Pencapaian Kinerja Program Yang Mendukung Yang Mendukung Kelancaran Tugas Dan Fungsi SKPD	100	100	100	100	100	100	
5.	Persentase Sarana Prasarana Perkantoran Yang Mendukung Kelancaran Tugas Dan Fungsi Administrasi Perangkat Daerah (UPTD Pelatihan Kesehatan)	100	100	100	100	100	100	
6.	Persentase Sarana Prasarana Perkantoran Yang Mendukung Kelancaran Tugas Dan Fungsi Administrasi	100	100	100	100	100	100	

NO	RENSTRA 2017 - 2022							EVALUASI
	IKU	2020		2021		2022		
		TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	
	Perangkat Daerah (UPTD Labkesda Provinsi Banten)							
7.	Presentase Terbangunnya RS Jiwa Dan Pusat Rehabilitasi Ketergantungan Obat	50%	50%	75%	50%	90%	50%	Pada tahun 2024 target tidak tercapai karena adanya SE dari SEKDA No 050 / 1514 / Ekbang / 2022 tentang Optimalisasi Pendapatan dan Kebijakan Belanja pada Rencana Perubahan APBD TA 2022 sehingga pembangunan tidak dilanjutkan
8.	Presentase Pembangunan RS Banten Selatan	40%	40%	50%	50%	50%	98,50%	
9.	Presentase Pemenuhan Obat Publik Dan Perbekalan Kesehatan	100	100	100	100	100	100	
10.	Persentase Jenis Pemeriksaan	45	47,34	53%	64,36%	61%	72,87%	

NO	RENSTRA 2017 - 2022							EVALUASI
	IKU	2020		2021		2022		
		TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	
	Laboratorium Kesehatan Yang Di Layani							
11.	Persentase Pelayanan Kesehatan Yang Terakreditasi (Fktp, Fkrtl, Laboratorium)	86	100	90%	93,24%	94%	94,24%	
12.	Persentase Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana Dan/Atau Berpotensi Bencana Provinsi	100	100	100	100	100	100	
13.	Persentase Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk Terdampak Dan Beresiko Pada Kondisi Kejadian Luar Biasa Provinsi	100	100	100	100	100	100	

NO	RENSTRA 2017 - 2022							EVALUASI
	IKU	2020		2021		2022		
		TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	
14.	Persentase Persalinan Di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	86%	95,89%	90%	99,40%	94%	95,67%	
15.	Prevalensi Stunting	24,60	23,4	23,60	24,5	23,60	20%	
16.	Persentase Kab/Kota Yang Mencapai Imunisasi Dasar Lengkap (Idl 95%)	75	50	87,5	94,8	100	100	
17.	Keberhasilan Pengobatan Tb (Success Rate) Di Kab/Kota	90	92	90%	91,76%	90%	90,05%	
18.	Prevalensi HIV	< 0,50	0,33	< 0,50	0,1	< 0,50	0,13	
19.	Inciden Rate DBD (Per 100.000 Penduduk)	< 49	23,67	< 49	16,09	< 49	43,40	
20.	Prevalensi Hipertensi	24	39	19	41	14	13,24	
21.	Terlaksananya Gerakan Bebas Pasung Di Kab/Kota	8	8	8	8	8	8	
22.	Persentase Penduduk Yang	100%	100%	100%	100%	100%	100%	

NO	RENSTRA 2017 - 2022							EVALUASI
	IKU	2020		2021		2022		
		TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	
	Mendapatkan Jaminan Pelayanan Kesehatan							
23.	Capaian SPM Pelayanan Medis Dan SPM Pelayanan Keperawatan RSUD Banten	90%	90%	93%	93%	93%	97,1%	
24.	Capaian SPM Pelayanan Medis RSUD Banten	90%	90%	93%	93%	93%	100%	
25.	Capaian SPM Pelayanan Keperawatan RSUD Banten	90%	90%	93%	93%	93%	97%	
26.	Capaian Pemenuhan Standar Sarana Dan Prasarana RSUD Banten Dan Persentase Kelengkapan Pengisian Rekam Medik 24 Jam	85%	85%	90%	90%	90%	91,7%	

NO	RENSTRA 2017 - 2022							EVALUASI
	IKU	2020		2021		2022		
		TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	
	Setelah Selesai Pelayanan							
27.	Capaian Pemenuhan Standar Sarana Dan Prasarana Rumah Sakit	85%	85%	90%	90%	90%	91,3%	
28.	Capaian Kelengkapan Pengisian Rekam Medik 24 Jam Setelah Selesai Pelayanan	85%	85%	90%	90%	90%	92,3%	
29.	Capaian SPM Pelayanan Medis RSUD Malingping	100%	74,24%	100%	100%	100%	100%	
30.	Capaian SPM Pelayanan Keperawatan RSUD Malingping	100%	98,08%	100%	100%	100%	100%	
31.	Capaian SPM Penunjang RSUD Malingping	100%	88,91%	100%	100%	100%	100%	
32.	Cakupan Kabupaten/Kota Sehat	7	7	8	8	8	8	

NO	RENSTRA 2017 - 2022							EVALUASI
	IKU	2020		2021		2022		
		TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	
33.	Jumlah Dokter/Dokter Gigi, Tenaga Kesehatan Yang Direkrut Dan Ditingkatkan Kompetensinya	470	441	470	470	470	470	
34.	Cakupan Terlatihnya Sumber Daya Manusia Kesehatan Dan Masyarakat	150	150	150	150	150	300	
35.	Persentase Pembinaan Sarana Kefarmasian	70	70	80	88,7	95	100	

Sumber: Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2024

TABEL 2.12 CAPAIAN KINERJA INDIKATOR KINERJA UTAMA DAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM DINAS KESEHATAN PROVINSI BANTEN TAHUN 2023-2024

NO	RENSTRA 2023-2026					EVALUASI
	IKU	2023		2024		
		TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	
INDIKATOR KINERJA UTAMA						
1.	Capaian SAKIP Perangkat Daerah (Nilai)	70 – 80	78,5	70 – 80	78,7	
2.	Cakupan Layanan Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif dalam Penurunan Stunting (%)	40	66,6	50	75	
3.	Rasio Kematian Ibu (per 100.000 kelahiran hidup)	81	75,9	80	71,7	
4.	Rasio Kematian Bayi (per 1.000 kelahiran hidup)	4,7	5	4,6	4,5	1. Pada tahun 2023 rasio kematian bayi tidak tercapai sesuai target dikarenakan perhitungan rasio kematian bayi (per 1.000 kelahiran hidup) masih baru dilakukan sehingga Kab/Kota belum konsisten mencatat jumlah kelahiran hidup yang membuat capaian menjadi tidak sesuai target; 2. Faktor lainnya yang turut mempengaruhi masih tingginya kematian bayi adalah, keterbatasan jumlah tempat tidur di NICU (*Neonatal Intesive Care Unite*) di RS yang masih tinggi sehingga ketika terjadi kasus komplikasi pada bayi baru lahir yang membutuhkan perawatan secara intensif sulit dilakukan

NO	RENSTRA 2023-2026					EVALUASI
	IKU	2023		2024		
		TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	
5.	Persentase Capaian Rumah Sakit Pendidikan	76,92	76,93	92,31	92,31	
6.	Persentase Ketercapaian Indikator SPM Rumah Sakit	100	100	100	100	
INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN (*OUTCOME*)						
1.	Rasio Daya Tampung RS Rujukan	0,13	0,13	0,14	0,14	Outcome LPPD Urusan Kesehatan Kewenangan Provinsi
2.	Persentase RS Rujukan Provinsi yang Terakreditasi	79,20%	91%	79,37%	79,37%	
3.	Persentase Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana Dan/Atau Berpotensi Bencana Provinsi	100%	100%	100%	100%	
4.	Persentase Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk Terdampak Dan Beresiko Pada Kondisi Kejadian Luar Biasa Provinsi	100%	100%	100%	100%	
5.	Persentase Ketercapaian Dari Seluruh Kegiatan Pada Program Penunjang	100%	100	100%	100	

NO	RENSTRA 2023-2026					EVALUASI
	IKU	2023		2024		
		TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	
	Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi					
6.	Persentase Ketercapaian Dari Seluruh Kegiatan Para Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Pada UPTD Labkesda	100%	100	100%	100	
7.	Persentase Ketercapaian Dari Seluruh Kegiatan Para Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Pada UPTD Pelatihan Kesehatan	100%	100	100%	100	
8.	Persentase Ketercapaian Dari Seluruh Kegiatan Para Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Pada UPTD RSUD Banten	100%	100	100%	100	
9.	Persentase Ketercapaian Dari Seluruh Kegiatan Para Program Penunjang Urusan Pemerintahan	100%	100	100%	100	

NO	RENSTRA 2023-2026					EVALUASI
	IKU	2023		2024		
		TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	
	Daerah Provinsi Pada UPTD RSUD Malingping					
10.	Capaian Kualitas Keluarga Sehat	57%	78,5%	57%	87,0%	
11.	Persentase Keluarga Dengan Akses Terhadap Sarana Sanitasi Sanitasi (Jamban)	86%	90,60%	86%	94,00%	
12.	Persentase Pelayanan Kasus Penyakit Menular, Penyakit Tidak Menular Dan Kesehatan Jiwa Yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	100%	100%	100%	100%	
13.	Persentase Jaminan Pelayanan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin	100%	100%	100%	100%	
14.	Ketersediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Provinsi Yang Bermutu	239	252	239	239	
15.	Persentase Pemenuhan Obat Publik Dan Perbekalan Kesehatan	100%	100%	100%	100%	
16.	Peningkatan Jumlah Parameter Lab Kesehatan	118 Parameter	118 Parameter	123 Parameter	123 Parameter	

NO	RENSTRA 2023-2026					EVALUASI
	IKU	2023		2024		
		TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	
	Dan Laboratorium Kalibrasi Yang Terakreditasi (Labkesda Provinsi Banten)					
17.	Persentase Standar Bagian Penunjang Sebagai RS Pendidikan (RSU Banten)	50%	50%	100%	100%	
18.	Persentase Standar Bagian Penunjang Logistik Sebagai RS Pendidikan (RSU Banten)	50%	50%	100%	100%	
19.	Persentase Standar Bagian Penunjang Rekam Medis Dan SIM RS Sebagai RS Pendidikan (RSU Banten)	50%	50%	100%	100%	
20.	Persentase Standar Bagian Pelayanan Sebagai RS Pendidikan (RSU Banten)	100%	100%	100%	100%	
21.	Persentase Standar Bagian Pelayanan Medis Sebagai RS Pendidikan (RSU Banten)	100%	100%	100%	100%	

NO	RENSTRA 2023-2026					EVALUASI
	IKU	2023		2024		
		TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	
22.	Persentase Standar Bagian Keperawatan Sebagai RS Pendidikan (RSU Banten)	100%	100%	100%	100%	
23.	Capaian Variabel Indikator Pelayanan Medis RSUD Sesuai Standar Pelayanan Minimal (RSUD Malingping)	100%	100%	100%	100%	
24.	Capaian Variabel Indikator Keperawatan RSUD Sesuai Standar Pelayanan Minimal (RSUD Malingping)	100%	100%	100%	100%	
25.	Capaian Variabel Indikator Penunjang RSUD Sesuai Standar Pelayanan Minimal (RSUD Malingping)	100%	100%	100%	100%	
26.	Jumlah Tenaga Kesehatan Dan Tenaga Kesehatan Lainnya Yang Direkrut Dan Didistribusikan	470 Orang	470 Orang	470 Orang	470 Orang	

NO	RENSTRA 2023-2026					EVALUASI
	IKU	2023		2024		
		TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	
27.	Peningkatan Kapasitas Kompetensi SDM Kesehatan Dan Masyarakat Pada UPTD Pelatihan Kesehatan	360 Orang	360 Orang	420 Orang	420 Orang	
28.	Persentase Pembinaan Dan Pengawasan Sarana Distribusi Kefarmasian Dan Pengawasan Alat Kesehatan	100%	100%	100%	100%	
29.	Persentase Pembinaan Dan Pengawasan Sarana Perusahaan Rumah Tangga Alat Kesehatan Dan PKRT	100%	100%	100%	100%	
30.	Cakupan Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	13 Kelompok Masyarakat	13 Kelompok Masyarakat	14 Kelompok Masyarakat	14 Kelompok Masyarakat	

Sumber: Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2024

Indikator SPM bidang kesehatan yang menjadi kewenangan Provinsi yaitu Pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibatn bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi dan pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak dan beresiko pada kondisi kejadian luas biasa provinsi pada tahun 2020 sampai dengan 2024 sudah tercapai sebesar 100%.

Keberhasilan dalam pencapaian kinerja tidak terlepas dari faktor internal dan faktor eksternal organisasi. Adapun faktor internal dan faktor eksternal keberhasilan tersebut antara lain disebabkan oleh:

a. Ketersediaan anggaran yang memadai untuk melaksanakan program dan kegiatan yang telah direncanakan;
b. Adanya komitmen dan kepedulian yang tinggi dari masing-masing penanggung jawab kegiatan untuk merealisasikan apa yang telah ditargetkan untuk kinerja tahun 2024;
c. Perencanaan dari masing-masing kegiatan telah fokus pada apa yang akan dicapai;
d. Telah diimplementasikannya penganggaran yang berbasis kinerja, setiap anggaran yang telah dikeluarkan dapat menghasilkan kinerja yang optimal;
e. Telah dilakukannya evalusi perbulan atas pelaksanaan kegiatan baik terkait realisasi keuangan maupun realisi fisiknya, hal ini dimungkinkan untuk dapat melakukan perbaikan apabila terdapat kegiatan yang tidak focus pada hasil;
f. Optimalnya koordinasi dengan berbagai stakeholder baik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota maupun Pemerintah Vertikal teknis, OPD teknis mitra Dinas Kesehatan, Organisasi Profisi maupun Organisasi Masyarakat dan Masyarakat secara luas. Sehingga pelaksanaan kegiatan dapat berjalan efektif, efiesien dan tepat sasaran;
g. Adanya sinergitas program/kegiatan baik antara Kementerian Kesehatan dengan Dinas Kesehatan Provinsi Banten maupun dengan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota; dan
h. Kualitas dan kompetensi SDM yang semakin meningkat menjadi kekuatan potensial untuk menghasilkan kinerja yang optimal.

Selain faktor penunjang keberhasilan dalam pencapaian sasaran kinerja, tentu ada faktor yang menghambat dalam pelaksanaan kegiatan program yang tentu saja dapat memengaruhi pencapaian target sasaran yang telah ditetapkan. Data jumlah kelahiran hidup yang proses kelaiharannya bukan di fasilitas pelayanan Kesehatan masih sulit didapatkan. Diperlukan kerja sama dengan Disdukcapil dan BPS dalam menghitung jumlah kelahiran hidup tiap tahunnya.

2.1.3.2 CAPAIAN REALISASI ANGGARAN

Sumber daya keuangan untuk pembiayaan Dinas Kesehatan Provinsi Banten dan jajaran berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Daerah Provinsi banten, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Kementerian Kesehatan Republik Indonesia serta sumber pembiayaan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Sebagaimana tercantum dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, urusan kesehatan merupakan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, yang wajib diselenggarakan oleh semua daerah. Pemerintah daerah harus mengalokasikan anggaran urusan kesehatan minimal 10% dari total belanja APBD diluar belanja pegawai. Salah satu sumber pendapatan bagi Dinas Kesehatan Provinsi Banten dan jajaran adalah pendapatan jasa layanan pada Unit Perangkat Teknis Daerah (UPTD) yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK BLUD).

Nilai pendapatan menunjukan peningkatan pada tahun 2017 diantaranya akibat penerimaan kapitasi BPJS Kesehatan yang semakin meningkat bagi puskesmas dan penerimaan bersumber klaim metode INA-CBGs bagi Rumah Sakit Daerah. Dalam periode anggaran tahun 2023-2026 diproyeksikan anggaran pendapatan UPTD PPK-BLUD terus mengalami peningkatan seiring dengan upaya perbaikan pelayanan melalui transformasi pelayanan kesehatan primer maupun rujukan.
Dilihat dari tabel berikut, penggunaan anggaran Dinas Kesehatan pada Tahun 2024 sangat efesien karena serapan anggaran mencapai 98,96%. Jika lakukan analisis realisasi penggunaan angggaran dengan realisasi capaian kinerja, maka Dinas Kesehatan Provinsi Banten pada tahun 2024 sudah sangat baik dalam perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan.

TABEL 2.13 EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA TAHUN ANGGARAN 2024

NO	KETERANGAN	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)	PERSENTASE (%)
1	Dinas Kesehatan	621.105.756.713	614.224.861.716	98,91
2	UPTD Labkesda	12.420.004.139	13.376.983.794	99,68
3	UPTD Upelkes	3.336.634.184	3.171.142.353	95,04
4	APBD RSUD Banten	151.590.732.122	148.430.269.108	97,92
5	BLUD RSUD Banten	186.946.724.272	185.660.128.071	99,31
6	APBD RSUD Malingping	97.398.192.935	97.103.134.541	99,69
7	BLUD RSUD Malingping	59.487.028.205	59.449.208.976	99,94
	Total	**1.113.195.072.570**	**1.121.415.728.559**	**98,96**

Sumber: Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2024

Dilihat dari tabel di atas, penggunaan anggaran Dinas Kesehatan pada Tahun 2024 mencapai 98,96% dengan realisasi kinerja 89,56% dengan predikat BAIK. maka Dinas Kesehatan Provinsi Banten pada tahun 2024 sudah baik dalam perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan.

GAMBAR 2.11 CAPAIAN ANGGARAN DAN REALISASI PENGGUNAAN SUMBER DAYA TAHUN ANGGARAN 2024

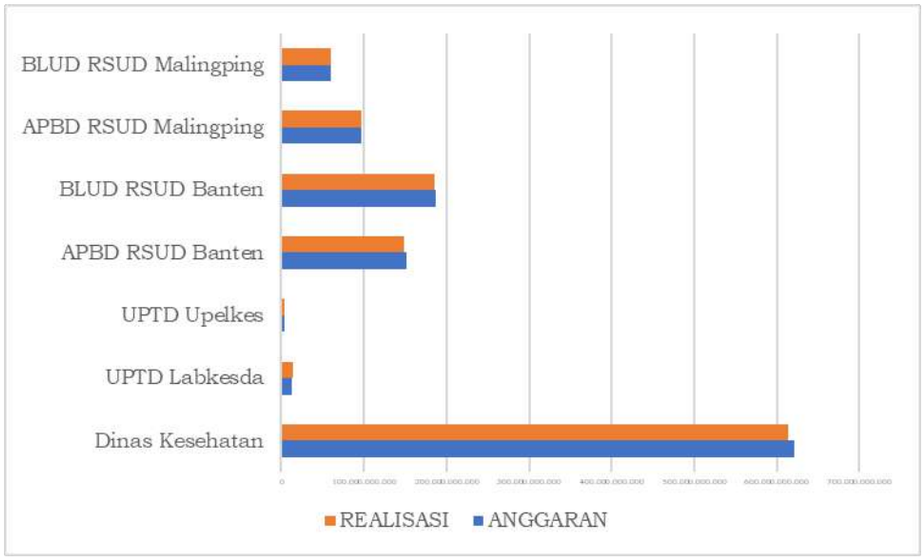

Sumber: Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2024

Dengan tercapainya seluruh indikator kinerja utama, indkator kinerja program, dan indkator sub kegiatan sesuai dengan perjanjian kinerja dan optimalnya dalam realisasi anggaran. Penambahan jumlah tempat tidur dan pengembangan pelayanan unggulan Rumah Sakit Daerah, yang diharapkan dapat meningkatkan utilitas jasa pelayanan kesehatan oleh masyarakat di Puskesmas maupun di Rumah Sakit Daerah. Namun, rencana penerapan kebijakan Kelas Rawat Inap Standar (KRIS) perlu dipandang sebagai sebuah tantangan dalam arah pengembangan pelayanan Rumah Sakit Daerah yang akan berdampak pada penyesuaian tarif Indonesia Case Based Group (INA CBGs) serta perubahan komposisi ketersedian tempat tidur dan utilitas pelayanan Rumah Sakit Daerah.

Hal ini diprediksi akan berimplikasi pada trend pendapatan juga perhitungan nilai investasi atas perubahan infrastruktur maupun belanja modal dalam jangka pendek dan jangka panjang. Penggunaan sumber daya dalam rangka mendukung pelaksanaan program/kegiatan terdiri atas dua yaitu sumber daya biaya (anggaran) dan sumber daya manusia.

Adapun untuk realisai anggaran Dinas Kesehatan Tahun 2020-204 dapat dilihat pada Tabel berikut:

TABEL 2.14 REALISASI ANGGARAN DINAS KESEHATAN TAHUN 2020-2024

NO	KETERANGAN	2020			2021			2022		
		ANGGARAN (RP.)	REALISASI (RP.)	(%)	ANGGARAN (RP.)	REALISASI (RP.)	(%)	ANGGARAN (RP.)	REALISASI (RP.)	(%)
1.	Dinas Kesehatan	353.917.705.298	345.202.144.986	97,54	524.841.223.536	477.339.934.217,38	90,95	626.707.200.658	605.053.071.000	96,54
2.	UPTD. Labkesda	17.457.369.000	15.042.725.942	86,17	6.051.777.283	5.107.863.038	80,40	8.949.959.278	8.516.086.770	95,15
3.	UPTD. Upelkes	1.068.789.600	931.332.789.877	87,14	2.037.536.500	1.301.348.490	63,87	2.809.502.810	2.707.886.317	96,38
4.	APBD UPTD RSU Banten	190.339.458.705	157.139.559.581	82,56	275.767.893.319	263.850.137.421	95,68	564.410.647.625	534.728.815.725,39	94,74
5.	BLUD UPTD RSU Banten	92.588.077.581	33.989.668.319	36,61	74.162.325.872	25.070.965.056	33,81	189.347.741.610	167.142.781.932	88,27
6.	APBD UPTD. RSUD Malingping	100.911.824.758,10	97.433.213.740	93,46	68.233.333.163	65.167.703.787	95,51	153.356.874.277	144.377.580.419	94,14
7.	BLUD UPTD. RSUD Malingping	21.324.898.296,90	16.804.346.112	68,65	30.056.271.327	19.914.585.831	66,26	67.360.720.118	61.315.132.967	91,03
Total		**771.763.199.639,00**	**660.980.567.091,00**	**85,65**	**981.150.361.000,00**	**857.752.537.840,38**	**87,42**	**1.356.234.184.648,00**	**1.295.388.440.231,39**	**95,51**

NO	KETERANGAN	2023			2024		
		ANGGARAN (RP.)	REALISASI (RP.)	(%)	ANGGARAN (RP.)	REALISASI (RP.)	(%)
1.	Dinas Kesehatan	696.674.928.962	693.969.801.498	99,61	621.015.756.713,00	614.224.861.716,00	98,91
2.	UPTD. Labkesda	2.538.671.600	2.424.295.294	95,49	3.336.634.184,00	3.171.142.353,00	95,04
3.	UPTD. Upelkes	7.048.448.102	7.004.639.419	99,38	13.420.004.139,00	13.376.983.794,00	99,68
4.	APBD UPTD RSU Banten	154.190.809.238	141.816.526.341	91,97	151.590.732.122,00	148.430.269.108,00	97,92
5.	BLUD UPTD RSU Banten	244.503.004.605	237.597.934.853	97,18	186.946.724.272,00	185.660.128.071,00	99,31
6.	APBD UPTD RSUD Malingping	89.491.451.069	87.424.798.195	97,69	97.398.192.935,00	97.103.134.541,00	99,69
7.	BLUD UPTD RSUD Malingping	49.307.409.394	49.218.279.022	99,82	59.487.028.205,00	59.449.208.976,00	99,94
Total		**1.243.754.722.970**	**1.219.456.274.622**	**98,05**	**1.133.195.072.570,00**	**1.121.415.728.559,00**	**98,96**

Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Banten Tahun 2024

2.2 PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DINAS KESEHATAN PROVINSI BANTEN

2.2.1 PERMASALAHAN

Permasalahan kesehatan di Provinsi Banten yaitu masih tingginya angka kematian ibu dan bayi. Berdasarkan Laporan Kinerja Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Tahun 2023, rata-rata Angka Kematian Ibu di Indonesia pada tahun 2023 yang diperoleh secara *Long Form* sensus penduduk adalah 189 per 100.000 kelahiran hidup. Provinsi Banten merupakan termasuk 4 (empat) besar Provinsi dengan AKI paling tinggi di Indonesia setelah Jawa Barat, Jawa Timur dan Jawa Tengah. Sedangkan untuk Angka Kematian Bayi, berdasarkan data MPDN (*Maternal Perinatal Death Notification*) Kemenkes RI Provinsi Banten masih termasuk dalam 5 (lima) besar Provinsi dengan Angka Kematian Bayi tertinggi di Indonesia setelah Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur. Meskipun menurut data yang dihimpun dari Kabupaten / Kota, tren Angka Kematian Ibu dan Bayi di Provinsi Banten cenderung menurun setiap tahunnya.

Berdasarkan data terbaru, Kabupaten Serang mencatat penurunan signifikan kematian ibu dari 34 kasus pada 2023 menjadi 21 kasus hingga Oktober 2024, dan kematian bayi turun dari 200 kasus menjadi 106 kasus dalam periode yang sama. Namun, di Kabupaten Lebak, angka kematian ibu justru meningkat dari 29 kasus menjadi 30 kasus.

Penyebab utama kematian ibu tetap didominasi oleh komplikasi seperti hipertensi dalam kehamilan dan perdarahan, sementara kematian bayi banyak terjadi pada periode neonatal, terutama akibat berat badan lahir rendah (BBLR) dan asfiksia. Kondisi ini disebabkan oleh cakupan layanan kesehatan ibu hamil, bersalin, dan bayi yang belum merata serta kualitas layanan yang masih perlu ditingkatkan. Upaya penguatan layanan kesehatan primer, pelatihan kader posyandu, dan peningkatan koordinasi lintas sektor menjadi langkah strategis yang harus diperkuat untuk menurunkan angka kematian dan mendorong peningkatan UHH dan IPM di Provinsi Banten.

Pada tahun 2024, prevalensi stunting di Provinsi Banten mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya. Menurut hasil pengukuran serentak pada Juni 2024, sebanyak 35.000 dari 824.000 balita di Banten teridentifikasi mengalami stunting, menunjukkan penurunan dari angka 24 persen pada tahun 2023. Namun, angka ini masih berada di atas rata-rata nasional yang tercatat sebesar 19,8 persen pada tahun yang sama.

Beberapa kabupaten/kota di Banten menunjukkan tren positif; misalnya, Kabupaten Serang berhasil menurunkan prevalensi stunting dari 26 persen menjadi 23 persen berdasarkan data e-PPGBM. Sementara itu, Kota Tangerang mencatat penurunan signifikan dari 17,6 persen pada 2023 menjadi 5,6 persen pada Oktober 2024, berkat program intervensi seperti Gerakan Serentak untuk Anak Tangerang Sehat dan Cerdas (Gertak Tangkas).

Meskipun demikian, tantangan masih ada, terutama dalam meningkatkan cakupan pemberian ASI eksklusif pada bayi usia kurang dari 6 bulan, yang sejak 2017 hingga 2020 cenderung berada di bawah rata-rata nasional. Faktor-faktor seperti pemenuhan gizi dan pemberian ASI eksklusif tetap menjadi fokus utama dalam upaya penurunan stunting di Provinsi Banten.

Selain itu Provinsi Banten juga masih menghadapi beberapa masalah penyakit menular, diantaranya angka notifikasi semua kasus tuberkulosis (TBC) cenderung mengalami peningkatan dari Tahun 2014-2021. TBC merupakan penyakit menular yang disebabkan oleh kuman Mycobacterium tuberculosis yang menyebar melalui udara, cakupan penemuan kasus TBC lebih tinggi dibandingkan angka secara nasional berdasarkan data profil kesehatan Indonesia Tahun 2021-2023. Tahun 2023, cakupan penemuan kasus TBC yang terjangkau oleh program secara nasional sebesar 77,5 persen, meningkat dari tahun sebelumnya sebesar 74,7 persen. Cakupan penemuan di Provinsi Banten sebesar 107 persen lebih tinggi secara nasional dan bersama DKI Jakarta menjadi tertinggi ketiga di Pulau Jawa-Bali setelah Provinsi Jawa Barat sebesar 116 persen dan Jawa Tengah sebesar 112 persen.

Pada tahun 2024, Provinsi Banten mencatatkan 45.644 kasus tuberkulosis (TBC) yang ditemukan, dengan cakupan penemuan kasus mencapai 112 persen dari estimasi 50.391 kasus. Angka ini jauh melebihi cakupan penemuan kasus TBC secara nasional yang hanya 77,5 persen pada tahun 2023. Capaian ini menjadikan Banten sebagai provinsi dengan penemuan kasus TBC tertinggi ketiga di Pulau Jawa-Bali, setelah Jawa Barat (116 persen) dan Jawa Tengah (112 persen). Meskipun ini menunjukkan keberhasilan deteksi kasus yang baik, tingginya angka penemuan juga mencerminkan tingginya beban TBC di masyarakat.

Hal ini menandakan perlunya upaya yang lebih intensif dalam pengobatan dan pencegahan untuk mengurangi penularan dan mencapai target eliminasi TBC pada 2030. Pada 2024, cakupan kepemilikan jaminan kesehatan di Provinsi Banten mencapai 96,73 persen, meningkat tajam dari 72,46 persen pada 2023. Meskipun demikian, disparitas antarwilayah masih terlihat, dengan Kabupaten Pandeglang dan Lebak mencatatkan persentase kepemilikan jaminan kesehatan yang lebih rendah dibandingkan daerah lain di provinsi tersebut.

Hal ini mengindikasikan perlunya upaya lebih lanjut untuk memastikan pemerataan akses jaminan kesehatan di seluruh wilayah Provinsi Banten. Peningkatan kualitas SDM juga menjadi fokus utama untuk diselesaikan dalam dokumen perencanaan jangka menengah ini, di Provinsi Banten masih menyisakan tantangan kompleks terhadap peningkatan pemerataan kualitas layanan SDM yang terletak pada masih tingginya kesenjangan akses dan mutu layanan antarwilayah, terutama antara kawasan maju Banten Utara dengan Banten Selatan.

Keterbatasan infrastruktur pendidikan dan kesehatan, rendahnya distribusi tenaga pengajar dan tenaga kesehatan yang berkualitas, serta

minimnya akses terhadap pelatihan kerja yang relevan menjadi faktor penghambat utama. Selain itu, belum optimalnya integrasi program lintas sektor dan rendahnya partisipasi masyarakat dalam pengembangan SDM turut memperkuat ketimpangan yang ada, sehingga upaya pemerataan memerlukan pendekatan yang menyeluruh, berbasis data, dan berkelanjutan Peningkatan pemerataan kualitas layanan SDM di Provinsi Banten menjadi prioritas strategis dalam upaya menciptakan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan, sehingga diharapkan dapat menciptakan SDM yang tidak hanya berdaya saing dan inovatif, tetapi juga menjunjung tinggi nilai sosial, budaya, gender dengan didukung oleh akses terhadap layanan pendidikan dan kesehatan yang adil dan berkualitas tanpa diskriminasi.

Untuk mewujudkan SDM yang berkualitas dan berdaya saing yaitu melalui meningkatkan intelektual dan karakter masyarakat, meningkatkan kualitas taraf kesehatan masyarakat, dan perlunya untuk meningkatkan pembangunan kualitas keluarga. Strategi dalam peningkatan pemerataan kualitas layanan SDM di Provinsi Banten difokuskan pada akses dan infrastruktur sarana dan prasarana pendidikan yang setara, pelatihan berbasis kompetensi yang adil, merata, dan terstandarisasi, peningkatan kualitas tenaga kerja, peningkatan kapasitas guru, pengembangan vokasi dan sertifikasi yang selaras dengan kebutuhan industri (link and match)serta adanya inovasi dan digitalisasi dalam penerapan pembelajaran untuk memperluas jangkauan pendidikan, termasuk bagi kelompok rentan.

Sementara itu strategi lainnya dalam peningkatan pemerataan kualitas layanan SDM disektor kesehatan berfokus kepada penguatan infrastruktur, peningkatan kompetensi tenaga medis, serta pemanfaatan teknologi informasi untuk dapat membantu terpetakannya kebutuhan serta pendistribusian sumber daya secara tepat sasaran. Mulai tahun 2016, Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals*/SDGs) tahun 2015-2030 secara resmi menggantikan, dan merupakan tahun transisi dari berakhirnya *Millennium Development Goals* (MDGs). SDGs, atau tujuan pembangunan berkelanjutan adalah kelanjutan dari program MDGs. Berbeda dengan MDGs yang hanya memiliki 8 tujuan, SDGs memiliki 17 tujuan pembangunan berkelanjutan dengan 169 target.

Oleh karena itu, SDGs memiliki cakupan yang lebih luas, dan diharapkan mampu lebih tanggap akan kebutuhan universal. Adapun tujuan SDGs mencakup 3 (tiga) dimensi dari pembangunan berkelanjutan, yaitu pertumbuhan ekonomi, inklusi sosial, serta perlindungan terhadap lingkungan. SDGs dibuat berdasarkan momentum keberhasilan MDGs.

Tujuan SDG's mencakup lebih banyak aspek kehidupan, dengan 5 (lima) poin yang menjadi pondasi dalam pelaksanaannya yaitu manusia, planet, kesejahteraan, perdamaian, dan kemitraan yang ingin mencapai tujuan tersebut di tahun 2030, maka disusunlah 17 tujuan global. Adapun terkait dengan penanganan bidang kesehatan sebagaimana diamanatkan

di dalam SDG's terdapat pada Tujuan ke 3 yaitu : Kesehatan yang Baik dan Kesejahteraan (*Good Health and Well-being*). Menjamin kehidupan yang sehat, serta mendorong kesejahteraan hidup bagi semua orang di segala usia. Berdasarkan tujuan tersebut, Provinsi Banten turut mempertimbangkan pelaksanaan SDGs dalam agenda pembangunan daerah. Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan terkait tujuan pembangunan berkelanjutan, yang mana Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh Kepala Daerah memiliki unsur sebagai penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

Rencana aksi (renaksi) SDGs Daerah merupakan prioritas daerah dalam melaksanakan SDGs sesuai dengan kebutuhan, dan keadaan, serta kondisi daerah. Kemudian, rencana aksi (renaksi) SDGs Daerah tersebut, harus menjadi rencana kerja pemerintah setiap tahun. Prioritas tersebut dapat dibagi ke dalam dua rencana besar, yaitu bagaimana fokus, dan sasaran khusus SDGs di daerah; dan bagaimana SDGs diarusutamakan ke dalam seluruh kebijakan, dan program Pemerintah Daerah. Konsistensi dalam perwujudan tujuan dari SDGs adalah menerapkan seluruh prinsip dari tujuan pembangunan berkelanjutan dalam setiap strategi pembangunan dokumen perencanaan di Provinsi Banten.

Provinsi Banten telah berkomitmen atas pelaksanaan kesepakatan global tersebut yang dituangkan dalam Peraturan Gubernur Banten Nomor 42 Tahun 2023 tentang Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Provinsi Banten Tahun 2024-2026. Berdasarkan dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Banten tahun 2025-2029 didapati bahwa analisis capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) Provinsi Banten ditentukan dengan melihat pada capaian masing-masing indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) di Provinsi Banten sesuai dengan kelompok kewenangan provinsi. Capaian tersebut secara umum disajikan dalam bentuk data selama 4 tahun terakhir, yaitu tahun 2020 sampai 2023. Berdasarkan data capaian tersebut selanjutnya dilakukan analisis apakah capaian dari masing-masing indikator pada tahun terakhir telah memenuhi target yang ditetapkan dalam RPJMN 2019, dengan mendasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

Dari proses Kajian Lingkungan Hidup (KLHS) yang telah dilakukan, menghasilkan Isu Strategis KLHS RPJMD Provinsi Banten Tahun 2025-2029 terkait dengan penanganan bidang kesehatan, adalah sebagai berikut:

1. Ancaman meningkatnya kerawanan pangan:
   Penyediaan pangan diprovinsi banten jika ditinjau pada tahun 2043 mendatang hanya kabupaten pandeglang yang belum terlampaui pada penyediaan pangan (beras). sementara pada penyediaan pangan (non-

beras) semua wilayah berada pada fase terlampaui. Sementara berdasarkan program pembangunan SDG's yang belum tercapai saat ini meliputi: prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah dua tahun/baduta, realisasi pencapaian 6,3 persen persentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapatkan asi ekslusif, realisasi pencapian 70,6 persen kualitas konsumsi pangan yang diindikasikan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH) dan, tingkat konsumsi ikan, realisasi pencapaian 83,99 persen, dan jumlah varietas unggul tanaman, realisasi pencapaian 14 vub. Untuk program yang perlu dicapai, meliputi: prevalensi stunting, 24,5 persen.

2. Kemiskinan Ekstrem:

   Kemiskinan di kawasan daerah tertinggal saat ini sangat berdampak pada D3TLH dan efesiensi pemanfaatan SDA, karena salah satunya penyebab kemiskinan dapat disebabkan oleh krisis penyediaan kebutuhan pangan dan air.

   Selain itu rendahnya dalam pemanfaatan sumber daya alam pada suatu wilayah sehingga kecilnya nilai perekonomianpada sektor potensial sebagaimana dalam upaya meningkatkan pendapatan per kapita dengan adanya efesiensi pemanfaatan sumber daya alam. Sementara terkait dengan program pembangunan SDG's yang belum tercapai saat ini meliputi : persentase penduduk yang 66,36 persen memiliki jaminan kesehatan, realisasi pencapaian, persentase penyandang disabilitas yang miskin, rentan yang terpenuhi hak dasarnya dan inklusivitas realisasi pencapaian 100 persen, rata-rata pertumbuhan ekonomi di daerah tertinggal, 5 persen, dan rata-rata persentase penduduk miskin di daerah tertinggal, 6,78/4,44 persen. untuk program pembangunan yang perlu dicapai meliputi : persentase rumah tangga yang berpendapatan rendah mengakses rumah layak huni (kelompok penduduk 40 persen terbawah), realisasi pencapaian 60,78 persen, dan prevalensi stunting, 24,5 persen.

Berdasarkan Surat Edaran dari Menteri Kesehatan RI nomor Pr.01.01 / A / 2952 / 2025 tanggal 17 Juli 2025 perihal Penyelarasan Indikator Kinerja Kesehatan RIBK 2025 – 2029 dalam RPJMD Renstra – Perangkat Daerah 2025 – 2029. Bahwa sebagai bentuk penyelarasan program kesehatan nasional dalam RIBK (Rencana Induk Bidang Kesehatan) 2025-2029 dengan program kesehatan di daerah, telah ditentukan indikator kinerja kesehatan yang perlu dicantumkan dalam dokumen RPJMD 2025 – 2029 dan Renstra Perangkat Daerah 2025 – 2029. Penyelarasan tersebut menunjukkan permasalahan kesehatan yang paling utama yang harus dijadikan indikator kinerja setiap Provinsi dan Kabupaten / Kota di Indonesia, seperti:

- ➔ Belum meratanya persentase Kabupaten/Kota dengan fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar;
- ➔ Sanitasi Total Berbasis Masyarakat Kabupaten / Kota belum seluruhnya sesuai dengan standar;

- ➔ Prevalensi Depresi pada usia ≥ 15 tahun cukup tinggi;
- ➔ Prevalensi Obesitas > 18 tahun masih cukup tinggi;
- ➔ Masih rendahnya tingkat kepuasan pasien terhadap layanan kesehatan;
- ➔ Masih rendahnya persentase Kabupaten/Kota yang memenuhi syarat kualitas kesehatan lingkungan;
- ➔ Persentase fasilitas kesehatan yang terintegrasi dalam sistem informasi kesehatan nasional masih cukup rendah;
- ➔ Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi paripurna masih rendah;
- ➔ Persentase fasilitas pelayanan kesehatan dengan perbekalan kesehatan yang belum sesuai standar;
- ➔ Masih rendahnya persentase lanjut usia yang mandiri;
- ➔ Masih tingginya persentase merokok penduduk berusia 10-21 tahun;
- ➔ Cakupan penemuan kasus TB yang masih rendah;
- ➔ Belum meratanya keberhasilan Kabupaten / Kota dengan eliminasi kusta yang sesuai standar;
- ➔ Belum meratanya Persentase Kabupaten/Kota yang memiliki Unit Pelayanan Kesehatan Tingkat Desa / Kelurahan yang sesuai standar;
- ➔ Rasio tenaga kesehatan dan tenaga medis terhadap populasi yang masih rendah;
- ➔ Persentase Puskesmas dengan SDMK yang belum sesuai dengan standar;
- ➔ Persentase RS Pemerintah dengan dokter spesialis yang belum sesuai standar;
- ➔ Proporsi kebutuhan KB yang terpenuhi menurut alat / cara KB modern (*proportion of demand satisfied by modern methods*) masih rendah;
- ➔ Angka kelahiran menurut usia tertentu / Age Spesific Fertility Rate (ASFR) 15 – 19 tahun masih cukup tinggi di beberapa wilayah;
- ➔ Masih rendahnya persentase KB pasca persalinan (KBPP);
- ➔ Persentase pedagang besar farmasi (PBF) cabang yang masih belum mampu memelihara persyaratan perizinan;
- ➔ Persentase rekomendasi hasil pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan dari lintas sektor belum sepenuhnya dilakukan tindak lanjut oleh Pemerintah Daerah.

Berdasarkan arahan isu strategis yang diperhatikan dalam pemetaan tema pembangunan prioritas Provinsi Banten dalam RPJMD 2025-2029. Isu penanganan bidang kesehatan sebagaimana diamanatkan di dalam RPJMD adalah Peningkatan pemerataan kualitas layanan Sumber Daya Manusia (SDM)

Peningkatan kualitas SDM juga menjadi fokus utama untuk diselesaikan dalam dokumen perencanaan jangka menengah ini, di Provinsi Banten masih menyisakan tantangan kompleks terhadap peningkatan pemerataan kualitas layanan SDM yang terletak pada masih

tingginya kesenjangan akses dan mutu layanan antarwilayah, terutama antara kawasan maju Banten Utara dengan Banten Selatan. Keterbatasan infrastruktur pendidikan dan kesehatan, rendahnya distribusi tenaga pengajar dan tenaga kesehatan yang berkualitas, serta minimnya akses terhadap pelatihan kerja yang relevan menjadi faktor penghambat utama. Selain itu, belum optimalnya integrasi program lintas sektor dan rendahnya partisipasi masyarakat dalam pengembangan SDM turut memperkuat ketimpangan yang ada, sehingga upaya pemerataan memerlukan pendekatan yang menyeluruh, berbasis data, dan berkelanjutan. Peningkatan pemerataan kualitas layanan SDM di Provinsi Banten menjadi prioritas strategis dalam upaya menciptakan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan, sehingga diharapkan dapat menciptakan SDM yang tidak hanya berdaya saing dan inovatif.

Tetapi hal ini juga menjunjung tinggi nilai sosial, budaya, gender dengan didukung oleh akses terhadap layanan pendidikan dan kesehatan yang adil dan berkualitas tanpa diskriminasi. Untuk mewujudkan SDM yang berkualitas dan berdaya saing yaitu melalui meningkatkan intelektual dan karakter masyarakat, meningkatkan kualitas taraf kesehatan masyarakat, dan perlunya untuk meningkatkan pembangunan kualitas keluarga. Strategi dalam peningkatan pemerataan kualitas layanan SDM di Provinsi Banten difokuskan pada akses dan infrastruktur sarana dan prasarana pendidikan yang setara, pelatihan berbasis kompetensi yang adil, merata, dan terstandarisasi, peningkatan kualitas tenaga kerja, peningkatan kapasitas guru, pengembangan vokasi dan sertifikasi yang selaras dengan kebutuhan industri (*link and match*) serta adanya inovasi dan digitalisasi dalam penerapan pembelajaran untuk memperluas jangkauan pendidikan, termasuk bagi kelompok rentan.

Sementara itu strategi lainnya dalam peningkatan pemerataan kualitas layanan SDM disektor kesehatan berfokus kepada penguatan infrastruktur, peningkatan kompetensi tenaga medis, serta pemanfaatan teknologi informasi untuk dapat membantu terpetakannya kebutuhan serta pendistribusian sumber daya secara tepat sasaran. Dengan berbagai strategi ini, SDM Banten diharapkan lebih kompetitif, inklusif, dan siap menghadapi dinamika ekonomi serta tantangan global.

Dari beberapa hal tersebut, terdapat beberapa hal yang menjadi perhatian bagi sektor kesehatan di Provinsi Banten, meliputi:

A. USIA HARAPAN HIDUP (UHH)

Usia harapan hidup adalah rata-rata kesempatan atau waktu yang diharapkan seseorang untuk hidup, yang dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti akses terhadap layanan kesehatan, gaya hidup maupun lingkungan. UHH di Indonesia pada Tahun 2024 berada pada kondisi 72,39 tahun, meningkat 0,30 persen yang sebanding dengan 0,22 tahun dibandingkan kondisi pada tahun sebelumnya. Sementara itu hal baik ditorehkan terhadap tren Usia Harapan Hidup di Banten (2019-2024) meningkat dari 69,84 tahun (2019) menjadi 71,02 tahun

(2024), laju kenaikan relatif lambat, hanya naik 1,18 tahun dalam 5 tahun. UHH Banten masih di bawah rata-rata nasional, yang mencapai 72,39 tahun pada 2024. Dibandingkan provinsi lain di Pulau Jawa, Banten memilik UHH terendah. Faktor pendorong kenaikan UHH di Banten mencakup:

- ➔ Perbaikan layanan kesehatan : peningkatan akses ke rumah sakit, puskesmas, dan fasilitas kesehatan;
- ➔ Kesadaran masyarakat akan pola hidup sehat : meningkatnya kesadaran konsumsi gizi seimbang dan olahraga;
- ➔ Program pemerintah : adanya program BPJS dan bantuan kesehatan bagi masyarakat kurang mampu;
- ➔ Penurunan angka kematian bayi dan ibu : indikator kesehatan ibu dan anak semakin membaik.

Faktor penghambat kenaikan UHH di Banten:

- ➔ Ketimpangan akses layanan kesehatan: wilayah pedesaan dan daerah terpencil masih kesulitan mengakses fasilitas kesehatan berkualitas;
- ➔ Kemiskinan dan gizi buruk: masih ada masyarakat dengan akses pangan terbatas, berpengaruh pada kesehatan jangka panjang;
- ➔ Polusi dan lingkungan: wilayah industri di Banten menghasilkan polusi udara dan air, berdampak pada kesehatan masyarakat;
- ➔ Pendidikan kesehatan rendah: kesadaran tentang kesehatan, pola makan, dan penyakit masih perlu ditingkatkan.

Perbandingan UHH Banten dengan provinsi Lain di Jawa, DI Yogyakarta memiliki UHH tertinggi (75,22 tahun pada 2024), DKI Jakarta dan Jawa Barat lebih tinggi daripada Banten karena fasilitas kesehatan lebih baik dan akses ekonomi lebih luas. Jawa Timur mengalami peningkatan signifikan, melampaui Banten dalam laju kenaikan UHH.

GAMBAR 2.12 PERBANDINGAN USIA HARAPAN HIDUP DI PROVINSI BANTEN DENGAN WILAYAH LAINNYA DI PULAU JAWA TAHUN 2020-2024

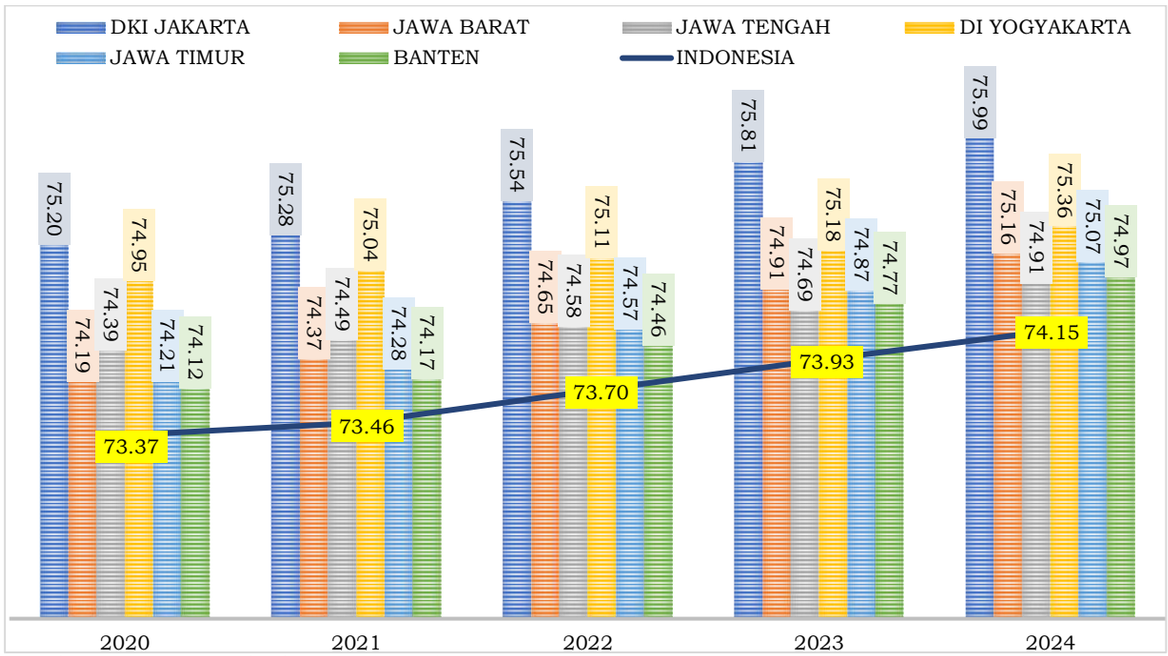

Sumber: RPJMD Provinsi Banten 2025-2029

Berdasarkan gambar diatas, Banten masih tertinggal dalam UHH dibandingkan provinsi lain di Jawa, kenaikan UHH relatif lambat, menunjukkan masih ada tantangan kesehatan dan sosial, sehingga diperlukan peningkatan akses kesehatan, edukasi, dan perbaikan lingkungan untuk meningkatkan umur harapan hidup di Banten.

B. PREVELANSI STUNTING

Pemerintah Provinsi Banten juga berkomitmen dalam percepatan penurunan stunting ditunjukkan dengan Prevalensi Stunting yang dijadikan indikator daerah dan merupakan tematik pembangunan, sehingga penurunan stunting menjadi fokus dan prioritas pembangunan di Provinsi Banten. Hal ini dapat dibuktikan dengan capaian penurunan Prevalensi Stunting Tahun 2024 yaitu 21,10 persen turun 2,90 persen dari Tahun 2021 (SSGI, 2025).

Secara umum, prevalensi stunting di Provinsi Banten menurun dari 24,50 persen pada Tahun 2021 menjadi 20,00 persen pada Tahun 2022, namun kembali meningkat menjadi 24,00 persen pada Tahun 2023 dan kembali menurun pada Tahun 2024 menjadi 21,10. Ini menunjukkan bahwa upaya penurunan Stunting di provinsi ini masih membutuhkan perhatian yang lebih intensif.

GAMBAR 2.13 PERBANDINGAN PREVELANSI STUNTING DI PROVINSI BANTEN DENGAN WILAYAH LAINNYA TAHUN 2020-2024

Sumber: RPJMD Provinsi Banten 2025-2029

Prevalensi stunting di Provinsi Banten mengalami kenaikan dari 20,00 persen pada Tahun 2022 menjadi 24,00 persen pada Tahun 2023 dan kembali menurun menjadi 21,10 di Tahun 2024. Kenaikan pada Tahun 2023 ini ini disebabkan oleh beberapa faktor utama:

1. Sanitasi yang buruk : praktik sanitasi yang tidak memadai, seperti penggunaan jamban yang tidak l, berkontribusi signifikan terhadap peningkatan angka stunting. Sanitasi yang buruk dapat menyebabkan balita rentan terhadap berbagai penyakit yang mempengaruhi status gizi mereka;
2. Anemia pada remaja putri : tingginya prevalensi anemia pada remaja putri dapat berdampak pada kesehatan mereka saat hamil di masa depan, yang kemudian meningkatkan risiko stunting pada anak yang dilahirkan;
3. Faktor lingkungan : akses terbatas terhadap air bersih dan sanitasi layak juga menjadi penyebab meningkatnya kasus stunting.
   Lingkungan yang tidak higienis meningkatkan risiko infeksi yang dapat menghambat pertumbuhan anak;
4. Asupan nutrisi yang tidak memadai: kurangnya keragaman dan kualitas asupan makanan pada anak dapat menyebabkan kekurangan gizi, yang merupakan penyebab langsung stunting.

Penurunan angka stunting yang berkelanjutan, diperlukan upaya kolaboratif dan strategi yang komprehensif dan terintegrasi serta komitmen yang kuat dari seluruh pemangku kepentingan di Provinsi Banten antara lain : pendekatan berbasis data, kolaborasi lintas sektor, dan pemberdayaan masyarakat menjadi faktor-faktor kunci dalam upaya ini, yang mencakup perbaikan sanitasi, peningkatan akses air bersih, edukasi gizi, penanganan anemia pada remaja putri,

digitalisasi administrasi pemerintahan penanganan stunting, dan pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal secara maksimal.

2.2.2 ISU STRATEGIS

Dinas Kesehatan merupakan unsur pelaksana yang memiliki fungsi perumusan kebijakan bidang kesehatan, pengkoordinasian perumusan rencana strategis dan kebijakan teknis bidang kesehatan, pelaksanaan dan koordinasi pembangunan kesehatan, pembinaan dan pengendalian pembangunan kesehatan.

Hal tersebut mengandung arti bahwa pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Kesehatan selain ada pelayanan yang dilaksanakan secara langsung kepada masyarakat, juga terdapat pelayanan yang tidak langsung dengan memberikan ”pelayanan” kepada unsur pimpinan, dan Lembaga lain sebagai bagian dari Perangkat Daerah di Provinsi Banten. Dibandingkan provinsi lain di Pulau Jawa, Banten memiliki UHH terendah. Faktor pendorong kenaikan UHH di Banten mencakup:

- ➔ Perbaikan layanan kesehatan: peningkatan akses ke rumah sakit, puskesmas, dan fasilitas kesehatan;
- ➔ Kesadaran masyarakat akan pola hidup sehat: meningkatnya kesadaran konsumsi gizi seimbang dan olahraga;
- ➔ Program pemerintah: adanya program BPJS dan bantuan kesehatan bagi masyarakat kurang mampu;
- ➔ Penurunan angka kematian bayi dan ibu: indikator kesehatan ibu dan anak semakin membaik.

Dengan berbagai strategi ini, SDM Banten diharapkan lebih kompetitif, inklusif, dan siap menghadapi dinamika ekonomi serta tantangan global. Isu permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan SPM Bidang Kesehatan apabila dirunut berdasarkan tantangan isu global dan isu strategis Provinsi Banten dapat dirumuskan sebagai berikut:

- ➔ Belum optimalnya kompetensi tenaga kesehatan;
- ➔ Masih adanya kesenjangan infrastruktur kesehatan antar kabupaten kota;
- ➔ Belum optimalnya keterlibatan masyarakat dalam pencapaian SPM kesehatan; dan
- ➔ Belum optimalnya monitoring dan evaluasi pelaksanaan SPM kesehatan.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut di atas, diperlukan peninjauan kembali konsep layanan dasar, peningkatan sosialisasi dan edukasi masyarakat terkait pentingnya kesehatan serta pemberlakuan reward dan punishment, pengalokasian anggaran harus menjadi skala prioritas serta peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya yang dimiliki serta peningkatan partisipasi kesadaran masyarakat dalam peningkatan kesehatan.

Gambaran tantangan dan peluang yang dihadapi dalam pembangunan kesehatan disusun berdasarkan hasil pencapaian kinerja program/kegiatan bidang kesehatan, kondisi lingkungan strategis, dan perkembangan baru lainnya yang terkait dengan sektor kesehatan. Tantangan dan peluang pembangunan kesehatan akan menjadi salah satu faktor yang menjadi pertimbangan dalam menentukan arah kebijakan dan strategi Dinas Kesehatan dan Jajaran. Tantangan merupakan analisa terkait unsur-unsur penting yang yang berpotensi dapat menjadi menghambat sekaligus memberikan perspektif kedepan bagi perangkat daerah dalam upaya pengembangan pelayanan yang berorientasi kedepan.

Analisa tantangan Dinas Kesehatan Provinsi Banten ditinjau dari 4 (empat) kategori utama yang merepresentasikan fokus utama dalam upaya peningkatan/pengembangan pelayanan kesehatan di masa yang akan datang dengan memperhatikan kapasitas lingkungan internal dan eksternal, kebijakan kesehatan, serta permasalahan kesehatan aktual. Peluang menjadi salah satu unsur penting yang perlu dianalisis dalam menentukan potensi-potensi yang dimiliki dalam mengatasi tantangan-tantangan sekaligus mendukung keberhasilan pembangunan kesehatan di Provinsi Banten.

Analisa peluang disusun dalam 4 (empat) kategori utama dengan mempertimbangkan aspek penerima manfaat atas pelayanan kesehatan, arah pengembangan pelayanan kesehatan, potensi penguatan sumber daya kesehatan, serta dukungan dan komitmen Pemerintah, lintas SKPD dan lintas sektor terkait sebagai daya ungkit tambahan dalam penguatan implementasi pelayanan kesehatan di Provinsi Banten.

Tantangan merupakan gambaran kondisi yang dapat dilihat berasal dari eksternal yang dapat menghambat pencapaian tujuan. Seiring dengan dinamika kehidupan berbangsa dan bernegara, bentuk tantangan dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Dukungan sektor lain terhadap bidang kesehatan masih belum optimal karena masih ada anggapan bahwa urusan kesehatan merupakan tanggung jawab Dinas Kesehatan saja. Jaringan kemitraan dengan berbagai pihak termasuk sektor pemerintah dan dunia usaha dalam penanganan masalah kesehatan sudah dilakukan namun belum optimal. Kemitraan berbagai unsur terkait termasuk stakeholder belum ditata secara baik sesuai peran, fungsi dan tanggung jawab masing-masing dalam pemberdayaan di bidang kesehatan;
2. Anggaran pembiayaan kesehatan, permasalahannya adalah alokasi yang masih belum optimal dan pembiayaan untuk upaya promotif dan preventif perlu terus ditingkatkan;
3. Kesadaran masyarakat terhadap jaminan pemeliharaan kesehatan belum tumbuh dengan baik, terlihat dari masih rendahnya kemandirian masyarakat untuk membiayai jaminan pemeliharaan kesehatannya (Peserta Mandiri JKNKIS/Non PBI). Selain kesadaran masyarakat, masalah utama dalam pemenuhan jaminan

pemeliharaan kesehatan masyarakat adalah pendataan/basis data masyarakat miskin yang belum terpadu sehingga menyulitkan dalam pendaftaran/pembiayaan masyarakat melalui Penerima Bantuan Iuran (PBI) JKN-KIS;

4. Pola Hidup yang tidak sehat dapat mengakibatkan berbagai macam penyakit, antara lain: sakit jantung, tekanan darah tinggi, kanker, stroke, diabetes, dan lainnya yang kesemuanya disebabkan oleh 3 faktor resiko utama, yaitu: merokok, kurang aktifitas fisik dan kurangnya makan makanan berserat. Sikap dan perilaku pada masyarakat khususnya populasi berisiko yang belum terbangunnya kesadaran untuk menolong dirinya sendiri dan bertanggungjawab pada anggota keluarga serta masyarakat dari resiko penularan IMS dan HIV;
5. Jumlah dan jenis tenaga kesehatan terus meningkat namun kebutuhan dan pemerataan distribusinya belum terpenuhi, masih terjadi disparitas jumlah dan distribusi tenaga kesehatan antar Kabupaten/Kota yang ada di wilayah Provinsi Banten;
6. Akses terhadap pelayanan kesehatan belum merata di setiap Kab/Kota, masih terbatasnya sarana pelayanan kesehatan dan tenaga kesehatan, keterbatasan akses juga disebabkan karena kondisi geografis yang sulit dan masih terbatasnya transportasi dan infrastruktur;
7. Sistem informasi kesehatan belum optimal menyebabkan kualitas data yang dimiliki masih rendah. Hal ini dapat menyebabkan permasalahan dalam penyusunan program dan kebijakan.

Peluang menjadi salah satu unsur penting yang perlu dianalisis dalam menentukan potensi-potensi yang dimiliki dalam mengatasi tantangan-tantangan sekaligus mendukung keberhasilan pembangunan kesehatan di Provinsi Banten. Analisa peluang disusun dengan mempertimbangkan aspek penerima manfaat atas pelayanan kesehatan, arah pengembangan pelayanan kesehatan, potensi penguatan sumber daya kesehatan, serta dukungan dan komitmen Pemerintah, lintas SKPD dan lintas sektor terkait sebagai daya ungkit tambahan dalam penguatan implementasi pelayanan kesehatan di Provinsi Banten.

Peluang merupakan kondisi eksternal yang mendukung dan dapat dimanfaatkan dalam pelaksanaan tugas pada Dinas Kesehatan Provinsi Banten. Adapun peluang yang dapat diidentifikasikan adalah sebagai berikut:

1. Penataan Kelembagaan perangkat Daerah seiring dengan diubahnya peraturan pemerintah tentang organisasi perangkat daerah, sesuai kebutuhan, potensi, karakeristik, dan kemampuan baik anggaran maupun sumber daya aparatur (mengacu pada UU Nmor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah);

2. Pertumbuhan Ekonomi dan IPM yang semakin meningkat;
3. Terdapat berbagai sumber alokasi anggaran dalam pelaksanaan pembangunan kesehatan (APBN – Dana Dekonsentrasi, APBD, Bantuan Keuangan, bagi hasil cukai tembakau);
4. Meningkatnya dukungan dari pihak-pihak yang berkomitmen terhadap pembangunan kesehatan dari stakeholder.

Akses layanan kesehatan yang berkualitas masih menjadi tantangan, terutama di daerah terpencil. Upaya peningkatan akses dan kualitas layanan harus terus dilakukan melalui pengembangan puskesmas rawat inap serta pembangunan pusat kesehatan desa untuk menjangkau masyarakat terisolasi. Optimalisasi tenaga medis, fasilitas, dan program kesehatan menjadi prioritas dalam mewujudkan Banten Sehat. Selain itu, modernisasi sistem pelayanan publik diperlukan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas, sehingga masyarakat dapat memperoleh layanan kesehatan yang lebih cepat, mudah, dan merata.

TABEL 2.15 MATRIKS SWOT PENGEMBANGAN KESEHATAN PROVINSI BANTEN

KEKUATAN	**PELUANG**
Pelaksanaan program kegiatan yang disusun sudah sesuai dengan target kinerja yang akan dicapai	Tersedianya regulasi yang mendukung pencapaian tujuan pembangunan bidang kesehatan provinsi
Upaya pemenuhan jumlah tenaga kesehatan di Kabupaten/Kota dilaksanakan melalui program perekrutan tenaga kesehatan khusus untuk ditempatkan di wilayah Kabupaten / Kota (Puskesmas) yang masih mengalami kekurangan sumber daya	Dukungan untuk melanjutkan program perekrutan tenaga kesehatan khusus
Pembangunan RSJKO diharapkan dapat meningkatkan pemenuhan akses dan mutu pelayanan kesehatan jiwa yang tanpa diskriminasi	Adanya komitmen yang kuat dari unsur pimpinan daerah dalam pembangunan kesehatan
	Peningkatan kualitas layanan melalui implementasi transformasi layanan kesehatan dan penguatan sistem kesehatan provinsi
KELEMAHAN	**HAMBATAN**
Kualitas dan jumlah SDM kesehatan masih rendah dan belum terdistribusi secara merata	Dukungan sektor lain yang belum optimal di dalam mendukung program kesehatan sehingga urusan kesehatan terkesan hanya menjadi tanggungjawab dari DInas Kesehatan
Akses serta mutu pelayanan sarana dan prasarana kesehatan di	Kerjasama lintas sektor dalam penyediaan akses

KEKUATAN	PELUANG
wilayah Provinsi Banten yang belum merata dan menyeluruh	
Keakuratan tehadap data kesehatan masih relatif kurang	Masih belum optimalnya dukungan sarana prasarana, anggaran dan SDM dalam pengelolaan data
Masih kurangnya deteksi dini terhadap penyakit oleh masyarakat, serta masih kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya jaminan kesehatan secara mandiri semisal BPJS	

Sumber Data: Hasil Analisis Dinkes, 2025

TABEL 2.16 RUMUSAN ISU STRATEGIS DINAS KESEHATAN PROVINSI BANTEN TAHUN 2025-2029

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN	PERMASALAHAN BIDANG KESEHATAN	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN BIDANG KESEHATAN	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN DINAS KESEHATAN			ISU STRATEGIS DINAS KESEHATAN PROVINSI BANTEN 2025-2029
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
Peningkatan kualitas sumber daya manusia dengan pencapaian pada bidang kesehatan dan pendidikan. Pencapaian pada bidang kesehatan diantaranya: ➔ Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional; ➔ Penurunan stunting dan	➔ Rendahnya Umur Harapan Hidup; ➔ Kematian ibu tetap didominasi oleh komplikasi seperti hipertensi dalam kehamilan dan perdarahan; ➔ Prevalensi stunting; ➔ Kasus tuberkulosis (TBC) cenderung mengalami peningkatan;	➔ Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah dua tahun/baduta; ➔ Realisasi pencapaian 6,3 persen persentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapatkan asi ekslusif;	➔ Menjamin kehidupan yang sehat, serta mendorong kesejahteraan hidup bagi semua orang di segala usia	➔ Angka kematian ibu masih tinggi (189/100.000); ➔ Stunting masih tinggi (21,50%); ➔ Prevelansi obesitas terus meningkat (23,4%); ➔ Wasting masih tinggi (8,5%); ➔ Kasus baru tuberkolosis peringkat ke-2 dunia (387 per 100.000 penduduk);	➔ Ancaman meningkatnya kerawanan pangan; ➔ Kemiskinan Ekstrem.	➔ Cakupan penemuan kasus tuberkolosis; ➔ Cakupan 9 layanan intervensi dalam penurunan stunting; ➔ Angka kematian ibu (per 100.000 kelahiran hidup); ➔ Sistem rujukan berbasis kompetensi

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN	PERMASALAHAN BIDANG KESEHATAN	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN BIDANG KESEHATAN	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN DINAS KESEHATAN			ISU STRATEGIS DINAS KESEHATAN PROVINSI BANTEN 2025-2029
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
wasting pada balita; ➔ Pemenuhan imunisasi dasar lengkap pada anak usia 12-23 bulan; ➔ Peningkatan kualitas Rumah Sakit dan kuantitas tenaga kesehatan; ➔ Peningkatan kapasitas obat dan makanan memenuhi syarat.	➔ Keterbatasan infrastruktur pendidikan dan kesehatan; ➔ Rendahnya distribusi tenaga pengajar dan tenaga kesehatan yang berkualitas, serta minimnya akses terhadap pelatihan kerja yang relevan.	➔ Realisasi pencapian 70,6 persen kualitas konsumsi pangan yang diindikasikan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH) dan, tingkat konsumsi ikan, realisasi pencapaian 83,99 persen		➔ Kasus baru kusta peringkat ke-3 dunia (10.976 kasus baru)		yang berklasifikasi utama.

Sumber Data: Hasil Analisis Dinkes, 2025

BAB III
TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 TUJUAN PERANGKAT DAERAH

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan Misi, yaitu sesuatu (apa) yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu periode tertentu. Dari penjabaran visi dan misi tersebut dirumuskan tujuan pembangunan Provinsi Banten sebagai rankaian kinerja yang menggambarkan tercapaianya visi Gubernur dan Wakil Gubernur Banten selama 5 (lima) tahun mendatang yang didasarkan pada analisis isu strategis, adapun tujuan pembangunan daerah dalam RPJMD Tahun 2025-2029 mencakup :

Misi 3 : Mewujudkan sumber daya manusia yang berintegritas, berdaya saing, berkualitas, inovatif, dan tidak diskriminatif.

- ➔ Pada misi ke-3 ini memiliki tujuan berupa terwujudnya sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing;
- ➔ Renstra Dinas Kesehatan : Meningkatnya Kualitas Taraf Kesehatan Masyarakat;
- ➔ Indikator Kinerja : Usia Harapan Hidup (Satuan : Nilai);
- ➔ Indikator Kinerja : Prevelansi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek Pada Balita (Satuan : persen).

Dinas Kesehatan mengemban Misi 3 yaitu Mewujudkan sumber daya manusia yang berintegritas, berdaya saing, berkualitas, inovatif, dan tidak diskriminatif dengan arah kebijakan, antara lain :

j. Optimalisasi pembiayaan dan mutu layanan kesehatan;
k. Peningkatan akses dan manajeman terpadu terhadap pelayanan kesehatan;
l. Pemenuhan standar akreditasi fasilitas kesehatan ditunjang dengan sarana dan prasarana kesehatan yang memadai serta pemenuhan kebutuhan sumber daya kesehatan; dan
m. Pengembangan *center of excellence* sektor kesehatan dan keolahragaan.

Adapun tujuan Rencana Strategis Dinas Kesehatan Provinsi Banten 2025-2029 dirumuskan berdasarkan arah tujuan pengembangan Provinsi Banten 2025-2029 yang termuat di dalam dokumen RPJMD Provinsi Banten 2025-2029, sebagai berikut :

TABEL 3.1 TUJUAN DAN INDIKATOR PEMERINTAH DAERAH DAN TUJUAN RENCANA STRATEGIS DINAS KESEHATAN PROVINSI BANTEN TAHUN 2025-2029

TUJUAN RPJMD PROVINSI BANTEN	INDIKATOR KINERJA	TUJUAN RENSTRA DINAS KESEHATAN
T.3 Terwujudnya sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	Usia Harapan Hidup (Nilai)	Meningkatnya Kualitas Taraf Kesehatan Masyarakat
	Prevelensi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek) Pada Balita (Persen)	

Sumber : Hasil Analisis Dinkes, 2025

3.2 SASARAN PERANGKAT DAERAH

Sasaran merupakan penjabaran dari Tujuan RENSTRA Perangkat Daerah Dinas Kesehatan Provinsi Banten : yaitu hasil yang akan dicapai secara nyata dalam rumusan yang lebih spesifik, terinci, dapat diukur dan dapat dicapai, serta dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran yang akan dicapai oleh Dinas Kesehatan Provinsi Banten tahun 2025-2029 berdasarkan rumusan Misi dan Tujuan sebagaimana tersebut diatas adalah sebagai berikut, yaitu :

Misi 3 : Mewujudkan sumber daya manusia yang berintegritas, berdaya saing, berkualitas, inovatif, dan tidak diskriminatif. Pada Misi ke-3 ini memiliki tujuan berupa "*Terwujudnya sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing*" di dalam dokumen RPJMD memiliki sasaran strategis di dalam Renstra Dinas Kesehatan, yaitu :

- ➔ RENSTRA : Menurunnya Angka Kematian Ibu
  Indikator Kinerja : Angka Kematian Ibu (per 100.000 Kelahiran Hidup) (Satuan : Persen);
- ➔ RENSTRA : Meningkatnya Cakupan 9 Layanan Intervensi Stunting;
  Indikator Kinerja : Persentase Layanan Cakupan 9 Layanan Intervensi dalam Penurunan Stunting (Satuan : Persen);
- ➔ RENSTRA : Meningkatnya Kasus Penemuan Tuberkulosis
  Indikator Kinerja : Cakupan Penemuan Kasus Tuberkulosis (*Treatment Coverage*) (Satuan : Persen);
- ➔ RENSTRA : Meningkatnya 4 (empat) Layanan Unggulan Kesehatan dengan Sistem Rujukan Berbasis Kompetensi pada Rumah Sakit Rujukan Regional;
  Indikator Kinerja : Persentase 4 Layanan Unggulan Kesehatan dengan Sistem Rujukan Berbasis Kompetensi yang Berklasifikasi Utama.

3.3 STRATEGI PERANGKAT DAERAH

Strategi adalah suatu rencana tindakan yang komprehensif dan sistematis berisikan upaya yang akan dilakukan untuk dapat mencapai tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2025-2029, salah satu isu yang

dipertimbangkan yaitu isu wilayah Jawa yang di dalamnya termasuk Provinsi Banten diarahkan untuk mendukung wilayah Jawa sebagai "Megalopolis yang Unggul, Inovatif dan Inklusif, Terintegrasi dan Berkelanjutan", beberapa isu terkait dengan pengembangan kesehatan, adalah sebagai berikut :

1. Prevalensi stunting, wasting, dan underweight masih relatif tinggi, rata-rata Wilayah Jawa mencapai 20 persen (2023); dan
2. Beban khusus TBC tinggi ada pada wilayah padat penduduk.

Strategi merupakan suatu bentuk konkrit dari usaha pelaksanaan perencanaan pembangunan yang memberikan arahan dan panduan kepada pemerintah daerah dan perangkat daerah agar lebih optimal dalam menentukan dan mencapai tujuan. Strategi dan arah kebijakan urusan kesehatan yang tertuang dalam RPJMD Provinsi Banten menjadi dasar untuk penetapan pernyataan strategi dan arah kebijakan yang lebih khusus agar dapat menjawab semua permasalahan dan isu-isu strategis terkait urusan kesehatan di Provinsi Banten. Keduanya dijabarkan menjadi strategi khusus dan arah kebijakan khusus Dinas Kesehatan Provinsi Banten dalam perencanaan program dan kegiatan Tahun 2025-2029.

Strategi adalah suatu rencana tindakan yang komprehensif dan sistematis berisikan upaya yang akan dilakukan untuk dapat mencapai tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, sementara itu arah kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dalam mengantisipasi isu strategis daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi.

Pelaksanaan pembangunan periode Tahun 2025-2029 merupakan tahap pembangunan. Penguatan modal dasar ini diwujudkan melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan dan kesehatan, pengembangan pusat-pusat perekonomian baru serta penguatan riset dan inovasi, peningkatan kapasitas daerah dalam mengelola konservasi lingkungan, sumber daya alam, dan kebencanaan, pengembangan sinergi dan akuntabilitas pemerintahan, dan peningkatan fungsi pusat-pusat pelayanan melalui pemenuhan sarana, prasarana, dan utilitas umum.

Pencapaian kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Banten turut didukung oleh peran Organisasi lain baik Organisasi Perangkat Daerah di Pemerintahan Provinsi Banten seperti : Dinas Sosial, Dinas Ketahanan Pangan, BPBD Provinsi Banten, DPMPTSP, Dinas Pertanian, Dinas PUPR, Dinas PRKP, Dinas LHK, DP3AKKB, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Disperindag, maupun organisasi lain diluar Pemerintahan Provinsi Banten seperti : BPJS Kesehatan, BKKBN, Kementerian Agama, Kementerian Kesehatan, Balai Besar POM di Serang, Biddokkes Polda Banten. Arah kebijakan merupakan pelaksanaan dari strategi pembangunan daerah yang difokuskan pada prioritas-prioritas pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan.

TABEL 3.2 ISU STRATEGIS, TUJUAN DAN SASARAN DINAS KESEHATAN TAHUN 2025-2029

ISU STRATEGIS PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN PD	SASARAN PD	INDIKATOR	TARGET TAHUN					
					2025	2026	2027	2028	2029	2030
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k
Peningkatan Pemerataan Kualitas Layanan SDM	UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan Meningkatnya Kualitas taraf Kesehatan Masyarakat	Meningkatnya Kualitas Taraf Kesehatan Masyarakat		Usia Harapan Hidup	75,20	75,47	75,73	76,30	76,77	77,07
			Menurunnya Angka Kematian Ibu	Angka Kematian Ibu (per 100.000 Kelahiran Hidup)	101	98	96	85	64	64
			Meningkatnya Penemuan Kasus Tuberkulosis	Cakupan Penemuan Kasus Tuberkulosis (*treatment coverage* - %)	95	95	95	95	95	95
			Meningkatnya 4 (empat) Layanan Unggulan Kesehatan	Persentase 4 (empat) Layanan Unggulan Kesehatan dengan Sistem	25	25	50	50	75	75

			dengan Sistem Rujukan Berbasis Kompetensi pada RS Rujukan Regional Provinsi	Rujukan Berbasis Kompetensi yang Berklasifikasi Utama						
		Meningkatnya Kualitas Taraf Kesehatan Masyarakat		Prevalensi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek) Pada Balita (Persen)	20,30	19,50	18,40	17,50	16,70	16,10
			Meningkatnya Cakupan 9 Layanan Intervensi Stunting	Persentase Cakupan 9 Layanan Intervensi dalam Penurunan Stunting	62	66	70	74	77	77

Sumber : Hasil Analisis Dinkes, 2025

TABEL 3.3 PENAHAPAN PEMBANGUNAN DINAS KESEHATAN TAHUN 2025-2029

SASARAN PERANGKAT DAERAH	TAHAP I (2026) PENGUATAN FONDASI PEMERATAAN KESEJAHTERAAN MELALUI PENDIDIKAN INKLUSIF DAN INFRASTRUKTUR DASAR BERKELANJUTAN	TAHAP II (2027) PENINGKATAN DAYA SAING SUMBER DAYA MANUSIA BERINTEGRITAS DAN INTEGRASI EKONOMI DOMESTIK DAN GLOBAL	TAHAP III (2028) PENGUATAN KOLABORASI MENUJU DAYA SAING PEREKONOMIAN	TAHAP IV (2029) PERCEPATAN PEMBANGUNAN MENUJU EKONOMI BERBASIS INOVASI	TAHAP V (2030) PENCAPAIAN FONDASI KUAT PEMERATAAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT
Menurunnya Angka Kematian Ibu	➔ Peningkatan Derajat Dan Akses Kesehatan Melalui Penyediaan Sarana prasarana Kesehatan Primer Dan Rujukan, Pemerataan Tenaga Kesehatan, Dan	➔ Peningkatan Kualitas Layanan Kesehatan (Promotif, Preventif, Rehabilitatif Dan Kuratif); ➔ Pemenuhan Standar Kompetensi Tenaga Kesehatan;	➔ Peningkatan Program Kesehatan, Peningkatan Infrastruktur Pada Wilayah Terluar Dan Terpencil; ➔ Pengembangan dan Peningkatanan Kapasitas Tenaga Kesehatan;	➔ Penguatan Kerjasama Multi Sektor Dalam Pengembangan Center Of Excellence Sektor Kesehatan Dan Pengembangan Konsep Hospital Tourism/Medica l Tourism; ➔ Peningkatan Kapasitasn dan Penempatan	➔ Pemantapan Kualitas Hidup Dan Kesehatan Masyarakat Secara Inklusif Ditunjang Dengan Pelayanan Dan Program Kesehatan Yang Komprehensiff Secara Adil, Merata, Dan

SASARAN PERANGKAT DAERAH	TAHAP I (2026) PENGUATAN FONDASI PEMERATAAN KESEJAHTERAAN MELALUI PENDIDIKAN INKLUSIF DAN INFRASTRUKTUR DASAR BERKELANJUTAN	TAHAP II (2027) PENINGKATAN DAYA SAING SUMBER DAYA MANUSIA BERINTEGRITAS DAN INTEGRASI EKONOMI DOMESTIK DAN GLOBAL	TAHAP III (2028) PENGUATAN KOLABORASI MENUJU DAYA SAING PEREKONOMIAN	TAHAP IV (2029) PERCEPATAN PEMBANGUNAN MENUJU EKONOMI BERBASIS INOVASI	TAHAP V (2030) PENCAPAIAN FONDASI KUAT PEMERATAAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT
	Optimalisasi Program Kesehatan Secara Komprehensif (Cek Kesehatan Gratis Dan Program Lainnya); ➔ Identifikasi Tenaga Kesehatan			Tenaga Kesehatan	Berkelas Dunia
Meningkatnya Penemuan Kasus Tuberkulosis	➔ Pencegahan Penyakit Menular Dan Tidak Menular	➔ Penuntasan Eliminasi Penyakit Prioritas,	➔ Peningkatan Program Kesehatan, Peningkatan	➔ Penguatan Kerjasama Multi Sektor Dalam Pengembangan	➔ Pemantapan Kualitas Hidup Dan Kesehatan

SASARAN PERANGKAT DAERAH	TAHAP I (2026) PENGUATAN FONDASI PEMERATAAN KESEJAHTERAAN MELALUI PENDIDIKAN INKLUSIF DAN INFRASTRUKTUR DASAR BERKELANJUTAN	TAHAP II (2027) PENINGKATAN DAYA SAING SUMBER DAYA MANUSIA BERINTEGRITAS DAN INTEGRASI EKONOMI DOMESTIK DAN GLOBAL	TAHAP III (2028) PENGUATAN KOLABORASI MENUJU DAYA SAING PEREKONOMIAN	TAHAP IV (2029) PERCEPATAN PEMBANGUNAN MENUJU EKONOMI BERBASIS INOVASI	TAHAP V (2030) PENCAPAIAN FONDASI KUAT PEMERATAAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT
	(Stunting, TBC, Malaria, dsb)	Menular Dan Tropis Terabaikan	Infrastruktur Pada Wilayah Terluar Dan Terpencil	Center Of Excellence Sektor Kesehatan Dan Pengembangan Konsep Hospital Tourism/Medical Tourism	Masyarakat Secara Inklusif Ditunjang Dengan Pelayanan Dan Program Kesehatan Yang Komprehensiff Secara Adil, Merata, Dan Berkelas Dunia
Meningkatnya Cakupan 9 Layanan Stuntung	➔ Pelayanan Bagi Ibu Dan Anak Di Provinsi Banten	➔ Peningkatan Fasilitas Kesehatan Dimulai Dari	➔ Peningkatan Program Kesehatan, Peningkatan	➔ Penguatan Kerjasama Multi Sektor Dalam Pengembangan	➔ Pemantapan Kualitas Hidup Dan Kesehatan

SASARAN PERANGKAT DAERAH	TAHAP I (2026) PENGUATAN FONDASI PEMERATAAN KESEJAHTERAAN MELALUI PENDIDIKAN INKLUSIF DAN INFRASTRUKTUR DASAR BERKELANJUTAN	TAHAP II (2027) PENINGKATAN DAYA SAING SUMBER DAYA MANUSIA BERINTEGRITAS DAN INTEGRASI EKONOMI DOMESTIK DAN GLOBAL	TAHAP III (2028) PENGUATAN KOLABORASI MENUJU DAYA SAING PEREKONOMIAN	TAHAP IV (2029) PERCEPATAN PEMBANGUNAN MENUJU EKONOMI BERBASIS INOVASI	TAHAP V (2030) PENCAPAIAN FONDASI KUAT PEMERATAAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT
	Khususnya Pada Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR); ➔ Pemenuhan Fasilitas Kesehatan yang Melaksanakan Pelayanan Prioritas KJSU – KIA;	Tingkat Pertama Dalam Deteksi Dini Penyakit; ➔ Pemantauan Tumbuh Kembang Anak Secara Berkala	Infrastruktur Pada Wilayah Terluar Dan Terpencil	Center Of Excellence Sektor Kesehatan Dan Pengembangan Konsep Hospital Tourism/Medical Tourism	Masyarakat Secara Inklusif Ditunjang Dengan Pelayanan Dan Program Kesehatan Yang Komprehensiff Secara Adil, Merata, Dan Berkelas Dunia
Meningkatnya 4 (empat) Layanan	➔ Peningkatan Derajat Dan Akses	➔ Peningkatan dan Pengembanga	➔ Penguatan Inovasi, Peningkatan	➔ Penguatan Kerjasama Multi Sektor Dalam	➔ Pemantapan Kualitas Hidup Dan

SASARAN PERANGKAT DAERAH	TAHAP I (2026) PENGUATAN FONDASI PEMERATAAN KESEJAHTERAAN MELALUI PENDIDIKAN INKLUSIF DAN INFRASTRUKTUR DASAR BERKELANJUTAN	TAHAP II (2027) PENINGKATAN DAYA SAING SUMBER DAYA MANUSIA BERINTEGRITAS DAN INTEGRASI EKONOMI DOMESTIK DAN GLOBAL	TAHAP III (2028) PENGUATAN KOLABORASI MENUJU DAYA SAING PEREKONOMIAN	TAHAP IV (2029) PERCEPATAN PEMBANGUNAN MENUJU EKONOMI BERBASIS INOVASI	TAHAP V (2030) PENCAPAIAN FONDASI KUAT PEMERATAAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT
Unggulan Kesehatan dengan Sistem Rujukan Berbasis Kompetensi pada RS Rujukan Regional Provinsi	Kesehatan Melalui Penyediaan Sarana prasarana Kesehatan Primer Dan Rujukan, Pemerataan Tenaga Kesehatan, Dan Optimalisasi Program Kesehatan Secara Komprehensif	n Fasilitas Kesehatan dengan Peralatanan yang Modern; ➔ Optimalisasi Layanan Rumah Sakit; ➔ Pengembangan Sistem Digitalisasi Kesehatan;	Akses Dan Pelayanan Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan Dalam Menangani Kasus Kompleks Dan Spesialisasi (Gigi Dan Mulut, Kesehatan Mental, Multi-Penyakit Pada Lanjut Usia,	Pengembangan Center Of Excellence Sektor Kesehatan Dan Pengembangan Konsep Hospital Tourism/Medical Tourism; ➔ Pengembangan Sistem Digitalisasi Kesehatan;	Kesehatan Masyarakat Secara Inklusif Ditunjang Dengan Pelayanan Dan Program Kesehatan Yang Komprehensiff Secara Adil, Merata, Dan Berkelas Dunia; ➔ Pengembangan Sistem

SASARAN PERANGKAT DAERAH	TAHAP I (2026) PENGUATAN FONDASI PEMERATAAN KESEJAHTERAAN MELALUI PENDIDIKAN INKLUSIF DAN INFRASTRUKTUR DASAR BERKELANJUTAN	TAHAP II (2027) PENINGKATAN DAYA SAING SUMBER DAYA MANUSIA BERINTEGRITAS DAN INTEGRASI EKONOMI DOMESTIK DAN GLOBAL	TAHAP III (2028) PENGUATAN KOLABORASI MENUJU DAYA SAING PEREKONOMIAN	TAHAP IV (2029) PERCEPATAN PEMBANGUNAN MENUJU EKONOMI BERBASIS INOVASI	TAHAP V (2030) PENCAPAIAN FONDASI KUAT PEMERATAAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT
	(Cek Kesehatan Gratis Dan Program Lainnya); ➔ Pemerataan Pelayanan Fasilitas Kesehatan di UPTD Labkesmas, UPTD RSUD		Ketergantungan Obat, dsb); ➔ Pengembangan Sistem Digitalisasi Kesehatan;		Digitalisasi Kesehatan.

Sumber : Hasil Analisis Dinkes, 2025

3.4 ARAH KEBIJAKAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025 - 2029

Arah kebijakan merupakan kerangka pikir rangkaian kerja sebagai penjabaran misi yang selaras dengan strategi dalam rangka menyelesaikan permasalahan pembangunan melalui pencapaian target tujuan dan sasaran. Adapun arah kebijakan Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Banten Tahun 2025-2029 sejalan dengan arah kebijakan di dalam RPJMD Provinsi Banten Tahun 2025-2029, antara lain sebagai berikut :

TABEL 3.4 ARAH KEBIJAKAN RENSTRA DINAS KESEHATAN PROVINSI BANTEN TAHUN 2025-2029

OPERASIONALISASI NSPK/SASARAN PERANGKAT DAERAH	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH	KET
Menurunnya Angka Kematian Ibu	➔ Optimalisasi Pembiayaan dan Mutu Layanan Kesehatan; ➔ Peningkatan Akses Dan Manajeman Terpadu Terhadap Pelayanan Kesehatan; ➔ Pemenuhan Standar Akreditasi Fasilitas Kesehatan Ditunjang Dengan Sarana dan Prasarana Kesehatan Yang Memadai Serta Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Kesehatan; dan ➔ Pengembangan *Center Of Excellence* Sektor Kesehatan Dan Keolahragaan	➔ Meningkatkan upaya kesehatan bersumber daya masyarakat guna memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan dasar; ➔ Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan ibu hamil, persalinan dan pasca persalinan serta meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya kesehatan reproduksi; ➔ Memperkuat serta memperluas basis pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak dalam skema Jaminan Kesehatan Nasional.	
Meningkatnya Penemuan Kasus Tuberkulosis		➔ Meningkatkan upaya keberhasilan pengobatan tuberkulosis yang diperkuat dengan keterlibatan lintas sektor serta terjalinnya kemitraan; ➔ Mengendalikan peningkatan kasus Tuberkulosisi melalui intensifikasi,	

OPERASIONALISASI NSPK/SASARAN PERANGKAT DAERAH	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH	KET
		akselerasi, ekstensifikasi dan inovasi program Tuberkulosis; ➔ Meningkatkan orang terduga Tuberkulosis yang mendapatkan fasilitas kesehatan; ➔ Mengendalikan penularan penyakit melalui optimalisasi surveilance penyakit dan pemberian pengebalan individu.	
Meningkatnya Cakupan Layanan Intervensi Stunting		➔ Memperkuat dan mempercepat cakupan intervensi stunting dalam lingkup kesehatan; ➔ Memberikan pelayanan kesehatan dan gizi masyarakat pada kelompok beresiko; ➔ Meningkatkan kerjasama antar sektor Pemerintah dalam rangka pelayanan kesehatan guna percepatan penurunan stunting secara terintegerasi.	
Meningkatnya 4 (empat) Layanan Unggulan Kesehatan dengan Sistem		➔ Meningkatkan akses, kualitas dan pemerataan pelayanan kesehatan masyarakat dengan mendorong	

OPERASIONALISASI NSPK/SASARAN PERANGKAT DAERAH	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH	KET
Rujukan Berbasis Kompetensi pada RS Rujukan Regional Provinsi		penguatan puskesmas sebagai garda terdepan pelayanan kesehatan; ➔ Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan melalui peningkatan kompetensi SDM kesehatan, penyediaan farmasi yang cukup serta peningkatan sarana prasarana pelayanan yang memadai; ➔ Meningkatkan inovasi dalam rangka memenuhi pelayanan kesehatan masyarakat; ➔ Meningkatkan kemitraan dengan stakeholder dalam mengembangkan upaya kesehatan masyarakat.	

Sumber : Hasil Analisis Dinkes, 2025

3.5 PROGRAM PRIORITAS RENSTRA DINAS KESEHATAN TAHUN 2025-2029

Program dan kegiatan Dinas Kesehatan Provinsi Banten disusun untuk mendukung penyelengggaraan pelayanan kesehatan melalui peningkatan kualitas mutu pelayanan. Selain itu, disajikan pula pencapaian target indikator kinerja pada akhir periode perencanaan yang dibandingkan dengan pencapaian indikator kinerja pada awal periode perencanaan. Bagian ini merupakan langkah teknokratis dalam menerjemahkan berbagai analisis dan metodologi perumusan sebelumnya ke dalam penyusunan program prioritas.

Berdasarkan strategi dan arah kebijakan yang telah disusun selanjutnya ditetapkan sejumlah program dan kegiatan yang akan dilaksanakan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Kesehatan Provinsi Banten sebagai upaya untuk mewujudkan tujuan organisasi melalui perwujudan sasaran-sasaran misi yang telah ditetapkan. Sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya program tersebut dimaksudkan pula sebagai program kerja dan atau rencana kerja yang akan datang yang dijadikan sebagai pedoman operasional.

Jumlah program dan kegiatan di lingkup Dinas Kesehatan yang disusun dalam Renstra telah mengacu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana telah dimutakhirkan di dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Kepurusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, dimana di dalam Permendagri tersebut terdapat perubahan terkait program yang menjadi menjadi sub kegiatan. Setiap capaian program pada dasarnya adalah untuk mendukung pencapaian target Sasaran dan Tujuan yang telah ditetapkan.

Program Prioritas Renstra Dinas Kesehatan secara teknis dirumuskan dengan mengambil indikator dari program prioritas yang telah ditetapkan (*outcome*) atau kompositnya (*impact*). Indikator kinerja Dinas Kesehatan dapat dirumuskan berdasarkan hasil analisis pengaruh dari satu atau lebih indikator capaian kinerja program (*outcome*) terhadap tingkat capaian indikator kinerja daerah berkenaan, setelah program dan kegiatan prioritas ditetapkan. Berikut adalah program dan kegiatan di lingkup Dinas Kesehatan Provinsi Banten yang akan dilaksanakan pada periode 2025-2029 yang dapat dilihat pada tabel berikut ini :

TABEL 3.5 PROGRAM PRIORITAS DINAS KESEHATAN PROVINSI BANTEN TAHUN 2025-2029

VISI MISI	TUJUAN PERANGKAT DAERAH	SASARAN PERANGKAT DAERAH	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
a	*b*	*c*	*d*	*e*	*f*	*f*
Visi : Banten Maju, Adil Merata Tidak Korupsi	Meningkatnya Kualitas Taraf Kesehatan Masyarakat	Menurunnya Angka Kematian Ibu	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesehatan Primer	Persentase Pelayanan Kesehatan Primer yang Berkualitas	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Meningkatnya Akses dan Kualitas Layanan Pemeriksaan Kesehatan Gratis, Kesehatan Tradisional, dan Akreditasi pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan Primer
Misi : Mewujudkan sumber daya manusia yang berintegritas, berdaya saing, berkualitas, inovatif, dan tidak diskriminatif.			Meningkatnya Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan Jiwa Tanpa Diskriminasi	Persentase Penderita gangguan jiwa dan Penyalahguna NAPZA yang mendapatkan pengobatan dan tidak diterlantarkan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	
			Meningkatnya Akses Jaminan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin/Tidak Mampu	Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (%)	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	
			Meningkatnya Kualitas SPM Bidang Kesehatan Provinsi	Persentase Ketercapaian SPM Bidang Kesehatan Provinsi	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	
			Meningkatnya pelayanan Kesehatan Ibu bersalin sesuai standar	persentase Ibu Bersalin melakukan persalinan di fasilitas kesehatan (%)	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	

VISI MISI	TUJUAN PERANGKAT DAERAH	SASARAN PERANGKAT DAERAH	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
a	*b*	*c*	*d*	*e*	*f*	*f*
			Meningkatnya Ketersediaan Obat di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Persentase Kabupaten/Kota yang Memiliki Ketersediaan Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan Sesuai Standar	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	
			Optimalnya Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan RS di Provinsi Banten	Rasio Daya Tampung Rumah Sakit Rujukan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Pembangunan RS Jiwa dan Ketergantungan Obat
			Meningkatnya Kapasitas SDM Kesehatan	Persentase SDM Kesehatan yang memiliki Kompetensi sesuai standar	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	
			Meningkatnya Kulaitas Pelayanan Kesehatan Rujukan	Persentase RS Rujukan yang Terkareditasi	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	
		Meningkatnya Cakupan 9 Layanan Intervensi Stunting	Meningkatnya layanan intervensi Penurunan Stunting sesuai Standar	Persentase Tercapainya Cakupan Layanan Intervensi dalam Penurunan Stunting	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	
			Meningkatnya Akses dan Mutu Imunisasi Dasar Lengkap bagi Bayi	Cakupan Imunisasi Bayi Lengkap	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	
		Meningkatnya 4 (empat) Layanan Unggulan Kesehatan dengan Sistem Rujukan Berbasis Kompetensi pada RS	Meningkatnya akses dan mutu pelayanan kesehatan penunjang RSUD Banten	Persentase sarana dan prasarana RSUD Banten sesuai standar yang terpenuhi	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	

VISI MISI	TUJUAN PERANGKAT DAERAH	SASARAN PERANGKAT DAERAH	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
a	*b*	*c*	*d*	*e*	*f*	*f*
		Rujukan Regional Provinsi				
			Meningkatnya Kualitas Pelayanan Yang Terakreditasi di UPTD RSUD Banten	Nilai Akreditasi RSUD Banten	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	
			Meningkatnya kualitas tatakelola Informasi Kesehatan di RSUD Banten	Persentase digitalisasi layanan kesehatan di RSUD Banten	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	
			Meningkatnya Fasilitas Layanan Kesehatan Rumah Sakit	Presentase Pengembangan Fasilitas Layanan Kesehatan UPTD RSUD Malingping	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	
			Meningkatnya Kualitas Pelayanan RSUD Malingping	Jumlah SPM Sub Variabel Kegawat daruratan UPTD RSUD Malingping	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	
			Meningkatnya kualitas tatakelola informasi di RSUD Malingping	Persentase digitalisasi layanan kesehatan di RSUD Malingping	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	
			Meningkatnya Kualitas Pelayanan RSUD Labuan	Jumlah SPM Sub Variabel Kegawat daruratan UPTD RSUD Labuan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	
			Meningkatnya kualitas tatakelola informasi UPTD RSUD Labuan	Persentase digitalisasi layanan Kesehatan RSUD Labuan		
			Meningkatnya kualitas tatakelola informasi di RSUD Cilograng	Persentase digitalisasi layanan Kesehatan RSUD Cilograng	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	

VISI MISI	TUJUAN PERANGKAT DAERAH	SASARAN PERANGKAT DAERAH	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
a	*b*	*c*	*d*	*e*	*f*	*f*
			Meningkatnya Kualitas Pelayanan RSUD Cilograng	Jumlah SPM Sub Variabel Kegawat daruratan UPTD RSUD Cilograng	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	
		Meningkatnya Penemuan Kasus Tuberkulosis	Terkendalinya Penyakit Tuberkulosis, Hipertensi dan Diabetes Melitus	Persentase Ketercapaian Angka Keberhasilan Pengobatan Tuberculosis, Persentase Hipertensi Dalam Pengendalian, dan Diabetes Melitus dalam Pengendalian	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	

3.6 RUMUSAN PROGRAM PROVINSI BANTEN BERDASARKAN PROGRAM UNGGULAN DAN PROGRAM TURUNAN KEPALA DAERAH

Program prioritas Pemerintah Provinsi Banten sebagaimana dijelaskan di dalam Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dirumuskan dengan memperhatikan terhadap cascading kinerja untuk menterjemahkan visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur sampai dengan outcome yang dilengkapi dengan indikator sesuai dengan tingkatannya serta program prioritas dimaksud. Adapun program unggulan Gubernur dan Wakil Gubernur Banten yang mencakup :

1. Program Unggulan 2
   Banten Sehat merupakan prioritas pembangunan untuk mewujudkan akses kesehatan bagi warga tanpa diskriminasi. Program unggulan ini memiliki program turunan berupa :
   - ➔ Faskin Kita yaitu Optimalisasi Fasilitas Kesehatan, Sumber Daya Manusia, dan Program Kesehatan Kita.
2. Program Unggulan 8
   Banten Melayani merupakan prioritas pembangunan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan tidak korupsi dan sistem merit dalam birokrasi. Program unggulan ini memiliki program turunan berupa:
   - ➔ Terobos yaitu Transformasi dan Efisiensi Reformasi Birokrasi Optimal.

GAMBAR 3.1 PROGRAM UNGGULAN DAN PROGRAM TURUNAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR BANTEN

Program Faskin kita memiliki Prioritas Pembangunan, meliputi :

1. Peningkatan Kualitas dan Akses Layanan Kesehatan Masyarakat; dan
2. Peningkatan Pembangunan Kualitas Keluarga yang Inklusif.

Gambar 3.2 Diagram Alir Intervensi Dukungan Program Unggulan dan Program Turunan Kepala Daerah dalam Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Banten Tahun 2025-2029

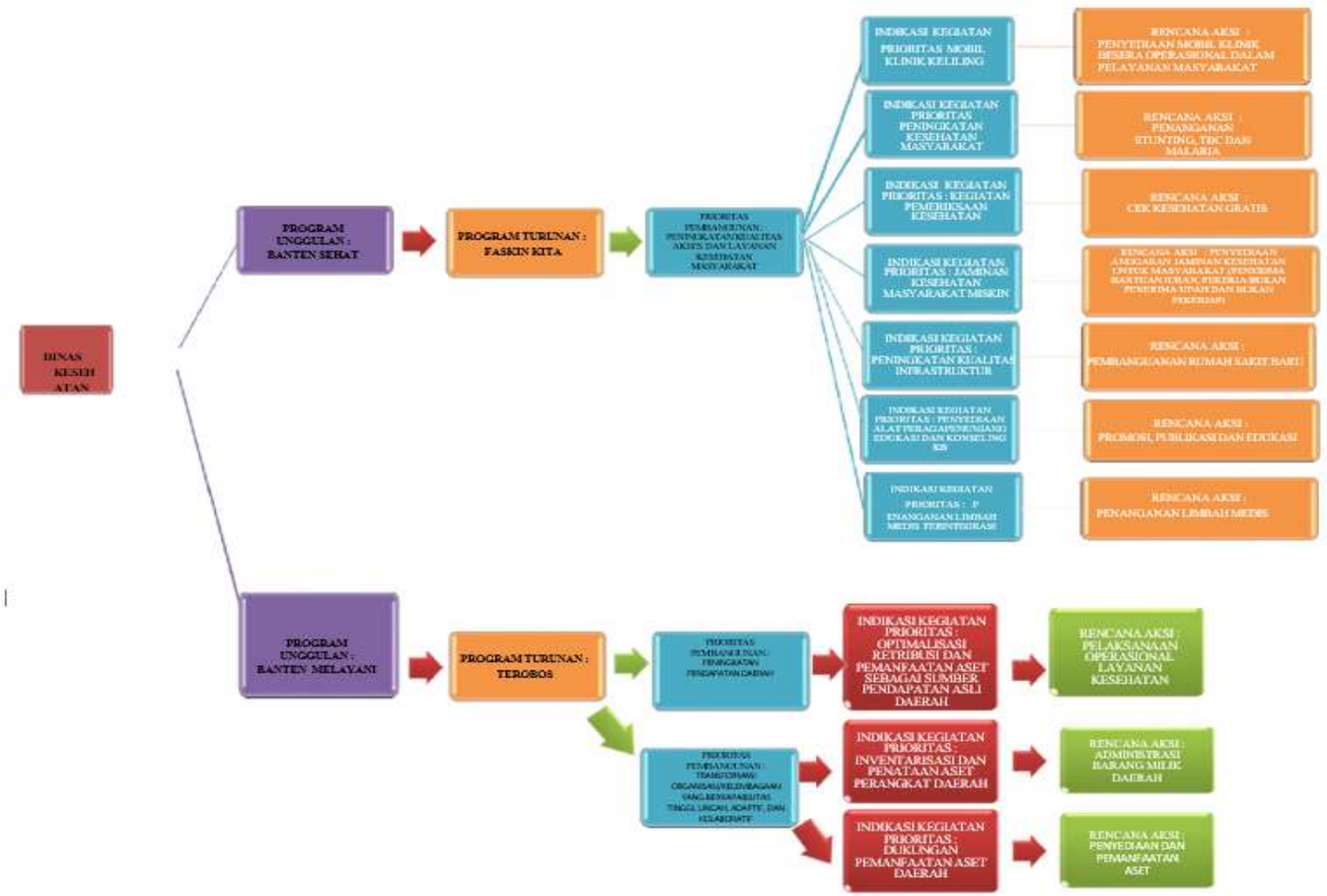

Sumber: Hasil Analisis Dinkes, 2025

TABEL 3.7 PROGRAM UNGGULAN DAN PROGRAM TURUNAN KEPALA DAERAH DALAM RENSTRA DINAS KESEHATAN PROVINSI BANTEN TAHUN 2025-2029

PROGRAM UNGGULAN	PROGRAM TURUNAN	PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKASI KEGIATAN PRIORITAS	URAIAN	TARGET 5 (TAHUN)
a	*b*	*c*	*d*	*e*	*f*
Banten Sehat	Faskin Kita	Peningkatan Kualitas dan Akses Layanan Kesehatan Masyarakat	Peningkatan Kesehatan Masyarakat	Penanganan Stunting, TBC dan Malaria	8 Kab / Kota
Banten Sehat	Faskin Kita	Peningkatan Kualitas dan Akses Layanan Kesehatan Masyarakat	Penanganan Limbah Medis Terintegrasi	Penanganan Limbah Medis	4 RS
Banten Sehat	Faskin Kita	Peningkatan Kualitas dan Akses Layanan Kesehatan Masyarakat	Mobil Klinik Keliling	Penyediaan Mobil Klinik besera Operasional dalam Pelayanan Masyarakat	12 unit
Banten Sehat	Faskin Kita	Peningkatan Kualitas dan Akses Layanan Kesehatan Masyarakat	Jaminan Kesehatan Masyarakat Miskin	Cek / Pemeriksaan Kesehatan Gratis	1.919.197 orang
Banten Sehat	Faskin Kita	Peningkatan Kualitas dan Akses Layanan Kesehatan Masyarakat	Jaminan Kesehatan Masyarakat Miskin	Penyediaan Anggaran Jaminan Kesehatan untuk Masyarakat (PBI, PBPU dan BP)	5 tahun
Banten Sehat	Faskin Kita	Peningkatan Kualitas dan Akses Layanan Kesehatan Masyarakat	Peningkatan Kualitas Infrastruktur Kesehatan	Pembangunan Rumah Sakit Baru	2 unit
Banten Sehat	Faskin Kita	Peningkatan Pembangunan Kualitas Keluarga yang Inklusif	Penyediaan Alat Peraga Penunjang Edukasi dan Konseling KB	Promosi, Publikasi dan Edukasi	1 dokumen
Banten Melayani	Terobos	Peningkatan Pendapatan Daerah	Optimalisasi Retribusi dan Pemanfaatan Aset Sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah	Pelaksanaan Operasional Layanan Kesehatant	5 unit
		Transformasi Organisasi / Kelembagaan Yang Berkapabilitas Tinggi, Lincah, Adaptif dan Kolaboratif	Inventarisasi dan Penataan Aset Perangkat Daerah	Administrasi Barang Milik Daerah	4 dokumen
		Transformasi Organisasi / Kelembagaan Yang Berkapabilitas Tinggi, Lincah, Adaptif dan Kolaboratif	Dukungan Pemanfaatan Aset Daerah	Penyediaan dan Pemanfaatan Aset	1 unit

Sumber : Hasil Analisis Dinkes, 2025

BAB - IV
PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1 PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN

Program dan kegiatan Dinas Kesehatan untuk mendukung penyelengggaraan pelayanan kesehatan melalui peningkatan kualitas mutu pelayanan. Selain itu, disajikan pula pencapaian target indikator kinerja pada akhir periode perencanaan yang dibandingkan dengan pencapaian indikator kinerja pada awal periode perencanaan. Bagian ini merupakan langkah teknokratis dalam menerjemahkan berbagai analisis dan metodologi perumusan sebelumnya ke dalam penyusunan program prioritas.

Berdasarkan strategi dan arah kebijakan yang telah disusun selanjutnya ditetapkan sejumlah program dan kegiatan yang akan dilaksanakan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Kesehatan Provinsi Banten sebagai upaya untuk mewujudkan tujuan organisasi melalui perwujudan sasaran-sasaran misi yang telah ditetapkan. Sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya program tersebut dimaksudkan pula sebagai program kerja dan atau rencana kerja yang akan datang yang dijadikan sebagai pedoman operasional.

Jumlah program dan kegiatan di lingkup Dinas Kesehatan yang disusun dalam Renstra telah mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana telah dimutakhirkan di dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Kepurusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah

Penetapan indikator kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Banten bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah yang terangkum dalam dokumen RPJMD Provinsi Banten Tahun 2025-2029. Hal ini ditunjukan dari akumulasi pencapaian indikator outcome program pembangunan daerah setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode Renstra Dinas Kesehatan dapat dicapai. Indikator kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Banten tahun 2025-2029 mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD, sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

   Pada program penunjang urusan pemerintahan daerah terdiri dari kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, Administrasi Umum Perangkat Daerah, Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, dan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Induk, UPTD Pelatihan Kesehatan (Pelkes), UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah (Labkesda), UPT RSUD Banten, dan UPT RSDU Banten.

   Namun pada UPTD Pelkes dan UPTD Labkesda tidak melaksanakan kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, karena tidak memiliki Sub bagian Perencanaan, Evalauasi, Program dan Sub bagian Keuangan.

2. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat

   Pada program pemenuhan upaya Kesehatan perorangan dan upaya Kesehatan masyarakat yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Induk terdapat kegiatan Penyediaan fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi. Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM, dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi, dan Kegiatan Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B.

   Penerbitan izin Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi. Pada UPT RSUD Banten dan UPT RSUD Malingping, pelaksanaan kegiatan pada program pemenuhan upaya Kesehatan perorangan dan upaya Kesehatan masyarakat yaitu, kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi, Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM, dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi, dan Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi. Sedangkan pada UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah (Labkesda), melaksanakan kegiatan Penyediaan fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi.

3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan

   Pada program peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan terdiri dari kegiatan Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM Provinsi yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Induk, dan kegiatan Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan

Tingkat Daerah Provinsi yang dilaksanakan oleh UPTD Pelatihan Kesehatan (Pelkes).

4. Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman
   Pada program sediaan farmasi, alat Kesehatan, dan makanan minuman terdiri dari kegiatan Penerbitan Pengakuan Pedagang Besar Farmasi (PBF) dan Cabang Penyalur Alat Kesehatan (PAK), dan kegiatan Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT).
5. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan
   Pada program pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan terdiri dari kegiatan Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Daerah Provinsi, dan kegiatan Pelaksanaan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Perilaku Hidup Bersih dan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Provinsi.

TABEL 4.1 PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN RENSTRA DINAS KESEHATAN PROVINSI BANTEN

TAHUN 2025-2029

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
1.02.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kesehatan							
Meningkatnya Kualitas Taraf Kesehatan Masyarakat	Meningkatnya Kualitas Taraf Kesehatan Masyarakat				Usia Harapan Hidup (UHH) ((tahun))		
					Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita (%)		
		Meningkatnya Penemuan Kasus Tuberkulosis			Cakupan Penemuan Kasus Tuberkolosis (treatment coverage) (%)		
			Terkendalinya Penyakit Tuberkulosis, Hipertensi dan Diabetes Melitus		Persentase Ketercapaian angka keberhasilan pengobatan tuberculosis, presentase hipertensi dalam pengendalian, dan diabetes melitus dalam pengendalian (%)	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Optimalnya Ketercapaian Target Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (Dokumen)	1.02.02.1.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	
					Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (Dokumen)	1.02.02.1.02.0011 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
			Meningkatnya LANSIA Mandiri		Persentase Lanjut Usia yang Mandiri (%)	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Meningkatnya persentase LANSIA yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut (Dokumen)	1.02.02.1.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	
					Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut (Dokumen)	1.02.02.1.02.0005 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut	
		Meningkatnya Cakupan 9 Layanan Intervensi Stunting			Persentase Cakupan 9 Layanan Intervensi dalam Penurunan Stunting (%)		
			Meningkatnya Masyarakat yang berperilaku hidup bersih dan sehat		Persentase masyarakat yang mengimplementasikan PHBS (%)	1.02.05 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	
				meningkatnya Dukungan Kelompok Masyarakat Melalui kegitan yang mendukung program prioritas kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi (Dokumen)	1.02.05.1.01 - Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
					Jumlah Dokumen Hasil Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi (Dokumen)	1.02.05.1.01.0001 - Peningkatan Upaya Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	
				Terlakasananya Promosi kesehatan dan Perilaku Hidup bersih dan sehat	Jumlah Dokumen Hasil Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (Dokumen)	1.02.05.1.02 - Pelaksanaan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Perilaku Hidup Bersih dan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Provinsi	
					Jumlah Dokumen Hasil Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (Dokumen)	1.02.05.1.02.0001 - Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	
			Meningkatnya Pemahaman Masyarakat tentang GERMAS		Persentase Masyarakat yang memahami GERMAS (%)	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Meningkatnya Kabupaten / Kota yang melakukan kampanye GERMAS	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga (Dokumen)	1.02.02.1.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
					Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan (Dokumen)	1.02.02.1.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	
					Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga (Dokumen)	1.02.02.1.02.0007 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	
					Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan (Dokumen)	1.02.02.1.02.0009 - Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	
			Meningkatnya layanan intervensi Penurunan Stunting sesuai Standar		Persentase Tercapainya Cakupan Layanan Intervensi dalam Penurunan Stunting (%)	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Meningkatnya kabupaten kota yg melaksanakan intervensi penurunan stunting	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Dokumen)	1.02.02.1.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	
					Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Dokumen)	1.02.02.1.02.0006 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	
			Meningkatnya Kabupaten/Kota yang Melaksanakan STBM		Persentase Kabupaten/Kota yang Melaksanakan STBM (%)	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
						UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Meningkatnya Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan kabupaten/kota sehat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Dokumen)	1.02.02.1.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	
					Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Dokumen)	1.02.02.1.02.0008 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	
			Meningkatnya Akses dan Mutu Imunisasi Dasar Lengkap Bagi Bayi		Cakupan imunisasi bayi lengkap (Persentase)	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Meningkatnya kabupaten/kota yang mencapai imunisasi bayi lengkap	Jumlah Dokumen Hasil Investigasi Lanjutan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal oleh Kabupaten/Kota (Dokumen)	1.02.02.1.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	
					Jumlah Dokumen Hasil Investigasi Lanjutan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal oleh Kabupaten/Kota (Dokumen)	1.02.02.1.02.0021 - Investigasi Lanjutan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal oleh Kabupaten/Kota	
		Menurunnya Angka Kematian Ibu			Angka Kematian Ibu (AKI) ((per 100.000 kelahiran hidup))		

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
			Optimalnya Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan RS Provinsi Banten		Rasio Daya Tampung Rumah Sakit Rujukan (Rasio)	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Terlaksananya Pelayanan kesehatan Rumah Sakit provinsi Banten	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan (Unit)	1.02.02.1.01 - Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	
					Jumlah Barang Penunjang Operasional Rumah Sakit yang Disediakan (Unit)	1.02.02.1.01 - Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	
					Jumlah Rumah Sakit Baru yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000 (Unit)	1.02.02.1.01 - Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
					Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit (Unit)	1.02.02.1.01 - Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	
					Jumlah Rumah Sakit Baru yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000 (Unit)	1.02.02.1.01.0001 - Pembangunan Rumah Sakit Beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya	
					Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan (Unit)	1.02.02.1.01.0010 - Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	
					Jumlah Barang Penunjang Operasional Rumah Sakit yang Disediakan (Unit)	1.02.02.1.01.0016 - Pengadaan Barang Penunjang Operasional Rumah Sakit	
					Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka	1.02.02.1.01.0026 - Pengembangan Rumah Sakit	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
					peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit (Unit)		
				Meningkatnya Kesiapan Operasional RS Provinsi Banten	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit (Dokumen)	1.02.02.1.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	
					Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit (Dokumen)	1.02.02.1.02.0022 - Operasional Pelayanan Rumah Sakit	
				Terlaksananya Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan (Dokumen)	1.02.02.1.03 - Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	
					Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan (Dokumen)	1.02.02.1.03.0002 - Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	
			Meningkatnya Pemenuhan dan Pemerataan SDM Kesehatan		Persentase Tenaga Kesehatan dan Tenaga Medis di Kabupaten/Kota Sesuai Standar (%)	1.02.03 - PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	
				Terpenuhinya SDM kesehatan sesuai standar yang terdistribusi di fasyankes	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) (Orang)	1.02.03.1.01 - Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
					Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Terdistribusi (Orang)	1.02.03.1.01 - Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi	
					Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) (Orang)	1.02.03.1.01.0001 - Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan	
					Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Terdistribusi (Orang)	1.02.03.1.01.0002 - Distribusi dan Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	
			Meningkatnya Kualitas Sarana Kefarmasian di Tingkat Provinsi		Persentase sarana Kefarmasian Tingkat Provinsi yang memenuhi syarat (%)	1.02.04 - PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	
				Meningkatnya Sarana Distribusi Kefarmasian yang Mendapatkan Rekomendasi Izin Operasional	Jumlah PBF Cabang dan Cabang PAK yang Dikendalikan dan Diawasi dalam rangka Penerbitan dan Tindaklanjut Penerbitan Perizinan (Sarana)	1.02.04.1.01 - Penerbitan Pengakuan Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang dan Cabang Penyalur Alat Kesehatan (PAK)	
					Jumlah PBF Cabang dan Cabang PAK yang Dikendalikan dan Diawasi dalam rangka Penerbitan dan Tindaklanjut Penerbitan Perizinan (Sarana)	1.02.04.1.01.0001 - Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Pengakuan PBF Cabang dan Cabang PAK	
				Terfasilitasinya Usaha Kecil Obat Tradisional, Kosmetik dan	Jumlah Usaha Kecil Obat Tradisional yang Dikendalikan dan Diawasi dalam rangka Penerbitan dan Tindaklanjut	1.02.04.1.02 - Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT)	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
				Obat Tradisional dalam pemberian rekomendasi ijin	Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional (Sarana)		
					Jumlah Usaha Kecil Obat Tradisional yang Dikendalikan dan Diawasi dalam rangka Penerbitan dan Tindaklanjut Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional (Sarana)	1.02.04.1.02.0001 - Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional	
			Meningkatnya ketersediaan obat di Fasilitas Pelayanan Kesehatan sesuai standar		Persentase Kabupaten / Kota yang memiliki ketersediaan obat publik dan perbekalan kesehatan sesuai standar (%)	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				terpenuhinya obat publik dan perbekalan kesehatan di Kab/kota secara merata	Jumlah dokumen distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan ke Fasilitas Kesehatan (Dokumen)	1.02.02.1.01 - Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	
					Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan (Paket)	1.02.02.1.01 - Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
					Jumlah dokumen distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan ke Fasilitas Kesehatan (Dokumen)	1.02.02.1.01.0025 - Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan	
					Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan (Paket)	1.02.02.1.01.0027 - Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	
			Meningkatnya Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan Jiwa Tanpa Diskriminasi		Persentase Penderita gangguan jiwa dan Penyalahguna NAPZA yang mendapatkan pengobatan dan tidak diterlantarkan (%)	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Meningkatnya Pelayanan Kesehatan pada Orang dengan Gangguan Jiwa dan Penyalahguna NAPZA	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) (Dokumen)	1.02.02.1.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	
					Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapakan Rehabilitasi Medis (Orang)	1.02.02.1.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
					Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) (Dokumen)	1.02.02.1.02.0013 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	
					Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapakan Rehabilitasi Medis (Orang)	1.02.02.1.02.0014 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Kecanduan NAPZA	
			Meningkatnya Akses Jaminan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin/Tidak Mampu		Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional (JKN) ((%))	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Meningkatnya Keaktifan Peserta Jaminan Kesehatan Nasional bagi Masyarakat Miskin / Tidak Mampu	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat (Dokumen)	1.02.02.1.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	
					Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat (Dokumen)	1.02.02.1.02.0016 - Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	
			Meningkatnya Kualitas SPM Bidang Kesehatan Provinsi		Persentase Ketercapaian SPM Bidang Kesehatan Provinsi (%)	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
				Meningkatnya Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan yang Mendukung Tercapainya SPM Bidang Kesehatan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji (Dokumen)	1.02.02.1.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	
					Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan (Dokumen)	1.02.02.1.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	
					Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Layanan Kesehatan pada Kondisi Kejadian Luar Biasa Provinsi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	1.02.02.1.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	
					Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Layanan Kesehatan yang Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/Atau Berpotensi Bencana Provinsi Sesuai Standar (Orang)	1.02.02.1.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	
					Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Layanan Kesehatan yang Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/Atau Berpotensi Bencana Provinsi Sesuai Standar (Orang)	1.02.02.1.02.0001 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
					Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Layanan Kesehatan pada Kondisi Kejadian Luar Biasa Provinsi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	1.02.02.1.02.0002 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	
					Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji (Dokumen)	1.02.02.1.02.0012 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji	
					Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan (Dokumen)	1.02.02.1.02.0017 - Pengelolaan Surveilans Kesehatan	
			Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesehatan Primer		Persentase Kualitas Pelayanan Kesehatan Primer sesuai standar (%)	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Terlaksananya pelayanan Kesehatan gratis Masyarakat Umum baik di Puskesmas maupun di luar puskesmas	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan (Dokumen)	1.02.02.1.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	
				Meningkatnya Pelayanan Kesehatan Tradisional	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya (Dokumen)	1.02.02.1.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
					Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya (Dokumen)	1.02.02.1.02.0010 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisonal, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	
				Terlaksananya pelayanan Kesehatan gratis Masyarakat Umum baik di Puskesmas maupun di luar puskesmas	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan (Dokumen)	1.02.02.1.02.0019 - Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan	
				Meningkatnya cakupan sarana prasarana bagi fasilitas kesehatan pertama	Jumlah Dokumen Hasil Verifikasi dan Penilaian Kelayakan Puskesmas untuk Registrasi Puskesmas (Dokumen)	1.02.02.1.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	
					Jumlah Dokumen Hasil Verifikasi dan Penilaian Kelayakan Puskesmas untuk Registrasi Puskesmas (Dokumen)	1.02.02.1.02.0020 - Verifikasi dan Penilaian Kelayakan Puskesmas untuk Registrasi Puskesmas	
			Meningkatnya pelayanan Kesehatan Ibu bersalin sesuai standar		persentase Ibu Bersalin melakukan persalinan di fasilitas kesehatan (%)	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
				Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Ibu hamil Sesuai Standar	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak (Dokumen)	1.02.02.1.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	
					Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak (Dokumen)	1.02.02.1.02.0003 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak	
			Meningkatnya Cakupan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif Sesuai Standar		Persentase Ketercapaian Target Pelayanan Kesehatan Usia Produktif Sesuai Standar (%)	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Meningkatnya Pelayanan Kesehatan Usia Produktif di Kabupaten / Kota sesuai standar	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif (Dokumen)	1.02.02.1.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	
					Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif (Dokumen)	1.02.02.1.02.0004 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif	
			Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesehatan Rujukan		Persentase RS Rujukan Provinsi yang Terkareditasi (%)	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
				Optimalnya pelayanan RS berbasis teknologi	Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersedia, Terkelola dan Terintegrasi dengan Rumah Sakit dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) (Unit)	1.02.02.1.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	
					Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersedia, Terkelola dan Terintegrasi dengan Rumah Sakit dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) (Unit)	1.02.02.1.02.0023 - Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	
				Tersedianya fasilitas Kesehatan Rujukan (RS) yang menjalankan sistem rujukan sesuai SOP	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan Kesehatan (Unit)	1.02.02.1.04 - Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	
					Jumlah Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya (Unit)	1.02.02.1.04 - Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	
					Jumlah Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya (Unit)	1.02.02.1.04.0001 - Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Perizinan Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan	
					Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator	1.02.02.1.04.0003 - Peningkatan Mutu	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
					Nasional Mutu (INM) Pelayanan Kesehatan (Unit)	Pelayanan Fasilitas Kesehatan	
		Meningkatknya 4 layanan unggulan kesehatan dengan sistem rujukan berbasis kompetensi			Persentase 4 Layanan Unggulan Kesehatan dengan Sistem Rujukan Berbasis Kompetensi yang Berklasifikasi Utama (%)		
			Meningkatnya tata kelola pemerintahan pada Perangkat Daerah		Indeks Reformasi Birokrasi pada Perangkat Daerah (Indeks)	1.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	
				Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Berita Acara)	1.02.01.1.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah (Data)	1.02.01.1.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	1.02.01.1.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	1.02.01.1.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	1.02.01.1.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	1.02.01.1.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	1.02.01.1.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	1.02.01.1.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	1.02.01.1.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	1.02.01.1.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	1.02.01.1.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	
					Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	1.02.01.1.01.0003 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	
					Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	1.02.01.1.01.0004 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	
					Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	1.02.01.1.01.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	
					Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	1.02.01.1.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	1.02.01.1.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
					Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah (Data)	1.02.01.1.01.0008 - Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	
					Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Berita Acara)	1.02.01.1.01.0009 - Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
				Meningkatnya kualitas Pengelolaan keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan (Dokumen)	1.02.01.1.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	1.02.01.1.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	1.02.01.1.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	1.02.01.1.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/ Bulan)	1.02.01.1.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/ Bulan)	1.02.01.1.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
					Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	1.02.01.1.02.0002 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	
					Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	1.02.01.1.02.0003 - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	
					Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	1.02.01.1.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	
					Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan (Dokumen)	1.02.01.1.02.0006 - Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	
				Terkelolanya Barang Milik Daerah secara tertib	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD (Laporan)	1.02.01.1.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	1.02.01.1.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
					Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	1.02.01.1.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
					Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	1.02.01.1.03.0001 - Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	
					Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD (Laporan)	1.02.01.1.03.0003 - Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	
					Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	1.02.01.1.03.0005 - Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	
				Meningkatnya Profesionalitas ASN	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	1.02.01.1.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	1.02.01.1.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	1.02.01.1.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	1.02.01.1.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
					Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	1.02.01.1.05.0009 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	1.02.01.1.05.0010 - Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	
				Terpenuhinya Kebutuhan Sarana dan Prasarana	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	1.02.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	1.02.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	1.02.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1.02.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1.02.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1.02.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	1.02.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1.02.01.1.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1.02.01.1.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
					Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	1.02.01.1.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	1.02.01.1.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
					Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1.02.01.1.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	1.02.01.1.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
					Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	1.02.01.1.06.0010 - Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	
				Terpenuhinya Barang Milik Daerah	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	1.02.01.1.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
					Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	1.02.01.1.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	1.02.01.1.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	1.02.01.1.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	1.02.01.1.07.0001 - Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
					Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	1.02.01.1.07.0002 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	1.02.01.1.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
					Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	1.02.01.1.07.0010 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
				Terpenuhinya Kebutuhan pelayanan penunjang kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	1.02.01.1.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	1.02.01.1.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	1.02.01.1.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	1.02.01.1.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
				Terpenuhinya pemeliharaan Barang Milik Daerah pada perangkat daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1.02.01.1.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	1.02.01.1.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya (Unit)	1.02.01.1.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	1.02.01.1.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
						Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1.02.01.1.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1.02.01.1.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya (Unit)	1.02.01.1.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	1.02.01.1.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	1.02.01.1.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
					Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1.02.01.1.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
						Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1.02.01.1.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1.02.01.1.09.0011 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
1.02.0.00.0.00.01.0001 - UPTD RSUD Banten							
- Meningkatnya Kualitas Taraf Kesehatan Masyarakat	Meningkatnya Kualitas Taraf Kesehatan Masyarakat	Meningkatknya 4 layanan unggulan kesehatan dengan sistem rujukan berbasis kompetensi	Meningkatnya tata kelola pemerintahan pada Perangkat Daerah		Indeks Reformasi Birokrasi pada Perangkat Daerah (Indeks)	1.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	
				Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	1.02.01.1.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	1.02.01.1.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
						Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	1.02.01.1.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	1.02.01.1.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	1.02.01.1.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	1.02.01.1.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	1.02.01.1.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	1.02.01.1.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
					Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	1.02.01.1.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	
					Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	1.02.01.1.01.0003 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	
					Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	1.02.01.1.01.0004 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	
					Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	1.02.01.1.01.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	
					Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	1.02.01.1.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	1.02.01.1.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
				Meningkatnya kualitas Pengelolaan keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan (Dokumen)	1.02.01.1.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
					Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	1.02.01.1.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)	1.02.01.1.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	1.02.01.1.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	1.02.01.1.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	1.02.01.1.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/ Bulan)	1.02.01.1.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/ Bulan)	1.02.01.1.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
					Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	1.02.01.1.02.0002 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
					Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	1.02.01.1.02.0003 - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	
					Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	1.02.01.1.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	
					Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan (Dokumen)	1.02.01.1.02.0006 - Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	
					Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	1.02.01.1.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	
					Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)	1.02.01.1.02.0008 - Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	
				Meningkatnya profesionalitas ASN	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	1.02.01.1.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	1.02.01.1.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
					Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	1.02.01.1.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	
					Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	1.02.01.1.05.0009 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	
				Kebutuhan sarana dan prasarana terpenuhi	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	1.02.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	1.02.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1.02.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1.02.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1.02.01.1.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	1.02.01.1.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
					Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1.02.01.1.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	1.02.01.1.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
				Terpenuhinya Barang Milik Daerah	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	1.02.01.1.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	1.02.01.1.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	1.02.01.1.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	1.02.01.1.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	1.02.01.1.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
					Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	1.02.01.1.07.0009 - Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
					Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	1.02.01.1.07.0010 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
					Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	1.02.01.1.07.0011 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
				Terpenuhinya kebutuhan pelayanan penunjang kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	1.02.01.1.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	1.02.01.1.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	1.02.01.1.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	1.02.01.1.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
				Terpenuhinya pemeliharaan barang milik daerah pada perangkat daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1.02.01.1.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	1.02.01.1.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya (Unit)	1.02.01.1.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	1.02.01.1.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1.02.01.1.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya (Unit)	1.02.01.1.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	1.02.01.1.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
						Dinas Operasional atau Lapangan	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	1.02.01.1.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
					Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1.02.01.1.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1.02.01.1.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
				Terpenuhinya peningkatan pelayanan BLUD UPTD RSUD BANTEN	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja)	1.02.01.1.10 - Peningkatan Pelayanan BLUD	
					Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja)	1.02.01.1.10.0001 - Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	
			Meningkatnya kualitas akses dan mutu pelayanan kesehatan penunjang RSUD Banten		Persentase sarana dan prasarana RSUD Banten sesuai standar yang terpenuhi (%)	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
				Meningkatnya kualitas Fasilitas Sarpras RSUD Banten	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun (Unit)	1.02.02.1.01 - Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	
					Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) yang Melayani Konsultasi Jarak Jauh Antar Fasyankes Melalui Pelayanan Telemedicine untuk Mendapatkan Akses Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas (Unit)	1.02.02.1.01 - Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	
					Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Rumah Sakit (Unit)	1.02.02.1.01 - Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	
					Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun (Unit)	1.02.02.1.01.0002 - Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	
					Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Rumah Sakit (Unit)	1.02.02.1.01.0009 - Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
					Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) yang Melayani Konsultasi Jarak Jauh Antar Fasyankes Melalui Pelayanan Telemedicine untuk Mendapatkan Akses Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas (Unit)	1.02.02.1.01.0020 - Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	
				Meningkatnya kualitas pemenuhan alat kesehatan, bahan medis habis pakai, dan makan minum pasien RSUD Banten	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan (Unit)	1.02.02.1.01 - Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	
					Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar (Unit)	1.02.02.1.01 - Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	
					Jumlah Barang Penunjang Operasional Rumah Sakit yang Disediakan (Unit)	1.02.02.1.01 - Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	
					Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di	1.02.02.1.01 - Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
					Fasilitas Kesehatan yang disediakan (Paket)	Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	
					Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan (Unit)	1.02.02.1.01.0010 - Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	
					Jumlah Barang Penunjang Operasional Rumah Sakit yang Disediakan (Unit)	1.02.02.1.01.0016 - Pengadaan Barang Penunjang Operasional Rumah Sakit	
					Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar (Unit)	1.02.02.1.01.0017 - Pemeliharaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	
					Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan (Paket)	1.02.02.1.01.0027 - Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	
			Meningkatnya Kualitas Pelayanan Yang Terakreditasi di RSUD Banten		Nilai Akreditasi RSUD Banten (Nilai Akreditasi)	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
				Terpenuhinya pelayanan RSUD Banten yang sesuai standar akreditasi	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan (Dokumen)	1.02.02.1.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	
					Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit (Dokumen)	1.02.02.1.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	
					Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan (Dokumen)	1.02.02.1.02.0019 - Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan	
					Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit (Dokumen)	1.02.02.1.02.0022 - Operasional Pelayanan Rumah Sakit	
			Meningkatnya kualitas tatakelola Informasi Kesehatan di RSUD Banten		Persentase digitalisasi layanan kesehatan di RSUD Banten (%)	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Meningkatnya akses dan mutu layanan Informasi kesehatan RSUD Banten	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan (Dokumen)	1.02.02.1.03 - Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	
					Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan (Dokumen)	1.02.02.1.03.0002 - Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
1.02.0.00.0.00.01.0003 - UPTD RSUD Malingping							
- Meningkatnya Kualitas Taraf Kesehatan Masyarakat	Meningkatnya Kualitas Taraf Kesehatan Masyarakat	Meningkatknya 4 layanan unggulan kesehatan dengan sistem rujukan berbasis kompetensi	Meningkatnya tata kelola pemerintahan pada Perangkat Daerah		Indeks Reformasi Birokrasi pada Perangkat Daerah (Indeks)	1.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	
				Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	1.02.01.1.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	1.02.01.1.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	1.02.01.1.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	1.02.01.1.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
					Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	1.02.01.1.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	1.02.01.1.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	1.02.01.1.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	1.02.01.1.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	1.02.01.1.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	
					Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	1.02.01.1.01.0003 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	
					Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	1.02.01.1.01.0004 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
					Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	1.02.01.1.01.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	
					Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	1.02.01.1.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	1.02.01.1.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
				Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan (Dokumen)	1.02.01.1.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	1.02.01.1.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	1.02.01.1.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	1.02.01.1.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/ Bulan)	1.02.01.1.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/ Bulan)	1.02.01.1.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
					Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	1.02.01.1.02.0002 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	
					Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	1.02.01.1.02.0003 - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	
					Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	1.02.01.1.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	
					Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan (Dokumen)	1.02.01.1.02.0006 - Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	
				Meningkatnya Profesionalitas ASN	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	1.02.01.1.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	1.02.01.1.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
				Kebutuhan Sarana dan Prasarana Terpenuhi	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	1.02.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	1.02.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1.02.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1.02.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1.02.01.1.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	1.02.01.1.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
					Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1.02.01.1.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	1.02.01.1.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
				Terpenuhinya Barang Milik Daerah	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	1.02.01.1.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	1.02.01.1.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	1.02.01.1.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	1.02.01.1.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	1.02.01.1.07.0001 - Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	1.02.01.1.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
					Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	1.02.01.1.07.0010 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
					Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	1.02.01.1.07.0011 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
				Terpenuhinya Kebutuhan Pelayanan Penunjang Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	1.02.01.1.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	1.02.01.1.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	1.02.01.1.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	1.02.01.1.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
				Terpenuhinya Pemeliharaan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1.02.01.1.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	1.02.01.1.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
						Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya (Unit)	1.02.01.1.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	1.02.01.1.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1.02.01.1.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya (Unit)	1.02.01.1.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	1.02.01.1.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	1.02.01.1.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
					Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1.02.01.1.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1.02.01.1.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
				Terpenuhinya Peningkatan Pelayanan BLUD UPTD RSUD Malingping	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja)	1.02.01.1.10 - Peningkatan Pelayanan BLUD	
					Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja)	1.02.01.1.10.0001 - Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	
			Meningkatnya Fasilitas Layanan Kesehatan Rumah Sakit		Persentase Pengembangan Fasilitas Layanan Kesehatan UPTD RSUD Malingping (%)	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Meningkatnya Kualitas Fasilitas Penunjang Operasional Layanan RSUD Malingping	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan (Unit)	1.02.02.1.01 - Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
					Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar (Unit)	1.02.02.1.01 - Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	
					Jumlah Barang Penunjang Operasional Rumah Sakit yang Disediakan (Unit)	1.02.02.1.01 - Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	
					Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan (Paket)	1.02.02.1.01 - Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	
					Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit (Unit)	1.02.02.1.01 - Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
					Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Rumah Sakit (Unit)	1.02.02.1.01 - Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	
					Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Rumah Sakit (Unit)	1.02.02.1.01.0009 - Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	
					Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan (Unit)	1.02.02.1.01.0010 - Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	
					Jumlah Barang Penunjang Operasional Rumah Sakit yang Disediakan (Unit)	1.02.02.1.01.0016 - Pengadaan Barang Penunjang Operasional Rumah Sakit	
					Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar (Unit)	1.02.02.1.01.0017 - Pemeliharaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	
					Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000	1.02.02.1.01.0026 - Pengembangan Rumah Sakit	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
					dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit (Unit)		
					Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan (Paket)	1.02.02.1.01.0027 - Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	
			Meningkatnya Kualitas Pelayanan UPTD RSUD Malingping		Jumlah SPM Sub Variabel Kegawat daruratan UPTD RSUD Malingping (Angka)	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Terpenuhinya pelayanan RSUD Malingping yang Sesuai Standar Akreditasi	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan (Dokumen)	1.02.02.1.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	
					Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit (Dokumen)	1.02.02.1.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
					Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan (Dokumen)	1.02.02.1.02.0019 - Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan	
					Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit (Dokumen)	1.02.02.1.02.0022 - Operasional Pelayanan Rumah Sakit	
			Meningkatnya kualitas tatakelola informasi RSUD Malingping		Persentase digitalisasi layanan kesehatan di RSUD Malingping (%)	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Meningkatnya Akses dan Mutu Layanan Informasi Kesehatan RSUD Malingping	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan (Dokumen)	1.02.02.1.03 - Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	
					Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan (Dokumen)	1.02.02.1.03.0002 - Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	
1.02.0.00.0.00.01.0005 - UPTD Pelatihan Kesehatan							
- Meningkatnya Kualitas Taraf Kesehatan Masyarakat	Meningkatnya Kualitas Taraf Kesehatan Masyarakat	Menurunnya Angka Kematian Ibu	Meningkatnya Kapasitas SDM Kesehatan		Persentase SDM Kesehatan yang memiliki Kompetensi sesuai standar (%)	1.02.03 - PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	
				Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Kesehatan	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Kompetensi dan Kualifikasi Meningkat (Orang)	1.02.03.1.02 - Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
				Sumber Daya Manusia Kesehatan dan Masyarakat		Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	
					Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Kompetensi dan Kualifikasi Meningkat (Orang)	1.02.03.1.02.0001 - Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	
				Terfasilitasinya sertifikasi bagi SDM Kesehatan dan Masyarakat yang telah mengikuti pelatihan kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan (Dokumen)	1.02.03.1.02 - Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	
					Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan (Dokumen)	1.02.03.1.02.0002 - Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	
		Meningkatknya 4 layanan unggulan kesehatan dengan sistem rujukan berbasis kompetensi	Meningkatnya tata kelola pemerintahan pada Perangkat Daerah		Indeks Reformasi Birokrasi pada Perangkat Daerah (Indeks)	1.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	
				Kebutuhan Sarana dan Prasarana terpenuhi	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	1.02.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	1.02.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1.02.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1.02.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1.02.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	1.02.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1.02.01.1.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1.02.01.1.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
					Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	1.02.01.1.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	1.02.01.1.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
					Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1.02.01.1.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	1.02.01.1.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
				Terpenuhinya Barang Milik Daerah	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	1.02.01.1.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	1.02.01.1.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
				Terpenuhinya Kebutuhan pelayanan penunjang kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	1.02.01.1.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	1.02.01.1.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	1.02.01.1.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	1.02.01.1.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
				Terpenuhinya pemeliharaan Barang Milik	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1.02.01.1.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
				Daerah pada perangkat daerah		Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	1.02.01.1.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	1.02.01.1.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	1.02.01.1.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	1.02.01.1.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
					Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1.02.01.1.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
1.02.0.00.0.00.01.0006 - UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah							
- Meningkatnya Kualitas Taraf	Meningkatnya Kualitas Taraf Kesehatan Masyarakat	Menurunnya Angka Kematian Ibu	Meningkatnya Pemanfaatan Fungsi Labkesmas Tingkat III		Persentase Pemanfaatan Fungsi Labkesmas Tingkat III (%)	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
Kesehatan Masyarakat						UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Meningkatnya layanan Labkesda Provinsi Banten	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan (Unit)	1.02.02.1.01 - Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	
					Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar (Unit)	1.02.02.1.01 - Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	
					Jumlah Alat Uji dan Kalibrasi pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintainance Center yang Disediakan dan Dipelihara (Unit)	1.02.02.1.01 - Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	
					Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun (Unit)	1.02.02.1.01 - Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
					Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar (Unit)	1.02.02.1.01 - Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	
					Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan (Paket)	1.02.02.1.01 - Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	
					Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun (Unit)	1.02.02.1.01.0002 - Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	
					Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar (Unit)	1.02.02.1.01.0004 - Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya	
					Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan (Unit)	1.02.02.1.01.0010 - Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	
					Jumlah Alat Uji dan Kalibrasi pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintainance Center yang Disediakan dan Dipelihara (Unit)	1.02.02.1.01.0013 - Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
					Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar (Unit)	1.02.02.1.01.0017 - Pemeliharaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	
					Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan (Paket)	1.02.02.1.01.0027 - Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	
		Meningkatknya 4 layanan unggulan kesehatan dengan sistem rujukan berbasis kompetensi	Meningkatnya tata kelola pemerintahan pada Perangkat Daerah		Indeks Reformasi Birokrasi pada Perangkat Daerah (Indeks)	1.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	
				Meningkatnya Profesionalitas ASN	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	1.02.01.1.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	1.02.01.1.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	
				Kebutuhan Sarana dan Prasarana terpenuhi	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	1.02.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	1.02.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1.02.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1.02.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	1.02.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1.02.01.1.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
					Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	1.02.01.1.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	1.02.01.1.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
					Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1.02.01.1.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	1.02.01.1.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
				Terpenuhinya Barang Milik Daerah	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	1.02.01.1.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	1.02.01.1.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	1.02.01.1.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	1.02.01.1.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	1.02.01.1.07.0002 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	1.02.01.1.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
					Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	1.02.01.1.07.0010 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
					Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	1.02.01.1.07.0011 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
				Terpenuhinya Kebutuhan pelayanan penunjang kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	1.02.01.1.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	1.02.01.1.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	1.02.01.1.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	1.02.01.1.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
				Terpenuhinya pemeliharaan Barang Milik Daerah pada perangkat daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1.02.01.1.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	1.02.01.1.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
						Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	1.02.01.1.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1.02.01.1.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	1.02.01.1.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	1.02.01.1.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
					Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1.02.01.1.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1.02.01.1.09.0011 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
						Kantor atau Bangunan Lainnya	
				Terpenuhinya peningkatan pelayanan BLUD UPTD LABKESDA	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja)	1.02.01.1.10 - Peningkatan Pelayanan BLUD	
					Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja)	1.02.01.1.10.0001 - Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	
1.02.0.00.0.00.01.0007 - UPTD RSUD Labuan							
- Meningkatnya Kualitas Taraf Kesehatan Masyarakat	Meningkatnya Kualitas Taraf Kesehatan Masyarakat	Meningkatknya 4 layanan unggulan kesehatan dengan sistem rujukan berbasis kompetensi	Meningkatnya tata kelola pemerintahan pada Perangkat Daerah		Indeks Reformasi Birokrasi pada Perangkat Daerah (Indeks)	1.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	
				Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	1.02.01.1.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	1.02.01.1.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
					Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	1.02.01.1.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	1.02.01.1.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	1.02.01.1.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	1.02.01.1.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	1.02.01.1.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	1.02.01.1.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi	1.02.01.1.01.0002 - Koordinasi dan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
					Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	
					Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	1.02.01.1.01.0003 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	
					Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	1.02.01.1.01.0004 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	
					Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	1.02.01.1.01.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	
					Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	1.02.01.1.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	1.02.01.1.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
				Meningkatnya kualitas Pengelolaan keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan (Dokumen)	1.02.01.1.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi	1.02.01.1.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
					Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)		
					Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	1.02.01.1.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	1.02.01.1.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/ Bulan)	1.02.01.1.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/ Bulan)	1.02.01.1.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
					Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	1.02.01.1.02.0002 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	
					Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	1.02.01.1.02.0003 - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	
					Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	1.02.01.1.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
					Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan (Dokumen)	1.02.01.1.02.0006 - Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	
				Meningkatnya Profesionalitas ASN	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	1.02.01.1.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	1.02.01.1.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	1.02.01.1.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	
					Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	1.02.01.1.05.0009 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	
				Kebutuhan Sarana dan Prasarana terpenuhi	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	1.02.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	1.02.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	1.02.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1.02.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1.02.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1.02.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	1.02.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1.02.01.1.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1.02.01.1.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
					Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	1.02.01.1.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	1.02.01.1.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
					Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1.02.01.1.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	1.02.01.1.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
					Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	1.02.01.1.06.0010 - Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	
				Terpenuhinya Barang Milik Daerah	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	1.02.01.1.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	1.02.01.1.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	1.02.01.1.07.0001 - Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	1.02.01.1.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
				Terpenuhinya Kebutuhan pelayanan penunjang kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	1.02.01.1.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	1.02.01.1.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air	1.02.01.1.08.0002 - Penyediaan Jasa	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
					dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	1.02.01.1.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
				Terpenuhinya pemeliharaan Barang Milik Daerah pada perangkat daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1.02.01.1.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	1.02.01.1.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya (Unit)	1.02.01.1.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	1.02.01.1.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1.02.01.1.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
					Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1.02.01.1.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya (Unit)	1.02.01.1.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	1.02.01.1.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	1.02.01.1.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
					Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1.02.01.1.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1.02.01.1.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
					Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1.02.01.1.09.0011 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
				Terpenuhinya Peningkatan Pelayanan BLUD UPTD RSUD Labuan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja)	1.02.01.1.10 - Peningkatan Pelayanan BLUD	
					Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja)	1.02.01.1.10.0001 - Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	
			Meningkatnya Kualitas Pelayanan Yang Terakreditasi di RSUD Labuan		Nilai Akreditasi RSUD Labuan (Nilai Akreditasi)	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Meningkatnya kualitas Fasilitas Penunjang Operasional Layanan RSUD Labuan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan (Unit)	1.02.02.1.01 - Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	
					Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar (Unit)	1.02.02.1.01 - Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
						Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	
					Jumlah Barang Penunjang Operasional Rumah Sakit yang Disediakan (Unit)	1.02.02.1.01 - Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	
					Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan (Paket)	1.02.02.1.01 - Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	
					Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit (Unit)	1.02.02.1.01 - Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
					Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Rumah Sakit (Unit)	1.02.02.1.01 - Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	
					Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Rumah Sakit (Unit)	1.02.02.1.01.0009 - Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	
					Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan (Unit)	1.02.02.1.01.0010 - Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	
					Jumlah Barang Penunjang Operasional Rumah Sakit yang Disediakan (Unit)	1.02.02.1.01.0016 - Pengadaan Barang Penunjang Operasional Rumah Sakit	
					Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar (Unit)	1.02.02.1.01.0017 - Pemeliharaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	
					Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000	1.02.02.1.01.0026 - Pengembangan Rumah Sakit	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
					dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit (Unit)		
					Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan (Paket)	1.02.02.1.01.0027 - Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	
			Meningkatnya kualitas tatakelola informasi RSUD Labuan		Persentase digitalisasi layanan kesehatan di RSUD Labuan (%)	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Meningkatnya akses dan mutu layanan Informasi kesehatan RSUD Labuan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan (Dokumen)	1.02.02.1.03 - Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	
					Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan (Dokumen)	1.02.02.1.03.0002 - Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	
			Meningkatnya Kualitas Pelayanan RSUD Labuan		Jumlah SPM Sub Variabel Kegawat daruratan UPTD RSUD Labuan (Angka)	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
						UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Terpenuhinya pelayanan RSUD Labuan yang sesuai standar akreditasi	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan (Dokumen)	1.02.02.1.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	
					Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit (Dokumen)	1.02.02.1.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	
					Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan (Dokumen)	1.02.02.1.02.0019 - Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan	
					Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit (Dokumen)	1.02.02.1.02.0022 - Operasional Pelayanan Rumah Sakit	
1.02.0.00.0.00.01.0008 - UPTD RSUD Cilograng							
- Meningkatnya Kualitas Taraf Kesehatan Masyarakat	Meningkatnya Kualitas Taraf Kesehatan Masyarakat	Meningkatknya 4 layanan unggulan kesehatan dengan sistem rujukan berbasis kompetensi	Meningkatnya tata kelola pemerintahan pada Perangkat Daerah		Indeks Reformasi Birokrasi pada Perangkat Daerah (Indeks)	1.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
				Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	1.02.01.1.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	1.02.01.1.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	1.02.01.1.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	1.02.01.1.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	1.02.01.1.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	1.02.01.1.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	1.02.01.1.01 - Perencanaan,	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
						Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	1.02.01.1.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	1.02.01.1.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	
					Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	1.02.01.1.01.0003 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	
					Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	1.02.01.1.01.0004 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	
					Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	1.02.01.1.01.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	
					Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	1.02.01.1.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	1.02.01.1.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
				Meningkatnya kualitas Pengelolaan keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan (Dokumen)	1.02.01.1.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	1.02.01.1.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	1.02.01.1.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	1.02.01.1.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/ Bulan)	1.02.01.1.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/ Bulan)	1.02.01.1.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
					Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	1.02.01.1.02.0002 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	
					Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	1.02.01.1.02.0003 - Pelaksanaan Penatausahaan dan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
						Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	
					Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	1.02.01.1.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	
					Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan (Dokumen)	1.02.01.1.02.0006 - Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	
				Meningkatnya Profesionalitas ASN	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	1.02.01.1.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	1.02.01.1.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	
				Kebutuhan Sarana dan Prasarana terpenuhi	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	1.02.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	1.02.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1.02.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1.02.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1.02.01.1.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	1.02.01.1.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
					Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1.02.01.1.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	1.02.01.1.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
				Terpenuhinya Barang Milik Daerah	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	1.02.01.1.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	1.02.01.1.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
					Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	1.02.01.1.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	1.02.01.1.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	1.02.01.1.07.0001 - Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	1.02.01.1.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
					Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	1.02.01.1.07.0010 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
					Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	1.02.01.1.07.0011 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
				Terpenuhinya Kebutuhan pelayanan penunjang kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	1.02.01.1.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	1.02.01.1.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	1.02.01.1.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	1.02.01.1.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
				Terpenuhinya pemeliharaan Barang Milik Daerah pada perangkat daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1.02.01.1.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	1.02.01.1.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya (Unit)	1.02.01.1.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	1.02.01.1.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
					Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1.02.01.1.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya (Unit)	1.02.01.1.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	1.02.01.1.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	1.02.01.1.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
					Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1.02.01.1.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1.02.01.1.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
				Terpenuhinya Peningkatan Pelayanan BLUD UPTD RSUD Cilogran	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja)	1.02.01.1.10 - Peningkatan Pelayanan BLUD	
					Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja)	1.02.01.1.10.0001 - Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	
			Meningkatnya Kualitas Pelayanan Yang Terakreditasi di RSUD Cilograng		Nilai Akreditasi RSUD Cilograng (Nilai Akreditasi)	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Meningkatnya Kualitas Fasilitas Penunjang Operasional Layanan RSUD Cilograng	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan (Unit)	1.02.02.1.01 - Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	
					Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar (Unit)	1.02.02.1.01 - Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	
					Jumlah Barang Penunjang Operasional Rumah Sakit yang Disediakan (Unit)	1.02.02.1.01 - Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
						Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	
					Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan (Unit)	1.02.02.1.01 - Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	
					Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan (Paket)	1.02.02.1.01 - Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	
					Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan (Unit)	1.02.02.1.01.0008 - Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	
					Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan (Unit)	1.02.02.1.01.0010 - Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	
					Jumlah Barang Penunjang Operasional Rumah Sakit yang Disediakan (Unit)	1.02.02.1.01.0016 - Pengadaan Barang Penunjang Operasional Rumah Sakit	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
					Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar (Unit)	1.02.02.1.01.0017 - Pemeliharaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	
					Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan (Paket)	1.02.02.1.01.0027 - Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	
			Meningkatnya kualitas tatakelola informasi RSUD Cilograng		Persentase digitalisasi layanan kesehatan RSUD Cilograng (%)	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Meningkatnya Akses dan Mutu Layanan Informasi Kesehatan RSUD Cilograng	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan (Dokumen)	1.02.02.1.03 - Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	
					Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan (Dokumen)	1.02.02.1.03.0002 - Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	
			Meningkatnya Kualitas Pelayanan RSUD Cilograng		Jumlah SPM Sub Variabel Kegawat daruratan UPTD RSUD Cilograng (Nilai)	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
				Terpenuhinya pelayanan RSUD Cilograng yang Sesuai Standar Akreditasi	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan (Dokumen)	1.02.02.1.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	
					Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit (Dokumen)	1.02.02.1.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	
					Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan (Dokumen)	1.02.02.1.02.0019 - Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan	
					Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit (Dokumen)	1.02.02.1.02.0022 - Operasional Pelayanan Rumah Sakit	

Sumber : Hasil Analisis Dinas Kesehatan, 2025

Tabel 4.2 Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Banten

Tahun 2025 – 2029

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				1.103.322.487.205		1.130.078.866.000		1.224.966.212.000		1.312.167.938.000		1.393.643.719.000		
1.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				619.600.948.727		632.344.170.000		648.152.775.000		682.506.594.000		792.846.046.000		
Meningkatnya tata kelola pemerintahan pada Perangkat Daerah	Indeks Reformasi Birokrasi pada Perangkat Daerah (Indeks)	58,88	80	619.600.948.727	83	632.344.170.000	85	648.152.775.000	87	682.506.594.000	90	792.846.046.000	1.02.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kesehatan	
1.02.01.1.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				307.650.000		307.650.000		307.650.000		372.650.000		755.704.000		
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian	12	12	307.650.000	12	307.650.000	12	307.650.000	12	372.650.000	12	755.704.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
	Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)													
	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	3	5		5		5		5		5			
	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	3	5		5		5		5		5			
	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Berita Acara)	0	1		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi	2	1		1		1		1		1			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
	Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)													
	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	2	1		1		1		1		1			
	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah (Data)	0	70		70		70		70		70			
1.02.01.1.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				72.610.000		72.610.000		72.610.000		102.610.000		454.664.000		
Tersusunnya Dokumen Perencanaan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	3	5	72.610.000	5	72.610.000	5	72.610.000	5	102.610.000	5	454.664.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Perangkat Daerah														
1.02.01.1.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				7.580.000		7.580.000		7.580.000		7.580.000		9.580.000		
Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	1	1	7.580.000	1	7.580.000	1	7.580.000	1	7.580.000	1	9.580.000		
1.02.01.1.01.0003 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				7.580.000		7.580.000		7.580.000		7.580.000		9.580.000		
Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	1	1	7.580.000	1	7.580.000	1	7.580.000	1	7.580.000	1	9.580.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Perubahan RKA-SKPD														
1.02.01.1.01.0004 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD				9.380.000		9.380.000		9.380.000		9.380.000		10.380.000		
Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	2	1	9.380.000	1	9.380.000	1	9.380.000	1	9.380.000	1	10.380.000		
1.02.01.1.01.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD				9.380.000		9.380.000		9.380.000		9.380.000		10.380.000		
Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	2	1	9.380.000	1	9.380.000	1	9.380.000	1	9.380.000	1	10.380.000		
1.02.01.1.01.0006 - Koordinasi				14.960.000		14.960.000		14.960.000		24.960.000		24.960.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	12	12	14.960.000	12	14.960.000	12	14.960.000	12	24.960.000	12	24.960.000		
1.02.01.1.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				80.015.000		80.015.000		80.015.000		85.015.000		90.015.000		
Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	3	5	80.015.000	5	80.015.000	5	80.015.000	5	85.015.000	5	90.015.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
1.02.01.1.01.0008 - Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah				18.865.000		18.865.000		18.865.000		28.865.000		28.865.000		
Terlaksananya Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah (Data)	0	70	18.865.000	70	18.865.000	70	18.865.000	70	28.865.000	70	28.865.000		
1.02.01.1.01.0009 - Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				87.280.000		87.280.000		87.280.000		97.280.000		117.280.000		
Terlaksananya Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka	0	1	87.280.000	1	87.280.000	1	87.280.000	1	97.280.000	1	117.280.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Berita Acara)													
1.02.01.1.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				184.984.357.830		184.984.357.830		184.984.357.830		187.046.857.830		198.483.755.830		
Meningkatnya kualitas Pengelolaan keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/ Bulan)	216	1.128	184.984.357.830	1.128	184.984.357.830	1.128	184.984.357.830	1.128	187.046.857.830	1.128	198.483.755.830		
	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	12	12		12		12		12		12			
	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan (Dokumen)	2	1		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi	3	1		1		1		1		1			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
	Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)													
	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	12	12		12		12		12		12			
1.02.01.1.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				183.962.849.430		183.962.849.430		183.962.849.430		185.962.849.430		197.362.247.430		
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/ Bulan)	216	1.128	183.962.849.430	1.128	183.962.849.430	1.128	183.962.849.430	1.128	185.962.849.430	1.128	197.362.247.430		
1.02.01.1.02.0002 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1.002.240.000		1.002.240.000		1.002.240.000		1.064.740.000		1.102.240.000		
Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	3	1	1.002.240.000	1	1.002.240.000	1	1.002.240.000	1	1.064.740.000	1	1.102.240.000		
1.02.01.1.02.0003 - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verif				6.178.800		6.178.800		6.178.800		6.178.800		6.178.800		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
ikasi Keuangan SKPD														
Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	12	12	6.178.800	12	6.178.800	12	6.178.800	12	6.178.800	12	6.178.800		
1.02.01.1.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				12.273.600		12.273.600		12.273.600		12.273.600		12.273.600		
Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	12	12	12.273.600	12	12.273.600	12	12.273.600	12	12.273.600	12	12.273.600		
1.02.01.1.02.0006 - Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan				816.000		816.000		816.000		816.000		816.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Tersedianya Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan (Dokumen)	2	1	816.000	1	816.000	1	816.000	1	816.000	1	816.000		
1.02.01.1.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				30.000.000		30.000.000		30.000.000		30.000.000		30.000.000		
Terkelolanya Barang Milik Daerah secara tertib	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD (Laporan)	0	1	30.000.000	1	30.000.000	1	30.000.000	1	30.000.000	1	30.000.000		
	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	0	2		2		2		2		2			
	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	4	1		1		1		1		1			
1.02.01.1.03.0001 - Penyusunan				10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD														
Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	0	2	10.000.000	2	10.000.000	2	10.000.000	2	10.000.000	2	10.000.000		
1.02.01.1.03.0003 - Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD				10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		
Tersedianya Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD (Laporan)	0	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000		
1.02.01.1.03.0005 - Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		
Terlaksananya Rekonsiliasi dan	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan	4	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)													
1.02.01.1.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				180.096.000		200.000.000		80.000.000		320.000.000		200.000.000		
Meningkatnya Profesionalitas ASN	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	15	5	180.096.000	5	200.000.000	5	80.000.000	5	320.000.000	5	200.000.000		
	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	0	180		180		180		180		180			
	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	2	1		1		0		1		1			
1.02.01.1.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya				105.250.000		120.000.000		0		200.000.000		120.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	2	1	105.250.000	1	120.000.000	0	0	1	200.000.000	1	120.000.000		
1.02.01.1.05.0009 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				37.500.000		40.000.000		40.000.000		80.000.000		40.000.000		
Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	15	5	37.500.000	5	40.000.000	5	40.000.000	5	80.000.000	5	40.000.000		
1.02.01.1.05.0010 - Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				37.346.000		40.000.000		40.000.000		40.000.000		40.000.000		
Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	0	180	37.346.000	180	40.000.000	180	40.000.000	180	40.000.000	180	40.000.000		
1.02.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				2.261.976.375		1.685.191.070		1.030.744.240		1.930.744.240		1.933.744.240		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Terpenuhinya Kebutuhan Sarana dan Prasarana	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	3	1	2.261.976.375	1	1.685.191.070	1	1.030.744.240	1	1.930.744.240	1	1.933.744.240		
	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	4	4		4		4		4		4			
	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	4	4		4		4		4		4			
	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	3	3		3		3		3		3			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
1.02.01.1.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				109.432.400		109.432.400		59.432.400		159.432.400		159.432.400		
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1	109.432.400	1	109.432.400	1	59.432.400	1	159.432.400	1	159.432.400		
1.02.01.1.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				361.819.935		300.000.000		200.000.000		400.000.000		400.000.000		
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	4	4	361.819.935	4	300.000.000	4	200.000.000	4	400.000.000	4	400.000.000		
1.02.01.1.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				298.735.240		250.735.240		150.735.240		350.735.240		350.735.240		
Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	3	3	298.735.240	3	250.735.240	3	150.735.240	3	350.735.240	3	350.735.240		
1.02.01.1.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor				687.352.200		300.000.000		300.000.000		500.000.000		500.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	4	4	687.352.200	4	300.000.000	4	300.000.000	4	500.000.000	4	500.000.000		
1.02.01.1.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				155.436.600		155.436.600		100.436.600		100.436.600		100.436.600		
Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	3	1	155.436.600	1	155.436.600	1	100.436.600	1	100.436.600	1	100.436.600		
1.02.01.1.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				626.060.000		546.446.830		200.000.000		400.000.000		400.000.000		
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	1	1	626.060.000	1	546.446.830	1	200.000.000	1	400.000.000	1	400.000.000		
1.02.01.1.06.0010 - Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				23.140.000		23.140.000		20.140.000		20.140.000		23.140.000		
Terlaksananya Penatausahaan	Jumlah Dokumen Penatausahaan	1	1	23.140.000	1	23.140.000	1	20.140.000	1	20.140.000	1	23.140.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Arsip Dinamis pada SKPD	Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)													
1.02.01.1.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				1.200.709.750		500.000.000		375.000.000		3.518.870.830		4.618.870.830		
Terpenuhinya Barang Milik Daerah	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	0	1	1.200.709.750	1	500.000.000	1	375.000.000	0	3.518.870.830	0	4.618.870.830		
	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	12	5		5		5		5		5			
	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	0	0		0		0		0		5			
	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	8	0		0		0		3		3			
1.02.01.1.07.0001 - Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau				0		0		0		0		2.000.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Kendaraan Dinas Jabatan														
Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	2.000.000.000		
1.02.01.1.07.0002 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				0		0		0		2.118.870.830		2.118.870.830		
Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	8	0	0	0	0	0	0	3	2.118.870.830	3	2.118.870.830		
1.02.01.1.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				900.709.750		400.000.000		300.000.000		900.000.000		400.000.000		
Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	12	5	900.709.750	5	400.000.000	5	300.000.000	5	900.000.000	5	400.000.000		
1.02.01.1.07.0010 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				300.000.000		100.000.000		75.000.000		500.000.000		100.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	0	1	300.000.000	1	100.000.000	1	75.000.000	0	500.000.000	0	100.000.000		
1.02.01.1.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				6.964.122.604		6.572.904.000		5.282.955.830		9.772.904.000		60.372.904.000		
Terpenuhinya Kebutuhan pelayanan penunjang kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	12	6.964.122.604	12	6.572.904.000	12	5.282.955.830	12	9.772.904.000	12	60.372.904.000		
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	12		12		12		12		12			
1.02.01.1.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				1.206.468.000		1.206.468.000		1.006.468.000		1.506.468.000		1.106.468.000		
Tersedianya Jasa Komunikasi,	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air	12	12	1.206.468.000	12	1.206.468.000	12	1.006.468.000	12	1.506.468.000	12	1.106.468.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Sumber Daya Air dan Listrik	dan Listrik yang Disediakan (Laporan)													
1.02.01.1.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				5.757.654.604		5.366.436.000		4.276.487.830		8.266.436.000		59.266.436.000		
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	12	5.757.654.604	12	5.366.436.000	12	4.276.487.830	12	8.266.436.000	12	59.266.436.000		
1.02.01.1.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				3.530.902.068		2.452.117.000		2.052.117.000		2.202.117.000		2.722.117.000		
Terpenuhinya pemeliharaan Barang Milik Daerah pada perangkat daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	2	1	3.530.902.068	1	2.452.117.000	1	2.052.117.000	1	2.202.117.000	1	2.722.117.000		
	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	2	2		2		2		2		2			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	7	1		1		1		1		1			
	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya (Unit)	7	7		7		7		7		7			
	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	78	78		78		78		78		78			
1.02.01.1.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				80.176.000		80.176.000		80.176.000		80.176.000		100.176.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya (Unit)	7	7	80.176.000	7	80.176.000	7	80.176.000	7	80.176.000	7	100.176.000		
1.02.01.1.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				1.696.981.068		1.200.000.000		850.000.000		1.000.000.000		1.500.000.000		
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	78	78	1.696.981.068	78	1.200.000.000	78	850.000.000	78	1.000.000.000	78	1.500.000.000		
1.02.01.1.09.0006 -				355.565.000		355.565.000		355.565.000		355.565.000		355.565.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	7	1	355.565.000	1	355.565.000	1	355.565.000	1	355.565.000	1	355.565.000		
1.02.01.1.09.0009 - Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				750.000.000		400.000.000		350.000.000		350.000.000		350.000.000		
Terlaksananya Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	1	750.000.000	1	400.000.000	1	350.000.000	1	350.000.000	1	350.000.000		
1.02.01.1.09.0010 - Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				216.376.000		216.376.000		216.376.000		216.376.000		216.376.000		
Terlaksananya Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	2	1	216.376.000	1	216.376.000	1	216.376.000	1	216.376.000	1	216.376.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
atau Bangunan Lainnya														
1.02.01.1.09.0011 - Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				431.804.000		200.000.000		200.000.000		200.000.000		200.000.000		
Terlaksananya Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	2	2	431.804.000	2	200.000.000	2	200.000.000	2	200.000.000	2	200.000.000		
Meningkatnya tata kelola pemerintahan pada Perangkat Daerah	Indeks Reformasi Birokrasi pada Perangkat Daerah (Indeks)	58,88	80	619.600.948.727	83	632.344.170.000	85	648.152.775.000	87	682.506.594.000	90	792.846.046.000	1.02.0.00.0.00.01.0001 - UPTD RSUD Banten	
1.02.01.1.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				0		3.500.000		0		3.500.000		7.000.000		
Meningkatnya akuntabilitas	Jumlah Dokumen Perencanaan	0	0	0	5	3.500.000	0	0	5	3.500.000	5	7.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
kinerja perangkat daerah	Perangkat Daerah (Dokumen)													
	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	0	0		1		0		1		1			
	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	0	0		1		0		1		1			
	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	0	0		1		0		1		1			
	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	0	0		1		0		1		1			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	0	0		12		0		12		12			
	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	0	0		3		0		3		3			
1.02.01.1.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				0		500.000		0		500.000		1.000.000		
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	0	0	0	5	500.000	0	0	5	500.000	5	1.000.000		
1.02.01.1.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				0		500.000		0		500.000		1.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	0	0	0	1	500.000	0	0	1	500.000	1	1.000.000		
1.02.01.1.01.0003 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				0		500.000		0		500.000		1.000.000		
Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	0	0	0	1	500.000	0	0	1	500.000	1	1.000.000		
1.02.01.1.01.0004 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD				0		500.000		0		500.000		1.000.000		
Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan	0	0	0	1	500.000	0	0	1	500.000	1	1.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Dokumen DPA-SKPD	Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)													
1.02.01.1.01.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD				0		500.000		0		500.000		1.000.000		
Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	0	0	0	1	500.000	0	0	1	500.000	1	1.000.000		
1.02.01.1.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				0		500.000		0		500.000		1.000.000		
Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan	0	0	0	12	500.000	0	0	12	500.000	12	1.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)													
1.02.01.1.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				0		500.000		0		500.000		1.000.000		
Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	0	0	0	3	500.000	0	0	3	500.000	3	1.000.000		
1.02.01.1.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				0		2.500.000		0		2.500.000		5.000.000		
Meningkatnya kualitas Pengelolaan keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	0	0	0	2	2.500.000	0	0	2	2.500.000	2	5.000.000		
	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/ Bulan)	268	0		0		0		0		0			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	0	0		2		0		2		2			
	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	0	0		1		0		1		1			
	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)	0	0		2		0		2		2			
	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	0	0		0		0		0		0			
	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan (Dokumen)	0	0		1		0		1		1			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
1.02.01.1.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				0		0		0		0		0		
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/ Bulan)	268	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.02.01.1.02.0002 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				0		0		0		0		0		
Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.02.01.1.02.0003 - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				0		500.000		0		500.000		1.000.000		
Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	0	0	0	2	500.000	0	0	2	500.000	2	1.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
1.02.01.1.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				0		500.000		0		500.000		1.000.000		
Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	0	0	0	1	500.000	0	0	1	500.000	1	1.000.000		
1.02.01.1.02.0006 - Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan				0		500.000		0		500.000		1.000.000		
Tersedianya Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan (Dokumen)	0	0	0	1	500.000	0	0	1	500.000	1	1.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
1.02.01.1.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD				0		500.000		0		500.000		1.000.000		
Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD (Laporan)	0	0	0	2	500.000	0	0	2	500.000	2	1.000.000		
1.02.01.1.02.0008 - Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				0		500.000		0		500.000		1.000.000		
Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)	0	0	0	2	500.000	0	0	2	500.000	2	1.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Realisasi Anggaran														
1.02.01.1.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				0		1.000.000		0		1.000.000		2.000.000		
Meningkatnya profesionalitas ASN	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	0	0	0	50	1.000.000	0	0	60	1.000.000	70	2.000.000		
	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	0	0		1		0		1		1			
1.02.01.1.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya				0		500.000		0		500.000		1.000.000		
Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	0	0	0	1	500.000	0	0	1	500.000	1	1.000.000		
1.02.01.1.05.0009 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				0		500.000		0		500.000		1.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	0	0	0	50	500.000	0	0	60	500.000	70	1.000.000		
1.02.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				0		2.000.000		0		2.000.000		4.000.000		
Kebutuhan sarana dan prasarana terpenuhi	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	0	0	0	2	2.000.000	0	0	2	2.000.000	2	4.000.000		
	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	0	0		1		0		1		1			
	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	0	0		2		0		2		2			
	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	0	0		1		0		1		1			
1.02.01.1.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi				0		500.000		0		500.000		1.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	0	0	0	1	500.000	0	0	1	500.000	1	1.000.000		
1.02.01.1.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor				0		500.000		0		500.000		1.000.000		
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	0	0	0	1	500.000	0	0	1	500.000	1	1.000.000		
1.02.01.1.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				0		500.000		0		500.000		1.000.000		
Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	0	0	0	2	500.000	0	0	2	500.000	2	1.000.000		
1.02.01.1.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				0		500.000		0		500.000		1.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	0	0	0	2	500.000	0	0	2	500.000	2	1.000.000		
1.02.01.1.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				0		1.500.000		0		1.500.000		3.000.000		
Terpenuhinya Barang Milik Daerah	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	0	0	0	1	1.500.000	0	0	1	1.500.000	1	3.000.000		
	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	0	0		1		0		1		1			
	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	0	0		1		0		1		1			
	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0	0		3		0		3		3			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
	yang Disediakan (Unit)													
1.02.01.1.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				0		500.000		0		500.000		1.000.000		
Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	0	0	0	1	500.000	0	0	1	500.000	1	1.000.000		
1.02.01.1.07.0009 - Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				0		500.000		0		500.000		1.000.000		
Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	0	0	0	1	500.000	0	0	1	500.000	1	1.000.000		
1.02.01.1.07.0010 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				0		250.000		0		250.000		500.000		
Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	0	0	0	3	250.000	0	0	3	250.000	3	500.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
1.02.01.1.07.0011 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				0		250.000		0		250.000		500.000		
Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	0	0	0	1	250.000	0	0	1	250.000	1	500.000		
1.02.01.1.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				0		1.000.000		0		1.000.000		2.000.000		
Terpenuhinya kebutuhan pelayanan penunjang kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	0	0	0	1	1.000.000	0	0	1	1.000.000	1	2.000.000		
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	0	0		1		0		1		1			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
1.02.01.1.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				0		500.000		0		500.000		1.000.000		
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	0	0	0	1	500.000	0	0	1	500.000	1	1.000.000		
1.02.01.1.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				0		500.000		0		500.000		1.000.000		
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	0	0	0	1	500.000	0	0	1	500.000	1	1.000.000		
1.02.01.1.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				0		2.500.000		0		2.500.000		5.000.000		
Terpenuhinya pemeliharaan barang milik daerah pada	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang	0	0	0	1	2.500.000	0	0	1	2.500.000	1	5.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
perangkat daerah	Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)													
	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	0	0		1		0		1		1			
	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	0	0		1		0		1		1			
	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya (Unit)	0	0		14		0		14		14			
	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	0	0		32		0		32		32			
1.02.01.1.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan				0		500.000		0		500.000		1.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya (Unit)	0	0	0	14	500.000	0	0	14	500.000	14	1.000.000		
1.02.01.1.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				0		500.000		0		500.000		1.000.000		
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	0	0	0	32	500.000	0	0	32	500.000	32	1.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Operasional atau Lapangan														
1.02.01.1.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				0		500.000		0		500.000		1.000.000		
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	0	0	0	1	500.000	0	0	1	500.000	1	1.000.000		
1.02.01.1.09.0009 - Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				0		500.000		0		500.000		1.000.000		
Terlaksananya Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	0	0	0	1	500.000	0	0	1	500.000	1	1.000.000		
1.02.01.1.09.0010 - Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				0		500.000		0		500.000		1.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Terlaksananya Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	0	0	0	1	500.000	0	0	1	500.000	1	1.000.000		
1.02.01.1.10 - Peningkatan Pelayanan BLUD				228.000.000.000		243.000.000.000		258.000.000.000		273.000.000.000		288.000.000.000		
Terpenuhinya peningkatan pelayanan BLUD UPTD RSUD BANTEN	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja)	1	1	228.000.000.000	1	243.000.000.000	1	258.000.000.000	1	273.000.000.000	1	288.000.000.000		
1.02.01.1.10.0001 - Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD				228.000.000.000		243.000.000.000		258.000.000.000		273.000.000.000		288.000.000.000		
Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja)	1	1	228.000.000.000	1	243.000.000.000	1	258.000.000.000	1	273.000.000.000	1	288.000.000.000		
Meningkatnya tata kelola pemerintahan pada Perangkat Daerah	Indeks Reformasi Birokrasi pada Perangkat Daerah (Indeks)	58,88	80	619.600.948.727	83	632.344.170.000	85	648.152.775.000	87	682.506.594.000	90	792.846.046.000	1.02.0.00.0.00.01.0003 - UPTD RSUD Malingping	
1.02.01.1.01 - Perencanaan,				0		3.500.000		0		3.500.000		7.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	12	0	0	12	3.500.000	0	0	12	3.500.000	12	7.000.000		
	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	1	0		1		0		1		1			
	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	5	0		5		0		5		5			
	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	1	0		1		0		1		1			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	1	0		1		0		1		1			
	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	1	0		1		0		1		1			
	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	3	0		3		0		3		3			
1.02.01.1.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				0		500.000		0		500.000		1.000.000		
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	5	0	0	5	500.000	0	0	5	500.000	5	1.000.000		
1.02.01.1.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan				0		500.000		0		500.000		1.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Dokumen RKA-SKPD														
Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	1	0	0	1	500.000	0	0	1	500.000	1	1.000.000		
1.02.01.1.01.0003 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				0		500.000		0		500.000		1.000.000		
Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	1	0	0	1	500.000	0	0	1	500.000	1	1.000.000		
1.02.01.1.01.0004 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD				0		500.000		0		500.000		1.000.000		
Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil	1	0	0	1	500.000	0	0	1	500.000	1	1.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)													
1.02.01.1.01.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD				0		500.000		0		500.000		1.000.000		
Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	1	0	0	1	500.000	0	0	1	500.000	1	1.000.000		
1.02.01.1.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				0		500.000		0		500.000		1.000.000		
Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil	12	0	0	12	500.000	0	0	12	500.000	12	1.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)													
1.02.01.1.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				0		500.000		0		500.000		1.000.000		
Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	3	0	0	3	500.000	0	0	3	500.000	3	1.000.000		
1.02.01.1.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				0		1.500.000		0		1.500.000		3.000.000		
Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan (Dokumen)	1	0	0	1	1.500.000	0	0	1	1.500.000	1	3.000.000		
	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan	126	0		0		0		0		0			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
	Tunjangan ASN (Orang/ Bulan)													
	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	1	0		1		0		1		1			
	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	2	0		2		0		2		2			
	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	12	0		0		0		0		0			
1.02.01.1.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				0		0		0		0		0		
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/ Bulan)	126	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.02.01.1.02.0002 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				0		0		0		0		0		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.02.01.1.02.0003 - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				0		500.000		0		500.000		1.000.000		
Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	2	0	0	2	500.000	0	0	2	500.000	2	1.000.000		
1.02.01.1.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				0		500.000		0		500.000		1.000.000		
Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan	1	0	0	1	500.000	0	0	1	500.000	1	1.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Akhir Tahun SKPD (Laporan)													
1.02.01.1.02.0006 - Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan				0		500.000		0		500.000		1.000.000		
Tersedianya Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan (Dokumen)	1	0	0	1	500.000	0	0	1	500.000	1	1.000.000		
1.02.01.1.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				0		500.000		0		500.000		1.000.000		
Meningkatnya Profesionalitas ASN	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	0	0	0	1	500.000	0	0	1	500.000	1	1.000.000		
1.02.01.1.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya				0		500.000		0		500.000		1.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	0	0	0	1	500.000	0	0	1	500.000	1	1.000.000		
1.02.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				0		2.000.000		0		2.000.000		4.000.000		
Kebutuhan Sarana dan Prasarana Terpenuhi	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	1	0	0	1	2.000.000	0	0	1	2.000.000	1	4.000.000		
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	12	0		12		0		12		12			
	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1	0		1		0		1		1			
	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	0		1		0		1		1			
1.02.01.1.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Peneran				0		500.000		0		500.000		1.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
gan Bangunan Kantor														
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	0	0	1	500.000	0	0	1	500.000	1	1.000.000		
1.02.01.1.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor				0		500.000		0		500.000		1.000.000		
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	1	0	0	1	500.000	0	0	1	500.000	1	1.000.000		
1.02.01.1.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				0		500.000		0		500.000		1.000.000		
Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1	0	0	1	500.000	0	0	1	500.000	1	1.000.000		
1.02.01.1.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				0		500.000		0		500.000		1.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	12	0	0	12	500.000	0	0	12	500.000	12	1.000.000		
1.02.01.1.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				0		2.000.000		0		2.000.000		4.000.000		
Terpenuhinya Barang Milik Daerah	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	0	0	0	1	2.000.000	0	0	1	2.000.000	1	4.000.000		
	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	1	0		1		0		1		1			
	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	3	0		3		0		3		3			
	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau	0	0		1		0		1		1			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
	Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)													
1.02.01.1.07.0001 - Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				0		500.000		0		500.000		1.000.000		
Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	0	0	0	1	500.000	0	0	1	500.000	1	1.000.000		
1.02.01.1.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				0		500.000		0		500.000		1.000.000		
Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	1	0	0	1	500.000	0	0	1	500.000	1	1.000.000		
1.02.01.1.07.0010 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				0		500.000		0		500.000		1.000.000		
Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	3	0	0	3	500.000	0	0	3	500.000	3	1.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
atau Bangunan Lainnya	yang Disediakan (Unit)													
1.02.01.1.07.0011 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				0		500.000		0		500.000		1.000.000		
Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	0	0	0	1	500.000	0	0	1	500.000	1	1.000.000		
1.02.01.1.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				0		1.000.000		0		1.000.000		2.000.000		
Terpenuhinya Kebutuhan Pelayanan Penunjang Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	0	0	12	1.000.000	0	0	12	1.000.000	12	2.000.000		
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang	12	0		12		0		12		12			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
	Disediakan (Laporan)													
1.02.01.1.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				0		500.000		0		500.000		1.000.000		
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	0	0	12	500.000	0	0	12	500.000	12	1.000.000		
1.02.01.1.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				0		500.000		0		500.000		1.000.000		
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	0	0	12	500.000	0	0	12	500.000	12	1.000.000		
1.02.01.1.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				0		2.500.000		0		2.500.000		5.000.000		
Terpenuhinya Pemeliharaan Barang Milik	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang	28	0	0	28	2.500.000	0	0	28	2.500.000	28	5.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Daerah pada Perangkat Daerah	Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)													
	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	0		1		0		1		1			
	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	0		1		0		1		1			
	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	1	0		1		0		1		1			
	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya (Unit)	4	0		4		0		4		4			
1.02.01.1.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan				0		500.000		0		500.000		1.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya (Unit)	4	0	0	4	500.000	0	0	4	500.000	4	1.000.000		
1.02.01.1.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				0		500.000		0		500.000		1.000.000		
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	28	0	0	28	500.000	0	0	28	500.000	28	1.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Operasional atau Lapangan														
1.02.01.1.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				0		500.000		0		500.000		1.000.000		
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	1	0	0	1	500.000	0	0	1	500.000	1	1.000.000		
1.02.01.1.09.0009 - Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				0		500.000		0		500.000		1.000.000		
Terlaksananya Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	0	0	1	500.000	0	0	1	500.000	1	1.000.000		
1.02.01.1.09.0010 - Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				0		500.000		0		500.000		1.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Terlaksananya Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	0	0	1	500.000	0	0	1	500.000	1	1.000.000		
1.02.01.1.10 - Peningkatan Pelayanan BLUD				52.000.000.000		54.000.000.000		55.000.000.000		57.000.000.000		60.000.000.000		
Terpenuhinya Peningkatan Pelayanan BLUD UPTD RSUD Malingping	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja)	1	1	52.000.000.000	1	54.000.000.000	1	55.000.000.000	1	57.000.000.000	1	60.000.000.000		
1.02.01.1.10.0001 - Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD				52.000.000.000		54.000.000.000		55.000.000.000		57.000.000.000		60.000.000.000		
Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja)	1	1	52.000.000.000	1	54.000.000.000	1	55.000.000.000	1	57.000.000.000	1	60.000.000.000		
Meningkatnya tata kelola pemerintahan pada Perangkat Daerah	Indeks Reformasi Birokrasi pada Perangkat Daerah (Indeks)	58,88	80	619.600.948.727	83	632.344.170.000	85	648.152.775.000	87	682.506.594.000	90	792.846.046.000	1.02.0.00.0.00.01.0005 - UPTD Pelatihan Kesehatan	
1.02.01.1.06 - Administrasi				19.000.000		224.000.000		224.000.000		224.000.000		224.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Umum Perangkat Daerah														
Kebutuhan Sarana dan Prasarana terpenuhi	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)		1	19.000.000	1	224.000.000	1	224.000.000	1	224.000.000	1	224.000.000		
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)		1		1		1		1		1			
	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)		1		1		1		1		1			
	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)		1		1		1		1		1			
	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)		1		1		1		1		1			
	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)		1		1		1		1		1			
1.02.01.1.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi				3.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)		1	3.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000		
1.02.01.1.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				3.000.000		65.000.000		65.000.000		65.000.000		65.000.000		
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)		1	3.000.000	1	65.000.000	1	65.000.000	1	65.000.000	1	65.000.000		
1.02.01.1.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				2.000.000		25.000.000		25.000.000		25.000.000		25.000.000		
Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)		1	2.000.000	1	25.000.000	1	25.000.000	1	25.000.000	1	25.000.000		
1.02.01.1.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor				3.000.000		48.000.000		48.000.000		48.000.000		48.000.000		
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)		1	3.000.000	1	48.000.000	1	48.000.000	1	48.000.000	1	48.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
1.02.01.1.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				3.000.000		13.000.000		13.000.000		13.000.000		13.000.000		
Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)		1	3.000.000	1	13.000.000	1	13.000.000	1	13.000.000	1	13.000.000		
1.02.01.1.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				5.000.000		63.000.000		63.000.000		63.000.000		63.000.000		
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)		1	5.000.000	1	63.000.000	1	63.000.000	1	63.000.000	1	63.000.000		
1.02.01.1.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000		
Terpenuhinya Barang Milik Daerah	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	1	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
1.02.01.1.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000		
Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	1	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000		
1.02.01.1.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				477.820.580		477.820.580		477.820.580		477.820.580		477.820.580		
Terpenuhinya Kebutuhan pelayanan penunjang kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)		12	477.820.580	12	477.820.580	12	477.820.580	12	477.820.580	12	477.820.580		
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)		12		12		12		12		12			
1.02.01.1.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				131.121.500		131.121.500		131.121.500		131.121.500		131.121.500		
Tersedianya Jasa Komunikasi,	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi,		12	131.121.500	12	131.121.500	12	131.121.500	12	131.121.500	12	131.121.500		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Sumber Daya Air dan Listrik	Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)													
1.02.01.1.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				346.699.080		346.699.080		346.699.080		346.699.080		346.699.080		
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)		12	346.699.080	12	346.699.080	12	346.699.080	12	346.699.080	12	346.699.080		
1.02.01.1.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				72.000.000		72.000.000		72.000.000		72.000.000		2.072.000.000		
Terpenuhinya pemeliharaan Barang Milik Daerah pada perangkat daerah	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	1	4	72.000.000	4	72.000.000	4	72.000.000	4	72.000.000	4	2.072.000.000		
	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)		1		1		1		1		1			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	0	0		0		0		0		1			
1.02.01.1.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				70.000.000		70.000.000		70.000.000		70.000.000		70.000.000		
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	1	4	70.000.000	4	70.000.000	4	70.000.000	4	70.000.000	4	70.000.000		
1.02.01.1.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				2.000.000		2.000.000		2.000.000		2.000.000		2.000.000		
Terlaksananya Pemeliharaan	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya		1	2.000.000	1	2.000.000	1	2.000.000	1	2.000.000	1	2.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Peralatan dan Mesin Lainnya	yang Dipelihara (Unit)													
1.02.01.1.09.0009 - Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				0		0		0		0		2.000.000.000		
Terlaksananya Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2.000.000.000		
Meningkatnya tata kelola pemerintahan pada Perangkat Daerah	Indeks Reformasi Birokrasi pada Perangkat Daerah (Indeks)	58,88	80	619.600.948.727	83	632.344.170.000	85	648.152.775.000	87	682.506.594.000	90	792.846.046.000	1.02.0.00.0.00.01.0006 - UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah	
1.02.01.1.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				0		47.500.000		0		0		1.000.000		
Meningkatnya Profesionalitas ASN	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	0	0	0	1	47.500.000	0	0	0	0	1	1.000.000		
1.02.01.1.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas				0		47.500.000		0		0		1.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Beserta Atribut Kelengkapannya														
Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	0	0	0	1	47.500.000	0	0	0	0	1	1.000.000		
1.02.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				70.000.000		70.000.000		70.000.000		70.000.000		80.000.000		
Kebutuhan Sarana dan Prasarana terpenuhi	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	1	3	70.000.000	3	70.000.000	3	70.000.000	3	70.000.000	3	80.000.000		
	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	3	3		3		3		3		3			
	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	3	3		3		3		3		3			
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi	0	0		2		0		0		2			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
	dan Konsultasi SKPD (Laporan)													
1.02.01.1.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000		
1.02.01.1.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		
Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	3	3	10.000.000	3	10.000.000	3	10.000.000	3	10.000.000	3	10.000.000		
1.02.01.1.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor				30.000.000		20.000.000		30.000.000		30.000.000		30.000.000		
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	1	3	30.000.000	3	20.000.000	3	30.000.000	3	30.000.000	3	30.000.000		
1.02.01.1.06.0005 - Penyediaan Barang				20.000.000		20.000.000		20.000.000		20.000.000		20.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Cetakan dan Penggandaan														
Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	3	3	20.000.000	3	20.000.000	3	20.000.000	3	20.000.000	3	20.000.000		
1.02.01.1.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				0		10.000.000		0		0		10.000.000		
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	0	0	0	2	10.000.000	0	0	0	0	2	10.000.000		
1.02.01.1.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				20.000.000		21.500.000		20.000.000		20.000.000		23.000.000		
Terpenuhinya Barang Milik Daerah	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0	1	20.000.000	1	21.500.000	1	20.000.000	1	20.000.000	1	23.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
	yang Disediakan (Unit)													
	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	0	0		1		0		0		1			
	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	18	0		1		0		0		1			
	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	0	0		1		0		0		1			
1.02.01.1.07.0002 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				0		500.000		0		0		1.000.000		
Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	0	0	0	1	500.000	0	0	0	0	1	1.000.000		
1.02.01.1.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				0		500.000		0		0		1.000.000		
Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin	18	0	0	1	500.000	0	0	0	0	1	1.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
	Lainnya yang Disediakan (Unit)													
1.02.01.1.07.0010 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				0		500.000		0		0		1.000.000		
Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	0	0	0	1	500.000	0	0	0	0	1	1.000.000		
1.02.01.1.07.0011 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				20.000.000		20.000.000		20.000.000		20.000.000		20.000.000		
Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	0	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000		
1.02.01.1.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan				2.900.707.600		2.900.707.600		2.900.707.600		2.900.707.600		3.000.707.600		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Pemerintahan Daerah														
Terpenuhinya Kebutuhan pelayanan penunjang kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	12	2.900.707.600	12	2.900.707.600	12	2.900.707.600	12	2.900.707.600	12	3.000.707.600		
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	12		12		12		12		12			
1.02.01.1.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				612.000.000		612.000.000		612.000.000		612.000.000		612.000.000		
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	12	612.000.000	12	612.000.000	12	612.000.000	12	612.000.000	12	612.000.000		
1.02.01.1.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				2.288.707.600		2.288.707.600		2.288.707.600		2.288.707.600		2.388.707.600		
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum	12	12	2.288.707.600	12	2.288.707.600	12	2.288.707.600	12	2.288.707.600	12	2.388.707.600		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
	Kantor yang Disediakan (Laporan)													
1.02.01.1.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				160.000.000		160.000.000		160.000.000		160.000.000		160.000.000		
Terpenuhinya pemeliharaan Barang Milik Daerah pada perangkat daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	4	160.000.000	4	160.000.000	4	160.000.000	4	160.000.000	4	160.000.000		
	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	14	7		7		7		7		7			
	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	127	25		25		25		25		25			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
1.02.01.1.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	14	7	100.000.000	7	100.000.000	7	100.000.000	7	100.000.000	7	100.000.000		
1.02.01.1.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				20.000.000		20.000.000		20.000.000		20.000.000		20.000.000		
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	127	25	20.000.000	25	20.000.000	25	20.000.000	25	20.000.000	25	20.000.000		
1.02.01.1.09.0009 - Pemeliharaan/ Rehabilitasi				20.000.000		20.000.000		20.000.000		20.000.000		20.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
Terlaksananya Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000		
1.02.01.1.09.0011 - Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				20.000.000		20.000.000		20.000.000		20.000.000		20.000.000		
Terlaksananya Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	4	20.000.000	4	20.000.000	4	20.000.000	4	20.000.000	4	20.000.000		
1.02.01.1.10 - Peningkatan Pelayanan BLUD				3.000.000.000		3.250.000.000		3.500.000.000		3.750.000.000		4.000.000.000		
Terpenuhinya peningkatan pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang		1	3.000.000.000	1	3.250.000.000	1	3.500.000.000	1	3.750.000.000	1	4.000.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
BLUD UPTD LABKESDA	Pelayanan (Unit Kerja)													
1.02.01.1.10.0001 - Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD				3.000.000.000		3.250.000.000		3.500.000.000		3.750.000.000		4.000.000.000		
Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja)		1	3.000.000.000	1	3.250.000.000	1	3.500.000.000	1	3.750.000.000	1	4.000.000.000		
Meningkatnya tata kelola pemerintahan pada Perangkat Daerah	Indeks Reformasi Birokrasi pada Perangkat Daerah (Indeks)	58,88	80	619.600.948.727	83	632.344.170.000	85	648.152.775.000	87	682.506.594.000	90	792.846.046.000	1.02.0.00.0.00.01.0007 - UPTD RSUD Labuan	
1.02.01.1.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				7.440.000		3.500.000		0		3.500.000		7.000.000		
Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	0	3	7.440.000	3	3.500.000	0	0	3	3.500.000	3	7.000.000		
	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen	0	1		1		0		1		1			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
	Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)													
	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	0	1		1		0		1		1			
	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	0	1		1		0		1		1			
	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	0	12		12		0		12		12			
	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	0	1		1		0		1		1			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	0	1		1		0		1		1			
1.02.01.1.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1.000.000		500.000		0		500.000		1.000.000		
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	0	3	1.000.000	3	500.000	0	0	3	500.000	3	1.000.000		
1.02.01.1.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1.000.000		500.000		0		500.000		1.000.000		
Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	0	1	1.000.000	1	500.000	0	0	1	500.000	1	1.000.000		
1.02.01.1.01.0003 - Koordinasi dan				1.000.000		500.000		0		500.000		1.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD														
Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	0	1	1.000.000	1	500.000	0	0	1	500.000	1	1.000.000		
1.02.01.1.01.0004 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD				1.000.000		500.000		0		500.000		1.000.000		
Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	0	1	1.000.000	1	500.000	0	0	1	500.000	1	1.000.000		
1.02.01.1.01.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD				1.000.000		500.000		0		500.000		1.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	0	1	1.000.000	1	500.000	0	0	1	500.000	1	1.000.000		
1.02.01.1.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1.000.000		500.000		0		500.000		1.000.000		
Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	0	12	1.000.000	12	500.000	0	0	12	500.000	12	1.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Realisasi Kinerja SKPD														
1.02.01.1.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1.440.000		500.000		0		500.000		1.000.000		
Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	0	1	1.440.000	1	500.000	0	0	1	500.000	1	1.000.000		
1.02.01.1.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				6.388.000		1.500.000		0		1.500.000		3.000.000		
Meningkatnya kualitas Pengelolaan keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/ Bulan)	0	0	6.388.000	0	1.500.000	0	0	0	1.500.000	0	3.000.000		
	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	0	0		0		0		0		0			
	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	0	12		12		0		12		12			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	0	1		1		0		1		1			
	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan (Dokumen)	0	1		1		0		1		1			
1.02.01.1.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				0		0		0		0		0		
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/ Bulan)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.02.01.1.02.0002 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				0		0		0		0		0		
Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.02.01.1.02.0003 - Pelaksanaan				2.618.000		500.000		0		500.000		1.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	0	12	2.618.000	12	500.000	0	0	12	500.000	12	1.000.000		
1.02.01.1.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				2.500.000		500.000		0		500.000		1.000.000		
Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	0	1	2.500.000	1	500.000	0	0	1	500.000	1	1.000.000		
1.02.01.1.02.0006 - Pengelolaan dan Penyiapan Bahan				1.270.000		500.000		0		500.000		1.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Tanggapan Pemeriksaan														
Tersedianya Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan (Dokumen)	0	1	1.270.000	1	500.000	0	0	1	500.000	1	1.000.000		
1.02.01.1.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				5.000.000		1.000.000		0		1.000.000		2.000.000		
Meningkatnya Profesionalitas ASN	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	0	30	5.000.000	40	1.000.000	0	0	60	1.000.000	70	2.000.000		
	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	0	0		1		0		1		1			
1.02.01.1.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya				0		500.000		0		500.000		1.000.000		
Tersedianya Pakaian Dinas	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut	0	0	0	1	500.000	0	0	1	500.000	1	1.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Beserta Atribut Kelengkapan	Kelengkapan (Paket)													
1.02.01.1.05.0009 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				5.000.000		500.000		0		500.000		1.000.000		
Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	0	30	5.000.000	40	500.000	0	0	60	500.000	70	1.000.000		
1.02.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				175.000.000		3.500.000		0		3.500.000		7.000.000		
Kebutuhan Sarana dan Prasarana terpenuhi	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	0	1	175.000.000	1	3.500.000	0	0	1	3.500.000	1	7.000.000		
	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	0	1		1		0		1		1			
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	0	1		1		0		1		1			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	0	3		3		0		3		3			
	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	0	3		3		0		3		3			
	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	0	3		3		0		3		3			
	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	0	1		1		0		1		1			
1.02.01.1.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				30.000.000		500.000		0		500.000		1.000.000		
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	0	1	30.000.000	1	500.000	0	0	1	500.000	1	1.000.000		
1.02.01.1.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan				30.000.000		500.000		0		500.000		1.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Perlengkapan Kantor														
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	0	3	30.000.000	3	500.000	0	0	3	500.000	3	1.000.000		
1.02.01.1.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				30.000.000		500.000		0		500.000		1.000.000		
Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	0	3	30.000.000	3	500.000	0	0	3	500.000	3	1.000.000		
1.02.01.1.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor				30.000.000		500.000		0		500.000		1.000.000		
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	0	3	30.000.000	3	500.000	0	0	3	500.000	3	1.000.000		
1.02.01.1.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				30.000.000		500.000		0		500.000		1.000.000		
Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	0	1	30.000.000	1	500.000	0	0	1	500.000	1	1.000.000		
1.02.01.1.06.0009 - Penyelenggaraa				20.000.000		500.000		0		500.000		1.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
n Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	0	1	20.000.000	1	500.000	0	0	1	500.000	1	1.000.000		
1.02.01.1.06.0010 - Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				5.000.000		500.000		0		500.000		1.000.000		
Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	0	1	5.000.000	1	500.000	0	0	1	500.000	1	1.000.000		
1.02.01.1.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				30.000.000		500.000		0		500.000		1.000.000		
Terpenuhinya Barang Milik Daerah	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	0	14	30.000.000	14	500.000	0	0	14	500.000	14	1.000.000		
	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas	0	0		4		0		0		0			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
	atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)													
1.02.01.1.07.0001 - Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				0		250.000		0		0		0		
Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	0	0	0	4	250.000	0	0	0	0	0	0		
1.02.01.1.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				30.000.000		250.000		0		500.000		1.000.000		
Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	0	14	30.000.000	14	250.000	0	0	14	500.000	14	1.000.000		
1.02.01.1.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				42.661.899.600		40.718.039.600		40.717.539.600		41.718.039.600		41.718.539.600		
Terpenuhinya Kebutuhan pelayanan penunjang kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang	0	12	42.661.899.600	12	40.718.039.600	12	40.717.539.600	12	41.718.039.600	12	41.718.539.600		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
	Disediakan (Laporan)													
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	0	12		12		0		12		12			
1.02.01.1.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				1.944.360.000		500.000		0		500.000		1.000.000		
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	0	12	1.944.360.000	12	500.000	0	0	12	500.000	12	1.000.000		
1.02.01.1.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				40.717.539.600		40.717.539.600		40.717.539.600		41.717.539.600		41.717.539.600		
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	0	12	40.717.539.600	12	40.717.539.600	12	40.717.539.600	12	41.717.539.600	12	41.717.539.600		
1.02.01.1.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah				220.000.000		3.000.000		0		3.000.000		6.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah														
Terpenuhinya pemeliharaan Barang Milik Daerah pada perangkat daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	0	1	220.000.000	1	3.000.000	0	0	1	3.000.000	1	6.000.000		
	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	0	1		1		0		1		1			
	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	0	1		1		0		1		1			
	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	0	266		266		0		266		266			
	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya (Unit)				1				1		1			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	0	10		10		0		10		10			
1.02.01.1.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				0		500.000		0		500.000		1.000.000		
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya (Unit)			0	1	500.000		0	1	500.000	1	1.000.000		
1.02.01.1.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan,				100.000.000		500.000		0		500.000		1.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	0	10	100.000.000	10	500.000	0	0	10	500.000	10	1.000.000		
1.02.01.1.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				30.000.000		500.000		0		500.000		1.000.000		
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	0	266	30.000.000	266	500.000	0	0	266	500.000	266	1.000.000		
1.02.01.1.09.0009 - Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				30.000.000		500.000		0		500.000		1.000.000		
Terlaksananya Pemeliharaan/ Rehabilitasi	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	0	1	30.000.000	1	500.000	0	0	1	500.000	1	1.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)													
1.02.01.1.09.0010 - Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				30.000.000		500.000		0		500.000		1.000.000		
Terlaksananya Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	0	1	30.000.000	1	500.000	0	0	1	500.000	1	1.000.000		
1.02.01.1.09.0011 - Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				30.000.000		500.000		0		500.000		1.000.000		
Terlaksananya Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang	0	1	30.000.000	1	500.000	0	0	1	500.000	1	1.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)													
1.02.01.1.10 - Peningkatan Pelayanan BLUD				27.000.000.000		28.250.000.000		30.000.000.000		32.000.000.000		45.000.000.000		
Terpenuhinya Peningkatan Pelayanan BLUD UPTD RSUD Labuan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja)	0	1	27.000.000.000	1	28.250.000.000	1	30.000.000.000	1	32.000.000.000	1	45.000.000.000		
1.02.01.1.10.0001 - Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD				27.000.000.000		28.250.000.000		30.000.000.000		32.000.000.000		45.000.000.000		
Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja)	0	1	27.000.000.000	1	28.250.000.000	1	30.000.000.000	1	32.000.000.000	1	45.000.000.000		
Meningkatnya tata kelola pemerintahan pada Perangkat Daerah	Indeks Reformasi Birokrasi pada Perangkat Daerah (Indeks)	58,88	80	619.600.948.727	83	632.344.170.000	85	648.152.775.000	87	682.506.594.000	90	792.846.046.000	1.02.0.00.0.00.01.0008 - UPTD RSUD Cilograng	
1.02.01.1.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				7.440.000		3.500.000		0		3.500.000		7.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	0	1	7.440.000	1	3.500.000	0	0	1	3.500.000	1	7.000.000		
	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	0	5		5		0		5		5			
	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	0	1		1		0		1		1			
	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	0	1		1		0		1		1			
	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	0	1		1		0		1		1			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	0	12		12		0		12		12			
	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	0	3		3		0		3		3			
1.02.01.1.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1.000.000		500.000		0		500.000		1.000.000		
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	0	5	1.000.000	5	500.000	0	0	5	500.000	5	1.000.000		
1.02.01.1.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1.000.000		500.000		0		500.000		1.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	0	1	1.000.000	1	500.000	0	0	1	500.000	1	1.000.000		
1.02.01.1.01.0003 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1.000.000		500.000		0		500.000		1.000.000		
Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	0	1	1.000.000	1	500.000	0	0	1	500.000	1	1.000.000		
1.02.01.1.01.0004 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD				1.000.000		500.000		0		500.000		1.000.000		
Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan	0	1	1.000.000	1	500.000	0	0	1	500.000	1	1.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)													
1.02.01.1.01.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD				1.000.000		500.000		0		500.000		1.000.000		
Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	0	1	1.000.000	1	500.000	0	0	1	500.000	1	1.000.000		
1.02.01.1.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1.000.000		500.000		0		500.000		1.000.000		
Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan	0	12	1.000.000	12	500.000	0	0	12	500.000	12	1.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)													
1.02.01.1.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1.440.000		500.000		0		500.000		1.000.000		
Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	0	3	1.440.000	3	500.000	0	0	3	500.000	3	1.000.000		
1.02.01.1.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				6.388.000		1.500.000		0		1.500.000		3.000.000		
Meningkatnya kualitas Pengelolaan keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan (Dokumen)	0	1	6.388.000	1	1.500.000	0	0	1	1.500.000	1	3.000.000		
	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan	0	0		0		0		0		0			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
	Tunjangan ASN (Orang/ Bulan)													
	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	0	1		1		0		1		1			
	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	0	2		2		0		2		2			
	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	0	0		0		0		0		0			
1.02.01.1.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				0		0		0		0		0		
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/ Bulan)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.02.01.1.02.0002 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas				0		0		0		0		0		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
ASN														
Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.02.01.1.02.0003 - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				2.618.000		500.000		0		500.000		1.000.000		
Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	0	2	2.618.000	2	500.000	0	0	2	500.000	2	1.000.000		
1.02.01.1.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				2.500.000		500.000		0		500.000		1.000.000		
Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi	0	1	2.500.000	1	500.000	0	0	1	500.000	1	1.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)													
1.02.01.1.02.0006 - Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan				1.270.000		500.000		0		500.000		1.000.000		
Tersedianya Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan (Dokumen)	0	1	1.270.000	1	500.000	0	0	1	500.000	1	1.000.000		
1.02.01.1.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				0		500.000		0		500.000		1.000.000		
Meningkatnya Profesionalitas ASN	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	0	0	0	1	500.000	0	0	1	500.000	1	1.000.000		
1.02.01.1.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut				0		500.000		0		500.000		1.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Kelengkapannya														
Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	0	0	0	1	500.000	0	0	1	500.000	1	1.000.000		
1.02.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				120.000.000		2.000.000		0		2.000.000		4.000.000		
Kebutuhan Sarana dan Prasarana terpenuhi	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	0	1	120.000.000	1	2.000.000	0	0	1	2.000.000	1	4.000.000		
	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	0	1		1		0		1		1			
	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	0	3		1		0		1		1			
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	0	2		2		0		2		2			
1.02.01.1.06.0001 - Penyediaan Komponen				30.000.000		500.000		0		500.000		1.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	0	1	30.000.000	1	500.000	0	0	1	500.000	1	1.000.000		
1.02.01.1.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor				30.000.000		500.000		0		500.000		1.000.000		
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	0	3	30.000.000	1	500.000	0	0	1	500.000	1	1.000.000		
1.02.01.1.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				30.000.000		500.000		0		500.000		1.000.000		
Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	0	1	30.000.000	1	500.000	0	0	1	500.000	1	1.000.000		
1.02.01.1.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan				30.000.000		500.000		0		500.000		1.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Konsultasi SKPD														
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	0	2	30.000.000	2	500.000	0	0	2	500.000	2	1.000.000		
1.02.01.1.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				60.000.000		2.000.000		0		1.500.000		3.000.000		
Terpenuhinya Barang Milik Daerah	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	0	0	60.000.000	1	2.000.000	0	0	0	1.500.000	0	3.000.000		
	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	0	1		1		0		1		1			
	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0	0		2		0		2		2			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
	yang Disediakan (Unit)													
	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	0	14		14		0		14		14			
1.02.01.1.07.0001 - Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				0		500.000		0		0		0		
Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	0	0	0	1	500.000	0	0	0	0	0	0		
1.02.01.1.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				30.000.000		500.000		0		500.000		1.000.000		
Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	0	14	30.000.000	14	500.000	0	0	14	500.000	14	1.000.000		
1.02.01.1.07.0010 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				0		500.000		0		500.000		1.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	0	0	0	2	500.000	0	0	2	500.000	2	1.000.000		
1.02.01.1.07.0011 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				30.000.000		500.000		0		500.000		1.000.000		
Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	0	1	30.000.000	1	500.000	0	0	1	500.000	1	1.000.000		
1.02.01.1.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				47.927.050.320		45.863.382.320		45.862.882.320		46.863.382.320		46.863.882.320		
Terpenuhinya Kebutuhan pelayanan penunjang kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	0	12	47.927.050.320	12	45.863.382.320	0	45.862.882.320	12	46.863.382.320	12	46.863.882.320		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	0	12		12		12		12		12			
1.02.01.1.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				2.064.168.000		500.000		0		500.000		1.000.000		
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	0	12	2.064.168.000	12	500.000	0	0	12	500.000	12	1.000.000		
1.02.01.1.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				45.862.882.320		45.862.882.320		45.862.882.320		46.862.882.320		46.862.882.320		
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	0	12	45.862.882.320	12	45.862.882.320	12	45.862.882.320	12	46.862.882.320	12	46.862.882.320		
1.02.01.1.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan				190.000.000		2.500.000		0		2.500.000		5.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Pemerintahan Daerah														
Terpenuhinya pemeliharaan Barang Milik Daerah pada perangkat daerah	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	0	6	190.000.000	6	2.500.000	0	0	6	2.500.000	6	5.000.000		
	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	0	1		1		0		1		1			
	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	0	1		1		0		1		1			
	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	0	308		308		0		308		308			
	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya (Unit)	0	0		4		0		4		4			
1.02.01.1.09.0001 - Penyediaan Jasa				0		500.000		0		500.000		1.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya (Unit)	0	0	0	4	500.000	0	0	4	500.000	4	1.000.000		
1.02.01.1.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				100.000.000		500.000		0		500.000		1.000.000		
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan	0	6	100.000.000	6	500.000	0	0	6	500.000	6	1.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)													
1.02.01.1.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				30.000.000		500.000		0		500.000		1.000.000		
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	0	308	30.000.000	308	500.000	0	0	308	500.000	308	1.000.000		
1.02.01.1.09.0009 - Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				30.000.000		500.000		0		500.000		1.000.000		
Terlaksananya Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	0	1	30.000.000	1	500.000	0	0	1	500.000	1	1.000.000		
1.02.01.1.09.0010 - Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor				30.000.000		500.000		0		500.000		1.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
atau Bangunan Lainnya														
Terlaksananya Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	0	1	30.000.000	1	500.000	0	0	1	500.000	1	1.000.000		
1.02.01.1.10 - Peningkatan Pelayanan BLUD				15.000.000.000		16.500.000.000		17.000.000.000		19.000.000.000		32.000.000.000		
Terpenuhinya Peningkatan Pelayanan BLUD UPTD RSUD Cilogran	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja)	0	1	15.000.000.000	1	16.500.000.000	1	17.000.000.000	1	19.000.000.000	1	32.000.000.000		
1.02.01.1.10.0001 - Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD				15.000.000.000		16.500.000.000		17.000.000.000		19.000.000.000		32.000.000.000		
Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja)	0	1	15.000.000.000	1	16.500.000.000	1	17.000.000.000	1	19.000.000.000	1	32.000.000.000		
DINAS KESEHATAN INDUK														

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT				461.555.379.422		475.658.506.944		554.994.698.944		605.700.453.944		575.811.542.944		
Meningkatnya Akses dan Mutu Imunisasi Dasar Lengkap Bagi Bayi	Cakupan imunisasi bayi lengkap (Persentase)	75	80	413.297.000	82,5	450.000.000	85	450.000.000	87,5	600.000.000	90	600.000.000	1.02.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kesehatan	
1.02.02.1.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi				394.799.722.422		390.416.500.000		391.329.000.000		396.230.000.000		395.227.300.000		
Meningkatnya kabupaten/kota yang mencapai imunisasi bayi lengkap	Jumlah Dokumen Hasil Investigasi Lanjutan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal oleh Kabupaten/Kota (Dokumen)	8	1	413.297.000	1	450.000.000	1	450.000.000	1	600.000.000	1	600.000.000		
1.02.02.1.02.0021 - Investigasi Lanjutan				413.297.000		450.000.000		450.000.000		600.000.000		600.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal oleh Kabupaten/ Kota														
Terlaksananya Investigasi Lanjutan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal oleh Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Hasil Investigasi Lanjutan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal oleh Kabupaten/Kota (Dokumen)	8	1	413.297.000	1	450.000.000	1	450.000.000	1	600.000.000	1	600.000.000		
Meningkatnya Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan Jiwa Tanpa Diskriminasi	Persentase Penderita gangguan jiwa dan Penyalahguna NAPZA yang mendapatkan pengobatan dan tidak diterlantarkan (%)	100	100	869.514.000	100	900.000.000	100	900.000.000	100	900.000.000	100	901.000.000		
1.02.02.1.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan				394.799.722.422		390.416.500.000		391.329.000.000		396.230.000.000		395.227.300.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Tingkat Daerah Provinsi														
Meningkatnya Pelayanan Kesehatan pada Orang dengan Gangguan Jiwa dan Penyalahguna NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapakan Rehabilitasi Medis (Orang)	189	154	869.514.000	155	900.000.000	156	900.000.000	157	900.000.000	160	901.000.000		
	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
1.02.02.1.02.0013 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)				742.906.000		750.000.000		750.000.000		750.000.000		751.000.000		
Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) (Dokumen)	1	1	742.906.000	1	750.000.000	1	750.000.000	1	750.000.000	1	751.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
1.02.02.1.02.0014 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Kecanduan NAPZA				126.608.000		150.000.000		150.000.000		150.000.000		150.000.000		
Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penyalahguna NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapakan Rehabilitasi Medis (Orang)	189	154	126.608.000	155	150.000.000	156	150.000.000	157	150.000.000	160	150.000.000		
Meningkatnya Akses Jaminan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin/Tidak Mampu	Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional (JKN) ((%))	98,63	98,77	380.697.693.022	98,77	380.991.500.000	98,77	381.000.000.000	99	381.000.000.000	99	381.000.000.000		
1.02.02.1.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi				394.799.722.422		390.416.500.000		391.329.000.000		396.230.000.000		395.227.300.000		
Meningkatnya Keaktifan Peserta Jaminan Kesehatan Nasional bagi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat (Dokumen)	1		380.697.693.022	1	380.991.500.000	1	381.000.000.000	1	381.000.000.000	1	381.000.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Masyarakat Miskin / Tidak Mampu														
1.02.02.1.02.0016 - Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat				380.697.693.022		380.991.500.000		381.000.000.000		381.000.000.000		381.000.000.000		
Terlaksananya Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat (Dokumen)	1		380.697.693.022	1	380.991.500.000	1	381.000.000.000	1	381.000.000.000	1	381.000.000.000		
Meningkatnya Cakupan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif Sesuai Standar	Persentase Ketercapaian Target Pelayanan Kesehatan Usia Produktif Sesuai Standar (%)	50	50	32.135.000	60	35.000.000	65	50.000.000	70	50.000.000	70	50.000.000		
1.02.02.1.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi				394.799.722.422		390.416.500.000		391.329.000.000		396.230.000.000		395.227.300.000		
Meningkatnya Pelayanan Kesehatan Usia Produktif di Kabupaten /	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif (Dokumen)	1	1	32.135.000	1	35.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Kota sesuai standar														
1.02.02.1.02.0004 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif				32.135.000		35.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		
Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Usia Produktif	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif (Dokumen)	1	1	32.135.000	1	35.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000		
UPTD RSUD MALINGPING														
Meningkatnya Fasilitas Layanan Kesehatan Rumah Sakit	Persentase Pengembangan Fasilitas Layanan Kesehatan UPTD RSUD Malingping (%)	80	83	0	83	1.500.000	83	0	88	1.500.000	100	25.004.000.000	1.02.0.00.0.00.01.0003 - UPTD RSUD Malingping	
1.02.02.1.01 - Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi				0		1.500.000		0		1.500.000		25.004.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Meningkatnya Kualitas Fasilitas Penunjang Operasional Layanan RSUD Malingping	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan (Paket)	1	0	0	1	1.500.000	1	0	1	1.500.000	6	25.004.000.000		
	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Rumah Sakit (Unit)	1	0		1		0		1		1			
	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar (Unit)	15	0		1		0		1		1			
	Jumlah Barang Penunjang Operasional Rumah Sakit yang Disediakan (Unit)	30	0		1		0		1		1			
	Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah	0	0		1		0		1		1			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
	sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit (Unit)													
	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan (Unit)	3	0		1		0		1		3			
1.02.02.1.01.0009 - Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit				0		250.000		0		250.000		1.000.000		
Terlaksananya Pemeliharaan Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan Rumah Sakit	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Rumah Sakit (Unit)	1	0	0	1	250.000	0	0	1	250.000	1	1.000.000		
1.02.02.1.01.0010 - Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas				0		250.000		0		250.000		5.000.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Layanan Kesehatan														
Tersedianya Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan (Unit)	3	0	0	1	250.000	0	0	1	250.000	3	5.000.000.000		
1.02.02.1.01.0016 - Pengadaan Barang Penunjang Operasional Rumah Sakit				0		250.000		0		250.000		1.000.000		
Tersedianya Barang Penunjang Operasional Rumah Sakit	Jumlah Barang Penunjang Operasional Rumah Sakit yang Disediakan (Unit)	30	0	0	1	250.000	0	0	1	250.000	1	1.000.000		
1.02.02.1.01.0017 - Pemeliharaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan				0		250.000		0		250.000		1.000.000		
Terpeliharanya Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar (Unit)	15	0	0	1	250.000	0	0	1	250.000	1	1.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Kesehatan Sesuai Standar														
1.02.02.1.01.0026 - Pengembangan Rumah Sakit				0		250.000		0		250.000		1.000.000		
Tersedianya Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit	Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit (Unit)	0	0	0	1	250.000	0	0	1	250.000	1	1.000.000		
1.02.02.1.01.0027 - Pengadaan Obat, Bahan				0		250.000		0		250.000		20.000.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan														
Tersedianya Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan (Paket)	1	0	0	1	250.000	1	0	1	250.000	6	20.000.000.000		
DINKES INDUK														
Meningkatnya Kabupaten/Kota yang Melaksanakan STBM	Persentase Kabupaten/Kota yang Melaksanakan STBM (%)	25	50	1.143.406.000	62,5	700.000.000	62,5	700.000.000	75	1.000.000.000	75	1.000.000.000	1.02.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kesehatan	
1.02.02.1.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi				394.799.722.422		390.416.500.000		391.329.000.000		396.230.000.000		395.227.300.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Meningkatnya Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan kabupaten/ kota sehat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Dokumen)	8	1	1.143.406.000	1	700.000.000	1	700.000.000	1	1.000.000.000	1	1.000.000.000		
1.02.02.1.02.0008 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				1.143.406.000		700.000.000		700.000.000		1.000.000.000		1.000.000.000		
Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Dokumen)	8	1	1.143.406.000	1	700.000.000	1	700.000.000	1	1.000.000.000	1	1.000.000.000		
Meningkatnya ketersediaan obat di Fasilitas Pelayanan Kesehatan sesuai standar	Persentase Kabupaten / Kota yang memiliki ketersediaan obat publik dan perbekalan kesehatan sesuai standar (%)	96	97	40.230.000.000	97	31.075.806.944	97	48.949.491.944	97	62.703.521.692	97	62.985.070.500		
1.02.02.1.01 - Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP				49.230.000.000		71.075.806.944		148.949.491.944		172.442.746.944		87.408.102.500		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi														
terpenuhinya obat publik dan perbekalan kesehatan di Kab/kota secara merata	Jumlah dokumen distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan ke Fasilitas Kesehatan (Dokumen)	1	1	40.230.000.000	1	31.075.806.944	1	48.949.491.944	1	62.703.521.692	1	62.985.070.500		
	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan (Paket)	4	4		4		4		4		4			
1.02.02.1.01.0025 - Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan				230.000.000		50.000.000		230.000.000		230.000.000		233.700.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Terlaksananya distribusi Alat Kesehatan, Obat,Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan	Jumlah dokumen distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan ke Fasilitas Kesehatan (Dokumen)	1	1	230.000.000	1	50.000.000	1	230.000.000	1	230.000.000	1	233.700.000		
1.02.02.1.01.0027 - Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan				40.000.000.000		31.025.806.944		48.719.491.944		62.473.521.692		62.751.370.500		
UPTD RSUD BANTEN														
Tersedianya Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan (Paket)	4	4	40.000.000.000	4	31.025.806.944	4	48.719.491.944	4	62.473.521.692	4	62.751.370.500		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Meningkatnya kualitas akses dan mutu pelayanan kesehatan penunjang RSUD Banten	Persentase sarana dan prasarana RSUD Banten sesuai standar yang terpenuhi (%)	60	70	1.000.000	70	2.000.000	75	1.000.000	90	2.000.000	100	3.143.933.444	1.02.0.00.0.00.01.0001 - UPTD RSUD Banten	
1.02.02.1.01 - Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi				1.000.000		2.000.000		1.000.000		2.000.000		3.143.933.444		
Meningkatnya kualitas Fasilitas Sarpras RSUD Banten	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Rumah Sakit (Unit)	0	0	1.000.000	1	1.000.000	0	1.000.000	1	1.000.000	1	4.000.000		
	Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) yang Melayani Konsultasi Jarak Jauh Antar Fasyankes Melalui Pelayanan Telemedicine untuk	0	8		10		10		10		10			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
	Mendapatkan Akses Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas (Unit)													
	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun (Unit)	0	0		1		0		1		1			
1.02.02.1.01.0002 - Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya				0		500.000		0		500.000		2.000.000		
Terbangunnya Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun (Unit)	0	0	0	1	500.000	0	0	1	500.000	1	2.000.000		
1.02.02.1.01.0009 - Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit				0		250.000		0		250.000		1.000.000		
Terlaksananya Pemeliharaan Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan Rumah Sakit	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Rumah Sakit (Unit)	0	0	0	1	250.000	0	0	1	250.000	1	1.000.000		
1.02.02.1.01.0020 - Penyediaan Telemedicine di Fasilitas				1.000.000		250.000		1.000.000		250.000		1.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Pelayanan Kesehatan														
Tersedianya Layanan Konsultasi Jarak Jauh Antar Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) Melalui Pelayanan Telemedicine untuk Mendapatkan Akses Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas	Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) yang Melayani Konsultasi Jarak Jauh Antar Fasyankes Melalui Pelayanan Telemedicine untuk Mendapatkan Akses Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas (Unit)	0	8	1.000.000	10	250.000	10	1.000.000	10	250.000	10	1.000.000		
Meningkatnya kualitas pemenuhan alat kesehatan, bahan medis habis pakai, dan makan minum pasien RSUD Banten	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar (Unit)	0	0	0	10	1.000.000	0	0	20	1.000.000	30	3.139.933.444		
	Jumlah Barang Penunjang Operasional Rumah Sakit yang Disediakan (Unit)	0	0		10		30		20		30			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan (Paket)	0	0		4		0		4		4			
	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan (Unit)	3	0		6		20		9		12			
1.02.02.1.01.0010 - Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan				0		250.000		0		250.000		1.000.000		
Tersedianya Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan (Unit)	3	0	0	6	250.000	20	0	9	250.000	12	1.000.000		
1.02.02.1.01.0016 - Pengadaan Barang Penunjang Operasional Rumah Sakit				0		250.000		0		250.000		1.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Tersedianya Barang Penunjang Operasional Rumah Sakit	Jumlah Barang Penunjang Operasional Rumah Sakit yang Disediakan (Unit)	0	0	0	10	250.000	30	0	20	250.000	30	1.000.000		
1.02.02.1.01.0017 - Pemeliharaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan				0		250.000		0		250.000		1.000.000		
Terpeliharanya Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar (Unit)	0	0	0	10	250.000	0	0	20	250.000	30	1.000.000		
1.02.02.1.01.0027 - Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan				0		250.000		0		250.000		3.136.933.444		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Tersedianya Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan (Paket)	0	0	0	4	250.000	0	0	4	250.000	4	3.136.933.444		
DINKES INDUK														
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesehatan Primer	Persentase Kualitas Pelayanan Kesehatan Primer sesuai standar (%)	33,33	82	3.100.000.000	98	2.400.000.000	100	2.670.000.000	100	3.670.000.000	100	3.670.000.000	1.02.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kesehatan	
1.02.02.1.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi				394.799.722.422		390.416.500.000		391.329.000.000		396.230.000.000		395.227.300.000		
Meningkatnya cakupan sarana prasarana bagi fasilitas kesehatan pertama	Jumlah Dokumen Hasil Verifikasi dan Penilaian Kelayakan Puskesmas untuk Registrasi Puskesmas (Dokumen)	1	1	300.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
1.02.02.1.02.0020 - Verifikasi dan Penilaian Kelayakan Puskesmas untuk Registrasi Puskesmas				300.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		
Terverifikasi dan Terlaksananya Penilaian Kelayakan Puskesmas untuk Registrasi Puskesmas	Jumlah Dokumen Hasil Verifikasi dan Penilaian Kelayakan Puskesmas untuk Registrasi Puskesmas (Dokumen)	1	1	300.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000		
Meningkatnya Pelayanan Kesehatan Tradisional	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya (Dokumen)	2	1	300.000.000	1	300.000.000	1	570.000.000	1	570.000.000	1	570.000.000		
1.02.02.1.02.0010 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisonal, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan				300.000.000		300.000.000		570.000.000		570.000.000		570.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Tradisional Lainnya														
Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya (Dokumen)	2	1	300.000.000	1	300.000.000	1	570.000.000	1	570.000.000	1	570.000.000		
Terlaksananya pelayanan Kesehatan gratis Masyarakat Umum baik di Puskesmas maupun di luar puskesmas	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan (Dokumen)	2	1	2.500.000.000	1	2.000.000.000	1	2.000.000.000	1	3.000.000.000	1	3.000.000.000		
1.02.02.1.02.0019 - Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan				2.500.000.000		2.000.000.000		2.000.000.000		3.000.000.000		3.000.000.000		
Terbinanya Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan (Dokumen)	2	1	2.500.000.000	1	2.000.000.000	1	2.000.000.000	1	3.000.000.000	1	3.000.000.000		
Meningkatnya Kualitas Pelayanan	Persentase RS Rujukan Provinsi	90	92	1.738.450.000	93	1.465.000.000	94	1.550.000.000	95	1.550.000.000	95	6.546.300.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Kesehatan Rujukan	yang Terkareditasi (%)													
1.02.02.1.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi				394.799.722.422		390.416.500.000		391.329.000.000		396.230.000.000		395.227.300.000		
Optimalnya pelayanan RS berbasis teknologi	Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersedia, Terkelola dan Terintegrasi dengan Rumah Sakit dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) (Unit)	8	8	149.000.000	8	65.000.000	8	100.000.000	8	100.000.000	8	96.300.000		
1.02.02.1.02.0023 - Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)				149.000.000		65.000.000		100.000.000		100.000.000		96.300.000		
Tersedianya dan Terkelolanya Public Safety Center (PSC	Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersedia, Terkelola dan Terintegrasi dengan	8	8	149.000.000	8	65.000.000	8	100.000.000	8	100.000.000	8	96.300.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
119) yang Terintegrasi dengan Rumah Sakit dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Rumah Sakit dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) (Unit)													
1.02.02.1.04 - Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi				1.589.450.000		1.400.000.000		1.450.000.000		1.450.000.000		6.450.000.000		
Tersedianya fasilitas Kesehatan Rujukan (RS) yang menjalankan sistem rujukan sesuai SOP	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan Kesehatan (Unit)	40	95	1.589.450.000	100	1.400.000.000	105	1.450.000.000	110	1.450.000.000	110	6.450.000.000		
	Jumlah Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya (Unit)	106	15		16		18		19		20			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
1.02.02.1.04.0001 - Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Perizinan Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan				334.530.000		200.000.000		250.000.000		250.000.000		250.000.000		
Tersedianya Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya	Jumlah Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya (Unit)	106	15	334.530.000	16	200.000.000	18	250.000.000	19	250.000.000	20	250.000.000		
1.02.02.1.04.0003 - Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan				1.254.920.000		1.200.000.000		1.200.000.000		1.200.000.000		6.200.000.000		
Terlaksananya Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan yang	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM)	40	95	1.254.920.000	100	1.200.000.000	105	1.200.000.000	110	1.200.000.000	110	6.200.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM)	Pelayanan Kesehatan (Unit)													
UPTD RSUD CILOGRANG														
Meningkatnya Kualitas Pelayanan RSUD Cilograng	Jumlah SPM Sub Variabel Kegawat daruratan UPTD RSUD Cilograng (Nilai)	1	2	10.000.000	4	500.000	6	0	7	1.000.000	8	2.000.000	1.02.0.00.0.00.01.0008 - UPTD RSUD Cilograng	
1.02.02.1.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi				10.000.000		500.000		0		1.000.000		2.000.000		
Terpenuhinya pelayanan RSUD Cilograng yang Sesuai Standar Akreditasi	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan (Dokumen)		1	10.000.000	1	500.000	0	0	1	1.000.000	1	2.000.000		
	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit (Dokumen)	0	4		4		0		4		4			
1.02.02.1.02.0019 - Pembinaan Pelaksanaan				5.000.000		250.000		0		500.000		1.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Upaya Pelayanan Kesehatan														
Terbinanya Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan (Dokumen)		1	5.000.000	1	250.000	0	0	1	500.000	1	1.000.000		
1.02.02.1.02.0022 - Operasional Pelayanan Rumah Sakit				5.000.000		250.000		0		500.000		1.000.000		
Tersedianya Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit (Dokumen)	0	4	5.000.000	4	250.000	0	0	4	500.000	4	1.000.000		
UPTD RSUD LABUAN														
Meningkatnya Kualitas Pelayanan RSUD Labuan	Jumlah SPM Sub Variabel Kegawat daruratan UPTD RSUD Labuan (Angka)	1	2	10.000.000	4	500.000	6	0	7	1.000.000	8	2.000.000	1.02.0.00.0.00.01.0007 - UPTD RSUD Labuan	
1.02.02.1.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi				10.000.000		500.000		0		1.000.000		2.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Terpenuhinya pelayanan RSUD Labuan yang sesuai standar akreditasi	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan (Dokumen)		1	10.000.000	1	500.000	0	0	1	1.000.000	1	2.000.000		
	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit (Dokumen)		1		1		0		1		1			
1.02.02.1.02.0019 - Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan				5.000.000		250.000		0		500.000		1.000.000		
Terbinanya Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan (Dokumen)		1	5.000.000	1	250.000	0	0	1	500.000	1	1.000.000		
1.02.02.1.02.0022 - Operasional Pelayanan Rumah Sakit				5.000.000		250.000		0		500.000		1.000.000		
Tersedianya Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit (Dokumen)		1	5.000.000	1	250.000	0	0	1	500.000	1	1.000.000		
UPTD RSUD MALINGPING														
Meningkatnya Kualitas Pelayanan	Jumlah SPM Sub Variabel Kegawat daruratan UPTD	1	2	0	4	500.000	6	0	7	500.000	8	2.000.000	1.02.0.00.0.00.01.0003 -	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
UPTD RSUD Malingping	RSUD Malingping (Angka)												UPTD RSUD Malingping	
1.02.02.1.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi				0		500.000		0		500.000		2.000.000		
Terpenuhinya pelayanan RSUD Malingping yang Sesuai Standar Akreditasi	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan (Dokumen)	3	0	0	1	500.000	0	0	1	500.000	1	2.000.000		
	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit (Dokumen)	4	0		1		0		1		1			
1.02.02.1.02.0019 - Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan				0		250.000		0		250.000		1.000.000		
Terbinanya Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan (Dokumen)	3	0	0	1	250.000	0	0	1	250.000	1	1.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
1.02.02.1.02.0022 - Operasional Pelayanan Rumah Sakit				0		250.000		0		250.000		1.000.000		
Tersedianya Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit (Dokumen)	4	0	0	1	250.000	0	0	1	250.000	1	1.000.000		
UPTD RSUD BANTEN														
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Yang Terakreditasi di RSUD Banten	Nilai Akreditasi RSUD Banten (Nilai Akreditasi)	Paripurna	Paripurna	0	Paripurna	500.000	Paripurna	0	Paripurna	500.000	Paripurna	1.000.000	1.02.0.00.0.00.01.0001 - UPTD RSUD Banten	
1.02.02.1.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi				0		500.000		0		500.000		1.000.000		
Terpenuhinya pelayanan RSUD Banten yang sesuai standar akreditasi	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan (Dokumen)	0	0	0	1	500.000	0	0	1	500.000	1	1.000.000		
	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit (Dokumen)	0	0		1		0		1		1			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
1.02.02.1.02.0019 - Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan				0		250.000		0		250.000		500.000		
Terbinanya Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan (Dokumen)	0	0	0	1	250.000	0	0	1	250.000	1	500.000		
1.02.02.1.02.0022 - Operasional Pelayanan Rumah Sakit				0		250.000		0		250.000		500.000		
Tersedianya Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit (Dokumen)	0	0	0	1	250.000	0	0	1	250.000	1	500.000		
UPTD RSUD CILOGRANG														
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Yang Terakreditasi di RSUD Cilograng	Nilai Akreditasi RSUD Cilograng (Nilai Akreditasi)	Madya	Madya	7.120.000.000	Madya	6.001.000.000	Utama	6.000.000.000	Utama	10.002.000.000	Utama	25.201.000.000	1.02.0.00.0.00.01.0008 - UPTD RSUD Cilograng	
1.02.02.1.01 - Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP				7.120.000.000		6.001.000.000		6.000.000.000		10.002.000.000		25.201.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi														
Meningkatnya Kualitas Fasilitas Penunjang Operasional Layanan RSUD Cilograng	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan (Unit)	0	1	7.120.000.000	1	6.001.000.000	0	6.000.000.000	1	10.002.000.000	1	25.201.000.000		
	Jumlah Barang Penunjang Operasional Rumah Sakit yang Disediakan (Unit)	0	1		1				1		1			
	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar (Unit)	0	2		2		0		2		2			
	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan (Unit)	0	2		2		0		2		2			
	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan	0	6		6		6		6		6			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
	Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan (Paket)													
1.02.02.1.01.0008 - Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya				30.000.000		250.000		0		500.000		100.000.000		
Terlaksananya Rehabilitasi dan Pemeliharaan Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan pada Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan (Unit)	0	1	30.000.000	1	250.000	0	0	1	500.000	1	100.000.000		
1.02.02.1.01.0010 - Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan				30.000.000		250.000		0		500.000		5.000.000.000		
Tersedianya Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan (Unit)	0	2	30.000.000	2	250.000	0	0	2	500.000	2	5.000.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Layanan Kesehatan														
1.02.02.1.01.0016 - Pengadaan Barang Penunjang Operasional Rumah Sakit				30.000.000		250.000		0		500.000		1.000.000		
Tersedianya Barang Penunjang Operasional Rumah Sakit	Jumlah Barang Penunjang Operasional Rumah Sakit yang Disediakan (Unit)	0	1	30.000.000	1	250.000		0	1	500.000	1	1.000.000		
1.02.02.1.01.0017 - Pemeliharaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan				30.000.000		250.000		0		500.000		100.000.000		
Terpeliharanya Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar (Unit)	0	2	30.000.000	2	250.000	0	0	2	500.000	2	100.000.000		
1.02.02.1.01.0027 - Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,,				7.000.000.000		6.000.000.000		6.000.000.000		10.000.000.000		20.000.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan														
Tersedianya Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan (Paket)	0	6	7.000.000.000	6	6.000.000.000	6	6.000.000.000	6	10.000.000.000	6	20.000.000.000		
UPTD RSUD LABUAN														
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Yang Terakreditasi di RSUD Labuan	Nilai Akreditasi RSUD Labuan (Nilai Akreditasi)	Madya	Madya	7.180.000.000	Madya	6.001.000.000	Utama	6.000.000.000	Utama	15.002.500.000	Utama	32.002.000.000	1.02.0.00.0.00.01.0007 - UPTD RSUD Labuan	
1.02.02.1.01 - Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi				7.180.000.000		6.001.000.000		6.000.000.000		15.002.500.000		32.002.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Meningkatnya kualitas Fasilitas Penunjang Operasional Layanan RSUD Labuan	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Rumah Sakit (Unit)	0	0	7.180.000.000	0	6.001.000.000	0	6.000.000.000	1	15.002.500.000	1	32.002.000.000		
	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan (Unit)	0	2		2		0		2		2			
	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar (Unit)	0	2		2		0		2		2			
	Jumlah Barang Penunjang Operasional Rumah Sakit yang Disediakan (Unit)	0	1		1		0		1		1			
	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan (Paket)	0	4		4		4		4		4			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
	Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit (Unit)	0	0		1		0		1		1			
1.02.02.1.01.0009 - Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit				0		0		0		500.000		1.000.000		
Terlaksananya Pemeliharaan Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan Rumah Sakit	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Rumah Sakit (Unit)	0	0	0	0	0	0	0	1	500.000	1	1.000.000		
1.02.02.1.01.0010 - Pengadaan Alat Kesehatan/Alat				30.000.000		250.000		0		500.000		5.000.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan														
Tersedianya Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan (Unit)	0	2	30.000.000	2	250.000	0	0	2	500.000	2	5.000.000.000		
1.02.02.1.01.0016 - Pengadaan Barang Penunjang Operasional Rumah Sakit				100.000.000		250.000		0		500.000		1.000.000.000		
Tersedianya Barang Penunjang Operasional Rumah Sakit	Jumlah Barang Penunjang Operasional Rumah Sakit yang Disediakan (Unit)	0	1	100.000.000	1	250.000	0	0	1	500.000	1	1.000.000.000		
1.02.02.1.01.0017 - Pemeliharaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan				50.000.000		250.000		0		500.000		1.000.000		
Terpeliharanya Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang	0	2	50.000.000	2	250.000	0	0	2	500.000	2	1.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Layanan Kesehatan Sesuai Standar	Terpelihara Sesuai Standar (Unit)													
1.02.02.1.01.0026 - Pengembangan Rumah Sakit				0		250.000		0		500.000		1.000.000.000		
Tersedianya Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit	Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit (Unit)	0	0	0	1	250.000	0	0	1	500.000	1	1.000.000.000		
1.02.02.1.01.0027 - Pengadaan Obat, Bahan				7.000.000.000		6.000.000.000		6.000.000.000		15.000.000.000		25.000.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan														
Tersedianya Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan (Paket)	0	4	7.000.000.000	4	6.000.000.000	4	6.000.000.000	4	15.000.000.000	4	25.000.000.000		
Meningkatnya Kualitas SPM Bidang Kesehatan Provinsi	Persentase Ketercapaian SPM Bidang Kesehatan Provinsi (%)	100	100	1.481.822.400	100	950.000.000	100	1.179.000.000	100	1.180.000.000	100	1.180.000.000	1.02.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kesehatan	
1.02.02.1.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi				394.799.722.422		390.416.500.000		391.329.000.000		396.230.000.000		395.227.300.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Meningkatnya Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan yang Mendukung Tercapainya SPM Bidang Kesehatan Provinsi	Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Layanan Kesehatan pada Kondisi Kejadian Luar Biasa Provinsi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	300	310	1.481.822.400	320	950.000.000	330	1.179.000.000	340	1.180.000.000	350	1.180.000.000		
	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan (Dokumen)	8	1		1		1		1		1			
	Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Layanan Kesehatan yang Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/Atau Berpotensi Bencana Provinsi Sesuai Standar (Orang)	500	560		580		600		620		650			
	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji (Dokumen)	8	1		1		1		1		1			
1.02.02.1.02.0001 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk				589.588.800		300.000.000		379.000.000		380.000.000		380.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana														
Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Provinsi Sesuai Standar	Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Layanan Kesehatan yang Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/Atau Berpotensi Bencana Provinsi Sesuai Standar (Orang)	500	560	589.588.800	580	300.000.000	600	379.000.000	620	380.000.000	650	380.000.000		
1.02.02.1.02.0002 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)				516.396.000		300.000.000		450.000.000		450.000.000		450.000.000		
Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi	Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Layanan Kesehatan pada Kondisi Kejadian Luar Biasa Provinsi yang	300	310	516.396.000	320	300.000.000	330	450.000.000	340	450.000.000	350	450.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Kejadian Luar Biasa (KLB) Provinsi Sesuai Standar	Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)													
1.02.02.1.02.0012 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji				75.135.600		70.000.000		70.000.000		70.000.000		70.000.000		
Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji (Dokumen)	8	1	75.135.600	1	70.000.000	1	70.000.000	1	70.000.000	1	70.000.000		
1.02.02.1.02.0017 - Pengelolaan Surveilans Kesehatan				300.702.000		280.000.000		280.000.000		280.000.000		280.000.000		
Terlaksananya Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan (Dokumen)	8	1	300.702.000	1	280.000.000	1	280.000.000	1	280.000.000	1	280.000.000		
UPTD RSUD BANTEN														
Meningkatnya kualitas tatakelola Informasi Kesehatan di RSUD Banten	Persentase digitalisasi layanan kesehatan di RSUD Banten (%)	70	75	0	80	250.000	85	0	90	250.000	100	1.000.000	1.02.0.00.0.00.01.0001 - UPTD RSUD Banten	
1.02.02.1.03 - Penyelenggaraan Sistem				0		250.000		0		250.000		1.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi														
Meningkatnya akses dan mutu layanan Informasi kesehatan RSUD Banten	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan (Dokumen)	0	0	0	2	250.000	0	0	2	250.000	2	1.000.000		
1.02.02.1.03.0002 - Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan				0		250.000		0		250.000		1.000.000		
Terlaksananya Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan (Dokumen)	0	0	0	2	250.000	0	0	2	250.000	2	1.000.000		
UPTD RSUD CILOGRANG														
Meningkatnya kualitas tatakelola informasi RSUD Cilograng	Persentase digitalisasi layanan kesehatan RSUD Cilograng (%)	50	60	25.000.000	70	250.000	80	0	90	500.000	100	1.000.000	1.02.0.00.0.00.01.0008 - UPTD RSUD Cilograng	
1.02.02.1.03 - Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi				25.000.000		250.000		0		500.000		1.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Meningkatnya Akses dan Mutu Layanan Informasi Kesehatan RSUD Cilograng	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan (Dokumen)	0	1	25.000.000	1	250.000	1	0	1	500.000	1	1.000.000		
1.02.02.1.03.0002 - Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan				25.000.000		250.000		0		500.000		1.000.000		
Terlaksananya Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan (Dokumen)	0	1	25.000.000	1	250.000	1	0	1	500.000	1	1.000.000		
UPTD RSUD LABUAN														
Meningkatnya kualitas tatakelola informasi RSUD Labuan	Persentase digitalisasi layanan kesehatan di RSUD Labuan (%)	50	60	25.000.000	70	250.000	80	0	90	500.000	100	100.000.000	1.02.0.00.0.00.01.0007 - UPTD RSUD Labuan	
1.02.02.1.03 - Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi				25.000.000		250.000		0		500.000		100.000.000		
Meningkatnya akses dan mutu layanan Informasi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi	0	1	25.000.000	1	250.000	0	0	1	500.000	1	100.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
kesehatan RSUD Labuan	Kesehatan (Dokumen)													
1.02.02.1.03.0002 - Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan				25.000.000		250.000		0		500.000		100.000.000		
Terlaksananya Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan (Dokumen)	0	1	25.000.000	1	250.000	0	0	1	500.000	1	100.000.000		
Meningkatnya kualitas tatakelola informasi RSUD Malingping	Persentase digitalisasi layanan kesehatan di RSUD Malingping (%)	50	60	0	70	250.000	80	0	90	250.000	100	1.000.000	1.02.0.00.0.00.01.0003 - UPTD RSUD Malingping	
1.02.02.1.03 - Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi				0		250.000		0		250.000		1.000.000		
Meningkatnya Akses dan Mutu Layanan Informasi Kesehatan RSUD Malingping	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan (Dokumen)	1	0	0	1	250.000	0	0	1	250.000	1	1.000.000		
1.02.02.1.03.0002 - Pengelolaan				0		250.000		0		250.000		1.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Sistem Informasi Kesehatan														
Terlaksananya Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan (Dokumen)	1	0	0	1	250.000	0	0	1	250.000	1	1.000.000		
DINKES INDUK														
Meningkatnya LANSIA Mandiri	Persentase Lanjut Usia yang Mandiri (%)	48,6	76	52.975.000	77	50.000.000	78	50.000.000	78,5	50.000.000	79	50.000.000	1.02.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kesehatan	
1.02.02.1.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi				394.799.722.422		390.416.500.000		391.329.000.000		396.230.000.000		395.227.300.000		
Meningkatnya persentase LANSIA yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut (Dokumen)	1	1	52.975.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000		
1.02.02.1.02.0005 - Pengelolaan Pelayanan				52.975.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Kesehatan Usia Lanjut														
Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut (Dokumen)	1	1	52.975.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000		
Meningkatnya layanan intervensi Penurunan Stunting sesuai Standar	Persentase Tercapainya Cakupan Layanan Intervensi dalam Penurunan Stunting (%)	58	66,5	776.711.000	72	750.000.000	76	750.000.000	77	1.500.000.000	77,7	1.500.000.000		
1.02.02.1.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi				394.799.722.422		390.416.500.000		391.329.000.000		396.230.000.000		395.227.300.000		
Meningkatnya kabupaten kota yg melaksanakan intervensi penurunan stunting	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Dokumen)	2	1	776.711.000	1	750.000.000	1	750.000.000	1	1.500.000.000	1	1.500.000.000		
1.02.02.1.02.0006 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				776.711.000		750.000.000		750.000.000		1.500.000.000		1.500.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Dokumen)	2	1	776.711.000	1	750.000.000	1	750.000.000	1	1.500.000.000	1	1.500.000.000		
Meningkatnya pelayanan Kesehatan Ibu bersalin sesuai standar	persentase Ibu Bersalin melakukan persalinan di fasilitas kesehatan (%)	80	82	1.500.000.000	84	800.000.000	86	800.000.000	88	1.000.000.000	88	1.000.000.000		
1.02.02.1.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi				394.799.722.422		390.416.500.000		391.329.000.000		396.230.000.000		395.227.300.000		
Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Ibu hamil Sesuai Standar	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak (Dokumen)	3	1	1.500.000.000	1	800.000.000	1	800.000.000	1	1.000.000.000	1	1.000.000.000		
1.02.02.1.02.0003 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak				1.500.000.000		800.000.000		800.000.000		1.000.000.000		1.000.000.000		
Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan	3	1	1.500.000.000	1	800.000.000	1	800.000.000	1	1.000.000.000	1	1.000.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Kesehatan Ibu dan Anak	Kesehatan Ibu dan Anak (Dokumen)													
Meningkatnya Pemahaman Masyarakat tentang GERMAS	Persentase Masyarakat yang memahami GERMAS (%)	60	70	631.167.000	75	325.000.000	80	680.000.000	85	680.000.000	90	680.000.000		
1.02.02.1.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi				394.799.722.422		390.416.500.000		391.329.000.000		396.230.000.000		395.227.300.000		
Meningkatnya Kabupaten / Kota yang melakukan kampanye GERMAS	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga (Dokumen)	8	1	631.167.000	1	325.000.000	1	680.000.000	1	680.000.000	1	680.000.000		
	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan (Dokumen)	0	1		1		1		1		1			
1.02.02.1.02.0007 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				558.362.000		250.000.000		600.000.000		600.000.000		600.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga (Dokumen)	8	1	558.362.000	1	250.000.000	1	600.000.000	1	600.000.000	1	600.000.000		
1.02.02.1.02.0009 - Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				72.805.000		75.000.000		80.000.000		80.000.000		80.000.000		
Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan (Dokumen)	0	1	72.805.000	1	75.000.000	1	80.000.000	1	80.000.000	1	80.000.000		
UPTD LABKESDA PROVINSI BANTEN														
Meningkatnya Pemanfaatan Fungsi Labkesmas Tingkat III	Persentase Pemanfaatan Fungsi Labkesmas Tingkat III (%)	58,33	66,67	1.565.207.000	66,67	757.700.000	66,67	1.265.207.000	75,00	1.565.207.000	75,00	1.265.207.000	1.02.0.00.0.00.01.0006 - UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah	
1.02.02.1.01 - Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan				1.565.207.000		757.700.000		1.265.207.000		1.565.207.000		1.265.207.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Tingkat Daerah Provinsi														
Meningkatnya layanan Labkesda Provinsi Banten	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun (Unit)	0	0	1.565.207.000	0	757.700.000	0	1.265.207.000	0	1.565.207.000	0	1.265.207.000		
	Jumlah Alat Uji dan Kalibrasi pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintainance Center yang Disediakan dan Dipelihara (Unit)	0	4		4		4		4		4			
	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar (Unit)	0	3		3		3		3		3			
	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan (Paket)	0	5		5		6		6		6			
	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan	2	6		6		7		8		9			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
	SDM agar Sesuai Standar (Unit)													
	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan (Unit)	11	2		3		3		3		3			
1.02.02.1.01.0002 - Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya				0		0		0		0		0		
Terbangunnya Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun (Unit)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.02.02.1.01.0004 - Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya				307.507.000		200.000.000		307.507.000		307.507.000		307.507.000		
Tersedianya Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar (Unit)	2	6	307.507.000	6	200.000.000	7	307.507.000	8	307.507.000	9	307.507.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
1.02.02.1.01.0010 - Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan				17.700.000		17.700.000		17.700.000		17.700.000		17.700.000		
Tersedianya Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan (Unit)	11	2	17.700.000	3	17.700.000	3	17.700.000	3	17.700.000	3	17.700.000		
1.02.02.1.01.0013 - Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi				20.000.000		20.000.000		20.000.000		20.000.000		20.000.000		
Telaksananya Penyediaan dan Pemeliharaan Alat Pengujian dan Kalibrasi pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintainance Center	Jumlah Alat Uji dan Kalibrasi pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintainance Center yang Disediakan dan Dipelihara (Unit)	0	4	20.000.000	4	20.000.000	4	20.000.000	4	20.000.000	4	20.000.000		
1.02.02.1.01.0017 - Pemeliharaan				20.000.000		20.000.000		20.000.000		20.000.000		20.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan														
Terpeliharanya Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar (Unit)	0	3	20.000.000	3	20.000.000	3	20.000.000	3	20.000.000	3	20.000.000		
1.02.02.1.01.0027 - Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan				1.200.000.000		500.000.000		900.000.000		1.200.000.000		900.000.000		
Tersedianya Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan (Paket)	0	5	1.200.000.000	5	500.000.000	6	900.000.000	6	1.200.000.000	6	900.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Optimalnya Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan RS Provinsi Banten	Rasio Daya Tampung Rumah Sakit Rujukan (Rasio)	0,9	0,92	9.000.000.000	0,93	40.000.000.000	0,94	100.000.000.000	0,95	119.739.225.252	0,95	24.423.032.000	1.02.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kesehatan	
1.02.02.1.01 - Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi				49.230.000.000		71.075.806.944		148.949.491.944		172.442.746.944		87.408.102.500		
Terlaksananya Pelayanan kesehatan Rumah Sakit provinsi Banten	Jumlah Barang Penunjang Operasional Rumah Sakit yang Disediakan (Unit)	0	0	9.000.000.000	0	40.000.000.000	0	100.000.000.000	1	109.739.225.252	0	24.423.032.000		
	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan (Unit)	0	0		0		0		5		0			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
	Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit (Unit)	0	0		0		0		0		1			
	Jumlah Rumah Sakit Baru yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000 (Unit)	0	1		1		1		0		1			
1.02.02.1.01.0001 - Pembangunan Rumah Sakit Beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya				3.000.000.000		40.000.000.000		100.000.000.000		0		9.423.032.000		
Terpenuhinya Rumah Sakit Baru dengan	Jumlah Rumah Sakit Baru yang Memenuhi Rasio	0	1	3.000.000.000	1	40.000.000.000	1	100.000.000.000	0	0	1	9.423.032.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000	Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000 (Unit)													
1.02.02.1.01.0010 - Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan				6.000.000.000		0		0		60.000.000.000		0		
Tersedianya Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan (Unit)	0	0	6.000.000.000	0	0	0	0	5	60.000.000.000	0	0		
1.02.02.1.01.0016 - Pengadaan Barang Penunjang Operasional Rumah Sakit				0		0		0		49.739.225.252		0		
Tersedianya Barang Penunjang Operasional Rumah Sakit	Jumlah Barang Penunjang Operasional Rumah Sakit yang Disediakan (Unit)	0	0	0	0	0	0	0	1	49.739.225.252	0	0		
1.02.02.1.01.0026 - Pengembangan Rumah Sakit				0		0		0		0		15.000.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Tersedianya Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit	Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit (Unit)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	15.000.000.000		
1.02.02.1.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi				394.799.722.422		390.416.500.000		391.329.000.000		396.230.000.000		395.227.300.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Meningkatnya Kesiapan Operasional RS Provinsi Banten	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit (Dokumen)			0		0		0	1	1.000.000.000		0		
1.02.02.1.02.0022 - Operasional Pelayanan Rumah Sakit				0		0		0		1.000.000.000		0		
Tersedianya Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit (Dokumen)			0		0		0	1	1.000.000.000		0		
1.02.02.1.03 - Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi				0		0		0		9.000.000.000		0		
Terlaksananya Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan (Dokumen)	0	0	0	0	0	0	0	1	9.000.000.000	0	0		
1.02.02.1.03.0002 - Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan				0		0		0		9.000.000.000		0		
Terlaksananya Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan (Dokumen)	0	0	0	0	0	0	0	1	9.000.000.000	0	0		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Terkendalinya Penyakit Tuberkulosis, Hipertensi dan Diabetes Melitus	Persentase Ketercapaian angka keberhasilan pengobatan tuberculosis, presentase hipertensi dalam pengendalian, dan diabetes melitus dalam pengendalian (%)	100	100	3.952.002.000	100	2.000.000.000	100	2.000.000.000	100	3.500.000.000	100	3.500.000.000		
1.02.02.1.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi				394.799.722.422		390.416.500.000		391.329.000.000		396.230.000.000		395.227.300.000		
Optimalnya Ketercapaian Target Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (Dokumen)	11	2	3.952.002.000	2	2.000.000.000	2	2.000.000.000	2	3.500.000.000	2	3.500.000.000		
1.02.02.1.02.0011 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				3.952.002.000		2.000.000.000		2.000.000.000		3.500.000.000		3.500.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (Dokumen)	11	2	3.952.002.000	2	2.000.000.000	2	2.000.000.000	2	3.500.000.000	2	3.500.000.000		
UPTD PELATIHAN KESEHATAN														
1.02.03 - PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN				19.796.130.056		19.686.130.056		19.686.130.056		21.110.890.056		21.786.130.056		
Meningkatnya Kapasitas SDM Kesehatan	Persentase SDM Kesehatan yang memiliki Kompetensi sesuai standar (%)	20	30	285.240.000	35	175.240.000	40	175.240.000	45	1.100.000.000	50	175.240.000	1.02.0.00.0.00.01.0005 - UPTD Pelatihan Kesehatan	
1.02.03.1.02 - Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi				285.240.000		175.240.000		175.240.000		1.100.000.000		175.240.000		
Terfasilitasinya sertifikasi bagi SDM Kesehatan dan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya	1	1	35.240.000	1	25.240.000	1	25.240.000	1	100.000.000	1	25.240.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Masyarakat yang telah mengikuti pelatihan kesehatan	Manusia Kesehatan (Dokumen)													
1.02.03.1.02.0002 - Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan				35.240.000		25.240.000		25.240.000		100.000.000		25.240.000		
Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan (Dokumen)	1	1	35.240.000	1	25.240.000	1	25.240.000	1	100.000.000	1	25.240.000		
Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Kesehatan Sumber Daya Manusia Kesehatan dan Masyarakat	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Kompetensi dan Kualifikasi Meningkat (Orang)	420	510	250.000.000	540	150.000.000	570	150.000.000	600	1.000.000.000	630	150.000.000		
1.02.03.1.02.0001 - Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan				250.000.000		150.000.000		150.000.000		1.000.000.000		150.000.000		
Terlaksana Peningkatan	Jumlah Sumber Daya Manusia	420	510	250.000.000	540	150.000.000	570	150.000.000	600	1.000.000.000	630	150.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	Kesehatan Kompetensi dan Kualifikasi Meningkat (Orang)													
DINKES INDUK														
Meningkatnya Pemenuhan dan Pemerataan SDM Kesehatan	Persentase Tenaga Kesehatan dan Tenaga Medis di Kabupaten/Kota Sesuai Standar (%)	12,5	12,5	19.510.890.056	12,5	19.510.890.056	25	19.510.890.056	25	20.010.890.056	37,5	21.610.890.056	1.02.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kesehatan	
1.02.03.1.01 - Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi				19.510.890.056		19.510.890.056		19.510.890.056		20.010.890.056		21.610.890.056		
Terpenuhinya SDM kesehatan sesuai standar yang terdistribusi di fasyankes	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) (Orang)	297	277	19.510.890.056	217	19.510.890.056	230	19.510.890.056	253	20.010.890.056	253	21.610.890.056		
	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Terdistribusi (Orang)	297	277		217		230		253		253			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
1.02.03.1.01.0001 - Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan				19.363.630.056		19.363.630.056		19.363.630.056		19.863.630.056		21.363.630.056		
Terpenuhinya Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) yang Memenuhi Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) (Orang)	297	277	19.363.630.056	217	19.363.630.056	230	19.363.630.056	253	19.863.630.056	253	21.363.630.056		
1.02.03.1.01.0002 - Distribusi dan Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan				147.260.000		147.260.000		147.260.000		147.260.000		247.260.000		
Terlaksananya Distribusi dan Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Terdistribusi (Orang)	297	277	147.260.000	217	147.260.000	230	147.260.000	253	147.260.000	253	247.260.000		
DINKES INDUK														
1.02.04 - PROGRAM SEDIAAN				653.806.000		650.000.000		350.000.000		650.000.000		950.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN														
Meningkatnya Kualitas Sarana Kefarmasian di Tingkat Provinsi	Persentase sarana Kefarmasian Tingkat Provinsi yang memenuhi syarat (%)	70	76	653.806.000	79	650.000.000	80	350.000.000	82	650.000.000	84	950.000.000	1.02.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kesehatan	
1.02.04.1.01 - Penerbitan Pengakuan Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang dan Cabang Penyalur Alat Kesehatan (PAK)				493.918.800		500.000.000		200.000.000		500.000.000		750.000.000		
Meningkatnya Sarana Distribusi Kefarmasian yang Mendapatkan Rekomendasi Izin Operasional	Jumlah PBF Cabang dan Cabang PAK yang Dikendalikan dan Diawasi dalam rangka Penerbitan dan Tindaklanjut Penerbitan Perizinan (Sarana)	50	83	493.918.800	86	500.000.000	88	200.000.000	92	500.000.000	95	750.000.000		
1.02.04.1.01.0001 - Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan				493.918.800		500.000.000		200.000.000		500.000.000		750.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Pengakuan PBF Cabang dan Cabang PAK														
Terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Pengakuan PBF Cabang dan Cabang PAK	Jumlah PBF Cabang dan Cabang PAK yang Dikendalikan dan Diawasi dalam rangka Penerbitan dan Tindaklanjut Penerbitan Perizinan (Sarana)	50	83	493.918.800	86	500.000.000	88	200.000.000	92	500.000.000	95	750.000.000		
1.02.04.1.02 - Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT)				159.887.200		150.000.000		150.000.000		150.000.000		200.000.000		
Terfasilitasinya Usaha Kecil Obat Tradisional, Kosmetik dan Obat Tradisional dalam pemberian rekomendasi ijin	Jumlah Usaha Kecil Obat Tradisional yang Dikendalikan dan Diawasi dalam rangka Penerbitan dan Tindaklanjut Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional (Sarana)	50	92	159.887.200	95	150.000.000	96	150.000.000	98	150.000.000	100	200.000.000		
1.02.04.1.02.0001 - Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak				159.887.200		150.000.000		150.000.000		150.000.000		200.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Lanjut Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional														
Terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional	Jumlah Usaha Kecil Obat Tradisional yang Dikendalikan dan Diawasi dalam rangka Penerbitan dan Tindaklanjut Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional (Sarana)	50	92	159.887.200	95	150.000.000	96	150.000.000	98	150.000.000	100	200.000.000		
1.02.05 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN				1.716.223.000		1.740.059.000		1.782.608.000		2.200.000.000		2.250.000.000		
Meningkatnya Masyarakat yang berperilaku hidup bersih dan sehat	Persentase masyarakat yang mengimplementasikan PHBS (%)	60,84	69,57	1.716.223.000	73,91	1.740.059.000	78,26	1.782.608.000	82,61	2.200.000.000	86,96	2.250.000.000	1.02.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kesehatan	
1.02.05.1.01 - Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas				500.000.000		520.000.000		536.820.000		700.000.000		750.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Sektor Tingkat Daerah Provinsi														
meningkatnya Dukungan Kelompok Masyarakat Melalui kegitan yang mendukung program prioritas kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi (Dokumen)	2	1	500.000.000	1	520.000.000	1	536.820.000	1	700.000.000	1	750.000.000		
1.02.05.1.01.0001 - Peningkatan Upaya Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi				500.000.000		520.000.000		536.820.000		700.000.000		750.000.000		
Terlaksananya Upaya Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran serta Masyarakat dan Lintas	Jumlah Dokumen Hasil Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi (Dokumen)	2	1	500.000.000	1	520.000.000	1	536.820.000	1	700.000.000	1	750.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Sektor Tingkat Daerah Provinsi														
1.02.05.1.02 - Pelaksanaan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Perilaku Hidup Bersih dan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Provinsi				1.216.223.000		1.220.059.000		1.245.788.000		1.500.000.000		1.500.000.000		
Terlakasananya Promosi kesehatan dan Perilaku Hidup bersih dan sehat	Jumlah Dokumen Hasil Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (Dokumen)	2	1	1.216.223.000	1	1.220.059.000	1	1.245.788.000	1	1.500.000.000	1	1.500.000.000		
1.02.05.1.02.0001 - Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat				1.216.223.000		1.220.059.000		1.245.788.000		1.500.000.000		1.500.000.000		
Terselenggarayan Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (Dokumen)	2	1	1.216.223.000	1	1.220.059.000	1	1.245.788.000	1	1.500.000.000	1	1.500.000.000		

Sumber : Hasil Analisis Dinkes, 2025

TABEL 4.3 DAFTAR SUB KEGIATAN PRIORITAS DINAS KESEHATAN PROVINSI BANTEN

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*
1.02.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kesehatan				
1.	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Optimalnya Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan RS Provinsi Banten	1.02.02.1.01 - Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	
		Optimalnya Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan RS Provinsi Banten	1.02.02.1.01.0001 - Pembangunan Rumah Sakit Beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya	
		Meningkatnya ketersediaan obat di Fasilitas Pelayanan Kesehatan sesuai standar	1.02.02.1.01 - Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM	

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*
			dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	
		Meningkatnya ketersediaan obat di Fasilitas Pelayanan Kesehatan sesuai standar	1.02.02.1.01.0027 - Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	
		Meningkatnya Akses Jaminan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin/Tidak Mampu	1.02.02.1.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	
		Meningkatnya Akses Jaminan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin/Tidak Mampu	1.02.02.1.02.0016 - Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	
		Terkendalinya Penyakit Tuberkulosis, Hipertensi dan Diabetes Melitus	1.02.02.1.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	
		Terkendalinya Penyakit Tuberkulosis, Hipertensi dan Diabetes Melitus	1.02.02.1.02.0011 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	
		Meningkatnya Akses dan Mutu Imunisasi Dasar Lengkap Bagi Bayi	1.02.02.1.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	
		Meningkatnya Akses dan Mutu Imunisasi Dasar Lengkap Bagi Bayi	1.02.02.1.02.0021 - Investigasi Lanjutan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal oleh Kabupaten/Kota	
		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesehatan Primer	1.02.02.1.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*
		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesehatan Primer	1.02.02.1.02.0019 - Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan	
		Meningkatnya layanan intervensi Penurunan Stunting sesuai Standar	1.02.02.1.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	
		Meningkatnya layanan intervensi Penurunan Stunting sesuai Standar	1.02.02.1.02.0006 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	
		Meningkatnya Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan Jiwa Tanpa Diskriminasi	1.02.02.1.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	
		Meningkatnya Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan Jiwa Tanpa Diskriminasi	1.02.02.1.02.0013 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	
			1.02.02.1.02.0014 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Kecanduan NAPZA	
		Meningkatnya pelayanan Kesehatan Ibu bersalin sesuai standar	1.02.02.1.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	
		Meningkatnya pelayanan Kesehatan Ibu bersalin sesuai standar	1.02.02.1.02.0003 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak	
		Meningkatnya Pelayanan Kesehatan Usia Produktif di Kabupaten / Kota sesuai standar	1.02.02.1.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif	

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*
		Optimalnya pelayanan RS berbasis teknologi	1.02.02.1.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	
			1.02.02.1.02.0023 - Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	
		Meningkatnya Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan yang Mendukung Tercapainya SPM Bidang Kesehatan Provinsi	1.02.02.1.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	
			1.02.02.1.02.0001 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan / atau Berpotensi Bencana	
			1.02.02.1.02.0002 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	
1.02.0.00.0.00.01.0001 - UPTD RSUD Banten				
3.	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Meningkatnya kualitas akses dan mutu pelayanan kesehatan penunjang RSUD Banten	1.02.02.1.01 - Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	
			1.02.02.1.01.0020 - Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*
		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Yang Terakreditasi di RSUD Banten	1.02.02.1.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	
			1.02.02.1.02.0022 - Operasional Pelayanan Rumah Sakit	
		Meningkatnya kualitas tatakelola Informasi Kesehatan di RSUD Banten	1.02.02.1.03 - Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	
			1.02.02.1.03.0002 - Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	
1.02.0.00.0.00.01.0003 - UPTD RSUD Malingping				
		Meningkatnya Fasilitas Layanan Kesehatan Rumah Sakit	1.02.02.1.01 - Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	
			1.02.02.1.01.0026 - Pengembangan Rumah Sakit	
		Meningkatnya Kualitas Pelayanan RSUD Malingping	1.02.02.1.01 - Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	
			1.02.02.1.02.0022 - Operasional Pelayanan Rumah Sakit	
			1.02.02.1.02.0019 - Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan	
		Meningkatnya kualitas tatakelola informasi RSUD Malingping	1.02.02.1.03 - Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*
			1.02.02.1.03.0002 - Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	
1.02.0.00.0.00.01.0005 - UPTD Pelatihan Kesehatan				
4.	1.02.03 - PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Meningkatnya Kapasitas SDM Kesehatan	1.02.03.1.02 - Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	
			1.02.03.1.02.0001 - Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	
1.02.0.00.0.00.01.0007 - UPTD RSUD Labuan				
5.	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Meningkatnya Kualitas Pelayanan RSUD Labuan	1.02.02.1.01 - Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	
			1.02.02.1.02.0022 - Operasional Pelayanan Rumah Sakit	
			1.02.02.1.02.0019 - Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan	
		Meningkatnya kualitas tatakelola informasi RSUD Labuan	1.02.02.1.03 - Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	
			1.02.02.1.03.0002 - Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	
1.02.0.00.0.00.01.0008 - UPTD RSUD Cilograng				
		Meningkatnya Kualitas Pelayanan RSUD Cilograng	1.02.02.1.01 - Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM	

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*
			dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	
			1.02.02.1.02.0022 - Operasional Pelayanan Rumah Sakit	
			1.02.02.1.02.0019 - Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan	
		Meningkatnya kualitas tatakelola informasi RSUD Cilograng	1.02.02.1.03 - Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	
			1.02.02.1.03.0002 - Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	

Sumber : Hasil Analisis Dinas Kesehatan, 2025

4.2 INDIKATOR KINERJA UTAMA

Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai ukuran keberhasilan pencapaian. Hal ini ditunjukan dari akumulasi pencapaian indikator outcome program pembangunan daerah setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPJMD dapat dicapai.

Merujuk pada dokumen Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Banten Tahun 2025-2029, telah dirancang indikator kinerja pembangunan daerah dan dibuat untuk menjadi pedoman bagi perangkat daerah untuk melaksanakan program-program yang menjadi tanggung jawab dan kewenangannya. Selain itu, penetapan indikator kinerja daerah ini dimaksudkan untuk memberikan acuan bagi perangkat daerah dalam menyusun indikator-indikator kegiatannya (output), sehingga dapat dinyatakan indikator kinerja daerah (makro maupun program pembangunan) adalah akumulasi dari indikator-indikator kinerja perangkat daerah. Indikator kinerja daerah ini merupakan target daerah yang harus dicapai dan didukung perangkat daerah, secara bertahap setiap tahunnya, yang merupakan target selama periode berlakunya dokumen RPJMD Provinsi Banten Tahun 2025-2029.

Terdapat 3 (tiga) indikator kinerja daerah yang terdapat dalam dokumen RPJMD Provinsi Banten Tahun 2025-2029 tersebut, yaitu :

1) Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Provinsi Banten; dan
2) Indikator Kinerja Kunci Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Provinsi.

Indikator-indikator tersebut dikelompokan dalam 5 (lima) Misi Gubernur dan Wakil Gubernur Terpilih Provinsi Banten Tahun 2025-2025. Dalam hal ini, Dinas Kesehatan Provinsi Banten, berdasarkan sasaran perangkat daerah untuk urusan yang menjadi kewenangannya, indikator kinerja daerah-nya termasuk kedalam Indikator Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Provinsi ke dalam Misi 3, yaitu Mewujudkan sumber daya manusia yang berintegritas, berdaya saing, berkualitas, inovatif, dan tidak diskriminatif.

TABEL 4.4 INDIKATOR KINERJA UTAMA DALAM RENSTRA DINAS KESEHATAN PROVINSI BANTEN TAHUN 2025 – 2029

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*
	1.02.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kesehatan									
1.	Usia Harapan Hidup (UHH)	(tahun)	74,97	75,20	75,47	75,73	76,30	76,77	77,07	
2.	Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita	%	21,10	20,30	19,50	18,40	17,50	16,70	16,10	
3.	Persentase Cakupan 9 Layanan Intervensi dalam Penurunan Stunting	%	0	62	66	70	74	77	77	
4.	Cakupan Penemuan Kasus Tuberkolosis (treatment coverage)	%	90	95	95	95	95	95	95	
5.	Angka Kematian Ibu (AKI)	(per 100.000 kelahiran hidup)	0	101	98	96	85	64	63	
6.	Persentase 4 Layanan Unggulan Kesehatan dengan Sistem Rujukan Berbasis Kompetensi yang Berklasifikasi Utama	%	0	25	25	50	50	75	75	

Sumber : Hasil Analisis Dinas Kesehatan, 2025

4.3 INDIKATOR KINERJA KUNCI

Rencana Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan, Dinas Kesehatan Provinsi Banten akan melaksanakan 5 (lima) program, yaitu :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi;
2. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat;
3. Program Peningakatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan;
4. Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman;
5. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan.

Indikasi Kegiatan dan Sub Kegiatan adalah breakdown dari program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumberdaya, baik yang berupa personil (SDM), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumberdaya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa. Pengertian “bersifat indikatif” dalam UU No. 25 Tahun 2004 adalah bahwa informasi, baik tentang sumberdaya yang diperlukan maupun keluaran dan dampak yang tercantum di dalam dokumen rencana (termasuk rumusan kegiatan), hanya merupakan indikasi yang hendak dicapai dan tidak kaku. Dalam proses penyusunannya, indikasi kegiatan-kegiatan pembangunan tersebut didasarkan atas :

1. Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) serta Tugas Pokok dan Fungsi masing-masing unit kerja di Dinas Kesehatan Provinsi Banten berdasarkan Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 08 Tahun 2016 dan Peraturan Gubernur Nomor 48 Tahun 2022 dan diperkuat pula oleh Isu-isu strategis perencanaan pembangunan sektor kesehatan tahun 2025-2029;
2. Penetapan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan perencanaan pembangunan kesehatan tahun 2025-2029 Provinsi Banten;
3. Nomenklatur kegiatan yang tertuang dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri (KEPMENDAGRI) Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi, Dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan & Keuangan Daerah.

Rencana Strategis (Renstra) adalah dokumen perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam jangka waktu tertentu, biasanya 5 tahun, dan menjadi acuan dalam pengambilan keputusan serta operasionalisasi rencana kegiatan. Renstra berisi visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan yang relevan dengan tugas dan fungsi organisasi. Indikasi kegiatan dalam Renstra merujuk pada program dan kegiatan yang akan dilaksanakan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Indikasi ini mencakup:

- ➔ Program:
  Kumpulan kegiatan yang saling terkait dan terkoordinasi untuk mencapai tujuan tertentu.
- ➔ Kegiatan:
  Tindakan nyata yang dilakukan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran program.
- ➔ Indikator Kinerja:
  Tolok ukur yang digunakan untuk mengukur pencapaian tujuan dan sasaran program serta kegiatan.

Berikut adalah indikasi kegiatan pembangunan daerah yang akan dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Banten untuk Perencanaan Pembangunan tahun 2025-2029 sesuai dengan sasaran perangkat daerah dan program terkait, dimana indikasi kegiatan tersebut, antara lain :

TABEL 4.5 INDIKATOR KINERJA KUNCI DALAM RENSTRA DINAS KESEHATAN PROVINSI BANTEN TAHUN 2025 – 2029

NO	INDIKATOR	STATUS	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*
1.	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN										
2.	Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional (JKN)	positif	(%)	98,63	98,77	98,77	98,77	98,77	99	99	
3.	Jumlah SPM Sub Variabel Kegawat daruratan UPTD RSUD Cilograng	positif	Nilai	1	1	2	4	6	7	8	
4.	Jumlah SPM Sub Variabel Kegawat daruratan UPTD RSUD Labuan	positif	Angka	1	1	2	4	6	7	8	
5.	Jumlah SPM Sub Variabel Kegawat daruratan UPTD RSUD Malingping	positif	Angka	1	1	2	4	6	7	8	
6.	Nilai Akreditasi RSUD Banten	positif	Nilai Akreditasi	Paripurna	Paripurna	Paripurna	Paripurna	Paripurna	Paripurna	Paripurna	
7.	Nilai Akreditasi RSUD Cilograng	positif	Nilai Akreditasi	Madya	Madya	Madya	Madya	Utama	Utama	Utama	
8.	Nilai Akreditasi RSUD Labuan	positif	Nilai Akreditasi	Madya	Madya	Madya	Madya	Utama	Utama	Utama	
9.	Persentase digitalisasi layanan kesehatan di RSUD Banten	positif	%	70	75	75	80	85	90	100	
10.	Persentase digitalisasi layanan kesehatan di RSUD Labuan	positif	%	50	50	60	70	80	90	100	

NO	INDIKATOR	STATUS	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*
11.	Persentase digitalisasi layanan kesehatan di RSUD Malingping	positif	%	50	50	60	70	80	90	100	
12.	Persentase digitalisasi layanan kesehatan RSUD Cilograng	positif	%	50	50	60	70	80	90	100	
13.	persentase Ibu Bersalin melakukan persalinan di fasilitas kesehatan	positif	%	80	80	82	84	86	88	88	
14.	Persentase Kabupaten/Kota yang Melaksanakan STBM	positif	%	25	37,5	50	62,5	62,5	75	75	
15.	Persentase Kabupaten / Kota yang memiliki ketersediaan obat publik dan perbekalan kesehatan sesuai standar	positif	%	96	97	97	97	97	97	97	
16.	Persentase Ketercapaian angka keberhasilan pengobatan tuberculosis, presentase hipertensi dalam pengendalian, dan diabetes melitus dalam pengendalian	positif	%	100	100	100	100	100	100	100	
17.	Cakupan imunisasi bayi lengkap	positif	Persentase	75	75	80	82,5	85	87,5	90	
18.	Persentase Ketercapaian Target Pelayanan Kesehatan Usia Produktif Sesuai Standar	positif	%	50	50	50	60	65	70	70	

NO	INDIKATOR	STATUS	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*
19.	Persentase Kualitas Pelayanan Kesehatan Primer sesuai standar	positif	%	33,33	71,5	82	98	100	100	100	
20.	Persentase Lanjut Usia yang Mandiri	positif	%	48,6	76	76	77	78	78,5	79	
21.	Persentase Masyarakat yang memahami GERMAS	positif	%	60	65	70	75	80	85	90	
22.	Persentase masyarakat yang mengimplementasikan PHBS	positif	%	60,84	65,22	69,57	73,91	78,26	82,61	86,96	
23.	Persentase Pemanfaatan Fungsi Labkesmas Tingkat III	positif	%	58,33	66,67	66,67	66,67	66,67	75,00	75,00	
24.	Persentase Penderita gangguan jiwa dan Penyalahguna NAPZA yang mendapatkan pengobatan dan tidak diterlantarkan	positif	%	100	100	100	100	100	100	100	
25.	Persentase Pengembangan Fasilitas Layanan Kesehatan UPTD RSUD Malingping	positif	%	80	80	83	83	83	88	100	
26.	Persentase RS Rujukan Provinsi yang Terkareditasi	positif	%	90	91	92	93	94	95	95	Outcome LPPD
27.	Persentase sarana dan prasarana RSUD Banten sesuai standar yang terpenuhi	positif	%	60	65	70	70	75	90	100	
28.	Persentase sarana Kefarmasian Tingkat	positif	%	70	75	76	79	80	82	84	

NO	INDIKATOR	STATUS	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*
	Provinsi yang memenuhi syarat										
29.	Persentase SDM Kesehatan yang memiliki Kompetensi sesuai standar	positif	%	20	25	30	35	40	45	50	
30.	Persentase Tenaga Kesehatan dan Tenaga Medis di Kabupaten/Kota Sesuai Standar	positif	%	12,5	12,5	12,5	12,5	25	25	37,5	
31.	Persentase Tercapainya Cakupan Layanan Intervensi dalam Penurunan Stunting	positif	%	58	64	66,5	72	76	77	77,7	
32.	Rasio Daya Tampung Rumah Sakit Rujukan	positif	Rasio	0,9	0,91	0,92	0,93	0,94	0,95	0,95	Outcome LPPD
33.	Persentase Ketercapaian SPM Bidang Kesehatan Provinsi	positif	%	100	100	100	100	100	100	100	
	Persentase Pelayanan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Provinsi	positif	%	100	100	100	100	100	100	100	Outcome LPPD
	Persentase Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	positif	%	100	100	100	100	100	100	100	Outcome LPPD

NO	INDIKATOR	STATUS	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*
34.	Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis (treatment coverage)	positif	(%)	90	95	95	95	95	95	95	

Sumber : Hasil Analisis Dinas Kesehatan, 2025

BAB V
PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan Provinsi Banten 2025-2029 ini diharapkan dapat digunakan sebagai acuan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian upaya Dinas Kesehatan Provinsi dalam kurun waktu lima tahun kedepan, sehingga hasil pencapaiannya terukur dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan kinerja tahunan Dinas Kesehatan Provinsi. Diharapkan upaya Dinas Kesehatan Provinsi Banten sampai dengan tahun 2029 dapat lebih terarah dan terukur. Dalam kaitannya dengan pengukuran kinerja dan sebagai masukan bagi perencanaan selanjutnya, Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Banten 2025-2029 ini akan dievaluasi pada pertengahan (2027) dan akhir periode 4 tahun (2029) sesuai ketentuan yang berlaku.

Penyusunan Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Banten 2025-2029 melibatkan stakeholder terkait baik pusat dan daerah. Kepada semua pihak yang terlibat dalam penyusunan Renstra ini diucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Tentunya dokumen ini dapat dilaksanakan dan mencapai tujuannya, bila dilakukan dengan dedikasi yang tinggi dan kerja keras dari segenap aparatur kesehatan di Dinas Kesehatan Provinsi Banten dan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dilingkungan Provinsi Banten, serta peran serta masyarakat.

Matrik Definisi Operasional dan Rumus Perhitungan Kinerja Perangkat Daerah

KETERANGAN KERJA	KINERJA TUJUAN/SASARAN/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SIFAT INDIKATOR	UKURAN/SATUAN	RUMUS PENGHITUNGAN	DEFINISI OPERASIONAL	INTERPRETASI DATA	FREKUENSI PENGUMPULAN DATA	SUMBER DATA	TARGET 2025	TARGET 2026	TARGET 2027	TARGET 2028	TARGET 2029	TARGET 2030
1.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
DINKES INDUK					$\frac{Jumlah\ BMD\ yang\ tersedia}{Jumlah\ BMD\ yang\ tercatat} \times 100$										
IKK UTAMA															
	Meningkatnya Penemuan Kasus Tuberkulosis	Cakupan Penemuan Kasus Tuberkulosis (treatment coverage - %)	**Positif**	Persen	$\frac{\text{jumlah semua kasus TBC ditemukan yang dilaporkan}}{\text{perkiraan jumlah semua kasus TBC (estimasi kasus)}} \times 100$	Jumlah semua kasus TBC ditemukan yang dilaporkan	Semakin tinggi kasus yang ditemukan semakin baik	setiap tahun	Kabupaten / Kota	95	95	95	95	95	95
	Meningkatnya Cakupan 9 Layanan Intervensi Stunting	Persentase Cakupan 9 Layanan Intervensi dalam Penurunan Stunting	Positif	Persen	$\frac{\text{Komponen Intervensi Spesifik dalam Penurunan Stunting yang mencapai Target}}{\text{Total Komponen Intervensi Spesifik yang dilakukan}} \times 100$	perbandingan antara jumlah intervensi penurunan stunting yang tercapai dengan jumlah layanan intervensi penurunan stunting yang dilakukan (yaitu : 1. persentase ibu hamil yang mengkonsumsi tablet tambah darah (TTD) minimal 90 tablet selama masa kehamilan, 2. persentase remaja putri yang mengkonsumsi tablet tambah darah, 3. Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan mendapat Air Susu Ibu Esklusif, 4. Persentase anak usia 6 - 23 bulan yang mendapat makanan pendamping ASI (MP-ASI), 5. persentase ibu hamil kurang energi kronik (KEK) yang mendapatkan tambahan asupan gizi, 6. Persentase anak berusia berusia di bawah 5 tahun (balita) gizi buruk yang mendapat pelayanan tata laksana gizi buruk, 7. Persentase anak berusia di bawah 5 tahun (balita) yang dipantau pertumbuhan dan perkembangannya, 8. Persentase anak berusia di bawah 5 tahun (balita) yang gizi kurang yang mendapat tambahan asupan gizi, 9. Persentase anak berusia di bawah 5 tahun (balita) yang memperoleh imunisasi dasar lengkap pada jangka waktu 1 tahun tertentu	Semakin tinggi capaiannya semakin baik	setiap tahun		62	62	66	70	74	77
	Menurunnya Angka Kematian Ibu	Angka Kematian Ibu (per 100.000 Kelahiran Hidup)	Negatif	Rasio	$\frac{\text{Jumlah Kematian Ibu pada saat hamil, bersalin dan nifas}}{\text{jumlah kelahiran hidup}} \times 100.000$	Perbandingan jumlah kematian ibu pada saat hamil, melahirkan dan nifas pada jangka waktu 1 tahun tertentu dibagi dengan jumlah kelahiran hidup	Semakin rendah capaiannya semakin baik	setiap tahun		101	101	98	96	85	64
	Meningkatnya 4 (empat) Layanan Unggulan Kesehatan dengan Sistem Rujukan Berbasis Kompetensi pada RS Rujukan Regional	Persentase 4 (empat) Layanan Unggulan Kesehatan dengan Sistem Rujukan Berbasis Kompetensi yang Berklasifikasi Utama	Positif	Persen	$\frac{\text{Jumlah layanan unggulan yang tercapai}}{\text{total 4 layanan unggulan}} \times 100.$	Tercapainya Layanan unggulan kesehatan utama pada layanan Kesehatan Ibu Anak, Kanker, stroke dan jantung	Semakin tinggi capaiannya semakin baik	setiap tahun		25	25	25	50	50	75
IKK HASIL OUTCOME - URUSAN KESEHATAN PROVINSI															
Terwujudnya birokrasi yang berintegritas, adaptif, profesional, dan tangguh	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**														
	Meningkatnya tata kelola pemerintahan pada Perangkat Daerah	Indeks Reformasi Birokrasi pada Perangkat Daerah	Positif	Nilai	Indeks RB dihitung dengan menjumlahkan dua komponen utama: Nilai RB General: Mengukur capaian strategi pelaksanaan reformasi birokrasi secara umum. Nilai RB Tematik: Mengukur capaian dalam area tematik tertentu yang relevan dengan reformasi birokrasi Indeks RB = Nilai RB General + Nilai RB Tematik Setiap nilai komponen (RB General dan RB Tematik) diperoleh melalui evaluasi terhadap berbagai indikator dan sub-indikator yang telah ditetapkan	Indeks yang mencerminkan tingkat kemajuan pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan pemerintah daerah, yang mencakup berbagai aspek tata kelola pemerintahan, perbaikan proses bisnis, manajemen SDM, dan peningkatan kualitas layanan publik	Komponen Evaluasi Indeks Reformasi Birokrasi terdapat dua dimensi yaitu dimensi RB General terdiri dari: 1. Komponen Capaian Strategi Pelaksanaan RB General 2. Komponen Capaian Implementasi Kebijakan Reformasi Birokrasi 3. Komponen Capaian Sasaran Strategis Reformasi Birokrasi dan Dimensi RB Tematik teridiri dari: 1. Komponen Evaluasi RB Tematik Pemerintah Daerah. Nilai hasil akhir dari penjumlahan komponen digunakan untuk menetapkan tingkat pelaksanaan reformasi birokrasi, dengan kategori sebagai berikut: 1. AA (Nilai >100) - Sangat Memuaskan 2. A (Nilai >80-100) - Memuaskan 3. A- (Nilai >80-100) - Memuaskan dengan catatan 4. BB (Nilai >70-80) - Sangat Baik 5. B (Nilai > 60- 70) - Baik 6. CC (Nilai > 50-60) - Cukup 7. C (Nilai > 30-50) - Kurang 8. D (Nilai 0-30) - Sangat Kurang	Tahunan	Biro Organisasi Reformasi Birokrasi dan BAPPEDA	60	62	64	66	68	70
	Terkelolanya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum yang terkelola dengan baik	Positif	Persen	$\frac{\text{Jumlah Administrasi Umum yang terpenuhi tahun N}}{\text{Jumlah Administrasi Umum yang ditargetkan pada tahun N}} \times 100$	ukuran kuantitatif yang menggambarkan proporsi kegiatan layanan administrasi umum yang dilaksanakan dengan mematuhi standar yang telah ditetapkan dan sesuai dengan jadwal yang direncanakan dalam suatu periode waktu tertentu	Semakin tinggi persentasenya, semakin baik, efektif dan efisien pula kinerja administrasi yang dilakukan.	Triwulanan, Tahunan	Setiap Perangkat Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Tersusunnya pelaporan keuangan perangkat daerah sesuai standar akuntansi pemerintah	persentase dokumen pelaporan keuangan perangkat daerah yang disusun sesuai SAP(Standar akuntansi pemerinta)	Positif	Persen	$\frac{\text{jumlah laporan keuangan yg disusun}}{Jumlah\ Laporan\ sesuai\ SAP} \times 100$	pelaporan keuangan akhir tahun yang disusun PD sesuai dengan SAP berdasarkan PP 71 tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintahan	Persentase ini mencerminkan tingkat kepatuhan dan kualitas penyusunan laporan keuangan perangkat daerah terhadap Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yaitu : Perangkat daerah telah menerapkan prinsip-prinsip akuntansi pemerintahan dengan baik. Kualitas laporan keuangan tinggi, transparan, dan akuntabel. Memudahkan proses audit oleh BPK (Badan Pemeriksa Keuangan). Mendukung pengambilan keputusan yang tepat oleh pimpinan daerah	Triwulanan, Semesteran dan Tahunan	Setiap Perangkat Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%

	Meningkatnya prestasi kinerja ASN	Persentase ASN perangkat daerah yang memiliki predikat SKP minimal BAIK	Positif	Persen	$\frac{Jumlah\ ASN\ Perangkat\ Daerah\ yang\ mendapatkan\ nilai\ minimal\ BAIK}{Jumlah\ ASN\ Perangkat\ Daerah} \times 100$	Proporsi atau persentase dari jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) yang bekerja di suatu perangkat daerah (seperti kementerian, lembaga, atau dinas daerah) yang memiliki penilaian Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) dengan predikat minimal "BAIK"	ukuran yang digunakan untuk menilai kinerja ASN berdasarkan tugas yang telah ditetapkan selama satu periode (biasanya tahunan). menggambarkan seberapa banyak pegawai di perangkat daerah tersebut yang berhasil memenuhi atau melebihi standar kinerja yang diharapkan	Triwulanan, Tahunan	Setiap Perangkat Daerah	95%	95%	95%	95%	95%	95%
	Terpenuhinya Kebutuhan Sarana dan Prasarana kantor sesuai standar	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana kantor sesuai daftar kebutuhan standar	Positif	Persen	$\frac{Jumlah\ Sarana\ Prasarana\ yang\ dibelanjakan\ tahun\ N}{Jumlah\ Sarana\ Prasarana\ Sesuai\ RKBMD} \times 100$	ukuran kuantitatif yang menunjukkan perbandingan antara jumlah sarana dan prasarana kantor yang telah tersedia dengan jumlah kebutuhan ideal yang ditetapkan berdasarkan standar dan RKBMD	Persentase yang semakin tinggi mengindikasikan bahwa kantor semakin mendekati kondisi ideal dalam hal kelengkapan fasilitas kerja dalam mendukung pelaksanaan tugas serta fungsi secara optimal	Tahunan	Setiap Perangkat Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Terkelolanya pelayanan penunjang kantor	Persentase terpenuhinya pelayanan penunjang kantor	Positif	Persen	$\frac{jumlah\ pelayanan\ penunjang\ kantor\ yang\ dipenuhi}{jumlah\ pelayanan\ yang\ diperlukan} \times 100$	Indikator ini menunjukkan tingkat kedisiplinan dan efisiensi unit penunjang dalam memberikan pelayanan sesuai waktu yang telah dijadwalkan.	Semakin tinggi persentasenya, berarti pelayanan penunjang semakin tepat waktu dan sesuai rencana.	Tahunan		100%	100%	100%	100%	100%	100%
	terpenuhinya pemeliharaan BMD pada perangkat daerah	Persentase BMD dalam kondisi baik	Positif	Persen	$\frac{Jumlah\ BMD\ yang\ dipelihara\ Tahun\ N}{jumlah\ BMD\ yang\ direncanakan\ dipelihara\ Tahun\ N} \times 100$	ukuran yang menunjukkan proporsi jumlah BMD yang dirawat secara berkala dan tercatat dalam kondisi fisik baik terhadap total keseluruhan BMD yang tercatat dalam daftar inventaris.	Indikator ini digunakan untuk menilai efektivitas pemeliharaan aset daerah oleh pemerintah daerah, serta menunjukkan kualitas pengelolaan dan keberlanjutan fungsi dari barang milik daerah tersebut serta untuk acuan sejauh mana aset atau barang milik pemerintah daerah masih dalam kondisi layak pakai, fungsional, dan tidak rusak	Triwulanan, Tahunan	Setiap Perangkat Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Positif	Nilai	hasil evaluasi terhadap implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada tingkat perangkat daerah (seperti dinas, badan, atau instansi pemerintah daerah lainnya). Nilai ini mencerminkan sejauh mana instansi tersebut telah menerapkan prinsip akuntabilitas kinerja dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya. AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) adalah bagian dari SAKIP, yaitu sistem yang digunakan untuk memastikan bahwa kinerja pemerintah dapat diukur, dipertanggungjawabkan, dan digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan serta perbaikan berkelanjutan. Nilai AKIP diberikan berdasarkan evaluasi terhadap dokumen perencanaan, pengukuran, pelaporan, evaluasi kinerja, dan capaian kinerja dari perangkat daerah. Evaluasi biasanya dilakukan oleh Inspektorat Komponen Penilaian AKIP: Perencanaan Kinerja (perencanaan strategis dan kinerja tahunan) Pengukuran Kinerja (indikator kinerja dan pengumpulan data) Pelaporan Kinerja (dokumen LAKIP/LKjIP) Evaluasi Internal (monitoring dan tindak lanjut perbaikan) Capaian Kinerja (hasil/output yang dicapai)	Berdasarkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014, SAKIP (Sistem Akuntabilias Kinerja Instansi Pemerintah) merupakan rangkaian sistemik dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklarifikasian dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Penyelenggaraan SAKIP dilaksanakan untuk menghasilkan sebuah laporan kinerja yang berkualitas serta selaras dan sesuai dengan tahapan-tahapan yang meliputi:Rencana strategis;Perjanjian kinerja;Pengukuran kinerja;Pelaporan kinerja;Reviu dan evaluasi kinerja.Berdasarkan Peraturan Menteri PAN RB No. 12 Tahun 2015	Nilai hasil akhir dari penjumlahan komponen-komponen terdiri dari komponen Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal yang memberikan gambaran tingkat AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah), dengan kategori predikat sebagai berikut: 1. Predikat AA (Nilai > 90) - Sangat Memuaskan 2. Predikat A (Nilai >80-90) - Memuaskan 3. Predikat BB (Nilai > 70-80) - Sangat Baik 4. Predikat B (Nilai > 60-70) - Baik 5. Predikat CC (Nilai > 50-60) - Cukup (Memadai) 6. Predikat C (Nilai > 30-50) - Kurang 7. Predikat D (Nilai > 0-30) - Sangat Kurag	Tahunan	Setiap Perangkat Daerah	79,1	79,4	79,7	80	80	80
	Terkelolanya BMD secara tertib	persentase BMD yang tertib pencatatan dan fisik			$\frac{Jumlah\ Aset\ yang\ Tersedia}{jumlah\ Aset\ yang\ Tercatat} \times 100$	Perbandingan antara jumlah yang tersedia dengan jumlah aset yang tercatat		Tahunan		100%	100%	100%	100%	100%	100%
Meningkatnya Kualitas Taraf Kesehatan Masyarakat	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**														
	Optimalnya Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan RS Provinsi Banten	Rasio Daya Tampung Rumah Sakit Rujukan	Positif	Rasio (Nilai)	$\frac{Jumlah\ Daya\ Tampung\ Rumah\ Sakit\ Rujukan\ di\ Seluruh\ Provinsi\ Banten}{Jumlah\ Penduduk\ Provinsi} \times 1000$	Mengukur rasio daya tampung rumah sakit rujukan di Provinsi yaitu jumlah seluruh Tempat Tidur di Rumah Sakit Rujukan di Provinsi Banten baik Rumah Sakit milik Pemerintah maupun Swasta dibandingkan dengan jumlah penduduk se provinsi banten (rasio 1.000 penduduk)	Sesuai standar WHO yaitu 1 Tempat Tidur untuk 1.000 penduduk, maka jika hasil yang diperoleh semakin mendekati 1 capaiannya semakin baik	Tahunan	Data Tempat Tidur RS se Provinsi Banten (RS Online) dan Data Jumlah Penduduk (Dukcapil Prov Banten)	0,91	0,92	0,93	0,94	0,95	0,95
	Terlaksananya Pelayanan kesehatan Rumah Sakit provinsi Banten	Persentase Pemenuhan Sarana Prasarana RS baru	positif	persen	$\frac{jumlah\ sarana\ prasarana\ RS\ baru\ yang\ terpenuhi}{jumlah\ sarana\ prasarana\ yang\ sesuai\ Standar} \times 100.$	jika pemenuhan sarana dan prasarana di RS mendekati 100% maka pemenuhan sarana prasarana RS yang baru susah memenuhi standar	indikator yang menunjukkan sejauh mana fasilitas dan kelengkapan yang dibutuhkan rumah sakit telah tersedia dan sesuai dengan standar yang ditetapkan, untuk mendukung kualitas pelayanan kesehatan yang prima dan memastikan keselamatan pasien	Tahunan			20%	30%	40%	50%	60%
	Meningkatnya Kesiapan Operasional RS Provinsi Banten	Persentase Ketercapaian Kesiapan Operasional RS Baru Provinsi Banten	positif	persen	$\frac{Ketercapaian\ persiapan\ operasionak\ RS\ Provinsi\ Banten\ yang\ baru\ pada\ tahun\ N}{Target\ Persiapan\ Operasional\ RS\ Provinsi\ Banten\ yang\ baru\ pada\ tahun\ N} \times 100$	penerbitan ijin operasional RS Baru Pemprov Banten	semakin tinggi persentase ketercapaian kesiapan operasional RS baru, semakin dekat RS tersebut pada kondisi siap beroperasi penuh untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada masyaraka	Tahunan		100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Meningkatnya Akses dan Mutu Layanan Informasi Kesehatan RS Provinsi Baru	Persentase tersedianya layanan informasi kesehatan RS baru Prov Banten	positif	persen	$\frac{ketercapaian\ penyediaan\ layanan\ informasi\ kesehatan\ RS\ di\ RS\ baru\ provinsi}{target\ penyediaan\ layanan\ informasi\ kesehatan\ RS\ di\ RS\ baru\ provinsi} \times 100$	Penyediaan SIM RS di RS baru Provinsi Banten	semakin tinggi capaian maka semakin baik	Tahunan					100%	100%
	Meningkatnya ketersediaan obat di Fasilitas Pelayanan Kesehatan sesuai standar	Persentase Kabupaten / Kota yang memiliki ketersediaan obat publik dan perbekalan kesehatan sesuai standar	positif	persen	$\frac{Jumlah\ Kabupaten\ /\ Kota\ yang\ memiliki\ obat\ publik\ dan\ perbekalan\ kesehatan\ sesuai\ standar\ pada\ tahun\ N}{jumlah\ seluruh\ Kab/Kota\ pada\ tahun\ N} \times 100$	Pemenuhan ketersediaan obat publik dan perbekalan kesehatan, sesuai dengan pedoman untuk memenuhi kebutuhan pasien dan masyarakat dalam jangka waktu tertentu di Kabupaten / Kota	Semakin tinggi ketercapaian semakin baik	Tahunan	96	97%	97%	97%	97%	97%	97%

	terpenuhinya obat publik dan perbekalan kesehatan di Kab/kota secara merata	Persentase Distribusi Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan ke Kabupaten / Kota yang terpenuhi (%)	positif	persen	$\frac{\text{Jumlah Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan yang didistribusikan ke Kabupaten / Kota pada tahun M}}{\text{Jumlah Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan yang disediakan pada tahun N}} \times 100$	Pendistribusian Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan ke Kabupaten / Kota secara merata	ukuran efektivitas proses distribusi yang menunjukkan seberapa besar kebutuhan obat dan perbekalan kesehatan di suatu daerah (kabupaten/kota) berhasil dipenuhi sesuai dengan jenis dan jumlah yang seharusnya diterima, dengan tetap mempertahankan mutu dan waktu pengiriman yang tepat	Tahunan		100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Meningkatnya Pemahaman Masyarakat tentang GERMAS	Persentase Masyarakat yang memahami GERMAS	positif	persen	$\frac{\text{Jumlah masyarakat yang memahami GERMAS pada tahun N}}{\text{Jumlah masyarakat yang diedukasi pada tahun NN}} \times 100$	Masyarakat yang dapat mengetahui, memahami GERMAS yang telah dikampanyekan oleh Kabupaten / Kota dengan skor nilai tertentu (jika diatas 80 = faham, 60 - 80 = kurang faham, dibawah 60 = tidak faham)	Semakin banyak masyarakat yang diberikan eduksi dan memahami GERMAS maka semakin baik	Tahunan		65%	70%	75%	80%	85%	90%
	Meningkatnya Kabupaten / Kota yang melakukan kampanye GERMAS	Persentase Kabupaten / Kota yang Melaksanakan Kampanye GERMAS Sesuai Standar	positif	persen	$\frac{\text{Jumlah Kabupaten / Kota yang melaksanakan kampanye GERMAS sesuai standar pada tahun N}}{\text{Jumlah Kabupaten / Kota}} \times 100$	Kabupaten / Kota yang melaksanakan kampanye GERMAS meliputi minimal 8 kali pertahun	ukuran seberapa banyak pemerintah daerah (kabupaten/kota) di suatu wilayah telah aktif dalam menginisiasi dan menyelenggarakan gerakan nasional Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS), yang mencakup promosi perilaku hidup sehat melalui berbagai kegiatan kampanye dan program pendukungnya.	Tahunan		NA	40%	50%	60%	70%	80%
	Meningkatnya Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan Jiwa Tanpa Diskriminasi	Persentase Penderita gangguan jiwa dan Penyalahguna NAPZA yang mendapatkan pengobatan dan tidak diterlantarkan (%)	positif	persen	$\frac{\text{Jumlah penderita gangguan jiwa dan penyalahguna NAPZA yang memperoleh pelayanan kesehatan sesuai standar di fasyankes pada tahun N}}{\text{jumlah penderita yang masuk dalam kriteria pada tahun N}} \times 100$	Orang dengan Gangguan Jiwa dan penyalahguna NAPZA dengan kriteria (memiliki NIK dan wali) yang memperoleh pelayanan kesehatan di Fasyankes Kabupaten / Kota tanpa diskriminasi dan tidak ditelantarkan berdasarkan UU nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan	Semakin banyak ODGJ dan penyalahguna NAPZA yang memperoleh pelayanan kesehatan sesuai standar di Fasyankes maka awmakin baik	Tahunan		NA	100%	100%	100%	100%	100%
	Meningkatnya Pelayanan Kesehatan pada Orang dengan Gangguan Jiwa dan Penyalahguna NAPZA	Persentase Kabupaten / Kota yang melakukan Pelayanan kepada Orang dengan Gangguan Jiwa Berat dan Penyalahguna NAPZA sesuai standar	positif	persen	$\frac{\text{Jumlah Kabupaten / Kota yang melakukan pelayanan kepada ODGJ dan penyaalahguna NAPZA sesuai standar pada tahun N}}{\text{jumlah Kabupaten / Kota pada tahun N}} \times 100$	Pelayanan Kesehatan pada ODGJ dan penyalahguna NAPZA meliputi pelayanan di Fasyankes sesuai standar	Semakin tinggi persentase, semakin merata akses layanan bagi kelompok rentan ini di tingkat daerah	Tahunan		NA	100%	100%	100%	100%	100%
	Terkendalinya Penyakit Tuberkulosis, Hipertensi dan Diabetes Melitus	Persentase Ketercapaian angka keberhasilan pengobatan tuberculosis, presentase hipertensi dalam pengendalian, dan diabetes melitus dalam pengendalian	positif	persen	Σ (A+B+C)/Jumlah total target TBC, Hipertensi dan DM A= Ketercapaian Persentase keberhasilan penanganan penyakit TBC B = Ketercapaian Target Hipertensi dalam Pengendalian C = Ketercapaian Target Diabetes Melitus dalam pengendalian Target TBC 2026-2030 : 95% Hipertensi : 2026 : 5% 2027 : 7,5% 2028 : 10% 2029 : 12, 5% 2030 : 15% Diabetes Melitus 2026 : 5% 2027 : 7,5% 2028 : 10% 2029 : 12, 5% 2030 : 15%	Jumlah semua kasus penyakit TBC yang dinyatakan sembuh, pengobatan lengkap dibagi dengan semua kasus TBC yang diobati dikali 100%, jumlah pasien hipertensi di fasyankes dengan tekanan darah terkontrol <140/90 mmHg dibagi dengan jumlah seluruh pasien hipertensi dikali 100% dan jumlah pasien DM dengan kadar gula darah 2 PP kapiler <180 mg/dl pada kunjungan klinis terakhir dibagi dengan jumlah seluruh pasien DM dikali 100%	Semakin mendekati 100% artinya kinerja semakin baik	Tahunan		100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Optimalnya Ketercapaian Target Penyakit Menular dan Tidak Menular	Persentase ketercapaian layanan Penyakit Menular dan Tidak Menular	positif	persen	$\frac{\text{Jumlah ketercapaian layanan penyakit menular dan tidak menular pada tahun N}}{\text{jumlah layanan penyakit menular dan tidak menular yang direncanakan pada tahun N}} \times 100$	Upaya Penurunan jumlah penderita penyakit menular (TBC, HIV, Hepatitis, ISPA, Diare, Kusta, Malaria, DBD, Rabies, Kecacingan, Leptospirosis) dan tidak menular (Hipertensi, Diabetes Melitus, Obesitas, penyakit jantung, stroke, kanker serviks, kanker payudara, kanker kolorectal, kanker paru, gangguan indera dan fungsional, PPOK, penyakit gigi dan mulut serta pengendalian penyakit akibat tembakau, gangguan imunologi, gangguan otak dan kelainan darah) yang sesuai standar	Semakin mendekati target capaian artinya kinerja semakin t	Tahunan		100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Meningkatnya Akses Jaminan Kesehatan bagi masyarakat Miskin/Tidak Mampu	Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (%)	positif	persen	$\frac{\text{Jumlah penduduk tidak mampu yg terdaftar}}{\text{jumlah penduduk miskin}} \times 100$	Jumlah penduduk tidak mampu yg terdaftar di dlm jaminan kesehatan Nasional (JKN) atau BPJS Kesehatan di mana bagi fakir miskin dan orang tidak mampu dibayarkan oleh pemerintah	Semakin mendekati target capaian artinya kinerja semakin t	Tahunan		98,77%	98,77%	98,77%	98,77%	98,77%	98,77%
	Meningkatnya Keaktifan peserta Jaminan Kesehatan Nasional bagi masyarakat Miskin /Tidak Mampu	Persentase masyarakat yang aktif dalam kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (%)	positif	persen	$\frac{\text{Jumlah Masyarakat miskin yang aktif dalam JKN}}{\text{Jumlah masyarakat miskin}} \times 100$	Jumlah penduduk tidak mampu yg terdaftar di dlm jaminan kesehatan Nasional (JKN) atau BPJS Kesehatan di mana bagi fakir miskin dan orang tidak mampu dibayarkan oleh pemerintah	Semakin mendekati target capaian artinya kinerja semakin t	Tahunan		70,00%	72,00%	73,00%	74,00%	75,00%	76,00%
	Meningkatnya Kualitas SPM Bidang Kesehatan Provinsi	Persentase Ketercapaian SPM Bidang Kesehatan Provinsi	positif	persen	$\frac{\textit{Jumlah ketercapaian Kegiatan yang mendukung SPM Kesehatan PRovinsi}}{\textit{Jumlah target Kegiatan yang mendukung capaian SPM Kesehatan Provinsi}} \times 100$	Ketercapaian Kegiatan-kegiatan yang mendukung SPM Bidang Kesehatan Provinsi sesuai Permenkes tentang SPM	Semakin mendekati target capaian artinya kinerja semakin t	Tahunan		100%	100%	100%	100%	100%	100%

	Meningkatnya Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan yang Mendukung Tercapainya SPM Bidang Kesehatan Provinsi	Persentase Pelayanan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Provinsi	positif	persen	$\frac{Jumlah\ penduduk\ pada\ kondisi\ Krisis\ Kesehatan\ /\ Bencana\ yang\ terlayani\ kesehatannya\ pada\ tahun\ N}{jumlah\ penduduk\ yang\ terdampak\ Krisis\ Kesehatan\ /\ Bencana\ \ pada\ tahun\ N} \times 100$	Peningkatan kegiatan-kegiatan yang dapat mendukung tercapainya SPM Kesehatan Provinsi	Semakin mendekati target capaian artinya kinerja semakin B	Tahunan		100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Meningkatnya Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan yang Mendukung Tercapainya SPM Bidang Kesehatan Provinsi	Persentase Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	positif	persen	$\frac{Jumlah\ penduduk\ pada\ kondisi\ KLB\ yang\ terlayani\ kesehatannya\ pada\ tahun\ N}{jumlah\ penduduk\ yang\ terdampak\ KLB\ \ pada\ tahun\ N} \times 100$	Peningkatan kegiatan-kegiatan yang dapat mendukung tercapainya SPM Kesehatan Provinsi	Semakin mendekati target capaian artinya kinerja semakin B	Tahunan		100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Meningkatnya Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan yang Mendukung Tercapainya SPM Bidang Kesehatan Provinsi	Persentase Kabupaten / Kota yang melakukan pelayanan kesehatan kepada jamaah haji sesuai standar	positif	persen	$\frac{Jumlah\ Kabupaten\ /\ Kota\ yang\ melaksanakan\ pelayanan\ kesehatan\ pada\ jamaah\ haji\ sesuai\ standar\ pada\ tahun\ N}{Jumlah\ Kabupaten/Kota} \times 100$	Peningkatan kegiatan-kegiatan yang dapat mendukung tercapainya SPM Kesehatan Provinsi	Semakin mendekati target capaian artinya kinerja semakin B	Tahunan		100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Meningkatnya LANSIA Mandiri	Persentase Lanjut Usia yang Mandiri	positif	persen	$\frac{A}{B} \times 100$ A= Jumlah lansia (usia 60 tahun keatas) yang masih mampu melakukan aktivitas hidup sehari-hari tanpa bantuan sama sekali dari orang lain (MANDIRI;skor ADL 20) dan lansia yang mengalami gangguan ringan dalam melakukan aktivitas sehari-hari hingga kadang perlu bantuan orang lain (KETERGANTUNGAN RINGAN;skor ADL 12-19) B= jumlah lansia yang di skrining	Peningkatan kemandirian LANSIA (usia 60 tahun keatas) dalam melakukan aktivitas hidup sehari-hari tanpa bantuan sama sekali dari orang lain (MANDIRI;skor ADL 20) dan lansia yang mengalami gangguan ringan dalam melakukan aktivitas hidup sehari-hari hingga kadang perlu bantuan orang lain (Ketegantungan ringan; skor ADL 12-19)	Semakin mendekati target capaian artinya kinerja semakin B	Tahunan		76%	76%	77%	78%	78,5%	79%
	Meningkatnya persentase LANSIA yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	Persentase LANSIA yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	positif	persen	$\frac{Jumlah\ LANSIA\ (usia\ 60\ tahun\ keatas)\ yang\ mendapatkan\ skrining\ kesehatan\ sesuai\ standar}{jumlah\ lansia\ diwilayah\ kerja\ dalam\ kurun\ waktu\ 1\ tahun} \times 100$	Jumlah LANSIA (usia 60 tahun keatas) yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar minimal 1 kali dalam 1 tahun, meliputi ; pengukuran berat badan, lingkar perut, LILA Tekanan Darah, gula darah, kolesterol, tingkat kemandirian, skrining lansia sederhana(SKILAS), anamnesa perilaku berisiko sesuai SPM	Semakin mendekati target capaian artinya kinerja semakin B	Tahunan		50%	50%	54%	59%	64%	69,0%
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesehatan Primer	Persentase Kualitas Pelayanan Kesehatan Primer sesuai standar	Persentase ketercapaian fasyankes tradisional yang sesuai standar, pemeriksaan kesehatan gratis dan fasyankes primer yang sesuai standar akreditasi	persen	Σ (A+B+C)/Jumlah total pelayanan kesehatan primer dimana : A = Persentase ketercapaian pemeriksaan kesehatan gratis sesuai standar=(Jumlah cakupan layanan CKG/jumlah penduduk) x 100 B = Persentase ketercapaian fasyankes tradisional yang sesuai standar = (Jumlah cakupan kabupaten kota yang telah melaksanakan layanan kesehatan tradisional sesuai standar/jumlah kabupaten/kota) x100 C = Persentase ketercapaian fasyankes primer yang sesuai standar akreditasi = (Jumlah Fasilitas layanan kesehatan primer (Puskesmas/Klinik) sesuai akreditasi/ jumlah faskes primer (Puskesmas/klinik) x 100	Proporsi jumlah penerima pemeriksaan kesehatan gratis pada semua kelompok usia terhadap jumlah penduduk. layanan CKG + jumlah kabupaten kota dengan penyediaan/pelayanan kesehatan tradisional sesusuai standar minimal satu fasyankes disetiap kabupaten/kota + Pelayanan Fasilitas kesehatan primer (Puskesmas/Kilik) yang sesuai standar akreditasi	Semakin mendekati target capaian artinya kinerja semakin B	Tahunan		71.5%	82%	98%	100%	100%	100%
	Meningkatnya Pelayanan Kesehatan Tradisional	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan tradisional yang sesuai standar (%)	positif	persen	$\frac{Jumlah\ Faskes\ Tradisional\ yang\ sesuai\ standar\ pada\ tahun\ N}{Jumlah\ seluruh\ Faskes\ tradisional\ pada\ tahun\ N} \times 100$	Peningkatan dalam berbagai aspek pelayanan kesehatan tradisional yang dapat diukur secara konkret. Ini meliputi peningkatan kualitas tenaga kesehatan tradisional, mutu pengobatan, infrastruktur, serta kepuasan pasien dan masyarakat.	Semakin mendekati target capaian artinya kinerja semakin B	Tahunan		NA	70%	72%	74%	76%	78%
	Terlaksananya pelayanan Kesehatan gratis Masyarakat Umum baik di Puskesmas maupun di luar puskesmas	Persentase pelaksanaan pelayanan kesehatan gratis di Puskesmas dan di luar Puskesmas	positif	persen	$\frac{Jumlah\ Puskesmas\ yang\ melaksanakan\ pemeriksaan\ Kesehatan\ gratis\ pada\ semua\ kelompok\ usia\ pada\ tahun\ N}{Jumlah\ puskesmas\ pada\ tahun\ N} \times 100$	Peningkatan puskesmas yang melaksanakan CKG	Semakin mendekati target capaian artinya kinerja semakin B	Tahunan		70%	75%	80%	85%	90%	95%
	Meningkatnya kualitas Pelayanan Kesehatan primer yang sesuai standar Akreditasi	Persentase Fasilitas layanan kesehatan primer (Puskesmas/Klinik) sesuai standar akreditasi	positif	persen	$\frac{Jumlah\ Fasilitas\ layanan\ kesehatan\ primer\ (Puskesmas/Kilik)\ sesuai\ akreditasi}{jumlah\ faskes\ primer\ (Puskesmas/klinik} \times 100$	Pelayanan Fasilitas kesehatan primer (Puskesmas/Klinik) yang sesuai standar akreditasi	Semakin mendekati target capaian artinya kinerja semakin B	Tahunan		71,5%	82,0%	98,0%	100,0%	100,0%	100,0%

	Meningkatnya layanan intervensi Penurunan Stunting sesuai Standar	Persentase Cakupan Layanan Intervensi dalam Penurunan Stunting	positif	persen	$\frac{\text{'Jumlah indikator intervensi penurunan Stunting yang tercapai pada tahun N}}{\text{jumlah indikator intervensi stunting pada tahun N}} \times 100$	Tercapainya cakupan layanan intervensi dalam penurunan Stunting. Rata-rata pelayanan intervensi Stunting 1. Persentase ibu hamil yang mengonsumsi Tablet Tambah Darah (TTD) selama masa kehamilan.Target 48% 2.Persentase remaja putri yang mengonsumsi Tablet Tambah Darah (TTD). Target 65% 3. Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan mendapat Air Susu Ibu (ASI) eksklusi. Target 73% 4.Persentase anak usia 6-23 bulan yang mendapat Makanan Pendamping Air Susu Ibu (MP-ASI). target 73% 5.Persentase ibu hamil Kurang Energi Kronik (KEK) yang mendapatkan tambahan asupan gizi. Target. 64% 6.Persentase anak berusia di bawah lima tahun (balita) gizi buruk yang mendapat pelayanan tata laksana gizi buruk. target 70% 7.Persentase anak berusia di bawah lima tahun (balita) yang dipantau pertumbuhan dan perkembangannya. target. 50% 8.Persentase anak berusia di bawah lima tahun (balita) gizi kurang yang mendapat tambahan asupan gizi. target 60% 9. Persentase anak berusia dibawah 2 tahun (Baduta) yang memperoleh Imunisasi Lengkap target 80 %		Tahunan		64%	66,5%	72%	76%	77%	77,7%
	Meningkatnya kabupaten kota yg melaksanakan intervensi penurunan stunting	Persentase kabupaten/ kota yang melaksanakan intervensi penurunaan Stunting	positif	persen	$\frac{\text{Jumlah Kabupaten Kota yang melaksanakan Intervensi Penurunan Stunting pada tahun N}}{\text{jumlah Kabupaten Kota}} \times 100$	Kabupaten Kota Yang Melaksanakan intervensi Penurunan Stunting		Tahunan		64%	66,5%	72%	76%	77,0%	77,7%
	Meningkatnya Kabupaten/Kota yang Melaksanakan STBM	Persentase Kabupaten / Kota Yang Melaksanakan STBM	positif	persen	$\frac{\text{Jumlah Kabupaten / Kota yang tercapai pemenuhan STBM pada tahun N}}{\text{Jumlah Kab / Kota}} \times 100$	Kabupaten/kota yang telah terverifikasi 80% KK Stop Buang Air Besar Sembarangan di tempat terbuka dan minimal 50% KK berperilaku minimal 3 pilar STBM lainnya		Tahunan		NA	50%	63%	63,0%	75,0%	75%
	Meningkatnya Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan kabupaten/kota sehat	Jumlah Kabupaten / Kota yang menyelenggarakan kab/kota sehat	positif	jumlah	Jumlah kumulatif kab/ Kota dengan capaian nilai minimal 70% untuk setiap tatanan kab/kota sehat pada tahun N	Kabupaten Kota dengan capaian nilai minimal 70% untuk setiap tatanan kab/kota sehat		Tahunan		NA	3	4	4	5	5
	Meningkatnya Akses dan Mutu Imunisasi Dasar Lengkap Bagi Bayi	Cakupan imunisasi bayi lengkap	positif	persen	$\frac{\text{Jumlah bayi usia 0-11 bulan yang mendapatkan imunisasi lengkap pada tahun N}}{\text{target bayi (0-11 bulan) tahun N}} \times 100$	Persentase bayi (0-11 bulan) yang mendapatkan imunisasi lengkap di suatu wilayah dalam kurun waktu tertentu		Tahunan		NA	80%	82,5%	85%	87,5%	90%
	meningkatnya kabupaten/kota yang mencapai imunisasi bayi lengkap	Persentase Kabupaten / Kota yang Mencapai Imunisasi bayi lengkap (%)	positif	persen	$\frac{\text{Jumlah Kabupaten / Kota yang mencapai Imunisasi bayi lengkap pada tahun N}}{\text{jumlah Kab/Kota}} \times 100$	Kabupaten / Kota yang melaksanakan pelayanan imunisasi lengkap pada bayi usia 0-11 bulan		Tahunan		NA	62,5%	75%	75%	87,5%	87,5%
	Meningkatnya pelayanan Kesehatan Ibu bersalin sesuai standar	persentase Ibu Bersalin melakukan persalinan di fasilitas kesehatan (%)	positif	persen	$\frac{\text{Jumlah ibu Bersalin yang melahirkan di fasilitas kesehatan sesuai standar pada tahun N}}{\text{jumlah total ibu bersalin pada tahun N}} \times 100$	Pelayanan Kesehatan Ibu bersalin sesuai standar di Fasyankes		Tahunan		80%	82%	84%	86%	88%	88%
	Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Ibu hamil Sesuai Standar	persentase pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar	positif	persen	$\frac{\text{Jumlah ibu hamil yang memperoleh pelayanaan antenatal sesuai standar paling sedikit 6 kali selama masa kehamilan pelaksanaan pada tahun N}}{\text{jumlah ibu hamil pada tahun N}} \times 100$	Pelayanan Kesehatan Ibu hamil yang telah memperoleh pelayanan antenatal sesuai standar paling sedikit 6 kali selama kehamilan		Tahunan		76%	78%	80%	82%	84%	86%
	Meningkatnya Cakupan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif Sesuai Standar	Persentase Ketercapaian Target Pelayanan Kesehatan Usia Produktif Sesuai Standar	positif	persen	$\frac{\text{Jumlah indikator yang tercapai di tahun N}}{\text{jumlah indikator yang ada di tahun N}} \times 100$	Pelayanan Kesehatan Usia Produktif dengan sasaran dewasa dan usia reproduktif meliputi calon pengantin yang mendapat skrining kesehatan + pelayanan KB Pasca Persalinan + Catin perempuan dilayani kesehatan + catin laki-laki dilayani kesehatan		Tahunan	40	50%	50%	60%	65%	70%	70%
	Meningkatnya Pelayanan Kesehatan Usia Produktif di Kabupaten / Kota sesuai standar	Persentase Kabupaten / kota yang melaksanakan pelayanan kesehatan usia produktif sesuai standar	positif	persen	$\frac{\text{Jumlah Kabupaten / Kota yang melaksanakan yankes usia produktif pada tahun N sesuai standar}}{\text{Jumlah Kab / Kota N}} \times 100$	Kabupaten / Kota yang melaksanakan pelayanan kesehatan usia produktif yaitu pada usia dewasa dan usia reproduktif sesuai standar		Tahunan		NA	100%	100%	100%	100%	100%
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesehatan Rujukan	Persentase RS Rujukan Provinsi yang Terkareditasi	Positif	Persen	$\frac{\text{Jumlah Rumah Sakit Rujukan Provinsi yang Terakreditasi}}{\text{Jumlah Rumah Sakit Provinsi}} \times 100$	Jumlah rumah sakit rujukan yang terakreditasi tingkat perdana, dasar, madya, utama dan paripurna, dibuktikan dengan sertifikasi akreditasi setiap rumah sakit baik RS Pemerintah maupun RS swasta	Semakin tinggi capainnya (mendekati 100%) artinya semakin baik	Tahunan	Data Jumlah RS yang tera	91%	92%	93%	94%	95%	95%
	Terpenuhinya pembangunan RS berbasis teknologi	Persentase pembangunan RS berbasis teknologi	positif	persen	$\frac{\text{Jumlah layanan kesehatan berbasis teknologi}}{\text{jumlah fasilitas pelayanan berbasis teknologi}} \times 100$	jika layanan kesehatan kesehatan baru terpenuhi mendekati 100% maka sesuai dengan standar		Tahunan		34%	100%	100%	100%	100%	100%
	Tersedianya fasilitas Kesehatan Rujukan (RS) yang menjalankan sistem rujukan sesuai SOP	persentase faskes rujukan (RS) yang menjalankan sistem rujukan sesuai SOP	positif	persen	$\frac{\text{jumlah fasilitas kesehatan rujukan yang sesuai dengan SOP}}{\text{jumlah fasilitas kesehatan}} \times 100$	jika fasilitas kesehatan rujukan yang menjalankan sistem rujukan sesuai SOP mendekati 100% maka semakin baik		Tahunan		74	74	79	84	89	90
Meningkatnya Kualitas Taraf Kesehatan Masyarakat	**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**															
	Meningkatnya Pemenuhan dan Pemerataan SDM Kesehatan	Persentase Tenaga Kesehatan dan Tenaga Medis di Kabupaten/Kota Sesuai Standar			$\frac{\text{jumlah Kab / Kota dengan rasio tenaga kesehatan dan tenaga medis sesuai standar}}{\text{jumlah kabupaten kota}} \times 100$	Kabupaten / Kota dengan ketersediaan tenaga medis sesuai standar (sesuai rasio kebutuhan tenaga medis dan atau tenaga kesehatan dibandingkan dengan jumlah penduduk)		Tahunan		NA	12,5%	12,5%	25%	25%	37,5%
	Terpenuhinya SDM kesehatan sesuai standar yang terdistribusi di fasyankes	Persentase Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar yang terdistribusi			$\frac{\text{Jumlah SDM Kesehatan yang dipenuhi dan didistribusikan sesuai dengan kompetensi nya pada tahun N}}{\text{target pemenuhan dan pendistribusian SDM kesehatan sesuai kompetensi pada tahun N}} \times 100$	Jumlah SDM Kesehatan sesuai standar kebutuhan Fasyankes yang direkrut dan didistribusikan secara merata		Tahunan		12,5%	12,5%	12,5%	25%	25%	37,5%
Meningkatnya Kualitas Taraf Kesehatan Masyarakat	**PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN**															

	Meningkatnya Kualitas Sarana Kefarmasian di Tingkat Provinsi	Persentase sarana Kefarmasian Tingkat Provinsi yang memenuhi syarat			$\frac{\textit{Jumlah Sarana Kefarmasian yang memenuhi syarat pada tahun N}}{\textit{Jumlah seluruh Sarana kefarmasian pada tahun N}} \times 100$	Penginkatan Sarana Kefarmasian dan Alat Kesehatan Tingkat Provinsi (Pedagang Besar Farmasi Cabang, Distributor Alat Kesehatan Cabang, Distributor Kosmetik, Distributor Obat Tradisional, Penyuluhan kepada Petugas Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga dan Produksi Usaha Kecil Obat Tradisional) agar dapat memenuhi standar yang baik dan benar sesuai dengan kaidah CDOB / CDAKB / CPOTB Peningkatan Prosentase pemenuhan persyaratan berdasarkan instrumen pemeriksaan sarana dengan angka minimal 75 % dari hasil total skoring penilaian instrument		Tahunan		75%	76%	79%	80%	82%	84%
	Terfasilitasinya Sarana Distribusi Kefarmasian yang Mendapatkan Rekomendasi Izin Operasional	Persentase PBF Cabang dan Cabang PAK yang mendapatkan rekomendasi Perizinan			$\frac{\textit{Jumlah Sarana PBF Cabang dan PAK Cabang yang memperoleh rekomendasi perizinan pada tahun N}}{\textit{Jumlah Sarana PBF Cabang dan PAK Cabang yang mengajukan rekomendasi pada tahun N}} \times 100$	Peningkatan Rekomendasi Izin Oprasional yang di dapatkan sudah sesuai dengan Standar Sertifikat sesuai dengan PMK 14 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan usaha dan produk pada penyelengaraan berusaha berbasis resiko sektor kesehatan		Tahunan		NA	100%	100%	100%	100%	100%
	Terfasilitasinya Usaha Kecil Obat Tradisional, Kosmetik dan Obat Tradisional dalam pemberian rekomendasi ijin	Persentase Usaha Kecil Obat Tardisional (UKOT), Distributor Kosmetik dan Obat Tradisional yang mendapatkan Izin Operasional			$\frac{\textit{Jumlah Sarana Pedagang Besar Kosmetik dan Pedagang Besar Obat Tradisional yang memperoleh rekomendasi perizinan pada tahun N}}{\textit{Jumlah seluruh Sarana Pedagang Besar Kosmetik dan Pedagang Besar Obat Tradisional yang mengajukan rekomendasi pada tahun N}} \times 100$	Peningkatan Rekomendasi Izin Oprasional yang di dapatkan sudah sesuai dengan Standar Sertifikat sesuai dengan PMK 14 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan usaha dan produk pada penyelengaraan berusaha berbasis resiko sektor kesehatan		Tahunan		NA	100%	100%	100%	100%	100%
Meningkatnya Kualitas Taraf Kesehatan Masyarakat	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**														
	Meningkatanya masyarakat yang berperliaku hidup bersih dan sehat	Persentase masyarakat yang mengimplementasikan PHBS			$\frac{\textit{Jumlah masyarakat yang mengimplementasikan PHBS sesuai standar pada tahun N}}{\textit{jumlah masyarakat yang di edukasi pada tahun N}} \times 100$	Masyarakat yang berperilaku Hidup Bersih dan Sehat dilihat melalui kriteria (5 tatanan PHBS) berdasarkan Permenkes Nomor 2269 Tahun 2011 tentang Pedoman Pembinaan PHBS di berbagai Tatanan		Tahunan		NA	69,57%	73,91%	78,26%	82,61%	86,96%
	Meningkatnya Dukungan Kelompok Masyarakat Melalui kegitan yang mendukung program prioritas kesehatan	Persentase Organisasi Masyarakat, Organisasi Profesi, Lintas Sektor dan Kabupaten / Kota dalam mendukung program prioritas kesehatan			$\frac{\textit{Jumlah kelompok masyarakat yang mendukung program prioritas kesehatan sesuai standar pada tahun N}}{\textit{jumlah kelompok masyarakat yang bekerjasama pada tahun N}} \times 100$	Dukungan Kelompok Masyarakat dalam mendukung program prioritas kesehatan adalah melalui penyebarluasan informasi / edukasi kesehatan di kelompoknya		Tahunan		NA	54%	55%	56%	57%	58%
	Terlakasananya Promosi kesehatan dan Perilaku Hidup bersih dan sehat	Persentase Pelaksanaan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Perilaku Hidup Bersih dan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Provinsi			$\frac{\text{Jumlah pelaksanaan KIE pada media online dan offline pada tahun N}}{\textit{jumlah kebutuhan pelaksanaan KIE pada media online dan of fline pada tahun N}} \times 100$	Promosi Kesehatan dan PHBS di masyarakat melalui media baik online maupun offline		Tahunan		100%	100%	100%	100%	100%	100%
UPTD PELATIHAN KESEHATAN															
Terwujudnya birokrasi yang berintegritas, adaptif, profesional, dan tangguh	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**														
	Meningkatnya tata kelola pemerintahan pada Perangkat Daerah	Indeks Reformasi Birokrasi pada Perangkat Daerah	Positif	Nilai	Indeks RB dihitung dengan menjumlahkan dua komponen utama: Nilai RB General: Mengukur capaian strategi pelaksanaan reformasi birokrasi secara umum. Nilai RB Tematik: Mengukur capaian dalam area tematik tertentu yang relevan dengan reformasi birokrasi Indeks RB = Nilai RB General + Nilai RB Tematik Setiap nilai komponen (RB General dan RB Tematik) diperoleh melalui evaluasi terhadap berbagai indikator dan sub-indikator yang telah ditetapkan	Indeks yang mencerminkan tingkat kemajuan pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan pemerintah daerah, yang mencakup berbagai aspek tata kelola pemerintahan, perbaikan proses bisnis, manajemen SDM, dan peningkatan kualitas layanan publik	Komponen Evaluasi Indeks Reformasi Birokrasi terdapat dua dimensi yaitu dimensi RB General terdiri dari: 1. Komponen Capaian Strategi Pelaksanaan RB General 2. Komponen Capaian Implementasi Kebijakan Reformasi Birokrasi 3. Komponen Capaian Sasaran Strategis Reformasi Birokrasi dan Dimensi RB Tematik teridiri dari: 1. Komponen Evaluasi RB Tematik Pemerintah Daerah. Nilai hasil akhir dari penjumlahan komponen digunakan untuk menetapkan tingkat pelaksanaan reformasi birokrasi, dengan kategori sebagai berikut: 1. AA (Nilai >100) - Sangat Memuaskan 2. A (Nilai >80-100) - Memuaskan 3. A- (Nilai >80-100) - Memuaskan dengan catatan 4. BB (Nilai >70-80) - Sangat Baik 5. B (Nilai > 60- 70) - Baik 6. CC (Nilai > 50-60) - Cukup 7. C (Nilai > 30-50) - Kurang 8. D (Nilai 0-30) - Sangat Kurang	Tahunan	Biro Organisasi Reformasi Birokrasi dan BAPPEDA	62	62	65	70	72	75
	Terkelolanya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum yang terkelola dengan baik		persen	$\frac{\text{Jumlah Administrasi Umum yang terpenuhi tahun N}}{\text{Jumlah Administrasi Umum yang ditargetkan pada tahun N}} \times 100$	Terkelolanya Kebutuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah pada Tahun N		Tahunan		100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Terpenuhinya Kebutuhan Sarana dan Prasarana kantor sesuai standar	Persentase kebutuhan BMD terpenuhi		persen	$\frac{\textit{Jumlah Sarana Prasarana yang dibelanjakan tahun N}}{\textit{Jumlah Sarana Prasarana Sesuai RKBMD}} \times 100$	Perbandingan Kebutuhan Sarana dan Prasarana kantor sesuai standar dengan jumlah sarana prasarana sesuai RKBMD		Tahunan		100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Terkelolanya pelayanan penunjang kantor	Persentase terpenuhinya pelayanan penunjang kantor		persen	$\frac{\text{jumlah pelayanan penunjang kantor yang dipenuhi}}{\textit{jumlah pelayanan yang diperlukan}} \times 100$	Perbandingan Pelayanan Jasa Penunjang Kantor dengan Jumlah pelayanan yang diperlukan		Tahunan		100%	100%	100%	100%	100%	100%
	terpenuhinya pemeliharaan BMD pada perangkat daerah	Persentase BMD dalam kondisi baik		persen	$\frac{\text{Jumlah BMD yang dipelihara Tahun N}}{\textit{jumlah BMD yang direncanakan dipelihara Tahun N}} \times 100$	Perbandingan antara BMD yang dipelihara pada tahun N dengan Jumlah BMD yang direncanakan dipelihara pada Tahun N		Tahunan		100%	100%	100%	100%	100%	100%
Meningkatnya Kualitas Taraf Kesehatan Masyarakat	**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**														

	Meningkatnya Kapasitas SDM Kesehatan	Persentase SDM Kesehatan yang memiliki Kompetensi sesuai standar			$\frac{\text{Jumlah SDM Kesehatan yang memiliki sertifikat kompetensi}}{\textit{Jumlah SDM Kesehatan}} \times 100$	Peningkatan Kapasitas SDM Kesehatan sesuai Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan Pasal 258 ayat 1 bahwa dalam rangka menjaga dan meningkatkan mutu Tenaga Medis dan Tenaga kesehatan, dilakukan pelatihan dan atau kegiatan peningkatan kompetensi yang mendukung kesinambungan dalam menjalankan praktik		Tahunan		NA	30%	35%	40%	45%	50%
	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Kesehatan Sumber Daya Manusia Kesehatan dan Masyarakat	Persentase Tenaga Kesehatan dan Masyarakat yang terlatih sesuai standar			$\frac{\text{Jumlah Nakes dan Masyarakat yang terlatih sesuai standar pada tahun N}}{\textit{jumlah seluruh target peserta pelatihan yang akan dilatih pada tahun N di Upelkes}} \times 100$	Peningkatan Mutu dan Kompetensi SDM Kesehatan di UPTD Pelatihan Kesehatan		Tahunan		NA	100%	100%	100%	100%	100%
	Terfasilitasinya sertifikasi bagi SDM Kesehatan dan Masyarakat yang telah mengikuti pelatihan kesehatan	Persentase SDM Kesehatan dan Masyarakat yang mendapatkan sertifikasi			$\frac{\text{Jumlah peserta yang memperoleh sertifikat pada tahun N}}{\text{jumlah peserta yang mengikuti pelatihan pada tahun N}} \times 100$	SDM Kesehatan dan Masyarakat yang melaksanakan pelatihan mendapatkan sertifikat		Tahunan		NA	100%	100%	100%	100%	100%
UPTD LABKESDA PROVINSI BANTEN															
Terwujudnya birokrasi yang berintegritas, adaptif, profesional, dan tangguh	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**														
	Meningkatnya tata kelola pemerintahan pada Perangkat Daerah	Indeks Reformasi Birokrasi pada Perangkat Daerah	Positif	Nilai	Indeks RB dihitung dengan menjumlahkan dua komponen utama: Nilai RB General: Mengukur capaian strategi pelaksanaan reformasi birokrasi secara umum. Nilai RB Tematik: Mengukur capaian dalam area tematik tertentu yang relevan dengan reformasi birokrasi Indeks RB = Nilai RB General + Nilai RB Tematik Setiap nilai komponen (RB General dan RB Tematik) diperoleh melalui evaluasi terhadap berbagai indikator dan sub-indikator yang telah ditetapkan	Indeks yang mencerminkan tingkat kemajuan pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan pemerintah daerah, yang mencakup berbagai aspek tata kelola pemerintahan, perbaikan proses bisnis, manajemen SDM, dan peningkatan kualitas layanan publik	Komponen Evaluasi Indeks Reformasi Birokrasi terdapat dua dimensi yaitu dimensi RB General terdiri dari: 1. Komponen Capaian Strategi Pelaksanaan RB General 2. Komponen Capaian Implementasi Kebijakan Reformasi Birokrasi 3. Komponen Capaian Sasaran Strategis Reformasi Birokrasi dan Dimensi RB Tematik teridiri dari: 1. Komponen Evaluasi RB Tematik Pemerintah Daerah. Nilai hasil akhir dari penjumlahan komponen digunakan untuk menetapkan tingkat pelaksanaan reformasi birokrasi, dengan kategori sebagai berikut: 1. AA (Nilai >100) - Sangat Memuaskan 2. A (Nilai >80-100) - Memuaskan 3. A- (Nilai >80-100) - Memuaskan dengan catatan 4. BB (Nilai >70-80) - Sangat Baik 5. B (Nilai > 60- 70) - Baik 6. CC (Nilai > 50-60) - Cukup 7. C (Nilai > 30-50) - Kurang 8. D (Nilai 0-30) - Sangat Kurang	Tahunan	Biro Organisasi Reformasi Birokrasi dan BAPPEDA	60	62	64	66	68	70
	Terkelolanya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum yang terkelola dengan baik		kumulatif, persen	$\frac{\text{Jumlah Administrasi Umum yang terpenuhi tahun N}}{\text{Jumlah Administrasi Umum yang ditargetkan pada tahun N}} \times 100$	Terkelolanya Kebutuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah pada Tahun N		Tahunan		100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Meningkatnya prestasi kinerja ASN	Persentase ASN perangkat daerah yang memiliki predikat SKP minimal BAIK			$\frac{\textit{Jumlah ASN Perangkat Daerah yang mendapatkan nilai minimal BAIK}}{\textit{Jumlah ASN Perangkat Daerah}} \times 100$	Jumlah ASN Perangkat Daerah yang mendapatkan nilai minimal BAIK / Jumlah ASN Perangkat Daerah x 100%		Tahunan		100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Terpenuhinya Kebutuhan Sarana dan Prasarana kantor sesuai standar	Persentase kebutuhan BMD terpenuhi			$\frac{\textit{Jumlah Sarana Prasarana yang dibelanjakan tahun N}}{\textit{Jumlah Sarana Prasarana Sesuai RKBMD}} \times 100$	Perbandingan Kebutuhan Sarana dan Prasarana kantor sesuai standar dengan jumlah sarana prasarana sesuai RKBMD		Tahunan		100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Terkelolanya pelayanan penunjang kantor	Persentase terpenuhinya pelayanan penunjang kantor			$\frac{\text{jumlah pelayanan penunjang kantor yang dipenuhi}}{\textit{jumlah pelayanan yang diperlukan}} \times 100$	Perbandingan Pelayanan Jasa Penunjang Kantor dengan Jumlah pelayanan yang diperlukan		Tahunan		100%	100%	100%	100%	100%	100%
	terpenuhinya pemeliharaan BMD pada perangkat daerah	Persentase BMD dalam kondisi baik			$\frac{\text{Jumlah BMD yang dipelihara Tahun N}}{\textit{jumlah BMD yang direncanakan dipelihara Tahun N}} \times 100$	Perbandingan antara BMD yang dipelihara pada tahun N dengan Jumlah BMD yang direncanakan dipelihara pada Tahun N		Tahunan		100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Terpenuhinya peningkatan pelayanan BLUD UPTD	Persentase peningkatan pelayanan BLUD UPTD Labkesda Provinsi BANTEN			$\frac{\text{Jumlah Layanan Operasional yang dipenuhi}}{\textit{jumlah Layanan Oprasional yang ditargetkan}} \times 100$	pengelolaan pendapatan, belanja, dan kas secara terpadu, serta penyusunan Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) yang didasarkan pada rencana strategis dan standar pelayanan minimal	Jika persentasenya mendekati 100%, ini menunjukkan bahwa pelayanan sesuai standar	Tahunan		NA	100%	100%	100%	100%	100%
Meningkatnya Kualitas Taraf Kesehatan Masyarakat	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**														
	Meningkatnya Pemanfaatan Fungsi Labkes Tingkat III	Persentase Pemanfaatan Fungsi Labkesmas Tingkat III			Pemanfaatan Fungsi Labkesmas Tingkat III Dengan Standar 12 Fungsi Yang Dimanfaatkan Oleh Masyarakat	Jumlah Kemampuan Fungsi Labkesmas Sesuai Standar Dibagi Dengan 12 Fungsi Labkesmas Sesuai Standar Dikali 100 Persen		Tahunan		NA	66,67%	66,67%	66,67%	75%	75%
	Meningkatnya layanan Labkesda Provinsi Banten	Persentase capaian akreditasi Laboratorium Kesehatan (persen)			$\frac{\textit{Jumlah akreditasi/Sertifikasi (ISO / Akreditasi Labkes /Sertifikasi)yang tercapai oleh Labkesda}}{\textit{Jumlah Target seluruh akreditasi /Sertifikasi (4 Sertifikat akreditasi/sertifikasi)}} \times 100$	Peningkatan Layanan Labkesda dibuktikan dengan adanya akreditasi		Tahunan		NA	50%	50%	75%	75%	100%
UPTD RSUD BANTEN															
Terwujudnya birokrasi yang berintegritas, adaptif, profesional, dan tangguh	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**														

	Meningkatnya tata kelola pemerintahan pada Perangkat Daerah	Indeks Reformasi Birokrasi pada Perangkat Daerah	Positif	Nilai	Indeks RB dihitung dengan menjumlahkan dua komponen utama: Nilai RB General: Mengukur capaian strategi pelaksanaan reformasi birokrasi secara umum. Nilai RB Tematik: Mengukur capaian dalam area tematik tertentu yang relevan dengan reformasi birokrasi Indeks RB = Nilai RB General + Nilai RB Tematik Setiap nilai komponen (RB General dan RB Tematik) diperoleh melalui evaluasi terhadap berbagai indikator dan sub-indikator yang telah ditetapkan	Indeks yang mencerminkan tingkat kemajuan pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan pemerintah daerah, yang mencakup berbagai aspek tata kelola pemerintahan, perbaikan proses bisnis, manajemen SDM, dan peningkatan kualitas layanan publik	Komponen Evaluasi Indeks Reformasi Birokrasi terdapat dua dimensi yaitu dimensi RB General terdiri dari: 1. Komponen Capaian Strategi Pelaksanaan RB General 2. Komponen Capaian Implementasi Kebijakan Reformasi Birokrasi 3. Komponen Capaian Sasaran Strategis Reformasi Birokrasi dan Dimensi RB Tematik teridiri dari: 1. Komponen Evaluasi RB Tematik Pemerintah Daerah. Nilai hasil akhir dari penjumlahan komponen digunakan untuk menetapkan tingkat pelaksanaan reformasi birokrasi, dengan kategori sebagai berikut: 1. AA (Nilai >100) - Sangat Memuaskan 2. A (Nilai >80-100) - Memuaskan 3. A- (Nilai >80-100) - Memuaskan dengan catatan 4. BB (Nilai >70-80) - Sangat Baik 5. B (Nilai > 60- 70) - Baik 6. CC (Nilai > 50-60) - Cukup 7. C (Nilai > 30-50) - Kurang 8. D (Nilai 0-30) - Sangat Kurang	Tahunan	Biro Organisasi Reformasi Birokrasi dan BAPPEDA	60	62	64	66	68	70
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum yang terkelola dengan baik	Positif	Persen	$\frac{\text{Jumlah Administrasi Umum yang terpenuhi tahun N}}{\text{Jumlah Administrasi Umum yang ditargetkan pada tahun N}} \times 100$	Terkelolanya Kebutuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah pada Tahun N	Jika persentasenya mendekati 100%, ini menunjukkan bahwa pelayanan sesuai standar	Tahunan	RPJMD Banten	100	100	100	100	100	100
	Administrasi Keuangan perangkat daerah	persentase dokumen pelaporan keuangan perangkat daerah yang disusun sesuai SAP (Standar akuntansi pemerinta)	Positif	Persen	$\frac{\text{jumlah laporan keuangan yg disusun}}{\textit{Jumlah Laporan sesuai SAP}} \times 100$	pelaporan keuangan akhir tahun yang disusun PD sesuai dengan SAP berdasarkan PP 71 tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintahan	Jika persentasenya mendekati 100%, ini menunjukkan bahwa pelayanan sesuai standar	Tahunan	RPJMD Banten	100	100	100	100	100	100
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ASN perangkat daerah yang memiliki predikat SKP minimal BAIK	Positif	Persen	$\frac{\textit{Jumlah ASN Perangkat Daerah yang mendapatkan nilai minimal BAIK}}{\textit{Jumlah ASN Perangkat Daerah}} \times 100$	Perbandingan Jumlah ASN Perangkat Daerah yang mendapatkan predikat minimal BAIK dibandingkan dengan jumlah ASN pada Perangkat Daerah	Jika persentasenya mendekati 100%, ini menunjukkan bahwa pelayanan sesuai standar	Tahunan	RPJMD Banten	100	100	100	100	100	100
	Penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintahan daerah	Persentase terpenuhinya pelayanan penunjang kantor	Positif	Persen	$\frac{\text{jumlah pelayanan penunjang kantor yang dipenuhi}}{\textit{jumlah pelayanan yang diperlukan}} \times 100$	Perbandingan Pelayanan Jasa Penunjang Kantor dengan Jumlah pelayanan yang diperlukan	Jika persentasenya mendekati 100%, ini menunjukkan bahwa pelayanan sesuai standar	Tahunan	RPJMD Banten	100	100	100	100	100	100
	Pemeliharaan BMD penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase BMD dalam kondisi baik	Positif	Persen	$\frac{\text{Jumlah BMD yang dipelihara Tahun N}}{\textit{jumlah BMD yang direncanakan dipelihara Tahun N}} \times 100$	Perbandingan antara BMD yang dipelihara pada tahun N dengan Jumlah BMD yang direncanakan dipelihara pada Tahun N	Jika persentasenya mendekati 100%, ini menunjukkan bahwa pelayanan sesuai standar	Tahunan	RPJMD Banten	100	100	100	100	100	100
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Positif	Persen	hasil evaluasi terhadap implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada tingkat perangkat daerah (seperti dinas, badan, atau instansi pemerintah daerah lainnya). Nilai ini mencerminkan sejauh mana instansi tersebut telah menerapkan prinsip akuntabilitas kinerja dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya. AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) adalah bagian dari SAKIP, yaitu sistem yang digunakan untuk memastikan bahwa kinerja pemerintah dapat diukur, dipertanggungjawabkan, dan digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan serta perbaikan berkelanjutan. Nilai AKIP diberikan berdasarkan evaluasi terhadap dokumen perencanaan, pengukuran, pelaporan, evaluasi kinerja, dan capaian kinerja dari perangkat daerah. Evaluasi biasanya dilakukan oleh Inspektorat Komponen Penilaian AKIP: Perencanaan Kinerja (perencanaan strategis dan kinerja tahunan) Pengukuran Kinerja (indikator kinerja dan pengumpulan data) Pelaporan Kinerja (dokumen LAKIP/LKjIP) Evaluasi Internal (monitoring dan tindak lanjut perbaikan) Capaian Kinerja (hasil/output yang dicapai)	Berdasarkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014, SAKIP (Sistem Akuntabilias Kinerja Instansi Pemerintah) merupakan rangkaian sistemik dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklarifikasian dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Penyelenggaraan SAKIP dilaksanakan untuk menghasilkan sebuah laporan kinerja yang berkualitas serta selaras dan sesuai dengan tahapan-tahapan yang meliputi:Rencana strategis;Perjanjian kinerja;Pengukuran kinerja;Pelaporan kinerja;Reviu dan evaluasi kinerja.Berdasarkan Peraturan Menteri PAN RB No. 12 Tahun 2015	Nilai hasil akhir dari penjumlahan komponen-komponen terdiri dari komponen Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal yang memberikan gambaran tingkat AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah), dengan kategori predikat sebagai berikut: 1. Predikat AA (Nilai > 90) - Sangat Memuaskan 2. Predikat A (Nilai >80-90) - Memuaskan 3. Predikat BB (Nilai > 70-80) - Sangat Baik 4. Predikat B (Nilai > 60-70) - Baik 5. Predikat CC (Nilai > 50-60) - Cukup (Memadai) 6. Predikat C (Nilai > 30-50) - Kurang 7. Predikat D (Nilai > 0-30) - Sangat Kurag	Tahunan	RPJMD Banten	100	100	100	100	100	100
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Ketercapaian Pengadaan Barang Milik Daerah OPD	Positif	Persen	$\frac{\text{Jumlah BMD yang tersedia}}{\textit{Jumlah BMD yang tercatat}} \times 100$	Perbandingan antara jumlah yang tersedia dengan jumlah aset yang tercatat	Jika persentasenya mendekati 100%, ini menunjukkan bahwa pelayanan sesuai standar	Tahunan	RPJMD Banten	100	100	100	100	100	100
	Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase Ketercapaian Layanan BLUD sesuai standar	Positif	Persen	$\frac{\text{Jumlah Layanan Operasional yang dipenuhi}}{\textit{Jumlah Layanan Oprasional yang ditargetkan}} \times 100$	pengelolaan pendapatan, belanja, dan kas secara terpadu, serta penyusunan Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) yang didasarkan pada rencana strategis dan standar pelayanan minimal	Jika persentasenya mendekati 100%, ini menunjukkan bahwa pelayanan sesuai standar	Tahunan	RPJMD Banten	100	100	100	100	100	100
Meningkatnya Kualitas Taraf Kesehatan Masyarakat	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**													
	Meningkatnya akses dan mutu pelayanan kesehatan penunjang UPTD RSUD Banten	Persentase sarana dan prasarana RSUD Banten sesuai standar yang terpenuhi		Persen	$\frac{\textit{Capaian (Fasilitas Sarana Prasarana Gedung + Penunjang Operasional Pelayanan yang Terpenuhi)}}{\textit{Total target Capaian}} \times 100$	Kinerja dari Sarana Prasarana Gedung Ditambah dengan Kinerja Penunjang Operasional Pelayanan	Jika persentasenya mendekati 100%, ini menunjukkan bahwa sarana dan prasarana RSU Banten sesuai standar	Tahunan	RPJMD Banten	NA	70%	70%	75%	90%	100%
	Meningkatnya kualitas Fasilitas Sarpras UPTD RSUD Banten	Persentase Fasilitas Sarpras RSUD Banten Sesuai Standar		Persen	$\frac{\textit{Σ Jumlah Fasilitas Sarpras gedung pelayanan yang tingkatkan}}{\textit{Σ Jumlah Failitas Sarpras Pelayanan gedung yang direncanakan ditingkatkan}} \times 100$	Pelayanan Fasilitas Sarana Prasaran Gedung Pelayanan yang dikembangkan, direhabilitasi dan dibangun	Jika persentasenya mendekati 100%, ini menunjukkan bahwa sarana dan prasarana RSU Banten sesuai standar	Tahunan	RPJMD Banten	100%	100%	100%	100%	100%	100%

	Meningkatnya kualitas pemenuhan alat kesehatan, bahan medis habis pakai, dan makan minum pasien UPTD RSUD Banten	Persentase alat kesehatan, bahan medis habis pakai, dan makan minum pasien RSUD Banten Sesuai Standar		Persen	$\frac{\Sigma \text{ Jumlah Penunjang Operasional yang dipenuhi}}{\Sigma \text{ Jumlah Penunjang Operasonal yang direncanakan}} x\ 100$	Penunjang Operasional Pelayanan Rumah Sakit Terdiri dari Pengadaan dan Pemeliharaan Alkes, Pengadaan Operasional, Pengadaan Obat, BHP, BMHP dan Makmin Pasien	Jika persentasenya mendekati 100%, ini menunjukkan bahwa sarana dan prasarana RSU Banten sesuai standar	Tahunan	RPJMD Banten	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Yang Terakreditasi di UPTD RSUD Banten	Nilai Akreditasi RSUD Banten		Persen	Akreditasi RSUD Banten Dikeluarkan oleh Lembaga Akreditasi RS	Penilaian Akreditasi Rumah Sakit dilakukan setiap 4 Tahun, Kategori Akreditasi terdiri dari Paripurna, Utama, Madya, Dasar. Nilai 80-100 Memperoleh Akreditasi Paripurna, 70-79 Memperoleh Akreditasi Utama, 60-69 Memperoleh Akreditasi Madya, Kurang dari 60 Memperoleh Akreditasi Dasar (Tidak Lulus)	Jika perolehan nilai nya mendekati atau sesuai dengan target maka hal tersebut menunjukkan RSU Banten telah melaksanakan sesuai dengan standar	Tahunan	RPJMD Banten	80	80	82	82	82	82
	Terpenuhinya pelayanan UPTD RSUD Banten yang sesuai standar akreditasi	Persentase Ketercapaian Pelayanan RSUD Banten yang Sesuai Standar		Persen	$\frac{Jumlah\ Pelayanan\ yang\ Tersedia\ pada\ Tahun\ n}{Jumlah\ Pelayanan\ yang\ Direncanakan\ pada\ Tahun\ n} x\ 100$	Capaian kegiatan pelayanan yang terlaksana (satuan: persen) hal ini Menggambarkan capaian kegiatan untuk memenuhi standar pelayanan RSUD. Target capaian kegiatan pelayanan sesuai dengan Permenkes No. 129 Tahun 2008	Jika persentasenya mendekati 100%, ini menunjukkan bahwa pelayanan RSU Banten sesuai standar	Tahunan	RPJMD Banten	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Meningkatnya kualitas tatakelola pelayanan kesehatan di UPTD RSUD Banten	Persentase digitalisasi layanan kesehatan di RSUD Banten		Persen	$\frac{Jumlah\ aplikasi\ yang\ sudah\ terhubung\ terhadap\ system\ stakeholder}{Jumlah\ system\ stakeholder\ yang\ ditargetkan\ terhubung} x\ 10$	Capaian jumlah aplikasi pelaksanaan modul SIM RS sesuai dengan Permenkes no 92 tahun 2014 tentang penyelenggaraan komunikasi data dalam sistem informasi kesehatan terintegrasi		Tahunan	RPJMD Banten	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Meningkatnya Akses dan Mutu Layanan Informasi Kesehatan UPTD RSUD Banten	Persentase modul sistem informasi yang sudah terintegrasi		Persen	$\frac{Jumlah\ Layanan\ Infokes\ yang\ Sudah\ Optimal}{\text{Jumlah Lavanan Infokes Sesuai Standar}} x\ 100$	Capaian jumlah aplikasi pelaksanaan modul SIM RS sesuai dengan Permenkes no 92 tahun 2014 tentang penyelenggaraan komunikasi data dalam sistem informasi kesehatan terintegrasi		Tahunan	RPJMD Banten	100%	100%	100%	100%	100%	100%
UPTD RSUD MALINGPING																
Terwujudnya birokrasi yang berintegritas, adaptif, profesional, dan tangguh	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**															
	Meningkatnya tata kelola pemerintahan pada Perangkat Daerah	Indeks Reformasi Birokrasi pada Perangkat Daerah	Positif	Nilai	Indeks RB dihitung dengan menjumlahkan dua komponen utama: Nilai RB General: Mengukur capaian strategi pelaksanaan reformasi birokrasi secara umum. Nilai RB Tematik: Mengukur capaian dalam area tematik tertentu yang relevan dengan reformasi birokrasi Indeks RB = Nilai RB General + Nilai RB Tematik Setiap nilai komponen (RB General dan RB Tematik) diperoleh melalui evaluasi terhadap berbagai indikator dan sub-indikator yang telah ditetapkan	Indeks yang mencerminkan tingkat kemajuan pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan pemerintah daerah, yang mencakup berbagai aspek tata kelola pemerintahan, perbaikan proses bisnis, manajemen SDM, dan peningkatan kualitas layanan publik	Komponen Evaluasi Indeks Reformasi Birokrasi terdapat dua dimensi yaitu dimensi RB General terdiri dari: 1. Komponen Capaian Strategi Pelaksanaan RB General 2. Komponen Capaian Implementasi Kebijakan Reformasi Birokrasi 3. Komponen Capaian Sasaran Strategis Reformasi Birokrasi dan Dimensi RB Tematik teridiri dari: 1. Komponen Evaluasi RB Tematik Pemerintah Daerah. Nilai hasil akhir dari penjumlahan komponen digunakan untuk menetapkan tingkat pelaksanaan reformasi birokrasi, dengan kategori sebagai berikut: 1. AA (Nilai >100) - Sangat Memuaskan 2. A (Nilai >80-100) - Memuaskan 3. A- (Nilai >80-100) - Memuaskan dengan catatan 4. BB (Nilai >70-80) - Sangat Baik 5. B (Nilai > 60- 70) - Baik 6. CC (Nilai > 50-60) - Cukup 7. C (Nilai > 30-50) - Kurang 8. D (Nilai 0-30) - Sangat Kurang	Tahunan	Biro Organisasi Reformasi Birokrasi dan BAPPEDA	60	62	64	66	68	70
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum yang terkelola dengan baik	Positif	Persen	$\frac{\text{Jumlah Administrasi Umum yang terpenuhi tahun N}}{\text{Jumlah Administrasi Umum yang ditargetkan pada tahun N}} x\ 100$	Terkelolanya Kebutuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah pada Tahun N	Jika persentasenya mendekati 100%, ini menunjukkan bahwa pelayanan sesuai standar	Tahunan	RPJMD Banten	100	100	100	100	100	100
	Administrasi Keuangan perangkat daerah	persentase dokumen pelaporan keuangan perangkat daerah yang disusun sesuai SAP (Standar akuntansi pemerinta)	Positif	Persen	$\frac{\text{jumlah laporan keuangan yg disusun}}{Jumlah\ Laporan\ sesuai\ SAP} x\ 100$	pelaporan keuangan akhir tahun yang disusun PD sesuai dengan SAP berdasarkan PP 71 tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintahan	Jika persentasenya mendekati 100%, ini menunjukkan bahwa pelayanan sesuai standar	Tahunan	RPJMD Banten	100	100	100	100	100	100
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ASN perangkat daerah yang memiliki predikat SKP minimal BAIK	Positif	Persen	$\frac{Jumlah\ ASN\ Perangkat\ Daerah\ yang\ mendapatkan\ nilai\ minimal\ BAIK}{Jumlah\ ASN\ Perangkat\ Daerah} x\ 100$	Perbandingan Jumlah ASN Perangkat Daerah yang mendapatkan predikat minimal BAIK dibandingkan dengan jumlah ASN pada Perangkat Daerah	Jika persentasenya mendekati 100%, ini menunjukkan bahwa pelayanan sesuai standar	Tahunan	RPJMD Banten	100	100	100	100	100	100
	Penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintahan daerah	Persentase terpenuhinya pelayanan penunjang kantor	Positif	Persen	$\frac{\text{jumlah pelayanan penunjang kantor yang dipenuhi}}{Jumlah\ pelayanan\ yang\ diperlukan} x\ 100$	Perbandingan Pelayanan Jasa Penunjang Kantor dengan Jumlah pelayanan yang diperlukan	Jika persentasenya mendekati 100%, ini menunjukkan bahwa pelayanan sesuai standar	Tahunan	RPJMD Banten	100	100	100	100	100	100
	Pemeliharaan BMD penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase BMD dalam kondisi baik	Positif	Persen	$\frac{\text{Jumlah BMD yang dipelihara Tahun N}}{Jumlah\ BMD\ yang\ direncanakan\ dipelihara\ Tahun\ N} x\ 100$	Perbandingan antara BMD yang dipelihara pada tahun N dengan Jumlah BMD yang direncanakan dipelihara pada Tahun N	Jika persentasenya mendekati 100%, ini menunjukkan bahwa pelayanan sesuai standar	Tahunan	RPJMD Banten	100	100	100	100	100	100

	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Positif	Persen	hasil evaluasi terhadap implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada tingkat perangkat daerah (seperti dinas, badan, atau instansi pemerintah daerah lainnya). Nilai ini mencerminkan sejauh mana instansi tersebut telah menerapkan prinsip akuntabilitas kinerja dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya. AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) adalah bagian dari SAKIP, yaitu sistem yang digunakan untuk memastikan bahwa kinerja pemerintah dapat diukur, dipertanggungjawabkan, dan digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan serta perbaikan berkelanjutan. Nilai AKIP diberikan berdasarkan evaluasi terhadap dokumen perencanaan, pengukuran, pelaporan, evaluasi kinerja, dan capaian kinerja dari perangkat daerah. Evaluasi biasanya dilakukan oleh Inspektorat Komponen Penilaian AKIP: Perencanaan Kinerja (perencanaan strategis dan kinerja tahunan) Pengukuran Kinerja (indikator kinerja dan pengumpulan data) Pelaporan Kinerja (dokumen LAKIP/LKJIP) Evaluasi Internal (monitoring dan tindak lanjut perbaikan) Capaian Kinerja (hasil/output yang dicapai)	Berdasarkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014, SAKIP (Sistem Akuntabilias Kinerja Instansi Pemerintah) merupakan rangkaian sistemik dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklarifikasian dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Penyelenggaraan SAKIP dilaksanakan untuk menghasilkan sebuah laporan kinerja yang berkualitas serta selaras dan sesuai dengan tahapan-tahapan yang meliputi:Rencana strategis;Perjanjian kinerja;Pengukuran kinerja;Pelaporan kinerja;Reviu dan evaluasi kinerja.Berdasarkan Peraturan Menteri PAN RB No. 12 Tahun 2015	Nilai hasil akhir dari penjumlahan komponen-komponen terdiri dari komponen Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal yang memberikan gambaran tingkat AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah), dengan kategori predikat sebagai berikut: 1. Predikat AA (Nilai > 90) - Sangat Memuaskan 2. Predikat A (Nilai >80-90) - Memuaskan 3. Predikat BB (Nilai > 70-80) - Sangat Baik 4. Predikat B (Nilai > 60-70) - Baik 5. Predikat CC (Nilai > 50-60) - Cukup (Memadai) 6. Predikat C (Nilai > 30-50) - Kurang 7. Predikat D (Nilai > 0-30) - Sangat Kurag	Tahunan	RPJMD Banten	100	100	100	100	100	100
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Ketercapaian Pengadaan Barang Milik Daerah OPD	Positif	Persen	$\frac{\text{Jumlah BMD yang tersedia}}{Jumlah\ BMD\ yang\ tercatat} \text{x } 100$	Perbandingan antara jumlah yang tersedia dengan jumlah aset yang tercatat	Jika persentasenya mendekati 100%, ini menunjukkan bahwa pelayanan sesuai standar	Tahunan	RPJMD Banten	100	100	100	100	100	100
	Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase Ketercapaian Layanan BLUD sesuai standar	Positif	Persen	$\frac{\text{Jumlah Layanan Operasional yang dipenuhi}}{Jumlah\ Layanan\ Oprasional\ yang\ ditargetkan} \text{x } 100$	Perbandingan antara jumlah yang tersedia dengan jumlah aset yang tercatat	Jika persentasenya mendekati 100%, ini menunjukkan bahwa pelayanan sesuai standar	Tahunan	RPJMD Banten	100	100	100	100	100	100
Meningkatnya Kualitas Taraf Kesehatan Masyarakat	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**														
	Meningkatnya Fasilitas Layanan Kesehatan Rumah Sakit	Peresentase Pengembangan Fasilitas Layanan Kesehatan UPTD RSUD Malingping	**Positif**	Persen	$\frac{\text{Jumlah Fasilitas Layanan Kesehatan UPTD RSUD Malingping yang di kembangkan}}{\text{Jumlah Fasilitas Layanan Kesehatan UPTD RSUD Malingping yang direncanakan}} \text{x } 100$	Fasilitas Kesehatan yang dikembangkan	Jika persentasenya fasilitas layanan kesehatan mendekati 100%, otomatis layanan berkembang	Tahunan	Permenkes no 3 tahun 2020 tentang klasifikasi rumah sakit	80	83	83	83	88	100
	Meningkatnya Kualitas Fasilitas Penunjang Operasional Layanan UPTD RSUD Malingping	Persentase Penunjang Operasional Layanan UPTD RSUD Malingping Sesuai Standar	**Positif**	Persen	$\frac{Jumlah\ Penunjang\ Operasional\ yang\ dipenuhi}{\text{Jumlah } Penunjang\ Operasonal\ sesuai\ standar} x\ 100$	Capaian jumlah Fasilitas Operasional Layanan sesuai dengan permenkes nomor 3 tahun 2020 tentang kualifikasi rumah sakit	Jika persentasenya mendekati 100%, ini menunjukkan bahwa syarat standar kualifikasi rumah sakit kelas B telah memenuhi	Tahunan	Permenkes no 3 tahun 2020 tentang klasifikasi rumah sakit	100	100	100	100	100	100
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan UPTD RSUD Malingping	Jumlah SPM Sub Variabel Kegawat daruratan UPTD RSUD Malingping	Positif	kumulatif, Nilai	Capaian Standar SPM sub variabel indikator kegawat daruratan dengan capaian 100% yang terlaksana	SPM kegawatdaruratan dengan capaian 100 % dengan 8 indikator sub variable berdasarkan permenkes 129 tahun 2008	Semakin banyak jumlah yang tercapai maka semakin baik SPM kegawatdaruratan RS	Tahunan	Permenkes tentang SPM Rumah Sakit	1	2	4	6	7	8
	Terpenuhinya pelayanan RSUD Malingping yang Sesuai Standar Akreditasi	Persentase Ketercapaian Pelayanan UPTD RSUD Malingping yang Sesuai Standar	**Positif**	Persen	$\frac{\text{Jumlah Dokumen Kegiatan Pelayanan yang tercapai}}{\text{Jumlah Dokumen seluruh kegiatan pelayanan}} x\ 100$	Capaian kegiatan pelayanan yang terlaksana (satuan: persen) hal ini Menggambarkan capaian kegiatan untuk memenuhi standar pelayanan RSUD. Target capaian kegiatan pelayanan sesuai dengan Permenkes No. 129 Tahun 2008	Jika persentasenya mendekati 100%, ini menunjukkan bahwa pelayanan sesuai standar	Tahunan	Permenkes No. 129 Tahun 2008 Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit	100	100	100	100	100	100
	Meningkatnya kualitas tatakelola informasi di UPTD RSUD Malingping	Persentase digitalisasi layanan kesehatan di UPTD RSUD Malingping	**Positif**	Persen	$\frac{\textbf{Jumlah modul yang diimp}\textit{lementasikan}}{\textbf{Jumlah seluruh modul}} \textbf{x } 100$	Capaian jumlah aplikasi pelaksanaan modul SIM RS sesuai dengan Permenkes no 92 tahun 2014 tentang penyelenggaraan komunikasi data dalam sistem informasi kesehatan terintegrasi	Jika persentasenya mendekati 100%, ini menunjukkan bahwa sistem informasi kesehatan sudah terintegrasi	Tahunan	Permenkes no 92 tahun 2014 tentang penyelenggaraan komunikasi data dalam sistem informasi kesehatan terintegrasi	50	60	70	80	90	100
	Meningkatnya Akses dan Mutu Layanan Informasi Kesehatan UPTD RSUD Malingping	Persentase Layanan Informasi Kesehatan Terintegrasi	**Positif**	Persen	$\frac{\text{Jumlah layanan Infokes yang sudah terintegrasi}}{\text{Jumlah Seluruh layanan Infokes}} \text{x } 100$	Capaian jumlah aplikasi pelaksanaan modul SIM RS sesuai dengan Permenkes no 92 tahun 2014 tentang penyelenggaraan komunikasi data dalam sistem informasi kesehatan terintegrasi	Jika persentasenya mendekati 100%, ini menunjukkan bahwa sistem informasi kesehatan sudah terintegrasi	Tahunan	Permenkes no 92 tahun 2014 tentang penyelenggaraan komunikasi data dalam sistem informasi kesehatan terintegrasi	100	100	100	100	100	100
UPTD RSUD LABUAN PROVINSI BANTEN															
Terwujudnya birokrasi yang berintegritas, adaptif, profesional, dan tangguh	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**														

	Meningkatnya tata kelola pemerintahan pada Perangkat Daerah	Indeks Reformasi Birokrasi pada Perangkat Daerah	Positif	Nilai	Indeks RB dihitung dengan menjumlahkan dua komponen utama: Nilai RB General: Mengukur capaian strategi pelaksanaan reformasi birokrasi secara umum. Nilai RB Tematik: Mengukur capaian dalam area tematik tertentu yang relevan dengan reformasi birokrasi Indeks RB = Nilai RB General + Nilai RB Tematik Setiap nilai komponen (RB General dan RB Tematik) diperoleh melalui evaluasi terhadap berbagai indikator dan sub-indikator yang telah ditetapkan	Indeks yang mencerminkan tingkat kemajuan pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan pemerintah daerah, yang mencakup berbagai aspek tata kelola pemerintahan, perbaikan proses bisnis, manajemen SDM, dan peningkatan kualitas layanan publik	Komponen Evaluasi Indeks Reformasi Birokrasi terdapat dua dimensi yaitu dimensi RB General terdiri dari: 1. Komponen Capaian Strategi Pelaksanaan RB General 2. Komponen Capaian Implementasi Kebijakan Reformasi Birokrasi 3. Komponen Capaian Sasaran Strategis Reformasi Birokrasi dan Dimensi RB Tematik teridiri dari: 1. Komponen Evaluasi RB Tematik Pemerintah Daerah. Nilai hasil akhir dari penjumlahan komponen digunakan untuk menetapkan tingkat pelaksanaan reformasi birokrasi, dengan kategori sebagai berikut: 1. AA (Nilai >100) - Sangat Memuaskan 2. A (Nilai >80-100) - Memuaskan 3. A- (Nilai >80-100) - Memuaskan dengan catatan 4. BB (Nilai >70-80) - Sangat Baik 5. B (Nilai > 60- 70) - Baik 6. CC (Nilai > 50-60) - Cukup 7. C (Nilai > 30-50) - Kurang 8. D (Nilai 0-30) - Sangat Kurang	Tahunan	Biro Organisasi Reformasi Birokrasi dan BAPPEDA	60	62	64	66	68	70
	Terkelolanya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum yang terkelola dengan baik	Positif	kumulatif, persen	$\frac{\text{Jumlah Administrasi Umum yang terpenuhi tahun N}}{\text{Jumlah Administrasi Umum yang ditargetkan pada tahun N}} \times 100$	Terkelolanya Kebutuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah pada Tahun N	Semakin capaiannya mendekati 100% maka semakin baik kinerja yang dilakukan	Tahunan		100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Tersusunnya pelaporan keuangan perangkat daerah sesuai standar akuntansi pemerintah	persentase dokumen pelaporan keuangan perangkat daerah yang disusun sesuai SAP(Standar akuntansi pemerinta)	Positif	kumulatif, persen	$\frac{\text{jumlah laporan keuangan yg disusun}}{\textit{Jumlah Laporan sesuai SAP}} \times 100$	pelaporan keuangan akhir tahun yang disusun PD sesuai dengan SAP berdasarkan PP 71 tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintahan	Semakin capaiannya mendekati 100% maka semakin baik kinerja yang dilakukan	Tahunan		100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Meningkatnya prestasi kinerja ASN	Persentase ASN perangkat daerah yang memiliki predikat SKP minimal BAIK	Positif	kumulatif, persen	$\frac{\textit{Jumlah ASN Perangkat Daerah yang mendapatkan nilai minimal BAIK}}{\textit{Jumlah ASN Perangkat Daerah}} \times 100$	Perbandingan Jumlah ASN Perangkat Daerah yang mendapatkan predikat minimal BAIK dibandingkan dengan jumlah ASN pada Perangkat Daerah	Semakin tinggi ASN yang memiliki SKP dengan nilai predikat minimal Baik maka semakin baik	Tahunan		95%	95%	95%	95%	95%	95%
	Terpenuhinya Kebutuhan Sarana dan Prasarana kantor sesuai standar	Persentase kebutuhan BMD terpenuhi	Positif	kumulatif, persen	$\frac{\textit{Jumlah Sarana Prasarana yang dibelanjakan tahun N}}{\textit{Jumlah Sarana Prasarana Sesuai RKBMD}} \times 100$	Perbandingan Kebutuhan Sarana dan Prasarana kantor sesuai standar dengan jumlah sarana prasarana sesuai RKBMD	Semakin capaiannya mendekati 100% maka semakin baik kinerja yang dilakukan	Tahunan		100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Terkelolanya pelayanan penunjang kantor	Persentase terpenuhinya pelayanan penunjang kantor	Positif	kumulatif, persen	$\frac{\text{jumlah pelayanan penunjang kantor yang dipenuhi}}{\textit{jumlah pelayanan yang diperlukan}} \times 100$	Perbandingan Pelayanan Jasa Penunjang Kantor dengan Jumlah pelayanan yang diperlukan	Semakin capaiannya mendekati 100% maka semakin baik kinerja yang dilakukan	Tahunan		100%	100%	100%	100%	100%	100%
	terpenuhinya pemeliharaan BMD pada perangkat daerah	Persentase BMD dalam kondisi baik	Positif	kumulatif, persen	$\frac{\text{Jumlah BMD yang dipelihara Tahun N}}{\textit{Jumlah BMD yang direncanakan dipelihara Tahun N}} \times 100$	Perbandingan antara BMD yang dipelihara pada tahun N dengan Jumlah BMD yang direncanakan dipelihara pada Tahun N	Semakin capaiannya mendekati 100% maka semakin baik kinerja yang dilakukan	Tahunan		100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKP Perangkat Daerah	Positif	Nilai	hasil evaluasi terhadap implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada tingkat perangkat daerah (seperti dinas, badan, atau instansi pemerintah daerah lainnya). Nilai ini mencerminkan sejauh mana instansi tersebut telah menerapkan prinsip akuntabilitas kinerja dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya. AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) adalah bagian dari SAKIP, yaitu sistem yang digunakan untuk memastikan bahwa kinerja pemerintah dapat diukur, dipertanggungjawabkan, dan digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan serta perbaikan berkelanjutan. Nilai AKIP diberikan berdasarkan evaluasi terhadap dokumen perencanaan, pengukuran, pelaporan, evaluasi kinerja, dan capaian kinerja dari perangkat daerah. Evaluasi biasanya dilakukan oleh Inspektorat Komponen Penilaian AKIP: Perencanaan Kinerja (perencanaan strategis dan kinerja tahunan) Pengukuran Kinerja (indikator kinerja dan pengumpulan data) Pelaporan Kinerja (dokumen LAKIP/LKjIP) Evaluasi Internal (monitoring dan tindak lanjut perbaikan) Capaian Kinerja (hasil/output yang dicapai)	Berdasarkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014, SAKIP (Sistem Akuntabilias Kinerja Instansi Pemerintah) merupakan rangkaian sistemik dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklarifikasian dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Penyelenggaraan SAKIP dilaksanakan untuk menghasilkan sebuah laporan kinerja yang berkualitas serta selaras dan sesuai dengan tahapan-tahapan yang meliputi:Rencana strategis;Perjanjian kinerja;Pengukuran kinerja;Pelaporan kinerja;Reviu dan evaluasi kinerja.Berdasarkan Peraturan Menteri PAN RB No. 12 Tahun 2015	Nilai hasil akhir dari penjumlahan komponen-komponen terdiri dari komponen Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal yang memberikan gambaran tingkat AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah), dengan kategori predikat sebagai berikut: 1. Predikat AA (Nilai > 90) - Sangat Memuaskan 2. Predikat A (Nilai >80-90) - Memuaskan 3. Predikat BB (Nilai > 70-80) - Sangat Baik 4. Predikat B (Nilai > 60-70) - Baik 5. Predikat CC (Nilai > 50-60) - Cukup (Memadai) 6. Predikat C (Nilai > 30-50) - Kurang 7. Predikat D (Nilai > 0-30) - Sangat Kurag	Tahunan		70-80%					
	Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase Ketercapaian Layanan BLUD sesuai standar	Positif	Persen	$\frac{\text{Jumlah Layanan Operasional yang dipenuhi}}{\textit{Jumlah Layanan Oprasional yang ditargetkan}} \times 100$	Perbandingan antara jumlah yang tersedia dengan jumlah aset yang tercatat	Jika persentasenya mendekati 100%, ini menunjukkan bahwa pelayanan sesuai standar	Tahunan	RPJMD Banten	100	100	100	100	100	100
Meningkatnya Kualitas Taraf Kesehatan Masyarakat	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**														
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Yang Terakreditasi di UPTD RSUD Labuan	Nilai Akreditasi RSUD Labuan	Positif	Nilai	Capaian Nilai Akreditasi madya (60-69%), utama (70-79%), paripurna (80-100%)	pelayanan rumah sakit yang terakreditasi adalah layanan rumah sakit yang kualitasnya berdasarkan standar akreditasi yang ditetapkan oleh lembaga akreditasi resmi (seperti KARS, BAN-PT, atau lembaga lainnya).	Jika nilai mendekati target maka penunjang pelayanan RS sudah berjalan baik sesuai standar	Tahunan	Permenkes tentang Akreditasi RS	60	62	67	70	72	75
										Madya	Madya	Madya	Utama	Utama	Utama
	Meningkatnya kualitas Fasilitas Penunjang Operasional Layanan	Persentase Penunjang Operasional Layanan Sesuai Standar	Positif	kumulatif, persen	$\frac{\textit{Jumlah Penunjang Operasional RS yang Sesuai Standar}}{\text{Total Penunjang Operasional RS}} \times 100$	Penunjang RS adalah bagian yang menunjang pelayanan RS seperti Farmasi, gizi, radiologi, laundry, laboratorium, CSSD, IPSRS, IPAL dan Sanitasi, Gas Medis, Ambulans, pemulasaran jenazah.	Jika persentasenya mendekati 100%, ini menunjukkan bahwa pelayanan sesuai standar	Tahunan	Permenkes No.3 Tahun 2020	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan di RSUD Labuan	Jumlah SPM Sub Variabel Kegawat daruratan UPTD RSUD Labuan	Positif	kumulatif, Nilai	Jumlah SPM kegawatdaruratan sesuai standar yang tercapai	SPM kegawatdaruratan dengan capaian 100 % dengan 8 indikator sub variable berdasarkan permenkes 129 tahun 2008	Jika semakin banyak SPM kegawatdaruratan yang sesuai standar yang tercapai maka semakin baik	Tahunan	Permenkes tentang SPM Rumah Sakit	1	2	4	6	7	8

	Terpenuhinya pelayanan yang sesuai standar akreditasi	Persentase Ketercapaian pelayanan yang sesuai standar	Positif	kumulatif, persen	$\frac{\text{jumlah pelayanan rumah sakit yang memenuhi standar}}{\text{jumlah seluruh pelayanan RS}} \times 100$	Definisi operasional terpenuhinya pelayanan yang mencakup keselamatan pasien, efektivitas layanan, efisiensi operasional, serta kepuasan masyarakat	Jika persentasenya mendekati 100%, ini menunjukkan bahwa pelayanan sesuai standar	Tahunan	Permenkes tentang Akreditasi RS	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Meningkatnya kualitas tatakelola informasi UPTD RSUD Labuan	Persentase digitalisasi layanan Kesehatan RSUD Labuan	Positif	kumulatif, persen	$\frac{\textbf{Jumlah modul yang diimplementasikan}}{\textbf{Jumlah seluruh modul}} \textbf{x 10}$	Capaian jumlah aplikasi pelaksanaan modul SIM RS sesuai dengan Permenkes no 92 tahun 2014 tentang penyelenggaraan komunikasi data dalam sistem informasi kesehatan terintegrasi	Jika persentasenya mendekati 100%, ini menunjukkan bahwa digitalisasi pelayanan sesuai standar	Tahunan	Permenkes no 92 tahun 2014 tentang penyelenggaraan komunikasi data dalam sistem informasi kesehatan terintegrasi	50%	60%	70%	80%	90%	100%
	Meningkatnya akses dan mutu layanan Informasi kesehatan UPTD RSUD Labuan	Persentase Layanan Informasi Kesehatan Terintegrasi	Positif	kumulatif, persen	$\frac{\text{Jumlah layanan Informasi kesehatan yang sudah terintegrasi}}{\text{Jumlah Seluruh layanan Informasi Kesehatan}} \times 100$	Capaian jumlah aplikasi pelaksanaan modul SIM RS sesuai dengan Permenkes no 92 tahun 2014 tentang penyelenggaraan komunikasi data dalam sistem informasi kesehatan terintegrasi	Jika persentasenya mendekati 100%, ini menunjukkan bahwa Mutu pelayanan sesuai standar	Tahunan	Permenkes no 92 tahun 2014 tentang penyelenggaraan komunikasi data dalam sistem informasi kesehatan terintegrasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%
UPTD RSUD CILOGRANG PROVINSI BANTEN																
Terwujudnya birokrasi yang berintegritas, adaptif, profesional, dan tangguh	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**															
	Meningkatnya tata kelola pemerintahan pada Perangkat Daerah	Indeks Reformasi Birokrasi pada Perangkat Daerah	Positif	Nilai	Indeks RB dihitung dengan menjumlahkan dua komponen utama: Nilai RB General: Mengukur capaian strategi pelaksanaan reformasi birokrasi secara umum. Nilai RB Tematik: Mengukur capaian dalam area tematik tertentu yang relevan dengan reformasi birokrasi Indeks RB = Nilai RB General + Nilai RB Tematik Setiap nilai komponen (RB General dan RB Tematik) diperoleh melalui evaluasi terhadap berbagai indikator dan sub-indikator yang telah ditetapkan	Indeks yang mencerminkan tingkat kemajuan pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan pemerintah daerah, yang mencakup berbagai aspek tata kelola pemerintahan, perbaikan proses bisnis, manajemen SDM, dan peningkatan kualitas layanan publik	Komponen Evaluasi Indeks Reformasi Birokrasi terdapat dua dimensi yaitu dimensi RB General terdiri dari: 1. Komponen Capaian Strategi Pelaksanaan RB General 2. Komponen Capaian Implementasi Kebijakan Reformasi Birokrasi 3. Komponen Capaian Sasaran Strategis Reformasi Birokrasi dan Dimensi RB Tematik teridiri dari: 1. Komponen Evaluasi RB Tematik Pemerintah Daerah. Nilai hasil akhir dari penjumlahan komponen digunakan untuk menetapkan tingkat pelaksanaan reformasi birokrasi, dengan kategori sebagai berikut: 1. AA (Nilai >100) - Sangat Memuaskan 2. A (Nilai >80-100) - Memuaskan 3. A- (Nilai >80-100) - Memuaskan dengan catatan 4. BB (Nilai >70-80) - Sangat Baik 5. B (Nilai > 60- 70) - Baik 6. CC (Nilai > 50-60) - Cukup 7. C (Nilai > 30-50) - Kurang 8. D (Nilai 0-30) - Sangat Kurang	Tahunan	Biro Organisasi Reformasi Birokrasi dan BAPPEDA	60	62	64	66	68	70
	Terkelolanya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum yang terkelola dengan baik	Positif	kumulatif, persen	$\frac{\text{Jumlah Administrasi Umum yang terpenuhi tahun N}}{\text{Jumlah Administrasi Umum yang ditargetkan pada tahun N}} \times 100$	Terkelolanya Kebutuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah pada Tahun N	Semakin capaiannya mendekati 100% maka semakin baik kinerja yang dilakukan	Tahunan		100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Tersusunnya pelaporan keuangan perangkat daerah sesuai standar akuntansi pemerintah	persentase dokumen pelaporan keuangan perangkat daerah yang disusun sesuai SAP(Standar akuntansi pemerinta)	Positif	kumulatif, persen	$\frac{\text{jumlah laporan keuangan yg disusun}}{Jumlah\ Laporan\ sesuai\ SAP} \times 100$	pelaporan keuangan akhir tahun yang disusun PD sesuai dengan SAP berdasarkan PP 71 tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintahan	Semakin capaiannya mendekati 100% maka semakin baik kinerja yang dilakukan	Tahunan		100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Meningkatnya prestasi kinerja ASN	Persentase ASN perangkat daerah yang memiliki predikat SKP minimal BAIK	Positif	kumulatif, persen	$\frac{Jumlah\ ASN\ Perangkat\ Daerah\ yang\ mendapatkan\ nilai\ \underline{minimal\ BAIK}}{Jumlah\ ASN\ Perangkat\ Daerah} \times 100$	Perbandingan Jumlah ASN Perangkat Daerah yang mendapatkan predikat minimal BAIK dibandingkan dengan jumlah ASN pada Perangkat Daerah	Semakin tinggi ASN yang memiliki SKP dengan nilai predikat minimal Baik maka semakin baik	Tahunan		95%	95%	95%	95%	95%	95%
	Terpenuhinya Kebutuhan Sarana dan Prasarana kantor sesuai standar	Persentase kebutuhan BMD terpenuhi	Positif	kumulatif, persen	$\frac{Jumlah\ Sarana\ Prasarana\ yang\ dibelanjakan\ tahun\ N}{Jumlah\ Sarana\ Prasarana\ Sesuai\ RKBMD} \times 100$	Perbandingan Kebutuhan Sarana dan Prasarana kantor sesuai standar dengan jumlah sarana prasarana sesuai RKBMD	Semakin capaiannya mendekati 100% maka semakin baik kinerja yang dilakukan	Tahunan		100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Terkelolanya pelayanan penunjang kantor	Persentase terpenuhinya pelayanan penunjang kantor	Positif	kumulatif, persen	$\frac{\text{jumlah pelayanan penunjang kantor yang dipenuhi}}{Jumlah\ pelayanan\ yang\ diperlukan} \times 100$	Perbandingan Pelayanan Jasa Penunjang Kantor dengan Jumlah pelayanan yang diperlukan	Semakin capaiannya mendekati 100% maka semakin baik kinerja yang dilakukan	Tahunan		100%	100%	100%	100%	100%	100%
	terpenuhinya pemeliharaan BMD pada perangkat daerah	Persentase BMD dalam kondisi baik	Positif	kumulatif, persen	$\frac{\text{Jumlah BMD yang dipelihara Tahun N}}{Jumlah\ BMD\ yang\ direncanakan\ dipelihara\ Tahun\ N} \times 100$	Perbandingan antara BMD yang dipelihara pada tahun N dengan Jumlah BMD yang direncanakan dipelihara pada Tahun N	Semakin capaiannya mendekati 100% maka semakin baik kinerja yang dilakukan	Tahunan		100%	100%	100%	100%	100%	100%

	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Positif	Nilai	hasil evaluasi terhadap implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada tingkat perangkat daerah (seperti dinas, badan, atau instansi pemerintah daerah lainnya). Nilai ini mencerminkan sejauh mana instansi tersebut telah menerapkan prinsip akuntabilitas kinerja dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya. AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) adalah bagian dari SAKIP, yaitu sistem yang digunakan untuk memastikan bahwa kinerja pemerintah dapat diukur, dipertanggungjawabkan, dan digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan serta perbaikan berkelanjutan. Nilai AKIP diberikan berdasarkan evaluasi terhadap dokumen perencanaan, pengukuran, pelaporan, evaluasi kinerja, dan capaian kinerja dari perangkat daerah. Evaluasi biasanya dilakukan oleh Inspektorat Komponen Penilaian AKIP: Perencanaan Kinerja (perencanaan strategis dan kinerja tahunan) Pengukuran Kinerja (indikator kinerja dan pengumpulan data) Pelaporan Kinerja (dokumen LAKIP/LKjIP) Evaluasi Internal (monitoring dan tindak lanjut perbaikan) Capaian Kinerja (hasil/output yang dicapai)	Berdasarkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014, SAKIP (Sistem Akuntabilias Kinerja Instansi Pemerintah) merupakan rangkaian sistemik dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklarifikasian dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Penyelenggaraan SAKIP dilaksanakan untuk menghasilkan sebuah laporan kinerja yang berkualitas serta selaras dan sesuai dengan tahapan-tahapan yang meliputi:Rencana strategis;Perjanjian kinerja;Pengukuran kinerja;Pelaporan kinerja;Reviu dan evaluasi kinerja.Berdasarkan Peraturan Menteri PAN RB No. 12 Tahun 2015	Nilai hasil akhir dari penjumlahan komponen-komponen terdiri dari komponen Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal yang memberikan gambaran tingkat AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah), dengan kategori predikat sebagai berikut: 1. Predikat AA (Nilai > 90) - Sangat Memuaskan 2. Predikat A (Nilai >80-90) - Memuaskan 3. Predikat BB (Nilai > 70-80) - Sangat Baik 4. Predikat B (Nilai > 60-70) - Baik 5. Predikat CC (Nilai > 50-60) - Cukup (Memadai) 6. Predikat C (Nilai > 30-50) - Kurang 7. Predikat D (Nilai > 0-30) - Sangat Kurag	Tahunan	Setiap Perangkat Daerah	79,1	79,4	79,7	80	80	80
	Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase Ketercapaian Layanan BLUD sesuai standar	Positif	Persen	$\frac{\text{Jumlah Layanan Operasional yang dipenuhi}}{\textit{jumlah Layanan Oprasional yang ditargetkan}} \text{x } 100$	Perbandingan antara jumlah yang tersedia dengan jumlah aset yang tercatat	Jika persentasenya mendekati 100%, ini menunjukkan bahwa pelayanan sesuai standar	Tahunan	RPJMD Banten	100	100	100	100	100	100
Meningkatnya Kualitas Taraf Kesehatan Masyarakat	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**															
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Yang Terakreditasi	Nilai Akreditasi RSUD Cilograng	Positif	Nilai	Capaian Nilai Akreditasi madya (60-69%), utama (70-79%), paripurna (80-100%)	pelayanan rumah sakit yang terakreditasi adalah layanan rumah sakit yang kualitasnya berdasarkan standar akreditasi yang ditetapkan oleh lembaga akreditasi resmi (seperti KARS, BAN-PT, atau lembaga lainnya).	Jika nilai mendekati target maka penunjang pelayanan RS sudah berjalan baik sesuai standar	Tahunan	Permenkes tentang Akreditasi RS	60	62	67	70	72	75
										Madya	Madya	Madya	Utama	Utama	Utama
	Meningkatnya kualitas Fasilitas Penunjang Operasional Layanan	Persentase Penunjang Operasional Layanan Sesuai Standar	Positif	Persen	$\frac{\textit{Jumlah Penunjang Operasional RS yang Sesuai Standar}}{\text{Total Penunjang Operasional RS}} \text{x } 100$	Penunjang RS adalah bagian yang menunjang pelayanan RS seperti Farmasi, gizi, radiologi, laundry, laboratorium, CSSD, IPSRS, IPAL dan Sanitasi, Gas Medis, Ambulans, pemulasaran jenazah.	Jika persentasenya mendekati 100%, ini menunjukkan bahwa pelayanan sesuai standar	Tahunan	Permenkes No.3 Tahun 2020	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan UPTD RSUD Cilograng	Jumlah SPM Sub Variabel Kegawat daruratan UPTD RSUD Cilograng	Positif	Nilai	Jumlah SPM kegawatdaruratan sesuai standar yang tercapai	SPM kegawatdaruratan dengan capaian 100 % dengan 8 indikator sub variable berdasarkan permenkes 129 tahun 2008	Jika semakin banyak SPM kegawatdaruratan yang sesuai standar yang tercapai maka semakin baik	Tahunan	Permenkes tentang SPM Rumah Sakit	1	2	4	6	7	8
	Terpenuhinya pelayanan yang sesuai standar akreditasi	Persentase Ketercapaian pelayanan yang sesuai standar	Positif	persen	$\frac{\text{jumlah pelayanan rumah sakit yang memenuhi standar}}{\text{jumlah seluruh pelayanan RS}} \text{x } 100$	Definisi operasional terpenuhinya pelayanan yang mencakup keselamatan pasien, efektivitas layanan, efisiensi operasional, serta kepuasan masyarakat	Jika persentasenya mendekati 100%, ini menunjukkan bahwa pelayanan sesuai standar	Tahunan	Permenkes tentang Akreditasi RS	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Meningkatnya kualitas tatakelola informasi UPTD RSUD Cilograng	Persentase digitalisasi layanan Kesehatan RSUD Cilograng	Positif	persen	$\frac{\textbf{Jumlah modul yang diimplementasikan}}{\textbf{Jumlah seluruh modul}} \textbf{x } 100$	Capaian jumlah aplikasi pelaksanaan modul SIM RS sesuai dengan Permenkes no 92 tahun 2014 tentang penyelenggaraan komunikasi data dalam sistem informasi kesehatan terintegrasi	Jika persentasenya mendekati 100%, ini menunjukkan bahwa digitalisasi pelayanan sesuai standar	Tahunan	Permenkes no 92 tahun 2014 tentang penyelenggaraan komunikasi data dalam sistem informasi kesehatan terintegrasi	50%	60%	70%	80%	90%	100%
	Meningkatnya akses dan mutu layanan Informasi kesehatan UPTD RSUD Cilorang	Persentase Layanan Informasi Kesehatan Terintegrasi	Positif	persen	$\frac{\textbf{Jumlah layanan Informasi kesehatan yang sudah terintegrasi}}{\textbf{Jumlah Seluruh layanan Informasi Kesehatan}} \textbf{x } 100$	Capaian jumlah aplikasi pelaksanaan modul SIM RS sesuai dengan Permenkes no 92 tahun 2014 tentang penyelenggaraan komunikasi data dalam sistem informasi kesehatan terintegrasi	Jika persentasenya mendekati 100%, ini menunjukkan bahwa Mutu pelayanan sesuai standar	Tahunan	Permenkes no 92 tahun 2014 tentang penyelenggaraan komunikasi data dalam sistem informasi kesehatan terintegrasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%

1 isikan Keterangan penjenjangannya (Tujuan/Sasaran/Program nomenklatur/kegiatan nomenklatur
2 isikan kinerja dari sasaran program kegiatan contoh: meningkatnya....., tersusunnya.....
3 isikan indikator
4 Isikan positif atau negatif sifat indikator yang diambil
5 isikan satuan baik berupa %,Nilai, Jumlah,Unit
6 isikan rumus hitung dengan diketik jangan memakai screenshot
7 berikan penjelasan dari indikator yang dipilih secara lengkap
8 Penjelasan karakter,makna , sifat dari data tersebut (misalnya dengan mendekati 100% makin terpenuhi capaian kinerjanya)
9 isikan data tersebut muncul nya apakah 2 tahun, 1 tahun, triwulanan, bulanan
10 isikan darimana asal data tersebut muncul
11 isikan target tahunan

Permenkes tentang nomor 31 tahun 2018 tentang Aplikasi Sarana Prasarana dan Alat Kesehatan